KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI



BENTANGKAN LAYAR

Menuju Indonesia Emas 2045

Memorandum Pengakhiran Jabatan — 2020–2024

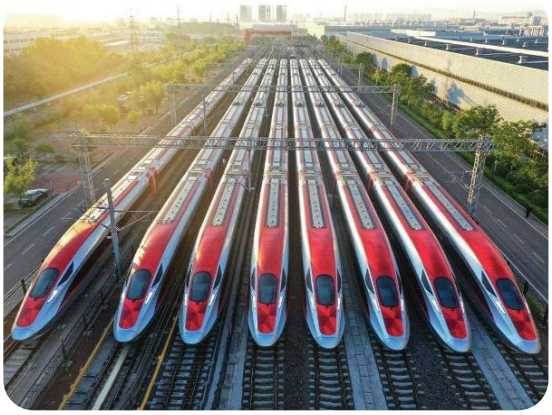
2019–2024



Presiden Joko Widodo Melantik Luhut B. Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (23/10/2019)



Presiden Joko Widodo pimpin Konferensi Tingkat Tinggi 10th World Water Forum 2024 (20/05/2024)





Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo ketika melakukan simulasi atau gladi penyambutan Negara Delegasi KTT G20 Bali yang berlangsung di Lobby Utama Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/11/2022).

MEMORANDUM MENKO MARVES

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku di hadapan Anda ini, merupakan risalah yang memuat informasi lengkap mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dalam periode 2019-2024. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024, selain pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan sebanyak 34 penugasan tambahan langsung dari Presiden, disamping melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program pembangunan yang masuk dalam target RPJMN 2019-2024. Penugasan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta memiliki capaian yang maksimal. Hal ini berkat sinergi kerja sama dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah/swasta, serta masyarakat yang terlibat.

Tantangan memasuki tugas pemerintahan pada periode awal adalah terjadinya wabah Covid-19. Dilain pihak, tugas-tugas pembangunan perlu tetap dilaksanakan. Berkat kerja keras semua pihak, Menko Marves yang juga mendapat tugas sebagai koordinator dalam pengendalian penanganan Covid-19 untuk area Jawa-Bali, salah satu strategi yang diterapkan oleh Menko Marves yaitu mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berhasil mengendalikan kasus Covid-19. Hal ini tampak dari angka kasus positif yang sempat menyentuh 53.214 kasus perhari dapat diturunkan menjadi 552 kasus perhari. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Indonesia resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga sisa periode waktu yang tersedia difokuskan untuk mengakselerasi target-target pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program pembangunan nasional, Kemenko Marves rutin melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi tingkat Menteri yang dipimpin langsung oleh Menko Marves. Dalam Rakor tersebut, dibahas 6 kategori utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional (PSN), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Direktif Presiden. Beberapa program yang dilaksanakan pada kategori tersebut, antara lain Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB), Food Estate, Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TP3DN), Pengelolaan Rumput Laut, gelaran F1 Powerboat di DPSP Danau Toba, Tata Kelola Sampah, lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Bangga Buatan Indonesia (BBI), Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), penanganan Covid-19.

Disamping itu, Menko Marves juga mendapatkan tugas untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan beberapa kegiatan internasional. Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali berhasil dilaksanakan dengan sukses dan menyepakati *Bali Leaders Declaration.* Penyelenggaraan KTT G20 di Bali mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari delegasi negara anggota G20. Pada tahun 2023 gelaran KTT AIS Forum di Bali juga telah sukses diselenggarakan. Forum ini bersama-sama untuk mengatasi permasalahan global seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim yang baik. Selain itu, Indonesia juga sukses menyelenggarakan *World Water Forum* (WWF) ke-10 tahun 2024 di Bali. Keberhasilan pelaksanaan WWF 2024 tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi Bangsa Indonesia. Indonesia kembali menjadi tonggak untuk terus menjadi pioneer dalam upaya penyelesaian isu-isu global yang saat ini terjadi, hal ini tentunya untuk melanjutkan komitmen dengan

aksi nyata WWF tersebut. Pertemuan tingkat menteri yang dihadiri perwakilan 106 negara dan 27 organisasi internasional telah berhasil menyepakati 'Deklarasi Menteri'. Kegiatan lainnya yang sukses dilaksanakan oleh Kemenko Marves pada tahun 2024 adalah Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kemenko Marves bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan menjadi forum yang mengukuhkan peran sentral Indonesia dalam Agenda Keberlanjutan Global. Selain itu, Gelaran Bali International Air Show 2024 berhasil diselenggarakan dengan dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi dan lebih dari 100 perusahaan dari 35 negara atau wilayah.

Diresmikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023 menjadi momentum kebangkitan transportasi di Indonesia dan menjadi peradaban baru menuju Indonesia Maju 2045. KCJB menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, momentum ini tentunya menjadi pemantik untuk terus bekerja bersama dan berkolaborasi demi kemajuan bangsa Indonesia.

Perhelatan F1 Powerboat dan Aquabike di Danau Toba Tahun 2023 telah menghasilkan dampak ekonomi yang besar, yaitu sekitar Rp1,68 triliun. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah berhasil mendorong peningkatan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pemerintah per 4 Oktober 2024 mencapai Rp1.634 triliun, meningkat 50% dari tahun 2022 yang sebesar Rp866 triliun.

Peningkatan jumlah produk di e-katalog per 4 oktober 2024 9,8 juta produk. Pengurangan sampah laut tahun 2023 tercapai sebesar 41,68%. Sementara itu, budidaya rumput laut telah mencapai luas sebesar 102.000 ha, diharapkan kedepan luasan ini bisa bertambah.

Untuk Pencapaian Program Penugasan Strategis dari Presiden Joko Widodo kepada Menko Marves seperti Perbaikan Data Perizinan Industri Kelapa Sawit menjadi kunci keberhasilan sampai dengan tahun 2024 terbukti dengan adanya kenaikan pada aspek perpajakan, dari Rp1,26 triliun (2023) menjadi Rp1,68 triliun (September 2024). Terdapat 114 perusahaan berada dalam kawasan hutan berhasil teridentifikasi dan diverifikasi Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penugasan lainnya yang berhasil dilakukan adalah menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng. Penurunan harga minyak goreng dari Rp18.361/liter (2022) menjadi Rp14.000/liter (2023). Capaian ini didukung oleh Kebijakan DMO *(Domestic Market Obligation), DPO (Domestic Price Obligation), Flush Out* (Percepatan Penyaluran Ekspor), serta pemberian insentif ekspor kepada perusahaan. Program lainnya untuk pengendalian minyak goreng dengan Digitalisasi Industri Kelapa Sawit.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, Kemenko Marves terus berupaya mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak baik terhadap capaian pembangunan nasional maupun meningkatkan efektifitas dan efisiensi internal kelembagaan. Beberapa prestasi yang berhasil diraih dan dipertahankan dalam 8 tahun terakhir adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pengelolaan keuangan yang diraih sejak tahun 2016 sampai saat ini. Peringkat I Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) tingkat Nasional, Indeks dari KemenPAN & RB yang berhasil diraih dan dipertahankan serta indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat setiap tahunnya. Prestasi lainnya yang berhasil diraih, Predikat "Sangat

Baik" atas Capaian Kinerja Anggaran dari Kementerian Keuangan, Penghargaan Institusi dengan program inovatif selama masa Pandemi Covid 19 "Terpopuler di Media Cetak 2020", Penghargaan BKN Award 2021, Penerbitan Peraturan Presiden Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, Peringkat satu nasional implementasi BerAKHLAK kategori Kementerian dari KemenPANRB, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif sejak tahun 2020, Menko Luhut B. Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Digital 2022, dan lain-lainnya.

Raihan atas pelaksanaan kinerja Kemenko Marves tentunya tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh Kementerian/Lembaga terkait khususnya 7 K/L yang berada dibawah koordinasi Kemenko Marves yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Parekraf, dan Kementerian Investasi/BKPM.

SAMBUTAN



Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua

Sewaktu Bapak Presiden memberikan amanah kembali kepada saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2019, Beliau memberikan perhatian pada masalah industri petrokimia, hingga urusan sumberdaya energi dan kelistrikan, disamping juga mencakup soal masalah hilirisasi yang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Saya juga mendapat arahan untuk melakukan terobosan dalam strategi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menangani hambatan investasi, dan merealisasikan komitmen investasi besar. Selain melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Marves, Bapak Presiden memberikan beberapa tugas tambahan yang harus diselesaikan.

Saat ini sudah 5 tahun berlalu dan saya sangat bersyukur bahwa semua tugas-tugas yang diberikan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Meskipun beberapa diantaranya masih perlu terus dilaksanakan dan disempurnakan. Sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai pejabat publik, Memorandum Pengakhiran Jabatan ini merupakan refleksi perjalanan pelaksanaan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam periode 2019-2024. Memorandum ini menguraikan berbagai dinamika perjalanan dan pelaksanaan tugas Kementerian koordinator beserta berbagai capaian yang sudah diperoleh. Saya berharap Memorandum ini dapat menjadi acuan untuk menyusun langkah-langkah ke depan dalam menjaga tahapan dan keberlanjutan Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Saya meyakini Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis berada pada posisi strategis di persilangan lalu lintas dunia. Posisi ini sangat menguntungkan Indonesia dan apabila dikelola dengan benar maka Indonesia bisa menjadi negara maju yang disegani di masa mendatang. Posisi Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan direfleksikan dalam semangat Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, harus dikelola dengan baik dengan memahami karakteristiknya sebagai modal dasar Pembangunan Nasional, untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia.

Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024 beserta seluruh jajaran mengucapkan rasa syukur dan bahagia atas terbitnya Memorandum **"Bentangkan Layar: Menuju Indonesia Emas 2045".** Terhadap seluruh pencapaian dan hasil kinerja dalam periode 5 tahun, saya mengapresiasi setiap peran dan kerja keras kementerian/lembaga, utamanya yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Inilah wujud nyata dari kerja bersama untuk prestasi Bangsa dan Negara kita.`

Ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi dari saya kepada seluruh jajaran di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selama ini telah bahu membahu, bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan tugas-tugas Kementerian, menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengawal pembangunan kemaritiman dan investasi. Tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan, saya ucapkan pula kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga yang telah mendukung dan bekerja sama untuk menyukseskan amanah yang kita emban bersama.

Akhir kata, semoga Memorandum ini dapat memberi manfaat tidak hanya bagi seluruh pemangku kepentingan tetapi juga masyarakat luas yang merasakan dampak pembangunan.

Selamat membaca,
Waasalamualikum Wr.Wb.

Luhut Binsar Pandjaitan

KATA PENGANTAR



Ayodhia G. L. Kalake

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi

Assalamualaikum Wr.Wb.

Untuk mewujudkan tujuan besar bagi masa depan bangsa, dengan memperhatikan Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di posisi strategis dengan potensi sumber daya alam laut yang besar, sektor kemaritiman menjadi prioritas untuk diperhatikan. Oleh karena itu sejak tahun 2014, Bapak Presiden telah menetapkan dibentuknya Kementerian Koordinator yang menangani isu pembangunan di bidang kemaritiman dimana sejak tahun 2019 nomenklaturnya ditetapkan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang Kemaritiman dan Investasi telah disusun dan dilaksanakan sebagai bagian upaya pencapaian visi Pembangunan Nasional pada periode 2019-2024.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam kerangka tersebut, Kemenko Marves telah melaksanakan berbagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Bekerja sama dengan seluruh mitra pembangunan, khususnya 7 Kementerian/Lembaga yang berada dibawah koordinasi Kemenko Marves.

Memorandum ini berisikan informasi capaian pelaksanaan program kerja Kemenko Marves sepanjang tahun 2019-2024. Program kerja tersebut selain amanat pelaksanaan program dalam RPJMN 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, meliputi pula penugasan khusus yang diberikan Presiden serta amanat pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya, yang menjadi prioritas Kabinet Indonesia Maju.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam melengkapi data, informasi, laporan dan berbagai pemikiran untuk menyempurnakan Memorandum Pengakhiran Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; **Bentangkan Layar, Menuju Indonesia Emas 2045.** Semoga Memorandum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2024
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Ayodhia G. L. Kalake

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif I

Sambutan IV

Kata Pengantar VI

Daftar Isi VII

Kaleidoskop Kegiatan XIV

1. Pendahuluan

1.01 Prolog 2

1.02 Mengawal Poros Maritim Dunia 3

1.03 Profil Kemenko Marves 7

1.04 Rencana Strategis Dan Program Kerja Kemaritiman 19

2. Capaian Kinerja

2.01 Sasaran Pembangunan 24

2.02 Janji Presiden 24

2.03 Program Strategis Nasional (PSN) 45

2.04 ***Mayor Project*** 50

2.05 ***Suistainable Development Goals*** (SDGs) 52

2.06 34 Direktif Presiden 54

DAFTAR ISI

3. Kewilayahan, Kedaulatan Maritim, dan Energi

3.01	Penjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57
3.02	Memperluas Hak Berdaulat Indonesia	62
3.03	Perjanjian Bilateral Indonesia - Singapura	64
3.04	Melestarikan Laut Bebas, Menjaga Warisan, Bersama Umat Manusia	67
3.05	Menjaga Keunggulan Daya Saing Indonesia dalam Pengelolaan Mineral Strategis Melalui Peran Aktif di Kawasan Dasar Laut Internasional	69
3.06	Pembangunan Berkelanjutan Bagi Energi Bersih, Terjangkau, dan Ramah Lingkungan	71
3.07	Peningkatan Produksi Lifting Migas di Indonesia	73
3.08	Kemenko Marves dan CPOPC : Benteng Harga Sawit Indonesia	76
3.09	Peningkatan Tata Kelola dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia	78
3.10	Penegakan Hukum Laut	80
3.11	***Grand Design*** Pemanfaatan Gas Bumi Nasional	81
3.12	Pengembangan Industri ***Suistainable Aviation Fuels*** (SAF) demi Dunia Aviasi yang Lebih Hijau	83
3.13	Membebaskan Aset Negara di Luar Negeri	85

4. Sumber Daya Maritim

4.01	Revitalisasi Tambak Udang	87
4.02	Pengembangan Rumput Laut	89
4.03	Pembangunan Pengaraman Nasional	98
4.04	Koordinasi Ekpedisi Laut Dalam dan Literasi Maritim	101
4.05	Pipa Kabel Bawah Laut	107
4.06	Percepatan Pengelolaan ***Management Authoriy Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (MA CITIES)***	110
4.07	***National Blue Agenda Actions Partnership***	114
4.08	Indeks Kesehatan Laut	116

5. Infrastruktur dan Transportasi

5.01	Wujud Nyata untuk Pengurangan Emisi Karbon	119
5.02	Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Memadai	124
5.03	Pengembangan Wilayah Untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	127
5.04	Pembangunan Pelabuhan Patimban	129
5.05	Merajut Konektivitas dalam Kelancaran Distribusi Logistik	132
5.06	Pelayaran Rakyat Guna Menjangkau Daerah 3T	135
5.07	Tol Trans Sumatera	137
5.08	Mewujudkan Ibu Kota Nusantara	140
5.09	Merajut Konektivitas dalam Kelancaran Transportasi	142
5.10	Solusi Pembangunan Berbasis Alam	146

6. Lingkungan dan Kehutanan

6.01	Food Estate : Investasi Masa Depan Bagi Generasi Anak Cucu	153
6.02	Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2)	157
6.03	Rehabilitasi Ekosistem Mangroves	158
6.04	Tekan Emisi Karbon, untuk ***Net Zero Emission***	162
6.05	Penyelamatan Danau, Untuk Siapa?	163
6.06	Pilah Sampah dari Sumber Penghasil Sampah	165
6.07	Citarum Kembali Harum	170
6.08	Prakarsa Infrastruktur Hijau Indonesia - Jerman	175
6.09	Pemanfaatan Limbah ***Fly Ash dan Bottom Ash*** (FABA)	179
6.10	Program Rehabilitasi Mangrove Menjadi Aksi Konkrit Pengendalian Perubahan Iklim	184

DAFTAR ISI

7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7.01	Pariwisata Tetap Menjadi Primadona	187
7.02	Liburan Seru, Cinta Negeri!	196
7.03	***Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)***	197
7.04	Geopark Indonesia Mendunia	198
7.05	Menuju Bali sebagai Destinasi Pariwisata Berkualitas	200
7.06	Sail Teluk Cenderawasih	201
7.07	***International Quality Tourism Conference (IQTC) 2024***	203
7.08	Membangun Ekosistem Penerbangan Nasional yang Efisien	204
7.09	Kita Bela, Kita Beli!	206
7.10	Kualitas Murah, Harga Oke	207
7.11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri [P3DN] dan Implementasi Inpres 2 Tahun 2022	209
7.12	GIM Lokal	211
7.13	***Indonesia Spice Up The World***	212
7.14	Percepatan Transformasi Digital Kemenko Marves	214
7.15	Perizinan Penyelenggaraan Event Secara Daring	215

8. Investasi dan Pertambangan

8.01	Konektivitas untuk Masa Depan	218
8.02	Wujudkan Jabodebek Tanpa Macet	223
8.03	Masa Depan Industri Energi Hijau Indonesia	226
8.04	Hilirisasi Mineral dan Batubara	232
8.05	Perbaikan Iklim Investasi dan Realisasi Investas 2020-2024	235
8.06	Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim	237
8.07	Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Layanan Masyarakat Melalui Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital	239

9. Tugas Khusus/Tambahan

9.01	Dari Bali Untuk Dunia : Kesuksesan Penyelenggaraan G20 2022 di Indonesia	242
9.02	Ocean20: Forum Kelautan Global	244
9.03	***Indonesia International Sustainability Forum*** (ISF): Mempelopori Solusi Pertumbuhan Berkelanjutan Global	248
9.04	Buah Manis Kolaborasi dan Kedisiplinan: Keberhasilan Indonesia Mengatasi Pandemi COVID-19	249
9.05	Pemulihan Ekonomi Nasional – ***Indonesia Coral Reef Garden*** (PEN-ICRG)	254
9.06	Minyak Goreng Berlimpah, Penerimaan Negara Cerah	256
9.07	Tata Kelola Sawit	257
9.08	Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA)	261
9.09	Penanganan Wabah yang “Kembali” Mewabah	262
9.10	Sosok Tegas Atasi Polusi Udara	264
9.11	Kemakmuran dan Pertumbuhan Bersama (***World Water Forum*** Ke-10)	266
9.12	***Bali International Air Show*** 2024: Melambungkan Indonesia ke Panggung Dirgantara Dunia dengan Teknologi, Kolaborasi, dan Inovasi	271
9.13	Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah	275
9.14	Berlari Sambil Menikmati Keindahan Bumi Kupang	278

DAFTAR ISI

10. Peran Aktif Kemenko Marves dalam Berbagai Forum Bilateral, Regional, dan Multilateral

10.01	***Saling Percaya,Saling Menguntungkan***	280
10.02	***Archipelagic and Island Forum*** (AIS): Solidaritas, Kesetaraan, dan Inklusivitas	284
10.03	***Global South Collaboration***	288
10.04	***International Maritime Organization (IMO)***	289
10.05	Indonesia - Africa Forum	291
10.06	Indonesia-Papua Nugini: Kemitraan Baru, Masa Depan Cerah	292
10.07	Peran Kemenko Marves	294

11. Dukungan Manajemen

11.01	Perundang-Undangan yang Ditetapkan/Diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	298
11.02	Kerja Sama Dalam Negeri & Luar Negeri	305
11.03	***Standard Operating Procedure*** (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	307
11.04	Prestasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	310
11.05	Pengembangan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	321
11.06	Perayaan Hari Maritim Nasional (HMN) Sebagai Momentum Membangun Literasi dan Potensi Kemaritiman di Indonesia	323

12. Apa Kata Mereka

12.01	Penutup	328
12.02	Ayodhia G. L. Kalake	329
12.03	Jodi Mahardi	330
12.04	M. Firman Hidayat	331
12.05	Rachmat Kaimuddin	332
12.06	Nani Hendiarti	333
12.07	Odo R. M. Manuhutu	334
12.08	Septian Hario Seto	335
12.09	Sugeng Santoso	336
12.10	Okto Irianto	337
12.11	Jona Widhagdo Putri	338
12.12	Marsetio	339
12.13	Satryo Soemantri Brodjonegoro	340
12.14	Yohanes Surya	341
12.15	Ezki Tri Rezeki Widianti	342

TIM PENYUSUN

LAMPIRAN

KALEIDOSKOP

Kemenko Maritim 2016-2024



High Level Meeting Indonesia – Timor Leste on Maritime Boundary 17 - 18 Januari 2016



Inisiatif Pembentukan IORA Maritime Law Enforcement Forum



Biodiversity Beyond National Jurisdiction



Penyiapan Statement Pemerintah Indonesia terhadap Rencana Putusan PCA atas Sengketa Filipina–Tiongkok terkait Laut China Selatan



International Seminar and Regional Conference on the Establisment of a Regional Convention against IUUF and its Related Crimes

2016 — **2017**



Asosiasi Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of the Palm Oil Producing Countries)



Bilateral Maritime Forum Indonesia – Belanda, 24 Maret 2016



Indonesia Marine Plastic Debris Summit

2016 **2017**

KALEIDOSKOP

Kemenko Maritim 2016-2024



The 30th IAPH World Ports Conference 2017



Kemenko Maritim Resmi Lepas Tim Ekspedisi Nusantara Jaya 2018 Universitas Hasanuddin



Conference of the Parties (COP) ke 23 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn



Deklarasi Manado (Manado Joint Declaration) - Pembentukan Archipelagic and Island States (AIS) Forum



Peresmian Ocean Forecast System (OFS)

2018 **2019**



2nd IORA Blue Economy Ministerial Meeting



Menko Luhut Targetkan Pemasukan US$ 28,5 Miliar dari Sektor Pariwisata



Annual Meeting International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) di Bali Oktober 2018.



Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata

2017 **2018** **2019**

KALEIDOSKOP

Kemenko Maritim 2016-2024



Penanganan Pandemi Covid 19



Penerapan PPKM Jawa-Bali



Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022

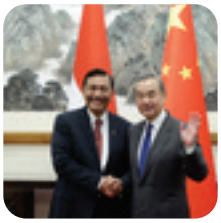


Moto GP Mandalika

2020 — **2021** — **2022**



Peringatan Hari Maritim Nasional Tahun 2020 s.d 2024



High-level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia - Tiongkok



Panen Perdana Kentang di Food Estate Humbang Hasudutan



Penandatanganan Perjanjian Bilateral Indonesia - Singapura untuk FIR, DCA, dan Esktradisi



Anugerah Bangga Buatan Indonesia

2020 **2021** **2022**

KALEIDOSKOP

Kemenko Maritim 2016-2024



Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/ Produk Dalam Negeri (Gernas BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Banten



Peresmian Kereta Cepat Jakarta - Bandung dan LRT Jakarta



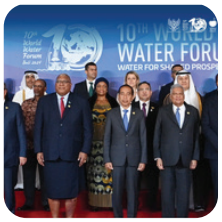
Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri



Peluncuran Buku Citarum Harum



Konferensi Tingkat Tinggi Pertama AIS Forum



Penyelenggaraan *World Water Forum* Ke-10 di Bali



Bali International Airshow 2024 sekaligus Peluncuran Peta Jalan *Sustainable Aviation Fuel (SAF)* Indonesia

2023 2024



Dorong Penguatan Kerja Sama di Berbagai Sektor bersama Kenya, Zimbagwe, dan DR Congo



Eksplorasi Laut Dalam : IDSSE dan OceanX



Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia ke PBB



Adopsi dan Penandatanganan Perjanjian BBNJ



Peluncuran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)



Peluncuran Sekretariat *Global Blended Finance Alliance (GBFA)*



Peresmian Industri Hilirisasi Rumput Laut di Lombok

2023 2024

Menko Marves dengan Kepala Negara/ Pejabat Asing










MITI


MITI
MINISTRY OF INVESTMENTS,
TRADE & INDUSTRY


HARAMB





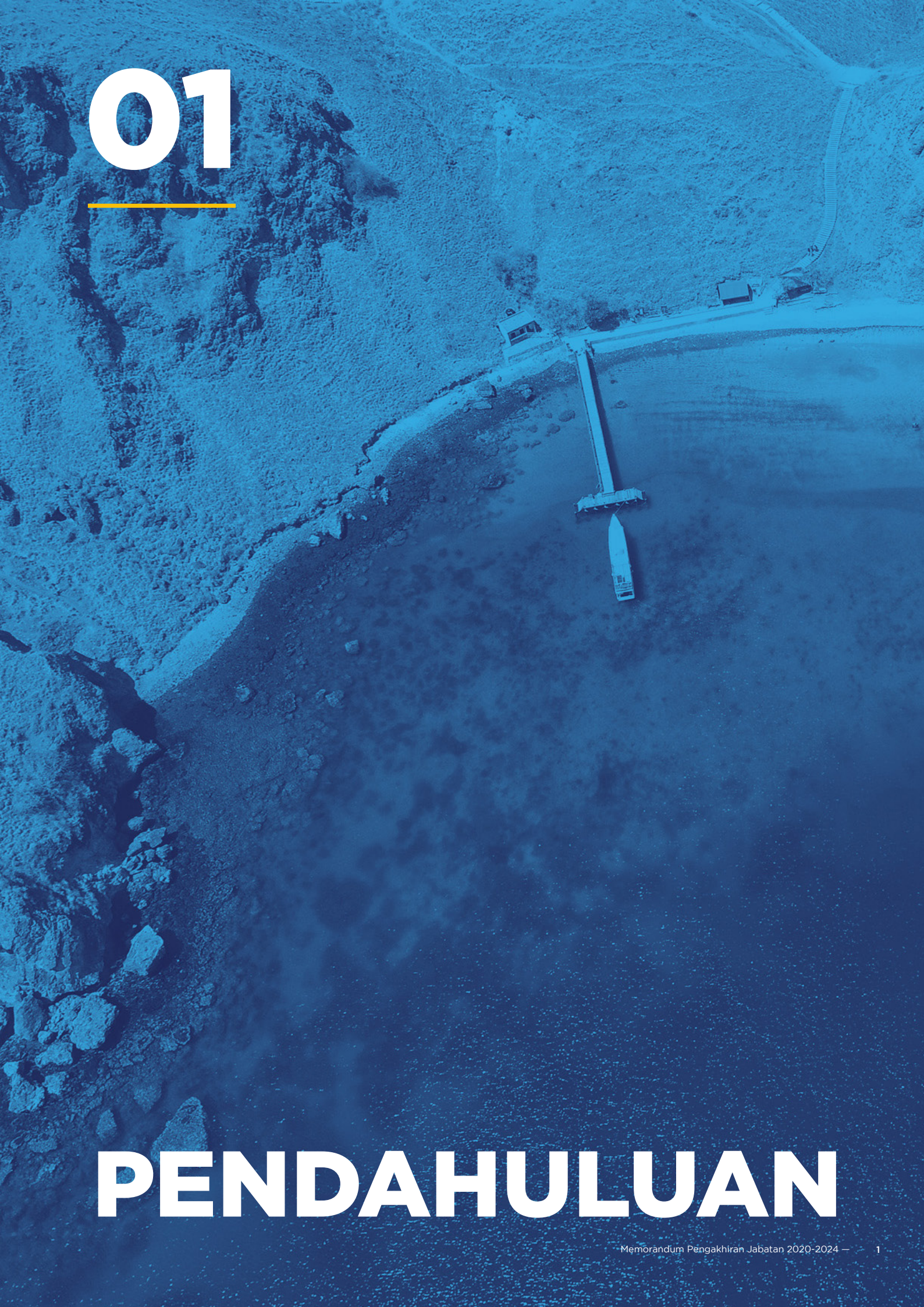

NG KE
MAN DAN IN
AND




HARAMBEE



01



PENDAHULUAN

PROLOG

Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mengoptimalkan potensi untuk mencapai tujuan bernegara. Keinginan-keinginan luhur yang disematkan oleh *founding father* Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dapat diimplementasikan dengan baik agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan.

Duapuluh tahun mendatang pada tahun 2045, dimana Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaannya adalah momentum yang tepat untuk kembali memastikan apakah bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita luhur, haluannya sudah mengarah pada arah yang tepat. Rangkaian peristiwa yang menjahit perjalanan Indonesia dalam merencanakan, melaksanakan, bahkan menggelorakan program-program pembangunan sebagai aksi nyata. Dengan memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang tersebar dalam kawasan perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dengan panjang pantai 108.000 kilometer dan ditaburi 17.504 pulau, berikut dengan keanekaragaman sumberdaya yang dimilikinya.

Oleh karena itu, di tengah semakin ketatnya persaingan global saat ini, pembangunan di bidang kemaritiman tidak lagi relevan ditempatkan sebagai wacana semata, melainkan telah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Apalagi, pemerintah telah mencanangkan poros maritim dunia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Kemenko Bidang Kemaritiman serta penetapan Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri dari 388 Renaksi (Periode 2016-2019) dan 374 Renaksi (Periode 2021-2025) sebagai spirit pembangunan nasional, lengkap dengan segala dinamika dan tantangannya. Itu sebabnya, implementasi program pembangunan kemaritiman telah, sedang dan akan terus diselenggarakan.

Di antara begitu banyak program dan kegiatan tersebut, terdapat program prioritas yang menjadi fokus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebagai salah satu instrumen penyebarluasan informasi, buku ini disusun dengan semangat untuk memotret capaian dan keberhasilan pelaksanaan dari program prioritas yang dilaksanakan sepanjang periode 2019-2024 serta keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional, *major project,* instruksi dan penugasan langsung presiden kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tentu saja, program-program tersebut sengaja dipilih antara lain karena memenuhi kriteria sebagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Realisasi infrastruktur konektivitas seperti pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api cepat dan ringan, tol laut, rehabilitasi ekosistem lingkungan termasuk mangrove sampai dengan pengembangan potensi kelautan seperti rumput laut, merupakan beberapa contoh program prioritas yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

MENGAWAL POROS MARITIM DUNIA

Pemahaman Poros Maritim

Poros dapat dipahami sebagai sumbu, acuan atau rujukan. Dalam konteks tersebut, poros maritim dunia dapat dimaknai sebagai rujukan peradaban maritim dunia. Kata rujukan di sini juga bisa dimaknai sebagai pusat orientasi atau kiblat. Dengan demikian, Indonesia poros maritim dunia harus dimaknai sebagai Indonesia yang menjadi pusat orientasi peradaban maritim dunia.

Menjadi poros maritim dunia pada hakikatnya adalah menjadi sebuah negara kepulauan yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman dunia. Hal ini sesuai dengan visi Kabinet Kerja yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.



"Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia"

Presiden Joko Widodo
dalam KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar,
13 November 2014



"Indonesia memiliki visi dan misi menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional"

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan
dalam pidato pada kuliah umum di Universitas Airlangga,
Surabaya, 18 September 2018

Jejak Kemaritiman **Indonesia**

Pasca Kemerdekaan

Jati diri Bangsa Indonesia adalah Bangsa Bahari. Namun, selama berabad-abad kita kehilangan jati diri sebagai Bangsa Bahari akibat kolonialisme. Keperkasaan dan kejayaan nenek moyang di laut haruslah menjadi penyemangat generasi sekarang dan yang akan datang. Bentuk implementasinya masa kini adalah bagaimana bangsa Indonesia dengan wilayah 2/3 merupakan lautan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan pembangunan bangsa.

1721 SM

Ditemukannya jambangan keramik berisi cengkih dalam penggalian situs kuno di kota Terqa, Efrat Tengah, Syria

1200 tahun yang lalu

Penelusuran DNA di Institut Biologi Molekuler, Universitas Massey, Selandia Baru, 30 sampel DNA dari Madagaskar identik dengan perempuan Indonesia.

Tahun 1521

Pati Unus dari Kerajaan Demak memimpin penyerbuan ke Malaka melawan pendudukan Portugis

Tahun 1599

Laksamana Malahayati dari Aceh memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid) berperang melawan kapal-kapal benteng-benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal.

Tahun 1670

Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa memimpin perlawanan kepada VOC yang hendak menguasai jalur rempah

Tahun 1293 - 1500

Kerajaan Majapahit salah satu bukti kerajaan nusantara yang bervisi maritim. Menurut Negarakertagama, kekuasaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur.

Abad ke-7

Kerajaan Sriwijaya, salah satu bukti kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara.Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah.

Abad ke-9

Lima lukisan relief kapal yang terdapat pada dinding candi Borobudur menceritakan fakta sejarah tingginya budaya maritim Indonesia, yaitu teknologi pembuatan kapal Samudera Raksa

Abad ke-14

Kapal tradisional Phinisi, menurut naskah Lontarak I Babad La Lagaligo adalah kapal asli karya cipta nenek moyang Bangsa Indonesia.

Sumpah Palapa

ikrar yang diucapkan oleh Mahapatih Gajahmada karena cita-cita yang kuat untuk mempersatukan nusantara di bawah kendali kerajaan yang ada di dalamnya dan bukan dikendalikan oleh kerajaan di daratan Benua Asia.

Bhinneka Tunggal Ika

“Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Tanah Air

Visi kewilayahan yang disosialisasikan dalam kongres pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres pemuda itu diperdengarkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya karya W.R Supratman. Dalam lirik lagu Indonesia Raya terdapat kata tanah air. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah visi negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari unsur tanah dan unsur air.

Jejak Kemaritiman **Indonesia**

Pasca Kemerdekaan

13 Desember 1957

Deklarasi Djuanda, Deklarasi ini juga telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara kepulauan dengan hakhaknya yang diakomodir dalam hukum laut internasional

Tahun 1982

United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82 akhirnya disahkan oleh PBB.

Tahun 1985

UNCLOS’82 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Tahun 1996

Pemerintah menggelar Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang melahirkan konsepsi Benua Maritim Indonesia.

Akhir dekade 1990-an

Pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2000-an

Konstitusi Indonesia mengalami amandemen sampai dengan 4 (empat) kali. Dalam amandemen yang ke-2, terjadi penegasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 25A UUD 1945).

Tahun 2005

Pemerintah menetapkan UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Misi ke-7 RPJPN tersebut adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Tahun 2014

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim, atau dikenal dengan Poros Maritim Dunia, sangat mengemuka dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tahun 2017

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Tahun 2019 - 2024

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

KATA **PRESIDEN**

Tentang Kemaritiman



Soekarno

Kita sekarang satu persatu, seorang demi seorang harus yakin bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang kuat, sentosa, sejahtera, jikalau kita tidak menguasai pula samudera, jikalau kita kembali menjadi bangsa samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa baharı, bangsa pelaut sebagai kita kenal di zaman bahari itu.



Soeharto

...Kuasai laut dan dirgantara



Bacharuddin Jusuf Habibie

...Pembangunan dan persatuan nasional harus berorientasi ke laut



Abdurrahman Wahid

...Laut Indonesia butuh pengelolaan agar memberi dampak ekonomi



Megawati Soekarnoputri

..seluruh bangsa Indonesia bersama-sama membangun kekuatan maritim



Susilo Bambang Yudhoyono

...pemimpin dan masyarakat harus bersatu selamatkan laut.



Joko Widodo

Kita telah memunggungi laut samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,

PROFIL KEMENKO MARVES

Alamat:

Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340

Tlp:

+62-021-23951100

Fax:

+62-21-3141790

Email:

humas@maritim.go.id

Website:

maritim.go.id

Tgl. Pendirian

27 Oktober 2014

MEDIA SOSIAL

Kemenko Bidang Kemaritian dan Investasi

Kemenko Bidang Kemaritian dan Investasi

@kemenkomarves

@kemenkomarves

@kemenkomarves

MILESTONE



1 DWISURYO INDROYONO SOESILO



2 RIZAL RAMLI



3 LUHUT B. PANDJAITAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DI KOORDINASIKAN

2014-2019

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi :

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Pariwisata; dan
5. Instansi lain yang dianggap perlu

2019-2024

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

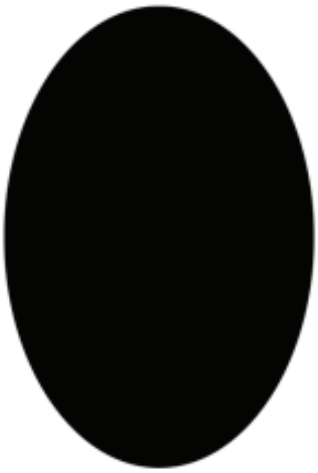
Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi :

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, BENTUK HURUF, DAN PROPORSI LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. Bentuk Logo

A. Makna, Arti Warna, Bentuk Huruf, dan Proporsi Logo



1. Makna Logo

a. Bentuk Oval

Makna: Bentuk bidang elips berwarna hitam memiliki filosofi Kemenko Marves sebagai benteng negara Republik Indonesia dari sisi maritim dan investasi yang tangguh yang tegak lurus siap melindungi dan membela kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam bentuk elips bermakna Kesatuan dan Keterkaitan dari sisi bentuk elips memiliki filosofi keterkaitan dan kesatuan, di mana setiap bagian dari sebuah sistem dianggap penting dan saling terhubung. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, saling ketergantungan, dan keselarasan antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) Kemaritman dan Investasi.



b. Bintang

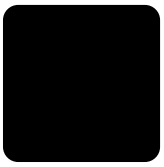
Makna: dua bintang sisi kanan dan kiri elips memfilosofikan dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu kemaritiman dan investasi bagaikan dua sisi mata uang yang digunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.



c. Lambang Garuda

Makna: Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia dengan gambar burung Garuda yang gagah berani yang berisikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa Bangsa Indonesia.

2. Arti Warna Logo



Kode Warna:

R=0
G=0
B=0

a. Hitam

Makna: Warna Hitam melambangkan kerahasiaan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai sumber kesejahteraan bangsa.

Kode Warna:

R=255
G=234
B=55

b. Kuning

Makna: Warna kuning emas melambangkan kejayaan bangsa Indonesia.

3. Bentuk Huruf Logo

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀ
ÅÉÎÕØabcdefghijklm
nopqrstuvwxyzàåéîõ
&1234567890($£.,!?)

Jenis huruf yang digunakan pada setiap huruf materi aplikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Arial.

4. Proporsi Logo

Penggunaan logo sebagaimana bentuk tercantum pada poin nomor 1 lampiran ini, memiliki proporsi penggunaan 2:3, 2 untuk horizontal dan 3 untuk vertikal.

Profil Singkat

MENKO MARVES





Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015 beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 – 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, beliau menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

34 penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi untuk menyelesaikan berbagai the bottlenecking pembangunan di bidang Kemaritiman dan Investasi sejak dilantik tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Tak hanya itu, pada tanggal 13 Juni 2024 secara resmi Menko Luhut Binsar Pandjaitan menerima gelar *Honorary Professor* (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, Tiongkok.

Kelembagaan



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis katulistiwa. Luas perairan mencapai 6,4 Juta km2, terdiri dari zona tambahan 270.000 m2, ZEE 3 juta KM2, landas kontinen 2,8 juta KM2, perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,110,000 KM2, dan laut teritorial 290.000 KM2, dan memiliki pulau sebanyak 17.504. Panjang garis pantai 108.000 KM (Perpres 118 Tahun 2022).

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas perdagangan laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Posisi Indonesia sebagai sebuah Benua Maritim dan Negara Kepualauan yang utuh merupakan pengejewantahan semangat Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957.
Sebagai Negara yang berada pada poros perdagangan dunia. Posisi silang Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus.



2014-2019

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mencanangkan bahwa Indonesia harus mampu meraih kembali kejayaan maritim. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dalam jajaran Kabinet Kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di bidang kemaritiman sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/ lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada.



Menteri-menteri anggota Kabinet Kerja melakukan sumpah jabatan di Istana Negara secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Foto: (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 menyatakan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini sesungguhnya merupakan pernyataan visi geopolitik dan sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional, sekaligus sebagai momentum penerapan strategi pembangunan nasional berbasiskan dan/ atau berorientasi kemaritiman. Upaya penguatan ekonomi maritim dilakukan melalui pembenahan di hulu pembangunan industri dan sistem logistik secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dinyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kemaritiman.





SerahTerima Jabatan Menko Bidang Kemaritiman dari Dwisuryo Indorono Soesilo kepada Rizal Ramli
Foto: Efrimal Bahri (e-maritim.com)

Presiden Joko Widodo melantik Dwisuryo Indriyono Soesilo sebagai Menko Bidang Kemaritiman bersama 33 Menteri Kabinet Kerja lainnya dengan Masa Bakti tahun 2014 -2019 di Istana Negara Jakarta, pada 26 Oktober 2015.

Belum genap satu tahun pada 12 Agustus 2015 Presiden Jokowi melakukan resuffle kabinet. Menko Bidang Kemaritiman termasuk dalam resufle, Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Dwisuryo Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

Serah terima jabatan dari Dwisuryo Indriyono Soesilo kepada Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dilakukan pada 13 Agustus 2015 di Auditorium Gedung BPPT-Jakarta.

Untuk mempercepat dan mengefektifkan kinerja pemerintah, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet jilid ke-2. Salah satu menteri yang masuk dalam skema reshuffle jilid kedua ini adalah Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Figur yang dipilih oleh presiden untuk menggantikan Rizal adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, purnawirawan Jenderal Angkatan Darat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Presiden melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 beberapa saat usai diumumkan menggantikan Rizal Ramli.

> **“Mas Indro ini mulai dari nol, jadi Menko baru, segala macam, kantor, anggaran, orang, sistem tidak punya.”**
>
> Rizal Ramli (Sambutan Sertijab 13 Agustus 2016)



Serah Terima Jabatan Menko Bidang Kemaritiman dari Rizal Ramli ke Luhut B Pandjaitan

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengalami tiga kali pergantian menteri. Pertama Dwisuryo Indroyono Susilo (27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015); kemudian Rizal Ramli (12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016) dan terakhir yakni Luhut Binsar Pandjaitan (27 Juli 2016 - Sekarang).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2015, selanjutnya dinyatakan bahwa Kemenko Bidang Kemaritiman mengoordinasikan beberapa kementerian antara lain: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian dan Instansi lain yang dianggap perlu.

> **"Rizal sebagai sosok yang bersahabat, baik, tulus dan cerdas."**
>
> Luhut B. Pandjaitan (Sambutan Sertijab 28 Juli 2016)



Pelantikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo

2019-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kemenko Marves pada periode ini membawahi 7 K/L yakni: Kementerian Kelautan Perikanan; Kementerian ESDM; Kementerian PUPR; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; kementerian Investasi/BKPM.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(Perpres No.92 Th. 2019 ttg Kementerin Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)

KEDUDUKAN

- Bertanggung jawab kepada Presiden
- Dipimpin oleh Menteri Koordinator

TUGAS

- menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian
- dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
- memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan
- agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

FUNGSI

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
- Penyelesaian isu di bidang pembangunan kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur **Organisasi**

Periode 2019-2024



Menteri Koordinator
Luhut B. Pandjaitan



Sekretaris Kemenko
Ayodhya G.L. Kalake



Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi
Jodi Mahardi



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi
Rachmat Kaimuddin



Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
M. Firman Hidayat



Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan & Kehutanan
Nani Hendiarti



Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Odo R.M. Manuhutu



Deputi Bidang Koordinasi Bidang Investasi & Pertambangan
Septian Hario Seto

Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim
—



Staf Ahli Bidang Hukum Laut
Okto Irianto



Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
Sugeng Santoso

Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
—

Dasar Hukum Pendirian

1

Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 UUD 1945

2

UU No 39/2008 ttg Kementerian Negara

3

Kepres No.121/P Th. 2014 ttg Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019

4

Perpres No.7 Th. 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

5

Perpres No.7 Th. 2015 ttg Organisasi Kementerian Negara

6

Kepres No.67 Th. 2019 ttg Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju

7

Kepres No.113/P Th. 2014 ttg Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024

8

Perpres No.10 Th. 2015 ttg Kementerin Koordinator Bidang Kemaritiman

9

Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019

10

Perpres No.92 Th. 2019 ttg Kementerin Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA KEMARITIMAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI 2019-2024

Presiden & Wakil Presiden

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kemenko Marves

"Indonesia Pusat Peradaban Maritim Duniauntuk mewujudkan "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"



MISI

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Mencapai lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

TUJUAN

- Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim dan berdaulat;
- Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional;
- Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
- Meningkatkan tatakelola Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

SASARAN

- Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
- Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
- Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
- Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
- Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara.

7 Pilar

Kebijakan Kelautan Indonesia

1a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
1b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2a. Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Laut
2b. Keselamatan di Laut
3. Tata Kelola dan Kelembagaan
4a. Ekonomi Kelautan
4b. Infrastruktur Kelautan
4c. Peningkatan Kesejahteraan
5a. Pengelolaan Ruang Laut
5b. Perlindungan Lingkungan Laut
6. Budaya Bahari
7. Diplomasi Maritim

Rencana Strategis

Presiden Jokowi dipertegas dalam rapat terbatas (Ratas) ke-1, tanggal 23 Oktober 2019 terkait tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:

RENCANA STRATEGIS

INVESTASI
- Fokus penyiapan program-program terobosan untuk mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan;
- Pastikan pada peningkatan inveastasi terus dilakukan;
- Iklim investasi harus kita bangun dan benah.

ENERGI
- Meningkatkan produksi migas dalam negeri;
- Implementasi dan kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) juga harus dipercepat.

INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS
- Penambahan trayek;
- Peningkatan frekuensi;
- Pengendalian monopoli terhadap pasokan barang (penciptaan harga kompetitif);
- Penurunan biaya logistik dan biaya transportasi.

INDUSTRI & MARITIM
- Pengurangan pada barang-barang impor;
- Tidak mengekspor bahan mentah;
- Mengembangkan produk-produk petrokimia dan membangun kawasan petrokimia.

PARIWISATA
- Fokus/konsentrasi pada 5 lokasi, baik itu infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk berbasiskan ekonomi rakyat;
- Target akhir tahun 2020, semua aspek yang memdukung sektor pariwisata harus rampung/selesai, antara lain: infrastruktur, pelabuhan, produk-produk wisata dan kalender event serta kondisi lingkungan yang menunjukan sebagai kawasan wisata.

5 Agenda

Pembangunan Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020-2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar. Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020- 2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis.

Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuarikan diatas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan Investasi tahun 2020- 2024 yaitu:



02



CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Fokus 6 Kelompok

Jenis dan jumlah proyek/kegiatan pengendalian di 6 Kelompok Pembangunan yang dilaksanakan Kemenko Marves dan sedang dilaksanakan di Tahun 2023.

3

SASARAN PEMBANGUNAN

IKU NASIONAL dalam RKP Tahun 2023

229

JANJI PRESIDEN 2020-2024

Bidang Kemaritiman dan Investasi

20

MAYOR PROJECT

Bidang Kemaritiman dan Investasi

168

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) 2020-2024

Proyek Strategik Nasional Bidang Kemaritiman dan Investasi

17

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

Pepres 111 Tahun 2022

34

DIREKTIF PRESIDEN

Sasaran **Pembangunan**

IKU NASIONAL dalam RKP Tahun 2023

1. Pertumbuhan Ekonomi (5,3-5,9)
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (27,02%)
3. Nilai Tukar Nelayan (107-108)

Janji Presiden

Bidang Kemaritiman dan Investasi

2021

1. Penyerahan sertipikat tanah di seluruh Tanah Air ditargetkan selesai pada tahun 2025.
2. Memerintahkan Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas, dibantu oleh TNI dan Polri untuk secepatnya melakukan operasi pencarian dan pertolongan kepada para korban agar segera ditemukan dan diselamatkan.

   Memerintahkan KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar segera menyelesaikan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak sehingga tidak mengganggu mobilitas distribusi barang.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta jajaran diharapkan dapat menjamin, agar kontrak kerja antara UMKM dengan perusahaan besar yang ditandatangani dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan cara sebagai berikut:
   - Memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas;
   - Meningkatkan kualitas produk dengan memperbaiki manajemen dan desain produk sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas;
   - Memperluas dan melembagakan model bisnis kemitraan serta menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dan perusahaan besar sehingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan besar
5. Keselamatan adalah hal yang utama dalam bidang transportasi, oleh sebab itu Menteri Perhubungan dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi diharapkan dapat menindaklanjuti hal tersebut terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan penumpang.
6. Ruas jalan tol Kayu Agung- Palembang diharapkan dapat menumbuhkan pusat perekonomian baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif. Maka dari itu, kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya agar dapat:
   - Menyambungkan jalan tol dengan sentra-sentra ekonomi, pariwisata, industri, pertanian, dan perkebunan;
   - Mengembangkan lahan di sepanjang koridor jalan tol yang memiliki potensi besar sebagai kawasan yang produktif untuk pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan yang akan meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk yang dihasilkan;
   - Lebih agresif menawarkan potensi-potensi daerah dan menjadikan infrastruktur sebagai keunggulan dalam meningkatkan daya tarik dan daya tawar kepada investor agar mengembangkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Menteri PUPR agar memastikan bahwa minggu depan Bendungan Napun Gete di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten dapat diresmikan

8. Presiden berpesan agar Gubernur dan para Bupati di Kalimantan Selatan melakukan intervensi terhadap pentingnya rehabilitasi lahan dan melakukan secara besar-besaran penghutanan kembali, penanaman kembali di sekitar Daerah Aliran Sungai, serta memastikan agar beberapa penduduk yang harus direlokasi diberikan uang ganti rugi dari pemerintah.
9. Menteri PUPR agar menambah embung dan satu bendungan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya.
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera memperbaiki rumah warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum.
11. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar memastikan moda transportasi di Indonesia ke depan harus semuanya mengarah kepada kereta transportasi massal dan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu listrik.
12. Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya diharapkan dapat menjaga konservasi di sekitar Bendungan Sindangheula dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, salah satunya menjadikan destinasi wisata baru di Provinsi Banten yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar membangun embung kolam paling lambat tahun depan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sesuai dengan visi smart and green university yang terintegrasi.
14. Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar berkonsentrasi di tiga zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, Sanur, dan Nusa Dua, dengan harapan:
    - Kedepannya bisa dibuka penuh untuk para turis agar merasa aman dan nyaman tinggal di Bali;
    - Kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan dievaluasi setiap minggu perkembangannya di tiga zona hijau tersebut dan pada umumnya di Provinsi Bali;
    - Proses vaksinasi ini akan terus sampai nanti sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gubernur Provinsi Bali agar secara bertahap membuka sektor ekonomi, khususnya pariwisata di Provinsi Bali dengan tahapan-tahapan yang akan didesain baik dari provinsi, kabupaten/kota, maupun dari Pemerintah pusat, apabila penyebaran COVID-19 sudah menurun bahkan hilang. Kebangkitan sektor pariwisata ini agar dievaluasi perkembangannya setiap minggu.
16. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar menjadikan penetapan tiga zona hijau di Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai model percontohan bagi provinsi dan kabupaten/kota lain untuk membuka sektor pariwisata.
17.
    - Menteri Perhubungan untuk dapat mengakselerasi penyelesaikan pembangunan proyek-proyek yang masih belum terselesaikan, seperti Makassar New Port yang sangat penting untuk menjadi hub Indonesia Bagian Timur.
    - Menteri BUMN untuk dapat mengoperasikan proyek- proyek dimaksud.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya, agar segera berkoordinasi, untuk:
    - Segera menyelesaikan sekitar 80% penyaluran air dari pipa utama hingga masuk ke rumah tangga, mengingat kapasitas SPAM Umbulan sebesar 4.000 liter air per detik baru berjalan sebesar 900 liter;
    - minggu inisegera diselesaikan, melalui rapat antara Menteri PUPR, Gubernur, Bupati, Walikota, dan PT Meta Adhya Tirta Umbulan, guna membahas pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga proyek besar dengan biaya sekitar Rp2,56 triliun tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat
    - model pembangunan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Umbulan
    - akan terus didorong, agar menjadi contoh bagi proyek-proyek lain, sehingga beban APBN akan semakin berkurang dan ke depan pengelolaannya swasta yang harus bergerak.
18. Memberikan pelayanan yang terbaik terkait perizinan ekspor UMKM dan investasi di daerah masing-masing karena kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengembangkan dan memanfaatkan Candi Prambanan yang sangat potensial untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa untuk kemajuan riset dan ilmu pengetahuan, serta sebagai tujuan destinasi wisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara untuk lebih mengenal dan mencintai peninggalan bersejarah bangsa Indonesia.

20. Pemerintah daerah agar menjadikan infrastruktur sebagai sebuah keunggulan dan modal penting untuk menarik investasi agar lebih banyak usaha-usaha baru yang dikembangkan sehingga akan membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya.

21. Menteri Kemaritiman dan Investasi agar mengoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah izin investasi, karena akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan income kepada negara.

22. Transformasi green technology perlu dilakukan sebab ke depan akan menjadi tumpuan bagi Indonesia memiliki potensi dan kekuatan, seperti penggunaan energi terbarukan B30 dan B100 terus dilanjutkan dan pengembangan industri mobil listrik dipercepat agar menjadi salah satu industri unggulan Indonesia.

    Pemerintah berharap agar kapasitas produksi industri otomotif dalam negeri bisa ditingkatkan dengan pemakaian kandungan lokal yang semakin tinggi dan para pelaku industri menyasar pasar ekspor.

23. Menteri PUPR, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Bupati Kabupaten Batang agar menyiapkan pelaksanaan peletakan batu pertama untuk industri kaca pada bulan Mei 2021 dan membangun industri prekursor dan katoda pada bulan Juni atau Juli 2021.

    Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM agar menjadikan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Batang sebagai contoh untuk kawasan industri lain yang berada di provinsi, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

24. Indonesia perlu mempercepat pilot percontohan net zero emission dengan cara:
    - membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia;
    - melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 620.000 hektare sampai tahun 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis.

    Indonesia membuka peluang bagi:
    - investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi;
    - pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik.

25. Memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan proses perizinan investasi agar investasi dari yang kecil, menengah, maupun besar tidak terhambat perizinannya.

26. Perlu hati-hati terhadap perolehan manfaat dari perkembangan dunia pada green economy, yaitu:
    - kita menyadari bahwa Indonesia sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar bangsa Indonesia dapat bersaing di pasar global;
    - merencanakan untuk membuat green industrial park, kawasan industri hijau di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower yang ada di Sungai Kayan, yang akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau, sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Inilah kekuatan kita ke depan;
    - Mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity di laut. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan, menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan industri. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai kita miliki.

27. Pemerintah akan memperbaiki beberapa hal untuk mempermudah pekerjaan nelayan, diantaranya:
    - melakukan pengerukan di PPDI Brondong pada dua lokasi yang diminta dalam dua atau tiga bulan ke depan untuk mengatasi masalah pendangkalan pelabuhan;
    - meninggikan dan memperbaiki lampu haluan di PPDI Brondong.

28. Menteri Kelautan dan Perikanan agar menindaklanjuti terkait permohonan nelayan mengenai Kapal Cantrang agar tetap dipertahankan untuk digunakan, dan Surat Izin Penangkapan untuk dapat dikeluarkan supaya ada kepastian dalam usaha.

    Sejumlah lokasi Pelabuhan mengalami pendangkalan sehingga menghambat aktivitas nelayan setempat untuk berlayar, dan perlunya perbaikan fasilitas di Pelabuhan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera menindaklanjuti untuk pengerukan di dua lokasi yang mengalami pendangkalan, perbaikan Lampu Haluan, dan Breakwater dalam 2-3 bulan ke depan, bulan Agustus 2021.

29. Presiden sangat mengapresiasi dan menghargai instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang ada di kota Surabaya, dan Presiden akan memerintahkan kota-kota lain untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Walikota Surabaya.

30. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi agar:
    - mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung yang ditargetkan pada awal tahun 2022, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah masuk pada tahap persiapan untuk operasi, dan akhir tahun 2022 sudah dapat diujicobakan dan beroperasional;
    - Kereta Cepat Jakarta- Bandung diharapkan dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang ada di Jakarta, seperti LRT dan MRT. Sehingga efisiensi waktu, dan kecepatan akan menjadi daya saing bagi Indonesia terhadap negara-negara lain.

31. Pembangunan LRT di Jabodebek yang sudah selesai kurang lebih 84,7 persen diharapkan sudah mulai diuji coba pada bulan April 2022 dan bisa mulai beroperasi pada bulan Juni 2022.

    Diharapkan setelah pembangunan ini selesai, pemerintah akan masuk ke titik-titik yang lain, seperti pembangunan LRT yang pengerjaannya 100 persen oleh PT INKA dan akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi, semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya.

32. Diharapkan Bandara ini dapat memberikan kontribusi, menumbuhkan ekonomi baik di Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya, termasuk Kebumen. Diharapkan juga mobilitas orang, barang, dan logistik akan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah Jawa Tengah bagian selatan.

    Meskipun terminalnya masih terminal darurat, tetapi airport- nya sudah dapat dipakai. Hal ini lebih produktif daripada menunggu terminal harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan. Cara- cara cepat seperti ini akan terus dilakukan terhadap airport-airport yang lain yang masih dalam proses dibangun.

33. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak diharapkan dapat:
    - mengurangi kemacetan lalu lintas yang sudah berpuluh- puluh tahun secara signifikan terjadi di Kaligawe-Bandar Udara Ahmad Yani;
    - meningkatkan konektivitas antardaerah;
    - mengendalikan banjir rob dengan adanya kolam retensi dan tanggul laut;
    - berdampak pada sekitar untuk kawasan industri dan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

34. Layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Adaptasi teknologi agar ditingkatkan untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat serta akurat sehingga lebih mampu meminimalkan risiko yang harus dihadapi.

    Para Menteri Koordinator agar mengoordinasikan jajarannya untuk menggunakan peringatan BMKG sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan Pemerintah di berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus terus diperkuat, termasuk bersama BNPB untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana bersiap menghadapi bencana.

35. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian, melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023.

Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN Tahun 2022, yaitu:

- melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan;
- menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan;
- memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing;
- melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi;
- menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;
- melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasishasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

36. Dengan adanya jalan tol diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik menjadi lebih cepat, efisien, dan kompetitif, serta meningkatkan daya saing terutama untuk komoditas yang diproduksi di Kalimantan Timur.

37. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dapat menyambungkan Bendungan Kuningan dengan jaringan irigasi, yakni mulai dari saluran primer, sekunder, tersier, sampai ke kuarter sehingga Bendungan Kuningan dapat memberikan manfaat nyata bagi peyediaan air irigasi untuk para petani.

38. Agar Bendungan Way Sekampung dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung produktivitas pertanian, membantu kesulitan air bersih, dan mengendalikan banjir:
    - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat menyambungkan Bendungan Way Sekampung dengan sistem irigasi yang tertata dengan baik, mulai dari saluran primer, sekunder, tersier, sampai ke kuarter;
    - Gubernur Provinsi Lampung dan jajarannya diharapkan dapat memanfaatkan Bendungan Way Sekampung sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

39. Sebanyak 10 bendungan akan diresmikan hingga akhir tahun 2021:
    - Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, akan diresmikan pada minggu ke-2 bulan September 2021;
    - Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, akan diresmikan pada bulan Oktober 2021;
    - Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan diresmikan pada bulan Oktober 2021;
    - Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan diresmikan pada bulan Oktober 2021;
    - Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan diresmikan pada bulan November 2021;
    - Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan diresmikan pada bulan November 2021;
    - Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, akan diresmikan pada bulan Desember 2021;
    - Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, akan diresmikan pada bulan Desember 2021;
    - Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, akan diresmikan pada bulan Desember 2021;
    - Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, akan diresmikan pada bulan Desember 2021.

40. Rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target pada tahun 2021 kurang lebih 34 ribu hektare di seluruh Tanah Air.

41. Pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas ribuan pulau di Indonesia dengan cara menghubungkannya melalui program tol laut untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antarpulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

42. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air dengan target 34 ribu hektare pada tahun 2021 sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon dan meneguhkan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan perubahan iklim dunia.

43. Menteri Perhubungan diharapkan terus meningkatkan kapasitas terminal bandara untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang serta mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat.

44. Hutan mangrove Bali direncanakan akan menjadi salah satu lokasi yang akan diperlihatkan kepada para pemimpin negara anggota G20 pada saat pelaksanaan KTT G20 Indonesia 2022 di Bali.

45.
- Setelah menguasai 51% saham Freeport, kebijakan strategis Pemerintah adalah mendorong Freeport membangun smelter di dalam negeri untuk memperkuat hilirisasi industri.
- Memerintahkan satu per satu perusahaan swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang dan minerba untuk masuk ke hilirisasi agar nilai komoditas menjadi lebih tinggi, memberikan nilai tambah bagi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadikan Indonesia semakin mandiri dan maju.
- Akan terus memberikan dukungan penuh terhadap iklim investasi agar menjadi lebih baik dengan mendukung infrastruktur maupun kemudahan dan kepastian berusaha. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga agar ikut mendukung agar KEK Gresik semakin maju dan Indonesia menjadi negara tujuan investasi.

46. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar melakukan penguatan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia melalui green economy dan blue economy dengan cara:
- mengejar kesempatan dari ledakan (booming) harga komoditas mineral dan batu bara (minerba) yang sedang terjadi sekarang untuk memajukan Indonesia. Pengembangan industri turunan nikel dan bauksit harus dilakukan dengan mengolah nikel menjadi katoda baterai, stainless-steel, atau litium baterai, yang kemudian diintegrasikan dengan industri otomotif untuk mendukung produksi mobil listrik di Indonesia pada beberapa tahun ke depan. Bauksit juga harus diolah menjadi alumunium dan lainnya;
- menghadapi risiko pertentangan dari negara- negara di dunia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizations/WTO) dengan menyiapkan pengacara- pengacara terbaik di Indonesia;
- menghentikan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan mentah dari komoditas sawit. Komoditas sawit harus diolah menjadi kosmetik, mentega, biodiesel, dan produk turunan lainnya;
- mulai membangun green industrial park dengan luas 20 ribu hektare pada bulan November 2021 sebagai kawasan industri hijau di Kalimantan Utara agar dapat bersaing dengan negara-negara Uni Eropa dan Amerika yang tidak lagi menggunakan energi fosil di masa mendatang;
- melakukan penanaman mangrove, rumput laut, budi daya ikan ketika menangkap hasil laut sebagai bagian dari prinsip blue economy. Penggunaan teknologi baru, seperti aquaculture, juga harus mulai dikenalkan kepada nelayan-nelayan di Indonesia.

47. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mengembangkan runway dan terminal Bandar Udara Internasional Komodo pada tahun 2022.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan segera melakukan promosi secara besar-besaran dan menyiapkan Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan event-event berskala nasional dan internasional, di antaranya, dengan menunjuk Labuan Bajo sebagai pendukung penyelenggaraan KTT G20 pada tahun 2022 dan KTT ASEAN pada tahun 2023.

48. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar merehabilitasi sekitar 600 ribu hektare hutan mangrove hingga tahun 2024 atau dalam kurun waktu tiga tahun dan bersama dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara agar merehabilitasi 180 ribu hektare hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara.

49. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, terutama pada sektor:
- kehutanan, dengan target mencapai Carbon Net Sink pada tahun 2030
- energi, dengan pengembangan ekosistem mobil listrik,
- pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan pengembangan industri berbasis clean energy.

Presiden menyatakan tekadnya untuk terus:

- memobilisasi pendanaan iklim dan pembiayaan inovatif dengan mitra negara maju, yang diyakini akan menjadi game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara- negara berkembang; dan
- mendorong penerapan mekanisme carbon market dan carbon price, yakni dengan menciptakan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil.

Sebagai bagian dari Forum Negara-negara Kepulauan dan Pulau Kecil (Archipelagic and Island States/AIS Forum), Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan kerja sama kelautan dan aksi iklim pada UNFCCC.

50. Menargetkan net carbon sink pada tahun 2030 sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi perubahan iklim.

51. Pemerintah akan melakukan evaluasi mengenai rencana pengembangan kawasan Mandalika setelah perhelatan World Superbike dan MotoGP digelar.

52. Pembangunan ruas Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan ruas Cileles- Panimbang sepanjang 33 kilometer akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.

53. Menteri Badan Usaha Milik Negara agar mendorong seluruh jajaran Pertamina dan PLN untuk:
    - segera melakukan transisi energi ke energi hijau baik Pertamina, yang masih fokus pada bisnis minyak dan gas, maupun PLN, yang masih mengandalkan penggunaan batu bara dengan cara:
        1. menyiapkan grand design secara konkret dan detail dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan;
        2. memanfaatkan rentang waktu yang ada untuk memperkuat fondasi menuju energi hijau;
        3. mencari teknologi yang paling efisien;
        4. segera melaksanakan langkah-langkah antisipasi transisi energi tersebut mengingat setiap negara berlomba-lomba untuk dapat mengambil peran secepatnya agar mendapatkan keuntungan;
        5. mendorong gasifikasi batu bara atau DME (Dimethyl Ether) untuk mengganti penggunaan LPG (Liquified Petroleum Gas);
        6. memanfaatkan potensi besar sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia, diantaranya geotermal dan hydropower dengan ribuan sungai yang dimiliki;
        7. memberi ruang tersendiri dan nilai lebih bagi produk-produk yang dihasilkan dari EBT;
        8. memperbaiki perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) bagi EBT.
    - melakukan perbaikan cara kerja terkait penugasan Pemerintah kepada Pertamina dan PLN dengan menetapkan target-target serta mempersiapkan diri mengingat negara-negara maju telah memberikan komitmen bantuan sebesar USD 100 miliar kepada seluruh dunia guna mendukung transisi energi.
    - mengoptimalisasikan potensi dan realisasi investasi mengingat besarnya animo investor untuk berinvestasi di Pertamina dan PLN dengan cara:
        1. meningkatkan efektivitas birokrasi dan profesionalisme dalam setiap penugasan;
        2. menyampaikan secara transparan mengenai kalkulasi perusahaan;
        3. memastikan kepentingan perusahaan dan kepentingan negara berjalan beriringan;
        4. tidak mengulur rencana yang sudah disepakati sebagaimana yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena dunia sangat dinamis;
        5. menjaga penilaian positif dari negara-negara lain terhadap birokrasi di Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), yang memberikan apresiasi atas percepatan pelayanan birokrasi di Indonesia.

54. Penyelesaian proyek Jalan Tol Serang-Panimbang, yang ditargetkan selesai pada tahun 2023, diharapkan akan:
    - mendekatkan Jakarta dengan wilayah Serang dan Pandeglang mengingat waktu tempuh yang lebih cepat;
    - menghidupkan kawasan wisata Tanjung Lesung mengingat pembangunan jalan tol secara otomatis akan membuka peluang investasi di kawasan wisata tersebut.

55. Didasari oleh keyakinan mengenai urgensi pembangunan ekosistem mobil ramah lingkungan, Presiden menyampaikan bahwa, ke depan, Pemerintah akan mendorong produksi mobil listrik atau hybrid.

56. Pemerintah akan membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang berbasis energi Sungai Kayan, dengan kapasitas kurang lebih sebesar 11.000-13.000 megawatt.

    Presiden menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dalam jangka waktu dua tahun, dapat mempersiapkan: pertama, infrastruktur digital, seperti fiber optic, microwave link, satelit, BTS, dan data center; kedua, penyesuaian- penyesuaian atas seluruh regulasi guna mendukung percepatan terwujudnya sebuah ekosistem besar digital di Indonesia; dan ketiga, sumber daya manusia dengan membangun digital leadership academy yang bekerja sama dengan berbagai universitas terkemuka dunia.

57. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar membuat kurang lebih 30 pusat persemaian selama kurun waktu tiga tahun ke depan.

58. Pemerintah akan membangun dua buah hydropower, yakni sungai Kayan, sebesar 13 ribu megawatt, guna mendukung Green Industrial Park, dan sungai Mamberamo, sebesar 24 ribu megawatt.

59. Melalui tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia akan fokus pada: pertama, penanganan kesehatan yang inklusif; kedua, transformasi berbasis digital; dan ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan.

60. Presiden mengimbau Gubernur Provinsi Bali bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mentransformasi pariwisata Bali dari mass tourism menjadi green & quality tourism, yakni pariwisata yang berbasis sosial, budaya, lingkungan, dan kearifan lokal Bali yang membangun harmoni dan memuliakan alam.

61. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk membuat nursery (persemaian) sehingga penghutanan kembali dapat berjalan dengan lancar.

62. Menteri Perhubungan diharapkan dapat memperpanjang landasan pacu (runway) Bandara Ngloram dari 1.500 meter menjadi 2.000 meter apabila jumlah penumpang selalu penuh dan panjang runway dinilai kurang.

63. Presiden menginstruksikan kepada:
    - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Gubernur Kalimantan Utara bersama Bupati Bulungan agar segera menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang baik dengan estimasi kebutuhan hingga 300 ribu tenaga kerja;
    - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar memastikan perizinan dapat dikeluarkan dalam hitungan jam dan melaporkan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

64. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gubernur Sulawesi Tenggara agar dapat mengembangkan Bendungan Ladongi sebagai tempat wisata air, yang pengembangannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten.

2022

65. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dalam negeri, Presiden menginstruksikan:

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera mencarikan solusi terbaik terkait pasokan batu bara dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk PLN dan industri dalam negeri, sebagaimana ketentuan Domestic Market Obligation (DMO). Sanksi dapat dikenakan apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, mulai dari tidak mendapatkan izin ekspor hingga pencabutan izin usaha;

    Produsen Liquefied Natural Gas (LNG) baik Pertamina maupun perusahaan swasta lainnya, untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri, dan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN agar mencarikan solusi permanen dalam menyelesaikan masalah pasokan LNG

66. Seluruh pihak terkait telah diperintahkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar jalan Bypass bandara menuju Mandalika pada bulan Februari 2022.

67. Peninjauan Presiden ke Sirkuit Internasional Mandalika dilaksanakan dalam rangka melihat kesiapan Sirkuit Internasional Mandalika dalam rangka perhelatan MotoGP pada bulan Maret 2022, utamanya yang berkaitan dengan:
    - proses kedatangan di bandara, seperti pelaksanaan PCR dan pengecekan vaksinasi, serta simulasi loading-unloading;
    - penataan lanskap dari bandara menuju ke Mandalika yang mulai dipercantik dengan bunga-bunga dan bukit-bukit yang dilakukan penghijauan kembali; dan
    - kesiapan dalam hal akomodasi, transportasi, hotel, hingga pesawat.
68. Mengingat tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah acara- acara yang berskala internasional, seperti MotoGP pada bulan Maret 2022 dan G20 pada bulan November 2022 serta acara berskala internasional lainnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dapat memanfaatkan momentum emas ini sebaik-baiknya dengan mempersiapkan 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan menunjukkan pengelolaan destinasi yang bersih, yang rapi, dan profesional.
69. Transformasi menuju green economy atau produk-produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi mengingat Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 418 gigawatt;
70. Progres pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang secara keseluruhan telah selesai 79,9 persen tersebut diharapkan dapat:
    - dilaksanakan uji coba pada akhir tahun 2022 dan mulai dapat diresmikan operasionalnya pada bulan Juni 2023;
    - mengurangi kemacetan, baik di Jakarta maupun di Bandung;
    - mempercepat mobilitas orang dan barang; dan
    - menjadi sebuah daya saing yang baik bagi bangsa Indonesia.
71. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Investasi diharapkan dapat:
    - menyelesaikan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kabupaten Muara Enim dalam waktu 30 bulan;
    - melakukan proyek serupa di daerah lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.
72. Menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan Wali Kota Kota Pagar Alam agar memperluas pemanfaatan energi hijau di Pagar Alam, di antaranya penggunaan kendaraan listrik sehingga Kota Pagar Alam dapat menjadi kota pertama yang menggunakan energi hijau atau green city.
73. Menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang sebagian kecil, sekitar 10-20 persen, masih bergelombang.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat membangun lagi rebranding dan diferensiasi antara kawasan Danau Toba dengan kawasan-kawasan destinasi wisata lainnya.

    Dengan mempertimbangkan skala prioritas, Pemerintah dalam jangka panjang akan mengintegrasikan secara bertahap seluruh destinasi wisata, termasuk antara kawasan Danau Toba dengan KEK Sei Mangkei.
76. Revitalisasi dan penataan kembali kawasan Huta Siallagan diharapkan selain menjadi kawasan konservasi adat budaya, juga dapat dijadikan destinasi pariwisata yang sangat menarik, tertata, dan memiliki kelas.
75. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan pendampingan kepada penerima Surat Keputusan (SK) dengan berkunjung ke perhutanan sosial yang sudah berhasil dikelola guna mempelajari dan menerapkan tata kelola dan manajemennya.
76. Melihat pentingnya dukungan berupa infrastruktur jalan yang baik untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan competitiveness produk lokal dengan komoditas impor:

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan produksi dengan estimasi sepanjang 40 ribu kilometer di seluruh Tanah Air.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar membantu petani dalam memperbaiki pengemasan, branding, dan Quality Control Check agar dapat mengangkat harga produk- produk petani, tidak hanya jeruk, tetapi seluruh komoditas pertanian.

77. Upaya Pemerintah mengawal transformasi besar untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan peningkatan nilai tambah, yaitu:
    - investasi besar-besaran dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM);
    - hilirisasi atau penghentian ekspor bahan mentah, mulai dari hilirisasi industri tambang hingga hilirisasi sektor pertanian;
    - transformasi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transformasi digital.

78. Komitmen Indonesia sebagai salah satu negara garda terdepan dalam hal perlindungan laut, antara lain:

    capaian target kawasan konservasi perairan laut seluas 28,1 juta hektare atau 86,5% pada tahun 2021 dari target 32,5 juta hektare pada tahun 2030;

    mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025 dengan berbagai upaya, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi sepuluh megawatt listrik;

    menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare hingga tahun 2024.

79. Presiden menyampaikan penegasan bahwa pembangunan IKN:

    akan mengusung konsep kota ramah lingkungan, yakni: pertama, 70 persen area hijau; kedua, 80 persen penggunaan transportasi publik dan pemanfaatan energi hijau dari Sungai Kayan; ketiga, 10-minute city dengan memberikan prioritas bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan keempat, smart forest city;

    tidak bertujuan untuk merusak hutan, di antaranya dengan mengupayakan: pertama, dari luas keseluruhan wilayah mencapai 256 ribu hektare, 200 ribu hektarenya akan tetap dibiarkan sebagai hutan hijau; dan kedua, memprioritaskan pembangunan nursery hingga mencapai 20 juta bibit per tahun

80. Keseriusan Pemerintah melakukan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk kendaraan listrik ditunjukan dengan menargetkan:
    - emisi karbon dapat berada di angka 29% pada tahun 2030 dan di angka nol (net-zero carbon) pada tahun 2060 dapat terpenuhi;
    - Indonesia mampu menjadi produsen kendaraan listrik dengan target dua juta pengguna pada tahun 2025 untuk selanjutnya dapat merambah pasar ekspor
    - pembangunan pabrik baterai listrik berkapasitas besar dapat segera diselesaikan.

81. - Pemerintah akan melanjutkan pembangunan MRT fase 2B, yakni dari Kota hingga Ancol Barat
    - Pihak terkait agar segera menyelesaikan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) dan mengeksekusi East-West Line, termasuk rute Fatmawati hingga Taman Mini Indonesia Indah.

82. Indonesia telah menyampaikan komitmen kepada dunia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 23 persen pada tahun 2025, 29 persen pada tahun 2030, hingga nol persen emisi atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060, meskipun tidak mudah. Hal ini mengingat perlunya untuk terus menyeimbangkan antara supply dan demand energi listrik.

    Guna merespons keluhan terkait perizinan yang memakan waktu hingga lebih dari lima tahun, sebagaimana yang disampaikan Bapak Jusuf Kalla, Presiden menekankan agar Direktur Utama PT PLN (Persero) memperhatikan birokrasi di perusahaannya agar tidak ada lagi keluhan terkait lamanya proses perizinan.

83. Membangun tiga puluh nursery pada tahun 2022 dengan kapasitas produksi hingga kurang lebih dua belas juta bibit tanaman dan pohon, di antaranya albasia, sengon, eukaliptus, manglid, jati, hingga mahogany.

84. Pada kesempatan melakukan peninjauan ke Pusat Persemaian Mentawir bersama dengan sejumlah Menteri dan Gubernur Kaltim, Presiden kembali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan diawali dengan merehabilitasi hutan dan melakukan penanaman kembali area-area di IKN dan sekitarnya. Untuk itu, diharapkan bahwa:
    - upaya penanaman kembali dapat mengembailkan fungsi hutan pada fungsi semula, yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan monokultur, sehingga suasana di IKN sesuai dengan konsep sebagai kota hutan;
    - dari jutaan bibit yang disemai, dapat dibawa ke IKN untuk ditanam, utamanya di lahan- lahan kritis yang ada di IKN dan dapat ditanam di sela- sela tanaman eucalyptus. Dengan demikian, ketika eucalyptusnya ditebang, tanaman-tanaman seperti meranti, kapur, nyatoh, gaharu, bangkirai, jambu-jambuan tersebut sudah pada posisi yang tinggi.

85. Pemerintah tengah berupaya untuk:
    - melakukan transisi besar- besaran dari mobil berbahan bakar fosil menuju penggunaan mobil listrik agar mobil listrik menjadi moda transportasi utama, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN);
    - menjadi pemain penting dalam global supply chain industri mobil listrik karena didukung oleh potensi sumber daya mineral yang sangat besar.

    Guna mendukung transisi tersebut, Presiden menekankan: pertama, pentingnya melakukan hilirisasi bahan-bahan mineral mentah untuk memberikan nilai tambah yang optimal; dan kedua, membangun ekosistem yang kuat di dalam negeri untuk bersaing dengan negara lain.

    Presiden menyampaikan:
    - bahwa tahun 2022 akan menjadi momen penting untuk pengembangan baterai litium untuk kendaraan listrik setelah beberapa investor menyatakan kesiapannya untuk memulai konstruksi bagi pengolahan nikel dan kobalt menjadi bahan material lithium battery;
    - harapan agar pada tahun 2024 sudah menggunakan baterai listrik yang diproduksi oleh Indonesia, termasuk komponen penting mobil listrik lainnya.

86. Mengingat gelaran balapan MotoGP merupakan event besar dan jangka panjang, maka Pemerintah akan melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan pada penyelengaraan tahun berikutnya.

87. Presiden menekankan kepada jajaran Pemerintah terkait untuk:
    - serius memperhatikan informasi cuaca dan perubahan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait guna memformulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat serta menyiapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim;
    - mengembangkan sistem peringatan dini yang andal di seluruh daerah, di antaranya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan inovasi untuk membangun kesadaran, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat;

88. Peningkatan kerja sama regional dengan negara-negara Pasifik Selatan, di antaranya terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan manajemen penanggulangan bencana yang menjadi tantangan negara-negara kepulauan di Pasifik.

89. Intensifikasi pembahasan mengenai penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas darat kedua negara mengingat telah dibukanya perbatasan kedua negara.

90. Pembangunan jalan tol di ruas- ruas tol lainya agar dipercepat, di antaranya penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra Lampung-Aceh sepanjang 2.900 kilometer.

91. Melihat peluang peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, Presiden meminta Menteri Perhubungan agar melayani penerbangan dari Surabaya ke Sumenep dan Jakarta ke Sumenep.

92. Dengan prediksi terdapat 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan untuk mudik tahun 2022 ini, Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif berupa rekayasa lalu lintas guna mengatasi kepadatan dan kemacetan pada puncak arus mudik yang melalui jalur darat, yakni:
    - pemberlakuan aturan ganjil genap;
    - pemberlakuan satu arah (one way);
    - larangan truk masuk jalan tol maupun jalan nasional;
    - imbauan agar masyarakat mudik lebih awal;

93. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) agar membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kecil khusus untuk para nelayan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera menyelesaikan masalah pendangkalan di sekitar dermaga.

94. Balapan Formula E agar dapat digelar pada awal Juni 2022.

95. mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi sehingga tidak lagi bergantung pada pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

96. Presiden berharap agar:
    - adanya tambahan investasi baru Jepang di bidang lainnya, terutama energi, industri semen, teknologi, pertanian, dan kesehatan;
    - percepatan tindak lanjut kerja sama transisi energi melalui investasi energi baru terbarukan (EBT), seperti hidrogen, biomassa, dan metanol, serta finalisasi dan implementasi MOU kerja sama lingkungan hidup;

97. Para Menteri Koordinator agar menginstruksikan kepada:
    - para Menteri untuk memerintahkan para pejabat eselon I dan II serta jajaran terkait;
    - Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah;
    - Menteri BUMN untuk mendorong jajarannya; untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

    Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan kepada para Kepala Daerah dan jajarannya untuk segera memasukkan produk lokal dan unggulan pada E-Katalog Lokal, mengingat baru 46 Pemda yang memiliki katalog lokal dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan asosiasi pengusaha yang berada di bawah koordinasinya untuk membangun kualitas produk, membuat desain, serta kemasan dan branding yang bagus agar semakin banyak produk unggulan lokal yang masuk E-Katalog lokal sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.

98. - Akan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk-produk berbasis nikel seperti lithium battery dan baterai kendaraan listrik, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia;
    - Menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, pusat dan daerah, untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut agar segera terselesaikan.

99. - Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM agar menjadikan model bisnis KITB tidak hanya dibangun di Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lainnya.
    - Pemerintah ingin membangun ekosistem besar dari hulu sampai hilir untuk industri mobil listrik, mulai dari penambangan nikel, smelter, refinery, industri katode dan prekursor, litium baterai, EV battery-nya, mobil listrik, hingga industri recycle baterai listrik.

100. Pada Keterangan Pers usai melakukan pelepasan tukik penyu ke laut dan transplantasi terumbu karang guna menjaga ekosistem laut di Kabupaten Wakatobi, yang di sekitarnya terdapat taman nasional seluas 1,3 juta hektare, Presiden menyampaikan harapan agar kegiatan serupa juga dilakukan di daerah lain agar kelestarian dan ekosistem sumber daya laut Indonesia dapat terus terjaga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menggerakkan organisasi masyarakat pecinta lingkungan hidup.

101. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah, baik pusat maupun daerah, utamanya terkait adanya persoalan spesifik terkait penerbitan sertifikat di pulau- pulau kecil, agar: pertama, saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat; kedua, komitmen untuk tidak lagi memberikan toleransi bagi terjadinya kerugian negara atau kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral.

102. Akan membangun tiga puluh nursery serupa dengan Persemaian Rumpin dengan kapasitas produksi sebanyak 360 juta bibit per tahun hingga tahun 2024 untuk selanjutnya didistribusikan dan ditanam pada lahan kritis, daerah rawan bencana longsor, dan Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti yang telah dilakukan di kawasan aliran Sungai Ciliwung;

    Berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan delapan nursery pada tahun 2022 sebagai wujud konkret upaya perbaikan lingkungan;

    Berkomitmen untuk merehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove yang tersebar di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali;

    Menginstrusikan Menteri LHK untuk selalu melakukan aksi- aksi konkret dan terkalkulasi dalam upaya perbaikan lingkungan.

103. Selain itu, juga merehabilitasi hutan mangrove yang rusak dengan membangun pusat mangrove dunia dalam waktu tiga tahun ke depan untuk lahan seluas 600 hektare, yakni di Teluk Pulau Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Provinsi Bali.

104. Penguatan kerja sama perubahan iklim, di antaranya dengan mengajak Jerman menjadi mitra Indonesia dalam mengolah potensi-potensi sumber-sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia;

105. Pada peninjauan proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna'a, Presiden menyampaikan:
    - perintah agar peningkatan struktur jalan dan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Nias Utara, yang tersisa 16 kilometer, dapat selesai pada tahun 2023 sedangkan untuk poros jalan provinsi akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Utara;
    - kepada Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan membantu pembangunan poros jalan kabupaten mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara;

    harapan agar pembangunan jalan tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di pulau Nias, yaitu: pertama, meningkatkan daya saing komoditas daerah, seperti kelapa dan ikan; dan kedua, menunjang industri pariwisata di mana pulau Nias sangat diminati untuk olahraga selancar.

106. Pemerintah akan segera membangun tanggul guna mengatasi banjir rob setelah proses lelang selesai.

107. Presiden menyampaikan:
    - komitmen akan terus mendorong akselerasi kemudahan perizinan hingga mencapai seratus ribu NIB per hari;
    - kepada kepala daerah agar mendorong pelaku UMKM di daerahnya untuk memiliki NIB.

    Presiden mendorong kepada seluruh pelaku UMKM untuk meminta bantuan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, atau Dinas Perindustrian terkait kemudahan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sertifikasi halal, dan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

108. memperkuat konektivitas, baik darat maupun laut, yakni: pertama, harapan untuk segera meluncurkan trayek bus rute Kupang-Dili; dan kedua, pentingnya membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin;

109. Menteri Perhubungan diharapkan dapat menyelesaikan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Komodo paling lambat tahun 2023 sehingga pesawat berbadan lebar (wide body aircraft) dari mancanegara dapat langsung mendarat di Labuan Bajo.

110. Pemerintah menetapkan: pertama, target minimal satu juta kunjungan wisatawan untuk tahap pertama, sesuai dengan kapasitas bandara; dan kedua, menjadi 1,5 juta wisatawan setelah penyelesaian perpanjangan landasan pacu (runway) bandara untuk mengakomodir pendaratan pesawat berbadan lebar (wide body).

    Memperhatikan masukan dari para pegiat lingkungan, Pemerintah telah menetapkan: pertama, pulau Komodo dan pulau Padar sebagai kawasan konservasi Komodo sehingga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi; dan kedua, pulau Rinca sebagai kawasan wisata, sehingga bagi wisatawan dapat berkunjung ke pulau Rinca tanpa ada perubahan tarif.

    Pemerintah berkomitmen untuk dapat segera meresmikan lima KSPN lainnya dengan tetap membuka kemungkinan pembangunan kembali apabila dirasakan kurang dengan tetap memperhitungkan return bagi negara.

    Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Pemerintah Daerah agar secara bersama-sama mengelola kawasan Labuan Bajo dengan baik, misalnya terkait pengelolaan sampah, guna menarik wisatawan untuk datang kembali ke Labuan Bajo.

112. Pemerintah masih berupaya untuk membangun dan memperlebar jalan meskipun berbagai upaya penataan telah dilakukan dan membawa banyak perubahan dibandingkan tahun 2015, di antaranya pemindahan pelabuhan sejauh 15 kilometer dari Kawasan tersebut.

    Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bupati Manggarai Barat agar memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha homestay mengenai pemeliharaan termasuk pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

    Pemerintah akan melanjutkan pengembangan konsep penataan kampung di Likupang, Borobudur, dan Toba.

    Meminta agar mempercepat penyelesaiannya proyek strategis nasional diantaranya MRT Jakarta, Kawasan Industri di Papua Barat, perluasan Pelabuhan dan akses Jalan tol Patimbang, dan kelanjutan proyek Gas Masela.

    Percepatan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia melalui advokasi innovative technology, seperti teknologi hidrogen dan ammonia;

113. Investasi Jepang diharapkan dapat mempertimbangkan competitiveness-nya sehingga dapat bersaing dengan investor lain.

114. Pemerintah bertekad untuk meneruskan kebijakan hilirisasi setelah nikel, yakni timah dan bauksit, yang dapat dikerjakan oleh BUMN bekerja sama dengan swasta atau mitra dari luar negeri dalam rangka transfer teknologi.

115. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar memperlebar akses jalan dari dan menuju pelabuhan.

116. Penyelesaian pembangunan 29 bendungan besar dari total 38 bendungan yang sedang dalam tahap pembangunan atau target 61 bendungan ditambah 4.500 embung pada tahun 2024

117. Presiden menyampaikan agar Revitalisasi TMII dapat diselesaikan pada akhir tahun 2022.

118. Pemerintah tengah berupaya untuk:
membangun fondasi berupa infrastruktur selama tujuh tahun terakhir, baik berupa pembangunan jalan tol sepanjang 2.040 km, 16 bandara baru dan 18 pelabuhan, dan 38 bendungan pada akhir tahun 2022.

melaksanakan kebijakan hilirisasi nikel dan akan dilanjutkan pada komoditas bahan mentah lainnya, seperti hilirisasi timah pada tahun 2022, bauksit pada tahun 2023, dan hilirisasi tembaga pada tahun 2024;

119. Dengan adanya Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region (FIR), Presiden mengharapkan agar: pertama, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak; dan kedua, menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia.

120. Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 km yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) kedua, diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2023.

121. Terkait dampak pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing bagi Pelabuhan Patimban, Presiden juga mengharapkan: pembangunan tol menuju pelabuhan Patimban dapat selesai pada tahun 2024;

terjadinya kompetisi yang sehat antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban sehingga pelayanan akan jauh lebih baik dengan tidak adanya monopoli.

122. Mengingat besarnya potensi aspal di Kabupaten Buton yang mencapai 662 juta ton, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar:
- mengembangkan industrial down streaming atau hilirisasi di wilayah tersebut sehingga tidak hanya mengambil raw material tanpa adanya nilai tambah;
- melaksanakan kebijakan penghentian impor aspal dalam dua tahun ke depan agar kegiatan produksi aspal mulai dilakukan di Kabupaten Buton;
- melaksanakan kegiatan produksi dapat dikerjakan oleh BUMN, swasta, ataupun melalui skema kerja sama dengan luar negeri;
- membangkitkan Kabupaten Buton sebagai industri penghasil aspal, bukan hanya tambang aspal.

123. Meningkatkan ketahanan energi dari energi B30 menjadi B40.

124. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mengaudit bangunan terhadap seluruh stadion yang digunakan kejuaraan sepak bola nasional, baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3.

125. Presiden juga menyampaikan apresiasi dan kesan dari para kepala Negara/Pemerintahan G20 yang mengunjungi Tahura Ngurah Rai yang dapat menampung enam juta bibit mangrove, sebagai salah satu dari lima lokasi lain yang telah selesai, dari target keseluruhan sebanyak 33 lokasi.

Sejalan dengan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musibah tersebut merupakan siklus gempa 20 tahunan,

126. Presiden menekankan bahwa pembangunan rumah-rumah yang terdampak gempa tersebut diwajibkan untuk menggunakan standar bangunan antigempa dari Kementerian PUPR.

127. Membangun infrastruktur, mulai dari pembangunan DAM untuk suplai air baku yang ditargetkan selesai pada bulan Januari 2023, membangun kawasan inti, membangun Dayak Center sesuai permintaan Suku Dayak yang akan segera ditentukan lokasinya, hingga membangun kementerian serta Istana Presiden dan Wakil Presiden yang juga akan dimulai pada bulan Desember 2022.

128. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera merehabilitasi bangunan SDN Sukamaju 1 yang rusak akibat gempa bumi dalam kurun waktu tiga bulan sehingga anak-anak dapat segera kembali belajar dengan layak.

129. Pemerintah akan menyelesaikan target pembangunan 60 bendungan di seluruh Tanah Air sampai tahun 2024.

130. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar lebih fokus terhadap dua hal, yaitu:
- pengelolaan sampah, mengingat belum ada daerah di Indonesia yang mampu menangani permasalahan sampah hingga tuntas;
- kehutanan, yakni dengan rehabilitasi lahan mangrove mengingat hutan mangrove dapat mereduksi kerusakan lingkungan delapan hingga dua belas kali lipat dari hutan biasa.

membantu daerah yang memiliki komitmen pada upaya rehabilitasi mangrove melalui BPDLH, misalnya dengan memberikan bantuan biaya untuk penanaman dan pemeliharaan bagi provinsi yang telah menyiapkan Nursery Center.

131. 1. manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta;

2. pembangunan tanggul laut maupun tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mencegah intrusi laut;

3. penyelesaian pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT) pada bulan Maret 2023.

4. normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta secara konsisten;

132. Terkait peresmian Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, Presiden menginstruksikan untuk:
1. menyelesaikan sodetan dari sungai Ciliwung ke BKT pada bulan Maret 2023;
2. melakukan sungai di konsisten; normalisasi 13 Jakarta secara;
3. segera melakukan kalkulasi dan mulai pembangunan tanggul laut raksasa, giant sea wall, untuk mencegah intrusi air laut.

133. Setelah tahap I diselesaikan, pembangunan tahap II ditargetkan selesai pada tahun 2024-2025.

134. LRT tersebut diharapkan sudah dapat beroperasi pada bulan Juni s.d. Juli 2023 bersamaan dengan operasional kereta cepat.

2023

135. Melanjutkan lingkar Pekanbaru sehingga ruas Dumai-Pekanbaru- Bangkinang dapat tersambung untuk kemudian dilanjutkan ke Padang.

136.. Direktur Utama PT Pertamina agar menerapkan manajemen serupa di Blok Mahakam. Hal ini terkait dengan tugas PT Pertamina dalam menyediakan 70% produksi minyak nasional.

137. Akan meningkatkan kapasitas SPAM Durolis agar dapat menambah jangkauan suplai air minum ke lebih banyak rumah tangga.

138. Untuk menarik lebih banyak lagi turis, baik dari Eropa dan Asia, misalnya dari Tiongkok, Jepang, dan dari Korea, yang akan berlibur ke Likupang akan memperbanyak jumlah hotel baik bintang empat, bintang tiga, resort, maupun hotel bintang lima.

Pembangunan proyek Kawasan Wisata Likupang dapat ditargetkan selesai dan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun 2023.

139. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat melanjutkan proyek penataan Kawasan Pantai Malalayang.

140. Melanjutkan pembangunan sodetan kali Ciliwung sepanjang 1,3 km.

141. Menghentikan ekspor tembaga pada tahun 2023 mengingat perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia dan smelter di NTB sudah mencapai lebih dari 50%.

142. Melanjutkan pembangunan jalan tol lingkar Pekanbaru, Muara Fajar, untuk menghubungkan Dumai-Pekanbaru-Bangkinang dan kemudian dilanjutkan menuju Padang, Sumatera Barat.

143. Pemerintah berkomitmen akan membangun rumah kreatif di Banda Aceh dengan estimasi biaya sebesar Rp150 miliar sebagai tempat perekaciptaan animasi, konten kreator, fintech, dan industri kreatif lainnya.

144. Dalam setahun dua tahun kedepan akan ada perubahan yang signifikan yakni: pertama, akan dilakukan penataan Lapangan Merdeka, penataan Kesawan mengisi berbagai kegiatan yang menjadikan landmark kota Medan

145. Mendorong pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir salah satunya dengan pemberian insentif.

Berpihak pada pembangunan transportasi massal, seperti MRT, LRT, kereta api, dan kereta api cepat. Integrasi moda transportasi di dalam kota maupun dari kota ke kota merupakan sebuah keharusan bagi kota-kota besar.

146. Pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung hanya menyisakan sekitar 17 kilometer dan ditargetkan selesai akhir tahun 2024.

Pemerintah berkomitmen untuk menormalisasikan 12 sungai guna mengurangi risiko banjr di Jakarta.

147. Usai meninjau Proyek Jalan Tol Kawasan Inti IKN- Balikpapan, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol dengan jarak kurang lebih 40 kilometer yang diharapkan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

Merespons pertanyaan terkait pembebasan lahan, Presiden menegaskan sudah tidak ada kendala, tinggal melakukan proses pembayaran pada bulan Maret 2023.

148. Pada sesi dialog dengan perwakilan penerima SK, Presiden menyampaikan: instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memberikan bantuan berupa bibit tanaman alpukat kepada penerima SK

komitmen bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan memfasilitasi perbaikan jalan menuju camping ground yang sering dimanfaatkan para pelajar untuk melaksanakan kegiatan perkemahan.

149. Arahan Presiden kepada para Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, melalui:
   - permudah pemberian izin acara seni dan olahraga;
   - promosikan wisata daerah agar masyarakat datang ke tempat wisata untuk membelanjakan uang;
   - dorong UMKM untuk berjualan di tempat wisata.

2. hilirisasi produk tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), tetapi juga pada sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

150. Terkait kebun binatang, Presiden belum menyampaikan arahan, namun yang paling penting adalah proteksi Orang Utan dan Monyet Bekantan serta Bendungan Sepaku agar dapat menjadi wisata alam

151. Menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk segera menyambungkan dan mengintegrasikan jalan tol dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayah masing-masing, baik dengan kawasan industri, kawasan pertanian dan perkebunan, serta kawasan pariwisata agar manfaat jalan tol dapat memberikan kecepatan, efisiensi, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

152. Terus memperbaiki infrastruktur di wilayah Danau Toba, seperti jalan dan apron bandara, meskipun membutuhkan proses dan waktu.

153. Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mencari jalan keluar atas keluhan para nelayan mengenai:
   - kuota solar bersubsidi yang tidak mereka dapatkan
   - peremajaan alat tangkap dan menyiapkan motor dengan kekuatan 15 PK

154. Diharapkan, sistem yang diterapkan pada TPST Kesiman Kertalangu, dapat diterapkan juga pada kota dan kabupaten lain di seluruh Tanah Air agar tidak kembali terjadi permasalahan dalam penanganan sampah.

155. Sebagai upaya terhadap penggalakkan belanja produk dalam negeri pada instansi Pemerintah, melalui penerapan mekanisme reward and punishment:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menambah faktor tingkat belanja produk dalam negeri pada sistem pemberian tunjangan kinerja (tukin);

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar merumuskan sanksi bagi jajaran yang masih membeli produk impor dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN.

156. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menyelenggarakan street carnival pada Juli 2023 di Kota Jayapura guna mengangkat potensi besar di bidang desain untuk tidak hanya diperkenalkan kepada masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat Indonesia dan masyarakat luar.

157. • Pemerintah telah menampung aspirasi dan berkomitmen untuk segera mencari solusi bagi para nelayan.
• Presiden telah menginstruksikan Kepala Kepolisian Daerah setempat agar mengantisipasi terjadinya gesekan terkait konflik antarnelayan yang berbeda wilayah dan mengingatkan mengenai pentingnya menjaga persaudaraan di antara sesama nelayan.

158. Presiden menyampaikan:
• komitmen untuk mengembangkan hunian milenial serupa di seluruh kota yang memiliki TOD, terutama pada lahan-lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tidak dimanfaatkan dengan baik;
• PT KAI PT Pembangunan Perumahan (PP), Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun hunian dengan konsep serupa.

159. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera mengambil alih perbaikan jalan bilamana provinsi atau kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki jalan yang rusak parah.

160. Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran khusus untuk Pemerintah Provinsi Lampung kurang lebih sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan termasuk jalan di Kabupaten Lampung yang sekarang rusak. Presiden telah memerintahkan Menteri PUPR untuk segera melakukan proses lelang agar perbaikan jalan dapat dimulai pada bulan Juni 2023.

161. • Mulai bulan Juli dan Agustus 2023 Pemerintah akan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang megalami kerusakan, termasuk jalan kabupaten dan jalan provinsi di Provinsi Jambi.
• Tidak hanya akan melakukan perbaikan ruas jalan di Provinsi Jambi, tetapi juga di provinsi-provinsi lain yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik.
• akan membantu mengakselerasi pengerjaan perbaikan jalan yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu dua hingga tiga tahun.
• akan segera memulai pembangunan jalan khusus bagi pengangkut batubara. Untuk itu, menginstruksikan Gubernur Jambi agar pembangunannya dapat diselesaikan secepatnya, baik dengan pola investasi ataupun pola lainnya.
• Jalan tol yang melintasi Provinsi Jambi ditargetkan selesai pada tahun 2024.

162. Terkait pembangunan Jembatan Kretek 2 yang merupakan rangkaian dari penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa dan pembangunannya dimulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur pulau Jawa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menyelesaikan pembangunannya pada tahun 2023.

163. Perkembangan pembangunan smelter di PT Amman dan PT Freeport yang diharapkan akan memberikan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah tembaga menjadi katoda tembaga ditargetkan selesai pada bulan Mei 2024.

164. Presiden ingin memastikan bahwa progres pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sesuai dengan rencana dan selesai pertengahan tahun 2024.

165. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia prosesnya telah mencapai 72 persen sehingga diharapkan dapat selesai sebelum bulan Mei 2024.

166. Keputusan terkait tambang Vale akan disampaikan pada bulan Juli, intinya bahwa kepentingan nasional harus diprioritaskan dengan tidak merugikan investor, kedua bela pihak harus berjalan dengan baik, dan yang terpenting industrialisasi betul-betul harus berjalan.

167. Kerja sama terkait penguatan konektivitas dan isu perbatasan, yakni: pertama, kesepakatan untuk membuka rute pelayaran PNG Express dan rute penerbangan Citilink Denpasar- Port Moresby; dan kedua, ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangement dan pembukaan kembali pos lintas Skouw-Wutung.

168 BIJB Kertajati akan beroperasi secara penuh mulai bulan Oktober 2023 dengan memindahkan aktivitas dari Bandara Husein Sastranegara menuju BIJB Kertajati, utamanya untuk yang pesawat berjenis jet, dan maksimal dalam kurun waktu satu tahun bagi pesawat yang berbasis baling-baling

169. • Jalan Tol Ruas Bengkulu- Taba Penanjung akan segera disambungkan sampai Lubuk Linggau atau sepanjang 95 kilometer.
• Komitmen untuk melanjutkan tahap kedua pembangunan ruas jalan tol tersebut meskipun dengan mempertimbangkan ketersediaan APBN dan keberlanjutan proyek jalan tol di provinsi lain serta terdapat proses hukum atas pembebasan lahan.
• Komitmen untuk menganggarkan dana sebesar Rp.400 miliar untuk perbaikan delapan ruas jalan di wilayah Bengkulu.

170. • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah akan mengintervensi perbaikan jalan provinsi dan jalan Kabupaten yang saat ini masih tengah dikerjakan, yakni sebesar Rp327 miliar untuk delapan ruas yang ada di Provinsi Bengkulu dan terbuka kemungkinan untuk terus bertambah.
• Komitmen memperbaiki jalan tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, tetapi telah berjalan di 32 provinsi pada akhir Juni.

171. Melakukan aksi pencegahan banjir pada 12 sungai lain di Jakarta, baik Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervaart, Sungai Pesanggrahan, dan lainnya.

Komitmen untuk menangani permasalahan banjir rob yang naik ke daratan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Pemprov DKI Jakarta terus berkolaborasi menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta yang kompleks dan tidak mudah.

172. Terkait hilirisasi, menyadari bahwa kaya Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup, melainkan harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya dan mampu memberikan nilai tambah, untuk itu Pemerintah tetap:

melaksanakan hilirisasi dengan mengupayakan transfer teknologi, memanfaatkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), dan meminimalkan dampak lingkungan, misalnya dengan upaya mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan guna menghutankan kembali lahan pascapenambangan;.

173. Peningkatan investasi di Kenya, terutama pada sektor energi sehingga diharapkan investasi Pertamina dengan Geothermal Development Company dan Guma Group senilai 1,5 miliar USD dapat segera terealisasi, bahkan diperluas ke sektor Energi Baru Terbarukan (EBT);

174. Terkait kerusakan jalan nasional di kilometer 171, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kaimantan Selatan, Presiden menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengidentifikasi tingkat kerusakan jalan nasional di seluruh wilayah, termasuk di wilayah Tanah Bumbu. Sebagian perbaikan jalan akan dilaksanakan mulai tahun 2023 dan sebagian akan dimulai pada tahun 2024.

175. Komitmen akan menindaklanjuti hilirisasi untuk komoditas lain, seperti timah, tembaga, bauksit, dan batu bara, hingga Minyak Kelapa Sawit Mentah (crude palm oil/CPO) perikanan, serta rumput laut.

176. Terkait para penyintas bencana yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap), Presiden menyampaikan:
• penjelasan bahwa, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan swasta, Pemerintah telah membangun ribuan huntap;
• komitmen untuk memastikan jumlah unit yang belum terbangun ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kemudian melanjutkan proses pembangunan huntap.

177. Terus mengawasi sistem dan jalur distribusi dan segera memperbaiki bilamana terdapat jalan yang rusak atau melaporkan kepada Pemerintah Pusat apabila dirasa anggaran di daerahnya tidak mencukupi untuk segera melakukan perbaikan jalan rusak. Hal ini mengingat Pemerintah Pusat, melalui Menteri Keuangan, telah mangalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak mencapai Rp34 triliun;

178. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan kereta cepat mulai awal Oktober 2023 meskipun penentuan dimulainya operasional akan diputuskan oleh manajemen Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

179. Pemerintah agar mendorong para pegiat lingkungan, ketua adat, kelompok perhutanan sosial, dan penyuluh untuk menggiatkan kembali rehabilitasi hutan pada musim hujan.

para perusahaan tambang agar memperbaiki lahan bekas tambang dan harus memiliki pusat persemaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yang baru. Terkait hal ini, Presiden menegaskan akan mengecek satu per satu perusahaan tambang yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Presiden mengajak para nelayan dan pegiat lingkungan untuk menanam mangrove di wilayah pesisir

180. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan komitmen Pemerintah, setiap perusahaan tambang wajib memiliki persemaian untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak dengan merehabilitasi hutan, baik hutan alam, tropical rainforest, dan hutan mangrove

181. Pembangunan jalan tol untuk mempersingkat waktu tempuh Balikpapan-Nusantara, yakni 30 menit dari yang sebelumnya memakan waktu 1,5 hingga 2 jam, sudah sampai pada tahap konstruksi yang ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2024

182. Pemerintah mendorong untuk mencari langkah konkret di tengah ancaman perubahan iklim, yakni:
    - menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk bertransaksi sehingga menjadi efektif dan efisien
    - memiliki target dan timeline untuk pasar dalam negeri sehingga dapat segera masuk ke pasar internasional
    - mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional, serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia

183. Presiden menekankan bahwa hanya Indonesia yang memiliki pendanaan pembangunan dan pengoperasian tiap transportasi publik dilakukan dengan skema berbeda-beda, seperti pendanaan dan konstruksi MRT dengan Jepang dan Light Rail Transit (LRT) dengan PT Industri Kereta Api (INKA) dan PT Wijaya Karya (WIKA). Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mengintegrasikan kereta cepat dengan transportasi publik lainnya, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, moda transportasi bandara, Kereta Rel Listrik (KRL), hingga moda aplikasi

    Presiden menjelaskan studi pengembangan Kereta Cepat Surabaya-Bandung (KCSB) yang melibatkan pemrakarsa diharapkan segera selesai dalam kurun waktu dua minggu. Dari hasil studi tersebut Setelah itu, prosesnya berlanjut pada studi yang dilakukan otoritas terkait di pemerintahan.

184. Dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi di bidang perumahan, Pemerintah berupaya untuk memberikan insentif pada:
    - pembangunan perumahan, utamanya sektor properti mengingat terdapat 114 komoditas yang dapat meningkat pertumbuhannya,
    - pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penghapusan uang administrasi hingga Rp4 juta untuk perumahan yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

185. Perbaikan rekonstruksi jalan di Lampung diharapkan akan selesai pada bulan Desember yang akan datang.

186 Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam skala besar dengan potensi energi hijau Indonesia yang kaya, yang berdasarkan perhitungan mencapai 3.600 gigawatt, yang bersumber dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, bioenergi, dan hydropower.

187. Rencana investasi dari Persatuan Emirat Arab agar dapat dikolaborasikan dengan investor dari dalam negeri.

188. Terkait progres pembangunan Tol Balikpapan-Nusantara, Presiden menjabarkan bahwa:
    - Infrastruktur tol sudah hampir mencapai 55 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada bulan Juni 2024
    - Pemerintah akan menghijaukan Tol Balikpapan-Nusantara dengan 60 ribu pohon endemik Kalimantan yang sudah ada stoknya, bukan berasal dari Persemaian Mentawir, yang rencananya akan ditanam di sisi sebelah kanan dan kiri tol.

189. PLTS Terapung Cirata ditargetkan pada tahun 2024 dapat menyumbang 23% bauran EBT di Indonesia dan kapasitas produksi akan terus ditingkatkan hingga lebih kurang 500 MWp

190. Tiga TPA sampah modern, yakni TPA Supit Urang, TPA Jabon, dan TPA Banjardowo agar dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada dan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan kesehatan masyarakat semakin meningkat
191. Pemerintah akan membangun pembangkit listrik serupa dengan PLTS terapung Cirata di kota-kota lain, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga
192. Indonesia berkomitmen untuk bekerja keras mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih awal.
193. Bendungan Mbay yang mulai dibangun di akhir tahun 2021, diharapkan dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2024
194. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar ikut membantu penataan kota di Kota Kupang, baik di Kelapa Lima, Oesapa, hingga Kota Lama, yang akan ditata, dibangun, dan diperbaiki, sehingga Kota Kupang semakin hijau serta memiliki tata kota dan pelayanan publik yang baik.
195. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelesaikan sambungan rumah tangga yang belum tersambungkan dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng.
    - Tujuh waduk diharapkan segera selesai pada tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
196. Para kepala daerah diharapkan dapat segera mengejar peluang investasi green economy dan blue economy. Ke depan, investasi di bidang geotermal, solar panel power plant, dan hydro power merupakan investasi yang sangat menjanjikan.
197. Presiden menyampaikan bahwa tidak hanya tembaga, nikel, bauksit, dan timah yang dihilirisasikan, namun juga bahan- bahan selain bahan mineral, agar memberikan nilai tambah bagi Indonesia, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, baik di perkebunan, pertanian, hingga perikanan.
198. Pemerintah akan memprioritaskan investor dalam negeri selama minat investor dalam negeri masih tinggi
199. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar memperbaiki kembali dan memperhalus kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun depan.

2024

200. Menteri Perhubungan agar memperhatikan kondisi terminal bus di kota-kota lain dan memperbaiki terminal-terminal tersebut, sehingga semua kota di seluruh Tanah Air memiliki fasilitas terminal yang bagus dengan standar bangunan yang sama.
201. Menteri PUPR agar mengecek dan menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung baru Kampus II UMP, sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan tidak bertambah dari Rp200 miliar menjadi Rp400 miliar.
202. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II paling lambat pada kuartal II 2024.
203. Presiden mencanangkan SPAM Semarang Barat ini sebagai pilot project pembangunan sistem pengelolaan air perpipaan dan rujukan untuk pembangunan SPAM di kota lain.
204. Pemerintah akan meningkatkan jumlah investasi untuk Makassar New Port hingga mencapai angka Rp10 triliun
    - Terkait rencana untuk mengubah pelabuhan Makassar yang lama menjadi pusat kota atau city center, Pemerintah akan membahas rencana tersebut bersama dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar, mengingat lokasi pelabuhan yang strategis berada di pusat kota akan memberikan nilai tambah bagi Kota Makassar.
205. Akan menambah alokasi anggaran perbaikan jalan sehingga jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi yang baik dan dapat memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi.
206. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol dan bandara baru di IKN yang diperkirakan selesai pada Juli 2024, akan mempersingkat waktu tempuh Balikpapan-IKN dari 1,5-2 jam menjadi hanya sekitar 45 menit dan perjalanan dari bandara baru ke IKN hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit.

207. Untuk mendukung IKN menjadi pusat ecotourism dengan konsep tropical rain forest, Pemerintah telah menyiapkan Persemaian Mentawir yang dapat memproduksi sekitar 15 juta bibit tanaman setiap tahun.

208. Presiden berharap target pembangunan jalan tol Balikpapan ke IKN yang akan mempersingkat waktu tempuh menjadi hanya sekitar 40-45 menit selesai pada Juli 2024.

209. Presiden menyampaikan pembangunan jalan tol dan bandara baru di IKN akan selesai pada Juli 2024. Kehadiran jalan tol tersebut akan mempersingkat waktu tempuh Balikpapan ke IKN menjadi sekitar 40-45 menit. Sedangkan perjalanan menuju IKN dari bandara baru hanya memerlukan waktu 15 menit.

210. Sementara itu, terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Presiden menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga dan penjelasannya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau PT Pertamina (Persero).

211. Akan melanjutkan pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024

212. Menteri Perhubungan agar menyiapkan pesawat dengan tujuan penerbangan ke Bandara Singkawang setelah bandara siap sehingga semakin banyak airline yang datang ke Singkawang

213. Presiden menyampaikan untuk rumah dan bangunan sekolah yang rusak karena banjir akan dilakukan pengecekan di lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

214 Rakyat bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara, untuk tanaman warga yang rusak akan diberikan bibit oleh Kementerian Pertanian.

215. Pembangunan jalan daerah serupa akan dilaksanakan di provinsi yang lain dan akan mengecek semua pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan daerah tersebut.

216. Presiden memerintahkan agar runway dapat diperpanjang lagi tahun 2024 atau paling lambat tahun 2025, sehingga pesawat jenis ATR full dapat masuk ke Bandar Udara Panua Pohuwato. Dengan demikian, perekonomian di Pohuwato diharapkan dapat lebih berkembang dan dapat muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

    Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki konstruksi yang rusak di RSUD Kondosapata.

217. Presiden memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk memberikan prioritas terkait pembangunan Inpres Jalan Daerah. Pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan proyek pembangunan di daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah pusat karena Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun pada 2024 untuk pembangunan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dan telah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk proyek sambungan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan air baku masyarakat.

218. Presiden akan menyiapkan di APBN 2025-2026 dan akan mengusulkan kepada Pemerintah yang baru untuk dapat menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak di Pantura yang membutuhkan anggaran sebesar Rp13 triliun, apabila pembangunan tersebut sangat kayak.

219. Presiden telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan-jalan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat melalui dana Inpres Jalan Daerah (IJD) karena alokasi anggaran nasional untuk IJD naik menjadi Rp15 triliun di tahun 2024.

220 Presiden menjelaskan bahwa Indonesia secara konsisten terus mendorong tiga hal upaya menjaga sumber daya air yang ada dan mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi, yakni:
    a. meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air;
    b. memberdayakan diplomasi air (hydro diplomacy) untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas;c. memperkuat kepemimpinan politik (political leadership) sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

221, Presiden menyampaikan dalam waktu beberapa bulan kedepan, pengambilalihan saham Freeport akan bertambah 10% menjadi 61% dengan perkiraan pemasukan ke kas negara dari Freeport sebesar 70-80% dalam bentuk royalti, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh karyawan, dan bea ekspor.

    Presiden menjelaskan bahwa pembayaran untuk pengambilalihan saham Freeport akan selesai pada tahun 2024.

222. Presiden menyampaikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Bangkinang-Pangkalan Tahap 1, yaitu seksi Bangkinang -XIII Koto Kampar sepanjang 24,7 kilometer setiap tahun akan terus tersambung dari Kota Pekanbaru sampai ke Kota Padang.

223. Presiden berpesan kepada Gubernur Provinsi Riau, para bupati, dan wali kota agar jalan tol yang sudah selesai direncanakan dan didesain untuk disambungkan ke kawasan-kawasan produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga mempercepat mobilitas orang serta barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan manfaat yang nyata dari kehadiran jalan tol tersebut dan dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

224. Presiden menargetkan produksi minyak di Blok Roka, Kota Dumai dapat di atas 200 ribu barel per hari. Untuk mencapai target tersebut, Pertamina telah menggunakan teknologi baru pada satu sumur yang dimiliki sehingga ke depan teknologi baru tersebut juga akan dikembangkan di sumur-sumur lain yang dipilih guna meningkatkan produksi minyak yang dihasilkan.

225. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membangun persemaian besar yang diperlukan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara serta wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya.

226. Presiden menargetkan agar pembangunan jalan tol dan bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai pada awal Agustus 2024.

227. Pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 80%. Interior, eksterior, dan sambungan air bersih masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan selesai pada pertengahan bulan Juli

228. Pemerintah menargetkan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob serta Penataan Kawasan Kampung Nelayan selesai pada Agustus 2024 berjalan baik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk membangun proyek sejenis di wilayahnya.

229 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menindaklanjuti pembangunan jalan Kereng Pakahi-Kampung Melayu sepanjang sekitar 80 km yang terkendala oleh anggaran yang kurang mencukupi.

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL **(PSN)**

2020

1. Jalan Tol Pandaan – Malang
2. Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera
3. Pelabuhan KEK Maloy
4. Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo
5. Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)
6. Kawasan Industri Konawe
7. Bendungan Tukul
8. Bendungan Tapin
9. Bendungan Napun Gete
10. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan
11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung

2021

12. Jalan Tol Manado – Bitung
13. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda
14. Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera
15. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper – Kunciran
16. Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
17. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong
18. Pengembangan Pelabuhan Kupang
19. Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo
20. Kawasan Industri Morowali
21. Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya
22. Bendungan Kuningan
23. Bendungan Bendo
24. Bendungan Gongseng
25. Bendungan Pidekso
26. Bendungan Tugu
27. Bendungan Karalloe
28. Bendungan Passeloreng
29. Bendungan Bintang Bano
30. Bendungan Way Sekampung
31. Bendungan Ladongi
32. Bendungan Randugunting
33. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat

2022

34. Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan
35. Terminal Multipurpose Labuan Bajo
36. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing
37. Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo
38. Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya
39. Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)
40. Kawasan Industri Weda Bay
41. Kawasan Industri Tanjung Enim
42. Kawasan Industri Terpadu Batang
43. Pembangunan Rumah Susun
44. Bendungan Kuwil Kawangkoan
45. Bendungan Ciawi
46. Bendungan Sukamahi
47. Bendungan Semantok

48. Bendungan Sadawarna
49. Bendungan Beringin Sila
50. Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru

2023

51. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan
52. Jalan Tol Serpong – Cinere
53. Jalan Tol Cinere – Jagorawi
54. Jalan Tol Cibitung – Cilincing
55. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo
56. Pelabuhan Likupang
57. Makassar New Port
58. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung
59. Bandar Udara Kediri
60. Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru
61. Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak
62. Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)
63. Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang (Target Penyelesaian Tahun 2024 hingga Pondok S5)
64. High Speed Railway Jakarta – Bandung
65. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
66. Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati
67. Kawasan Industri Tanjung Sauh
68. Kawasan Industri Motui
69. Bendungan Lolak
70. Bendungan Karian
71. Bendungan Cipanas
72. Bendungan Tamblang
73. Bendungan Tiu Suntuk
74. Bendungan Sepaku Semoi
75. Bendungan Ameroro
76. Proyek Tangguh LNG Train 3

2024

77. Jalan Tol Serang – Panimbang
78. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera
79. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera
80. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera
81. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera
82. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera

83. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera
84. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera
85. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera
86. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera
87. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera
88. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung
89. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang – Padalarang
90. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung
91. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
92. Jalan Tol Serpong – Balaraja
93. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
94. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
95. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
96. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
97. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)
98. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder – Manyar
99. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan
100. Jalan Tol Semarang – Demak
101. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
102. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)
103. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo
104. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)
105. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
106. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA)
107. Pengembangan Pelabuhan Sorong
108. Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu
109. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
110. Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)
111. Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang
112. Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi
113. Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun
114. Double Track Jawa Selatan
115. Kawasan Industri Kuala Tanjung
116. Kawasan Industri Bantaeng
117. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni
118. Kawasan Industri Takalar
119. Kawasan Terintegrasi Bakauheni

120. Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)
121. Kawasan Industri Indonesia Pomala Industry Park
122. Kawasan Industri Kendari
123. Kawasan Industri Pulau Ladi
124. Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park
125. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park (IDIP)
126. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP)
127. Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke
128. Bendungan Marangkayu
129. Bendungan Keureuto
130. Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh
131. Bendungan Leuwikeris
132. Bendungan Tiga Dihaji
133. Bendungan Pamukkulu
134. Bendungan Bener
135. Bendungan Lausimeme
136. Bendungan Sidan
137. Bendungan Marga Tiga
138. Bendungan Bagong
139. Bendungan Bulango Ulu
140. Bendungan Temef
141. Bendungan Way Apu
142. Bendungan Meninting
143. Bendungan Manikin
144. Bendungan Jlantah
145. Bendungan Jragung
146. Bendungan Budong-Budong
147. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci
148. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan
149. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang
150. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase
151. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa
152. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
153. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan
154. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering
155. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur
156. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas
157. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian – Serpong
158. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota

Bengkulu, dan Seluma)

159. Sarana dan Prasarana Air Baku Karian
160. Jakarta Sewerage System (JSS)
161. Tanggul Pantai
162. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM
163. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG
164. Pembangunan Jaringan Gas Kota
165. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai
166. Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim
167. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro
168. Pengembangan Industri Garam

PROYEK PRIORITAS **STRATEGIS NASIONAL (MAJOR PROJECT)**

BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI YANG DISELESAIKAN

1. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
2. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
3. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
4. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
5. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
6. Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas
7. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
8. Destinasi Pariwisata Prioritas.
9. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
10. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
11. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
12. Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga);
13. Pemulihan 4 DAS Kritis;
14. 18 Waduk Multiguna
15. Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;
16. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;

17. Kereta Api Makassar- Pare Pare;
18. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta CepatJakarta-Bandung)
19. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
20. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
21. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
22. Jembatan Udara 37 Rute di Papua
23. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya,Bandung, Medan, Semarang dan Makassar
24. Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27 .OOO Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kmsdan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA)
25. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah;
26. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)
27. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
28. Transformasi Digital
29. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
30. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)

Kemenko Marves Bersama 7 K/L

1 Tanpa Kemiskinan	✓		✓				
2 Tanpa Kelaparan		✓	✓		✓		
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera			✓				
4 Pendidikan Berkualitas			✓				
5 Kesetaraan Gender			✓				
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	✓		✓		✓		
7 Energi Bersih dan Terjangkau	✓		✓				
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		✓	✓			✓	

9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur			✓	✓	✓		✓
10 Berkurangnya Kesenjangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan			✓	✓	✓	✓	
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	✓	✓	✓			✓	
13 Penanganan Perubahan Iklim	✓	✓	✓	✓			
14 Ekosistem Lautan		✓	✓				
15 Ekosistem Daratan			✓				
16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh		✓	✓		✓		
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan		✓			✓		✓

34 DIREKTIF PRESIDEN #1

Dukungan Presidensi G-20
(Keppres No. 18 Tahun 2021)

Sumber Daya Air Nasional
(Keppres No. 53 Tahun 2022)

DAS Citarum
(Keppres No. 53 Tahun 2022)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia–BBI
(Keppres No. 15 Tahun 2021)



Food Estate
(Arahan Presiden, Tahun 2021)



5 DPSP
(Toba; Perpres No. 49 Tahun 2016)



Kawasan Rebana & Jabar Selatan
(Perpres 87 Tahun 2021)



Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
(Perpres No. 98 Tahun 2021)



Satgas Sawit
(Keppres No. 9/2023)



Covid-19 dan PEN
(Perpres No. 108 Tahun 2020)



15 Danau Prioritas Nasional
(Perpres No. 60 Tahun 2021)



Percepatan Program KBLBB
(Perpres No. 55 Tahun 2019)



PEN–ICRG
(PP No. 23 Tahun 2020)



Landas Kontinen Indonesia (TNP–LKI)
(Arahan Presiden Tahun 2021)



Penangan Sampah Laut
(Perpres No. 83 Tahun 2018)



HDCM RI-RRT
(Arahan Presiden dalam SKP, 2021)



Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia – KKI
(Perpres No. 34 Tahun 2022)



Ketua Satgas Penanganan Polisi Udara
(PP No. 22/2021)



Inisisasi Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)



Indonesia Spice Up The World (ISUTW)

34 DIREKTIF PRESIDEN #2

Archipelagic & ISland States Forum

Pembentukan Forum Negara Pulau dan Negara Kepulauan (AIS Forum)

Kereta Cepat Jakarta–Bandung

(Perepres No. 93 Tahun 2021)

SPBE

(Perpres No. 132/2022)



Pendengalian Program Tol Laut

(Perpres No. 27 Tahun 2021)

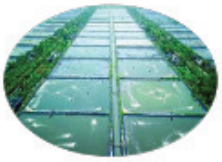


Kebijakan Satu Peta

(Perpres No.23 Tahun 2021)

Afirmasi PDN

(Perpres No. 12/2021)



Revitalisasi Tambak Udang

(Arahan Presiden Tahun 2021)

TP3DN

(Keppres No. 24 Tahun 2018)



Blue Infrastructure Terintegrasi

(Perpres No. 109 Tahun 2020)



MP Jalan Tarans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional

(Perpres No. 109 Tahun 2020)

Geopark

(Perpres No. 9 Tahun 2019)



Minyak Goreng

(Arahan Presiden dalam Ratas)

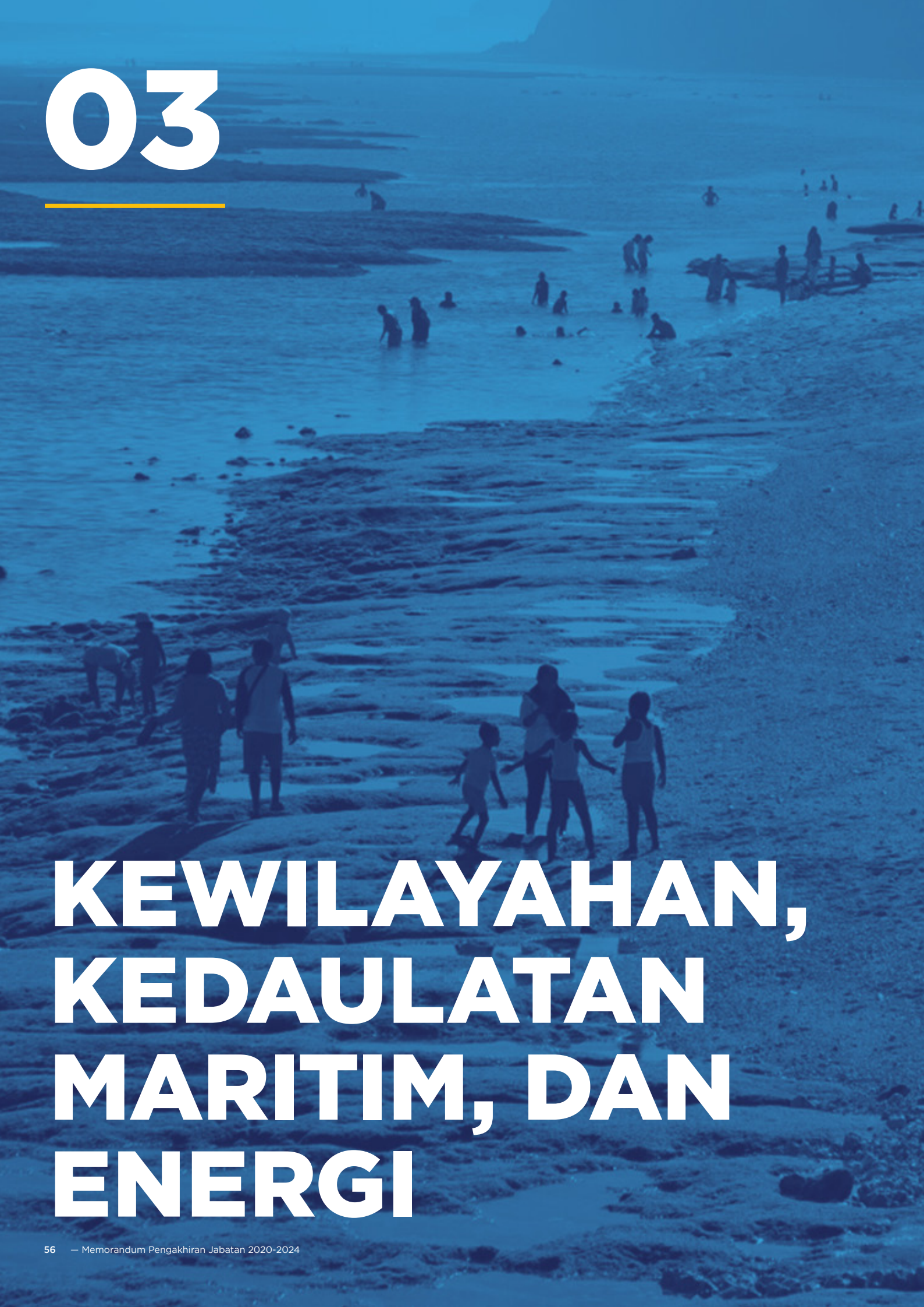


PKM

(Penyakit Kuku dan Mulut)



Online Event



03

KEWILAYAHAN, KEDAULATAN MARITIM, DAN ENERGI

Penjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia – KKI



Foto: KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menyatakan tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana.

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Visi Poros Maritim Dunia, untuk percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia akan menjadi pedoman bagi kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang mensinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Berdasarkan kedua Perpres tersebut Menko Marves ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan Monev KKI, sehingga diwajibkan untuk melakukan laporan progres pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia minimal 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh Bapak Presiden.

KKI ini juga merupakan output laporan yang levelnya di tingkat Menteri, sehingga tanggung jawab kelancaran kegiatan yang ada di dalamnya menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada di Kemenko Marves setidaknya berdasarkan pantauan tematik bidang dan tugas fungsi di masing-masing unit Eselon II, berdasarkan Lampiran Rencana Aksi yang berjumlah 374 aktivitas yang tersebar di 40 Kementerian dan Lembaga.

Kemenko Marves hingga saat ini tetap konsisten dalam melakukan pengawalan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan strategis bidang Kelautan dan Kemaritiman melalui Monev Kebijakan Kelautan Indonesia. Hasil pelaksanaan monev KKI akan dilaporkan ke Presiden.

Sebagai dokumen konsepsi pembangunan maritim nasional KKI telah menjadi masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Peristiwa Penting Kebijakan Kelautan Indonesia

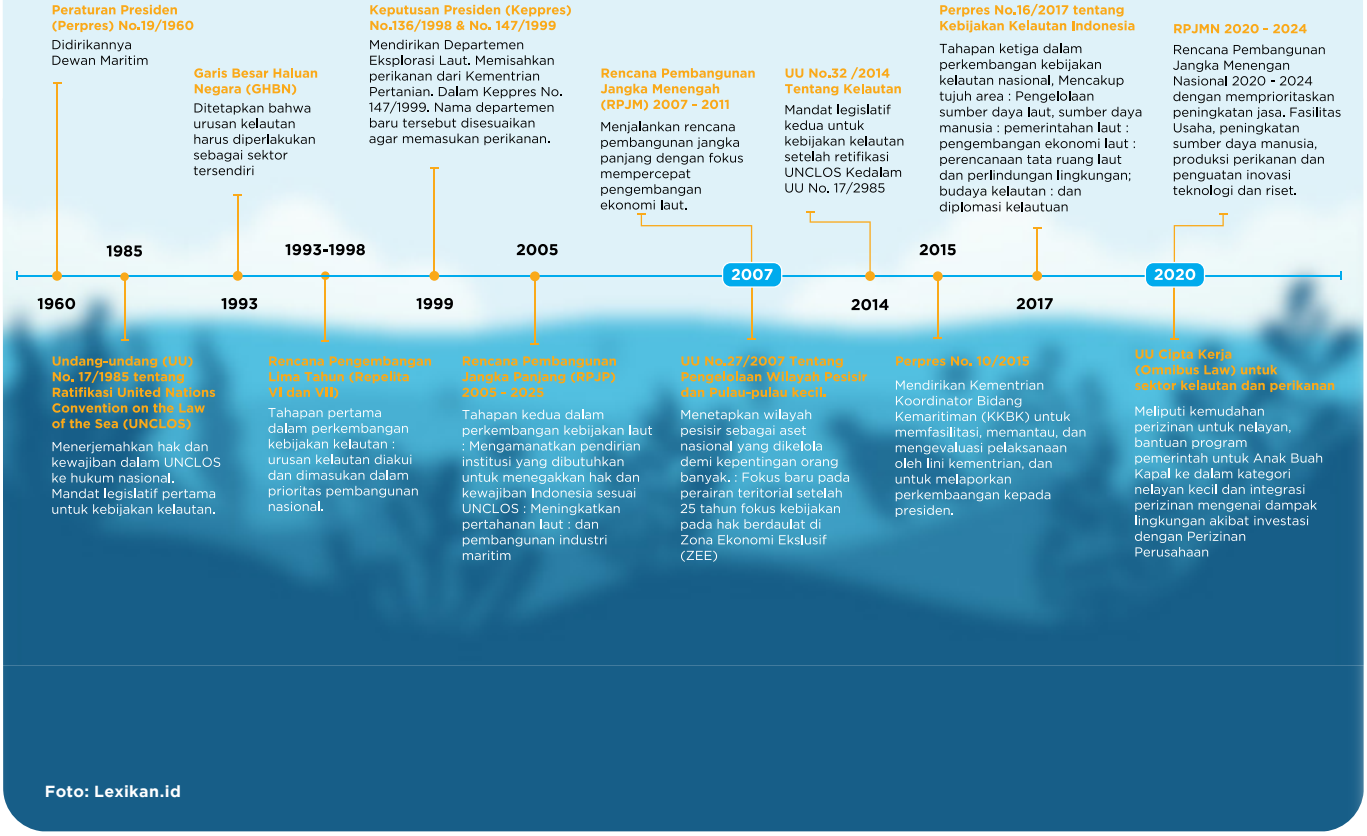


Foto: Lexikan.id

Meneguhkan Pagar Terluar Nusantara

"Good fences make good neighbors" Dalam penyelesaian batas zona maritim Indonesia dengan negara lain, ungkapan ini juga menjadi panduan Kemenko Marves dalam mendorong percepatan penyelesaian batas maritim Indonesia yang belum selesai dengan negara lain.

Penetapan batas maritim antar negara akan memberikan kepastian atas hak pengelolaan sumber daya dari dua negara yang bertetangga dan mendorong hubungan bilateral yang lebih baik.

Penegasan padar terluar nusantara ini dilakukan melalui beberapa pendekatan kebijakan, antara lain:

- **Penyelesaian Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia-Vietnam**

Belum selesainya batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di laut natuna utara telah menyebabkan berbagai ketegangan antara penegak hukum kedua negara di wilayah tersebut. Sebagai negara bertetangga dan sesame anggota ASEAN, ketegangan tersebut sangat kontra produktif dengan semangat kerja sama dan penyelesaian sengketa secara damai.

Kemenko Marves selalu mendorong agar penyelesaian batas maritim dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia, karakteristik sebagai negara kepurelauan, dan kesesuaian dengan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam Rapat koordinasi tingkat Menteri yang diselenggarakan pada 1 Desember 2022, Menko Marves dan Menko Polhukam, sesuai saran Menteri Luar Negeri, menyepakati posisi Indonesia untuk penyelesaian batas ZEE Indonesia-Vietnam. Kesepakatan tersebut dapat diterima oleh Viet Nam dan telah dituangkan dalam perjanjian ZEE Indonesia-Viet Nam yang ditandatangani kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 22 Desember 2022.



RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN 2021-2025

Pemerintah merilis rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia periode 2021-2025 yang fokus pada pembangunan ekosistem industri kemaritiman yang berkesinambungan.

Rencana Aksi

- Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia
- Ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan
- Tata Kelola dan kelembagaan laut
- Budaya Bahari
- Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan keselamatan di laut
- Pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut
- Diplomasi Maritim

Dasar Hukum



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022

Visi



Indonesia sebagai Poros maritim dunia

TARGET 2024

41,5	73,03	4	>0,02 Tahun	7,80%
Indeks Inovasi Maritim	**Indeks ketahan Energi nasional**	**Indeks Kedaulatan Maritim**	**Indeks Pembangunan hukum kemaritiman**	**Produk domestik bruto maritim**
3,5	107	67	>3 /Tahun	>3
Indeks kinerja logistik maritim	**Nilai tukar nelayan**	**Indeks Kesehatan Nasional**	**Indeks literasi maritim**	**Indeks kepemimpinan maritim**

Alan Koropitan
Tenaga ahli utama kantor Staff Kepresidenan

"Dengan ditetapkannya Perpres No 34 Tahun 20222 awal tahun ini, Presiden telah menunjukkan konsistensi terhadap pembangunan poros maritim dunia yang beliau canangkan."

Penetapan batas ZEE RI-Vietnam ini penting dan strategis karena:

1. Menegaskan bahwa di laut natuna utara ZEE Indonesia hanya berbatasan dengan Vietnam;
2. Memperkuat posisi Indonesia bahwa garis batas landas kontinen suatu negara tidak otomatis sama dengan garis batas ZEE, sebagaimana telah dilakukan Indonesia dalam penetapan batas maritim dengan Australia; dan
3. Meredakan ketegangan di kawasan yang sebelumnya terjadi pada wilayah yang belum selesai penetapan batas maritimnya.

- **Pemutakhiran Koordinat Titik Dasar Indonesia**

(Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pagar terluar nusantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Melalui regulasi ini, Pemerintah diamanatkan untuk dapat secara rutin menyempurnakan letak setiap titik dasar dan menyesuaikan dengan kepentingan nasional dari berbagai aspek, salah satunya dalam konteks perundingan batas maritim maupun perubahan kondisi geografis, misalnya akibat perubahan iklim.

Kemajuan teknologi pemetaan dan tantangan perubahan iklim terhadap zona maritim suatu negara telah menjadi diskursus hukum di level internasional dan mendorong praktik berbagai negara (state practices) terkait zona maritimnya. Kemajuan teknologi pemetaan juga memberikan data terbaru dengan level ketelitian yang lebih baik untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang titik terluarnya rentan terhadap akibat perubahan iklim, tentu perlu memiliki kebijakan yang responsif dan komprehensif terhadap tantangan dan perkembangan terkini. Berangkat dari beberapa pertimbangan tersebut, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan reviu dan pemutakhiran atas koordinat titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Pemutakhiran ini juga sekaligus menjadi kesempatan Indonesia untuk menegaskan batas terluar zona maritimnya yang diproyeksikan dari titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sesuai UNCLOS 1982.



Menjaga Perairan Kepulauan Indonesia (Rekomendasi Penetapan Perairan Pedalaman melalui Regulasi Nasional)

Indonesia merupakan negara pihak (state parties) Indonesia merupakan negara pihak (state parties) konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982). Konvensi yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini, menegaskan deklarasi Djuanda dan prinsip negara kepulauan sebagai prinsip hukum internasional.

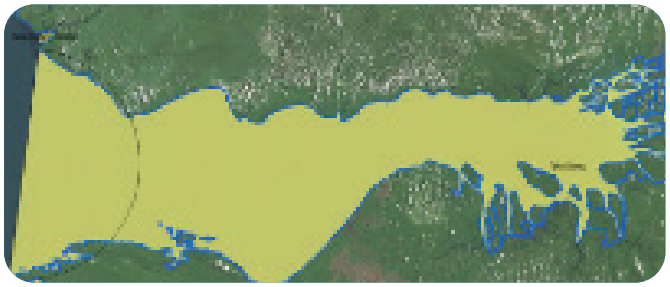
Sesuai prinsip negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan, dasar laut, dan ruang udara yang berada di dalam titik-titik koordinat garis pangkal kepulauan Indonesia. Walaupun memiliki kedaulatan penuh dalam perairan kepulauan, masyarakat internasional masih memiliki hak untuk berlayar secara damai dalam perairan kepulauan Indonesia *(innocent passage)*. Pada area yang ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), juga berlaku rezim transit passage dimana, kapal negara asing dapat berlayar secara cepat dan terus menerus dalam mode normal tanpa hambatan.

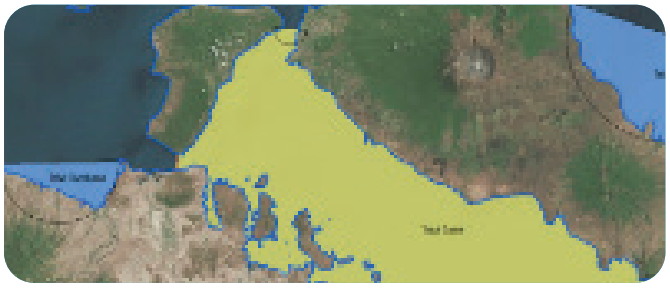
Diperbolehkannya hak *innocent passage* dan transit passage pada selat-selat Indonesia yang penting, dapat menimbulkan kerentanan apabila terjadi kecelakaan di laut dan/atau dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, berbagai negara melakukan pelayaran yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Penetapan perairan pedalaman, sesuai ketentuan UNCLOS 1982, memberikan hak penuh bagi Indonesia untuk melarang lalu lintas kapal negara apapun dalam perairan pedalaman tanpa izin dari Indonesia. Ini merupakan penegasan kedaulatan Indonesia atas tanah dan airnya.

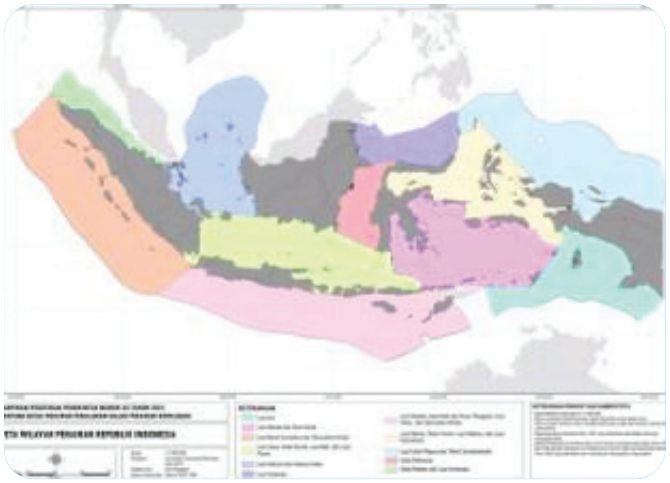
Sejak 2017, Kemenko Marves telah mengoordinasikan pengidentifikasian 815 Teluk (667 Teluk Yuridis dan 148 Teluk Historis) dengan total luasan 338.948,59 km2 dan 839 penutup mulut sungai yang akan ditetapkan dalam regulasi nasional sebagai perairan pedalaman Indonesia.

Penetapan Perairan Pedalaman melalui Peraturan Pemerintah akan melengkapi berbagai kerangka hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban Indonesia dalam zona maritimnya. Penetapan perairan pedalaman juga menjadi bukti sejarah penegasan kedaulatan Indonesia bagi generasi mendatang.





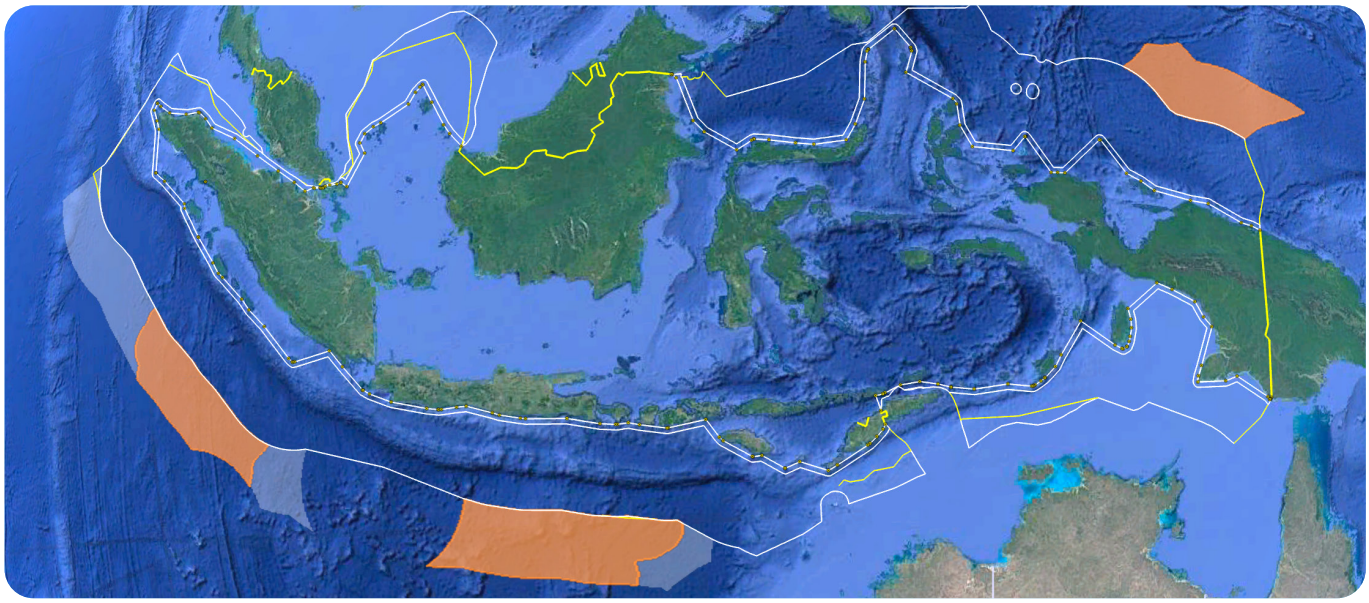






Memperluas
Hak Berdaulat Indonesia

Penetapan Landas Kontinen Indonesia



Pasal 76 United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 menyebutkan bahwa setiap negara pantai dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil, hingga sejauh-jauhnya 350 mil dari garis pangkal, jika diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut. Dengan kata lain, negara pantai memiliki kesempatan untuk melakukan submisi batas terluar landas kontinen lebih dari 200 mil laut.

Indonesia pertama kali mengajukan klaim perluasan landas kontinen di wilayah Barat Provinsi Aceh pada tahun 2008 dan telah menerima rekomendasi PBB yang menambahkan wilayah dasar laut seluas 4.209 km2 (seluas Pulau Madura).

Proses pengajuan landas kontinen Indonesia di luar 200 M sempat mengalami vakum sebelum pada tahun 2018, melalui koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman, ditetapkanlah Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil (Timnas LK) yang diketuai oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Semenjak pembentukannya, Timnas LK telah berhasil menyampaikan tiga segmen perluasan landas kontinen Indonesia ke PBB, yakni:

- Segmen Utara Papua pada tahun 2019 seluas 196.568,9 km^2,
- Segmen Barat Daya Sumatera pada tahun 2020 seluas 211.397,7 km^2,
- Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara pada tahun 2022 seluas 245.711 km^2.

Sesuai dengan proses yang berlaku, Timnas LK telah mempresentasikan ketiga submisi tersebut di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS).

Dengan total luas potensi penambahan landas kontinen sejumlah 653.677 km^2, atau kurang lebih sepertiga dari total luas daratan Indonesia, tentunya proses yang telah berjalan mesti ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia pada masa yang akan datang demi kemaslahatan dan kemajuan Indonesia.

Milestone

2011
Indonesia mendapatkan persetujuan rekomendasi perluasan landas kontinen seluas 4.209 kilometer persegi di barat AcehLhokseumawe.

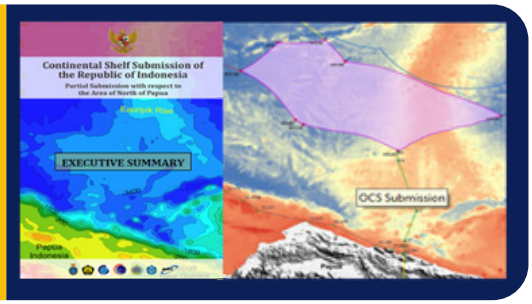
2019
Menyampaikan submisi untuk area utara Papua seluas 196.568,9 kilometer persegi

2020
Indonesia melakukan submisi di area barat daya Sumatera seluas 211.397,7 kilometer persegi

2019

Potensi Perluasan Landasan Kontinen Utara Papua

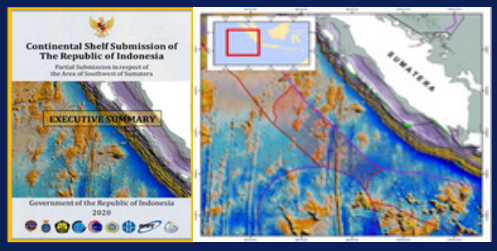
196.568,9 Km²



2020

Potensi Perluasan Landas Kontinen Barat Daya Sumatera

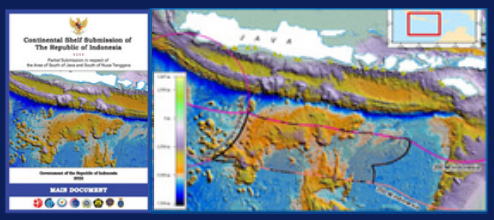
211.397,7 Km²



2022

Potensi Perluasan Landas Kontinen Selatan Jawa - Nusa Tenggara

245.711 Km²



Saat ini, Kemenko Marves tengah mengoordinasikan berbagai langkah strategis untuk mendukung pembuktian klaim Indonesia dari sisi ilmiah dan sisi hukum di hadapan Sub- Komisi UN-CLCS, di antaranya:

1. Penyusunan buku putih posisi Indonesia terkait delineasi batas terluar landas kontinen Indonesia diluar 200 NM.
2. Pelaksanaan survei kelautan (batimetri dan seismik) untuk melengkapi data dan memperkuat klaim Indonesia di hadapan Sub-Komisi di masa yang akan datang.
3. Kerja sama strategis dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih landas kontinen diluar 200 NM dengan Indonesia.
4. Integrasi dan pengarsipan dokumen, data, dan informasi pendukung klaim Indonesia dalam database elektronik yang reliable.





(Rakor Menko Persiapan Presentasi Timnas LK di Hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB)



(Presentasi di Hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB)

Perjanjian Bilateral **Indonesia—Singapura**

(Realignment Flight Information Region (FIR), Defence Coorperation Agreement (DCA), dan Extradition Treaty (ET))

Pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (Leaders' Retreat) tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerja sama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat. Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menyaksikan penandatanganan dokumen kerja sama strategis yakni :

1. Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (realignment flight information region - FIR);
2. Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (extradition treaty); dan
3. Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (Defense Cooperation Agreement - DCA 2007).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) di hadapan kedua Kepala Negara. Surat yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerja sama tersebut secara simultan.
Penandatanganan tiga dokumen perjanjian serta kerangka pemberlakuan ketiga kerja sama strategis secara simultan adalah bukti kesungguhan Pemerintah kedua negara untuk menyempurnakan kerja sama serta menyelesaikan long-standing issues secara konstruktif. Ketiga perjanjian yang ditandatangani tersebut adalah hasil diskusi yang konsisten para negosiator kedua negara sejak dua dekade yang lalu.

Perjanjian Penyesuaian Batas FIR

Sesuai UNCLOS 1982 batas FIR Singapura yang ditetapkan ICAO tahun 1973 mendesak disesuaikan untuk menghindari kebingungan. Penyesuaian ini mendesak, mengingat FIR Singapura melingkupi sebagian ruang udara di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh di laut maupun ruang udara di atasnya. Penyesuaian FIR di atas ruang udara Indonesia merupakan amanat Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan realignment FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia.



Penandatanganan persetujuan penyesuaian Batas FIR menunjukkan komitmen memperkuat kerja sama pelayanan dan keselamatan penerbangan. Kesepakatan bilateral ini juga menunjukkan kesungguhan kedua negara untuk beradaptasi dengan tuntutan industri penerbangan sipil dan ketentuan internasional (Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).



Secara operasional FIR Singapura yang berada di atas ruang udara Indonesia juga telah dialihkan oleh ICAO menjadi FIR Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Pada saat yang bersamaan, 10 orang personel gabungan TNI, AirNav, dan Kementerian Perhubungan RI juga mulai bertugas sebagai personel CMAC di Menara pengawas lalu lintas penerbangan Singapura.

Keberhasilan penandatanganan dan implementasi ketiga perjanjian Indonesia-Singapura merupakan kerja keras yang solid dari semua pihak, khususnya Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Tiga Matra TNI.

Melalui perjanjian pengalihan FIR, Indonesia dan Singapura juga sepakat bahwa penyediaan Jasa Pelayanan Penerbangan (JPP) pada FIR kedua negara harus menjunjung tinggi prinsip keselamatan.

Indonesia mendelegasikan JPP pada sebagian ruang udara Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dimana mayoritas penerbangan akan mendarat di bandara Changi. Pendelegasian JPP ini dilakukan untuk menghindari fragmentasi yang dapat mengakibatkan kebingungan, inefisiensi dan turunnya efektivitas penyediaan jasa dan keselamatan.

Pendelegasian JPP tentu tidak mengecualikan hak dan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer maupun mengawasi dan menyediakan JPP di ruang udara Indonesia. Delegasi JPP dalam persetujuan ini bahkan melahirkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah dan Otoritas Penerbangan Singapura antara lain:

1. kewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia;
2. Kewajiban berkoordinasi melalui kerja sama sipil – militer untuk manajemen lalu lintas penerbangan; dan
3. kewajiban memastikan pencegahan penyalahgunaan maupun pelanggaran ruang udara dari pesawat asing yang JPP-nya disediakan Singapura.

Indonesia akan mengawasi secara ketat implementasi JPP, termasuk koordinasi kerja sama sipil dan militer untuk manajemen lalu lintas penerbangan melalui penempatan personel Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura.

Perjanjian Ekstradisi Buronan 2022

Selain Persetujuan Penyesuaian Batas FIR, Indonesia dan Singapura juga menyepakati perjanjian ekstradisi buronan. Kesepakatan kedua negara terkait ekstradisi ini adalah sebuah momentum bersejarah.

Keberhasilan Indonesia meyakinkan Singapura dalam perjanjian ini menyempurnakan secara utuh skema ekstradisi yang pernah didiskusikan secara serius dan belum kunjung diberlakukan antara kedua negara. Melalui pemberlakuan perjanjian ekstradisi ini, kerja sama bidang hukum diantaranya pencarian pelaku kejahatan, penggeledahan, maupun penyitaan aset, dan pencegahan kejahatan lintas negara akan semakin efektif, dan menjamin kepentingan serta membawa kemaslahatan bagi kedua negara bersahabat.

Indonesia dan Singapura akan memberlakukan perjanjian ekstradisi yang tidak hanya progresif, dan fleksibel namun juga antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan.

Bentuk kejahatan baru yang belum terdefinisikan dalam perjanjian ini tetap dapat diekstradisi selama telah diatur dalam sistem hukum kedua negara. Perjanjian ekstradisi juga memberlakukan masa retroaktif hingga 18 tahun dan menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan yang lari ke luar negeri.

Berdasarkan perjanjian ini muslihat pelaku kejahatan melalui perubahan kewarganegaraan tidak akan mengecualikan pelaksanaan ekstradisi mengingat ekstradisi dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi.

Dengan demikian, perjanjian ini diyakini akan menciptakan efek gentar (deterrence) dan dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau termasuk memfasilitasi Pemerintah dalam mengimplementasikan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI.



Joint Statement Ministry of Defence on Military Cooperation

Joint Statement antara Menteri Pertahanan kedua Negara yang ditandatangani di Bintan tanggal 25 Januari 2022 menuangkan prinsip-prinsip dasar kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan; menghormati kedaulatan, hukum internasional dan nasional.

Pernyataan Bersama ini juga meneguhkan komitmen konkret skema persetujuan kerja sama pertahanan 2007 (Defence Cooperation Agreement 2007) secara simultan dengan pemberlakuan persetujuan penyesuaian batas FIR dan Ekstradisi.

Secara singkat DCA 2007 mengatur skema kerja sama yang memungkinkan Singapura melaksanakan latihan militer di wilayah yang diberikan ijin oleh Indonesia.

Indonesia melalui Defence Cooperation Committee (DCC) yang dibentuk dalam skema DCA akan mengawasi serta mengendalikan aktivitas latihan militer Singapura di area tertentu yang ditetapkan Indonesia.

Sebagaimana persetujuan penyesuaian batas wilayah Informasi penerbangan Indonesia – Singapura, pemberlakuan DCA 2007 juga menunjukkan komitmen Indonesia dan Singapura untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terkait batas-batas kedaulatan dan hak berdaulat negara sesuai prinsip negara kepulauan maupun akomodasi terhadap kepentingan dari negara yang bertetangga dan bersahabat dengan Indonesia.

Peran Kemenko Marves tidak berhenti dengan ditandatanganinya ketiga perjanjian tersebut. Menko Marves dan jajaran terus mendorong implementasi perjanjian dengan mempercepat proses ratifikasi.
Sebagai hasil percepatan yang dikoordinasikan Kemenko Marves, dalam 1 tahun,RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI.





ketiga perjanjian Indonesia- Singapura telah diratifikasi dengan regulasi nasional sebagai berikut:

1. UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ratifikasi Perjanjian Kerja sama Pertahanan,
2. UU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Buronan, dan
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Melestarikan Laut Bebas, Menjaga Warisan, Bersama Umat Manusia

Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)

Lebih dari 70% bumi adalah lautan dan sekitar 60%-nya merupakan lautan yang berada di luar area yurisdiksi negara. Area laut di luar yurisdiksi negara atau *Area Beyond National Jurisdiction* (ABNJ) merupakan bagian lautan yang berada di luar batas yurisdiksi negara manapun. Secara popular bagian laut ini dikenal sebagai laut bebas atau laut internasional.

Sebagai wilayah laut yang tidak dikuasai negara manapun, ABNJ berperan menyokong kehidupan seluruh umat manusia. Wilayah ini, terutama Kawasan laut dalam, merupakan habitat bagi sumber daya genetik laut yang unik dan memiliki manfaat bagi industri strategis masa depan di bidang medis dan pertahanan. Alternatif antibiotik dan antivirus pandemi di masa depan mungkin akan berasal dari ABNJ.

Selama bertahun-tahun masyarakat internasional masih menghadapi kesulitan untuk melindungi 60% wilayah laut global karena tidak adanya instrumen hukum internasional yang menyeluruh. Perjanjian BBNJ menjadi instrumen internasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi laut global serta manfaat yang adil dan merata untuk seluruh umat manusia.

Kemenko Marves telah mengoordinasikan langkah pemerintah untuk berperan aktif dalam pembentukan perjanjian ini. Menko Marves menetapkan Tim Nasional untuk negosiasi perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement* (BBNJ) dan memberikan kerangka kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangkan dalam negosiasi.

Sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya genetik laut dan berbatasan langsung dengan laut internasional, Perjanjian BBNJ sangat strategis bagi Indonesia.

Secara umum perjanjian BBNJ mengatur empat aspekutama pengelolaan laut bebas secara lestari, yakni:

1. Sumber daya genetik laut, termasuk pembagian manfaat yang adil dan merata
2. Langkah-langkah seperti perangkat pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut
3. Analisis dampak lingkungan
4. Peningkatan kapasitas dan alih teknologi kelautan.

Perjanjian internasional yang merupakan turunan UNCLOS 1982 ini, dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, adil dan merata, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam penelitian dan konservasi laut.

Secara praktikal, muatan perjanjian BBNJ memungkinkan Indonesia untuk membentuk Kawasan konservasi di ABNJ yang menjadi buffer zone dari pencemaran akibat aktivitas di laut internasional. Perjanjian BBNJ juga memungkinkan Indonesia melindungi hak pengetahuan masyarakat lokal Indonesia di Kawasan pesisir terkait khasiat sumber daya genetik di laut. Indonesia juga dapat mengakses data dan informasi digital terkait sumber daya genetik dari seluruh riset yang diselenggarakan ilmuwan seluruh dunia di ABNJ. Industri bioteknologi juga dapat semakin berkembang karena perjanjian BBNJ mengatur skema pengembangan kapasitas yang tidak mengecualikan teknologi rekayasa genetik dari bentuk alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

Secara khusus, sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat berperan dalam berbagai badan pelaksana perjanjian ini, menegaskan diplomasi maritim Indonesia dalam tata kelautan global.

Peran aktif Indonesia dalam pembentukan perjanjian ini turut mendorong di adopsinya perjanjian yang telah dinegosiasikan masyarakat internasional selama hampir 3 dekade. Pada 20 September 2023, Indonesia menandatangani perjanjian BBNJ di markas besar PBB. Penandatanganan perjanjian ini menunjukan komitmen Indonesia untuk tidak hanya terlibat aktif dalam negosiasi namun juga menjadi pihak yang berperan strategis dalam implementasinya.

Kemenko Marves akan terus mengoordinasikan langkah strategis Indonesia untuk melakukan ratifikasi dan implementasi perjanjian BBNJ.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

“ Indonesia tidak boleh terlambat. Semua pelaku (red: pemangku kepentingan) terutama para periset dan inovator muda mesti aktif kolaborasi riset terkait genetik laut, bioteknologi. Tugas Pemerintah untuk susun anggaran dan action plan. Ini kita jangan mimpi-mimpi lagi, slogan saja. (tapi harus) Action sekarang, jaga laut kita, dan petik manfaatnya buat masa depan (kita) ”



Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Momentum penandatanganan ini bersejarah karena Indonesia menandatangani Perjanjian ini pada hari pertama opening for signature Perjanjian BBNJ. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia saat menandatangani UNCLOS pada hari pertama pada 10 Desember 1982 oleh Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja”.



Adopsi Perjanjian BBNJ setelah melalui proses negosiasi selama 20 tahun.



Indonesia dipilih kembali sebagai anggota Dewan ISA



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan nasional dalam pemanfaatan kawasan dasar laut internasional dan sumber daya alam di dalamnya sebagai warisan bersama umat manusia diperlukan peran aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional;

b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982) dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 (Persetujuan Pelaksanaan Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan mengenai peran aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

SK No 188883 A

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional pada 12 Desember 2023.

Menjaga Keunggulan dan Daya Saing Indonesia dalam **Pengelolaan Mineral Strategis melalui Peran Aktif di KDLI**

Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI)

Indonesia terus melakukan hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis mineral strategis untuk mendukung transisi hijau. Hilirisasi mineral yang dilakukan Indonesia telah memberikan dampak ekonomi yang berganda bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Indonesia harus menjaga momentum yang baik ini dengan meningkatkan cadangan mineral strategis Indonesia yang diperkirakan akan semakin menipis dalam waktu 2 dekade ke depan. Langkah strategis harus dilakukan termasuk melalui pemanfaatan mineral dari kawasan dasar laut internasional (KDLI) secara lestari sesuai dengan ketentuan internasional.

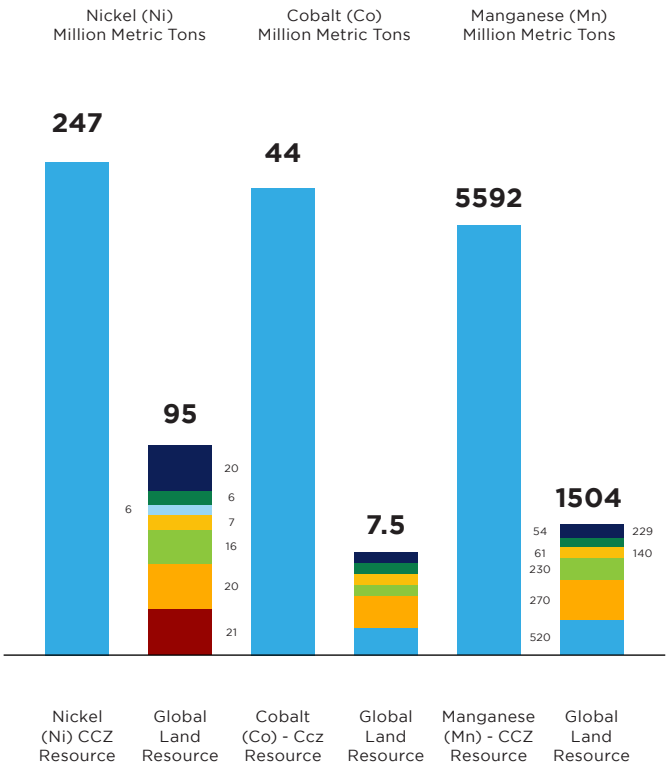
Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI) telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mengelola sumber daya mineral dari dasar laut internasional.

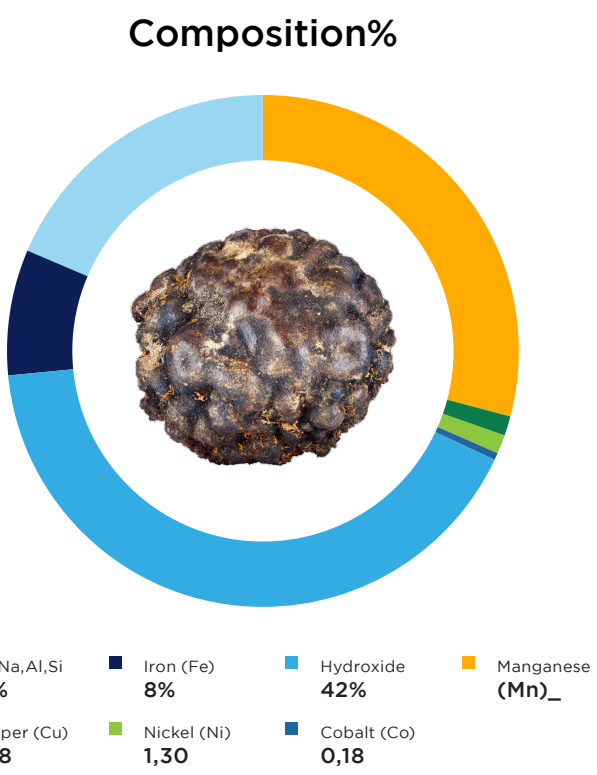
Pemanfaatan mineral dari KDLI tentu tidak dilakukan secara serampangan. Sebagai negara pihak konvensi hukum laut PBB 1982 dan anggota Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority/ISA), badan PBB yang diberi mandat mengelola KDLI, Indonesia berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan internasional termasuk mematuhi standar pelindungan lingkungan laut yang ketat.

- Menko Marves terus mendorong Indonesia untuk menyiapkan Langkah strategis pengelolaan mineral dari KDLI. Pengelolaan Mineral Strategis dari KDLI akan:
- mempertahankan daya saing dan posisi strategis Indonesia dalam pengelolaan mineral dan industri strategis di masa depan;
- mempercepat akselerasi ekonomi dan transisi hijau Indonesia;
- menjaga kepemimpinan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya laut dan tata kelautan global secara berkelanjutan;
- mendorong penguatan kapasitas riset ilmiah dan teknik kelautan serta teknologi mutakhir penjelajahan samudera.

KDLI memiliki cadangan mineral strategis yang melimpah. Cadangan mineral terutama terdapat pada tiga jenis resources utama yakni High-grade polymetallic nodules, Polymetallic sulphides, dan Cobalt-rich crusts. Polymetallic nodules merupakan sumber daya dengan tingkat kelimpahan paling tinggi di KDLI, terutama pada wilayah Clarion Clipperton Zone (CCZ). Jumlah Cadangan Mineral Strategis di area CCZ melebihi (150 – 400 %) dari seluruh cadangan global di darat.

Area yang potensial untuk diajukan kontrak eksplorasi oleh Indonesia terbentuk dari 6 blok seluas 75.000 km2 dengan potensi mineralisasi 520 juta ton polymetallic nodules atau 8 kg/m2.





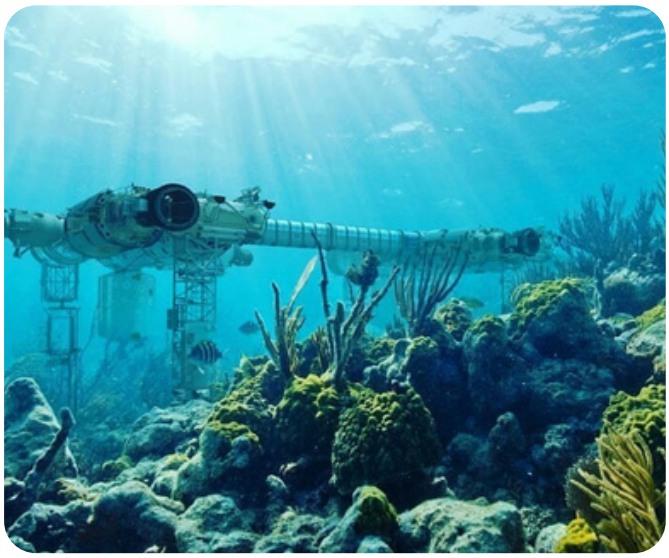
- Kemenko Marves juga mengoordinasikan Kementerian/ Lembaga dalam:
- Penyusunan posisi dasar untuk mengakomodir kepentingan Indonesia dalam penyusunan draft Exploitation Regulation (DRE).
- Penyusunan regulasi (Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaannya).
- Penyusunan roadmap percepatan pengajuan reserved area (area yang dicadangkan) di CCZ kepada Sekjen ISA.

Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran aktif Indonesia di KDLI adalah keberlanjutan diplomasi maritim Indonesia.

Sejak tahun 1995-1996 Indonesia terus menjadi anggota dewan ISA dan semakin aktif dalam komisi legal dan teknis ISA. Keterwakilan dalam badan-badan ISA ini sangat penting bagi Indonesia mengingat keinginan Indonesia untuk dapat mengajukan area kontrak pengelolaan mineral strategis dari dasar laut internasional dalam waktu dekat.

Indonesia juga wajib memastikan bahwa pembentukan regulasi di ISA sesuai dengan kepentingan nasional untuk menjaga daya saing nasional dan melindungi laut.

Sebagai langkah strategis dan implementasi Pepres 80 tahun 2023, Kemenko Marves telah mengoordinasikan pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menko Marves.





Koordinasi di tingkat Menko – Pertemuan dengan Calon Mitra Kerja Sama Pengelolaan Mineral di KDLI (31 Mei 2023)

Pembangunan Berkelanjutan Bagi Energi Bersih, Terjangkau, dan Ramah Lingkungan

Penyusunan Peraturan Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Carbon Capture Storage

Penyusunan Peraturan Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Carbon Capture Storage (Perpres 14/2024)

Untuk menjamin ketahanan energi nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga keberlanjutan serta kesinambungan energi di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan pengaturan cadangan penyangga energi yang mampu untuk menyediakan energi sesuai kondisi dan ketersediaan energi setempat dengan memperhatikan komitmen nasional terhadap Pembangunan berkelanjutan bagi energi bersih dan terjangkau serta ramah lingkungan. Selain itu penerbitan regulasi ini untuk memberikan arah bagi Pemerintah dalam melaksanakan penyediaan Cadangan penyangga energi, perlu mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan penyangga energi.

Ketersediaan Cadangan penyangga energi baik jumlah maupun standar dan mutunya sesuai dengan kebutuhan konsumsi nasional, perlu diatur pelaksanaan pengelolaan Cadangan penyangga energi.

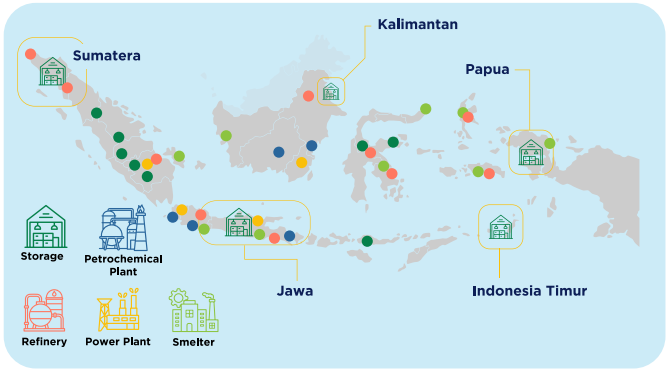
Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Penyusunan peraturan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni:

1. License to invest – trend global saat ini investasi baru memasukkan GCG dimana salah satu kontribusi melalui pengurangan emisi (CCS);
2. Carbon Capture and Storage (CCS) mendukung Net Zero Emission (NZE) pada kegiatan usaha hulu migas, pembangkit listrik, industri, dan kegiatan penghasil emisi lainnya;
3. Potensi Indonesia (saline aquifer & depleted reservoir) menjadi lokasi pengembangan CCS di tingkat regional (CCS Hub Karbon dari Singapore, Korea Selatan dan Jepang);
4. CCS menciptakan nilai ekonomi melalui storage fee, yang dapat dikenakan royalty (PNBP) serta multiplier effect (transportation fee, Emission Trading System dll);
5. Potensi ekspor industri nasional ke eropa dengan premium price.

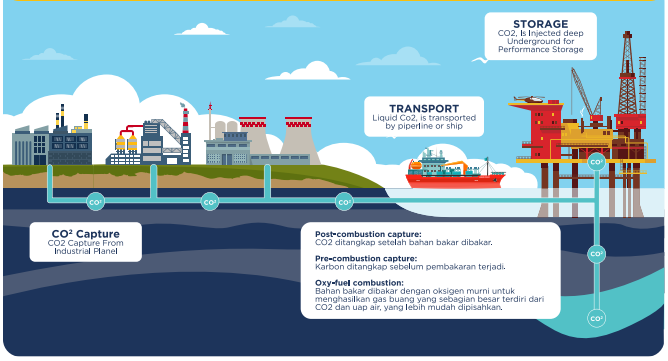
Tujuan penyusunan Peraturan Presiden kegiatan CCS

1. Sebagai dasar hukum kepastian CCS di WK Migas dan/atau WK Injeksi Karbon;
2. Sebagai dasar hukum dan mendorong kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara lain dalam pengiriman lintas batas dan penyimpanan karbon;
3. Membuka potensi geologi Indonesia dalam penyimpanan karbon yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi.

CCS/Penangkapan dan Penyimpanan Karbon adalah teknologi yang menangkap gas rumah kaca karbon dioksida (CO2) dan menyimpanannya dengan aman di bawah tanah, sehingga tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sumber CO2 berasal dari pabrik semen, baja, pupuk, pembangkit listrik dan pengolahan gas alam cross border transportation.



Alur Sederhana Penangkapan Karbon



Kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon domestik dengan alokasi awal 70% dan 30% untuk sumber karbon dari luar negeri. Penyesuaian alokasi kapasitas penyimpanan karbon dilakukan oleh Satuan Tugas yang dikoordinasikan oleh Menko Marves. Potensi prospektif penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 577 GtCO2 berdasarkan perhitungan dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM serta terdapat 15 total proyek CCS/CCUS dalam tahap studi/persiapan di Indonesia.

Indonesia terus membuka peluang kerja sama CCS Cross-Border dengan negara lain untuk menjadikan rencana sebagai CCS Hub di regional Asia-Pasifik.

Letter Of Intent (LOI) INDONESIA & SINGAPURA

Pemerintah Indonesia membangun kerja sama dengan Singapura melalui **Letter of Intent (LoI)** untuk Kerja sama Dalam **Penangkapan dan Penyimpanan Karbon** Lintas Negara serta sedang dilakukan untuk lanjut pada Memorandum of Understanding (MoU). Pertamina, Korea National Oil Company (KNOC), dan ExxonMobil melakukan penandatangan kerja sama pada IPA Convex 2024.



Selain dengan Negara Singapura, kerja sama dengan Korea Selatan juga termasuk dengan Posco International untuk sumber emisi industri baja domestik dan luar negeri serta Karbon Korea dan PLN untuk sumber emisi pembangkit listrik batubara.

Inpex Blok Masela berencana melakukan kerjasama dengan CPC Taiwan untuk project CCS Cross-Border di Lapangan Abadi, Masela serta BP Tangguh berencana melakukan kerjasama CCS Cross-Border dengan industri jepang untuk injeksi karbon di Provinsi Papua Barat.



Kerja sama dalam pengembangan CCS di Indonesia juga turut mendorong investasi pada sektor lain yaitu pengembangan industri petrokimia di Indonesia yang terintegrasi dengan proyek CCS. Kemenko Marves dan ExxonMobil telah menandatangani MoU Pengembangan Kompleks Petrokimia di Indonesia saat kunjungan di Amerika Serikat November 2023 dengan total nilai investasi mencapai 10 milyar USD



Setelah melalui berbagai diskusi dan rapat koordinasi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah berlaku sejak Januari 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut saat ini sedang disusun rancangan regulasi turunannya, yakni:

Rancangan Permen tentang Penyiapan, Penetapan, dan Penawaran WIPK serta Pemberian dan Pengawasan Izin Eksplorasi, Izin Transportasi, dan Izin Operasi Penyimpanan Karbon.

Peningkatan Produksi Lifting Migas di Indonesia

Setelah proses pengambilalihan saham mayoritas PT. Freeport, untuk mendukung kedaulatan dan ketahanan energi, Pemerintah Indonesia berencana untuk mengambil alih wilayah kerja eksploitasi migas di Blok Rokan mengingat kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan berakhir pada 2021.

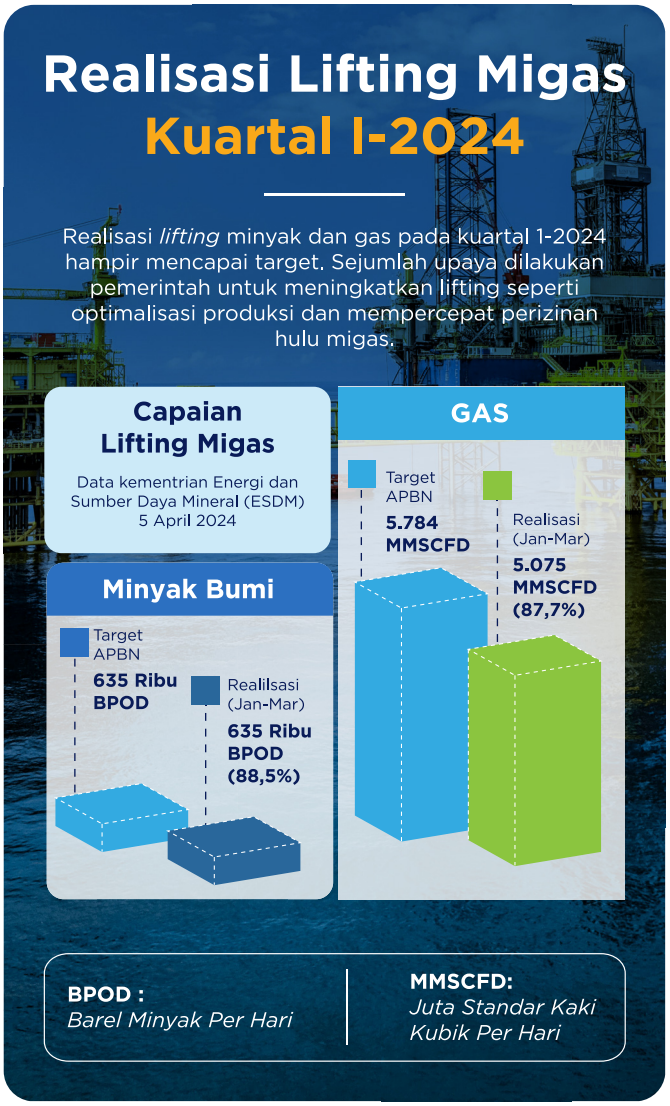
Proses Pengambilalihan ini penting mengingat Blok Rokan adalah WK produksi terbesar minyak di Indonesia sehingga bisa secara langsung memastikan pengendalian peningkatan lifting migas di Indonesia.

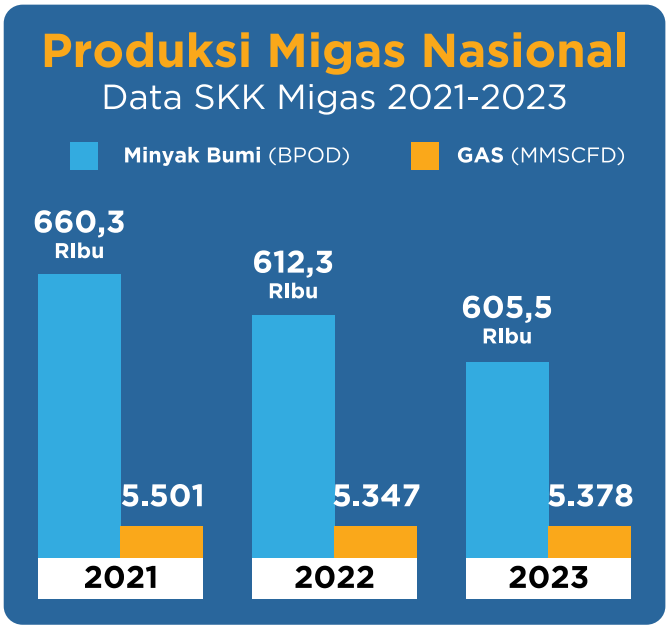
Kemenko Marves berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Pemda Riau, SKK Migas, Pertamina, CPI, dan stakeholder lain untuk memastikan kelancaran proses transisi dimaksud.

Beberapa hal strategis yang berhasil disepakati bersama melalui koordinasi Kemenko Marves di antaranya:

1. Memastikan CPI untuk memenuhi kewajibannya untuk kewajiban pengeboran (eksploitasi) walaupun masa kerja sudah akan berakhir.
2. Memastikan CPI untuk melakukan pemulihan lingkungan pada wilayah yang terdampak selama CPI melakukan aktivitas di Blok Rokan.
3. Penandatanganan Head of Agreement antara CPI dengan Pertamina.

Setelah berhasil mengambil alih WK Rokan, Pemerintah Indonesia mengidentifikasi sejumlah isu yang menghambat peningkatan produksi *lifting* migas di Indonesia, antara lain terkait tata kelola penerbitan perizinan, penetapan pajak migas yang kurang kondusif terhadap investasi migas, dan ketidaksesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.







Exploration

Development

Production

1 **Akselerasi persetujuan lingkungan (UKL/UPL & Amdal)** menjadi sekitar satu bulan untuk fase eksplorasi

2 **Menyelaraskan perizinan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan minyak dan gas** antara pemerintah pusat dan daerah

3 **Menegakkan aturan terhadap perambahan ilegal** di ladang minyak dan gas yang dianggap sebagai aset negara

4 **Menyelesaikan negosiasi paket kompensasi hutan** antara pemerintah dan pengelola sumber daya hutan

5 **Mempercepat perizinan wilayah untuk minyak dan gas lepas pantai** melalui proses administratif paralel dan digital

6 **Mengoptimalkan biaya pemanfaatan wilayah laut** melalui penerapan tarif yang tidak bersifat retroaktif

7 **Mendorong dukungan aparat keamanan** untuk area strategis minyak dan gas yang memiliki risiko keamanan signifikan

8 **Pengembangan jaringan infrastruktur distribusi minyak dan gas** untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan

9 **Menyinkronkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah** terhadap kegiatan minyak dan gas

10 **Mereformasi rezim perpajakan minyak dan gas** agar lebih proporsional dan tidak mencakup fase eksploitasi

11 **Mengoptimalkan pajak tidak langsung pada kegiatan hulu minyak dan gas** melalui revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017

Pada pertengahan 2024, Pemri berupaya menyelesaikan 11 kluster isu peningkatan produksi *lifting* migas dimaksud melalui sejumlah solusi yang didiskusikan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait yang akan tergabung di dalam *task-force* percepatan peningkatan *lifting* migas di Indonesia.

Menko Marves juga menyiapkan kebijakan untuk percepatan penyusunan peta jalan penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) agar dapat segera diimplementasikan. Metode EOR ini telah dipraktikkan banyak negara dan diyakini dapat meningkatkan cadangan minyak dalam sumur produksi eksisting Indonesia. Dengan melakukan pengangkatan minyak yang sebelumnya tidak dapat diproduksi, seperti minyak-minyak yang kental dan mengendap. EOR ini juga dapat diartikan sebagai sebuah proses optimalisasi.



Koordinasi penyelesaian masalah penghambat produksi lifting migas di Indonesia





Menko Luhut Meeting Bersama Mr. Chuck Taylor (Managing Director Chevron) di Kantor Maritim



Kemenko Marves dan CPOPC: **Benteng Harga Sawit Indonesia**



Industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun fluktuasi harga di pasar internasional seringkali menjadi tantangan besar bagi para pelaku industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maves) menginisiasi pembentukan Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit/*Council of Palm oil Producing Countries* (CPOPC).

Apa itu CPOPC?

CPOPC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia, dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tujuan utama didirikannya CPOPC adalah untuk memperkuat kerja sama antar negara produsen minyak sawit, meningkatkan posisi perdagangan minyak sawit di pasar dunia, dan menjamin keberlanjutan industri minyak sawit.

Melalui CPOPC, Indonesia bertujuan untuk:

- **Menstabilkan harga minyak sawit:**
- CPOPC bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga yang tidak diinginkan dengan mengoordinasikan kebijakan antar negara anggota.
- **Meningkatkan permintaan minyak sawit:** CPOPC secara aktif mempromosikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- **Melawan kampanye negatif:** CPOPC juga berperan penting dalam melawan kampanye negatif terhadap minyak sawit.

Kampanye ini sering kali diluncurkan oleh kelompok tertentu.

Upaya CPOPC menjaga stabilitas harga minyak sawit

Sejak awal berdirinya, CPOPC telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga minyak sawit, antara lain: Melakukan sejumlah pertemuan dan dialog membahas kebijakan minyak sawit dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

- **Mempromosikan Minyak Sawit Berkelanjutan:** CPOPC mempromosikan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan citra minyak sawit di mata dunia.

- **Kerja sama dengan organisasi internasional:** CPOPC bekerja dengan organisasi internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memastikan bahwa minyak sawit yang dihasilkan memenuhi standar keberlanjutan.

Dampak Positif CPOPC bagi Indonesia
Pembentukan CPOPC memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia sebagai berikut:

- **Stabilisasi harga minyak sawit:** Harga minyak sawit yang lebih terkendali Volatilitas membawa kepastian bagi petani dan pengusaha kelapa sawit.
- **Meningkatkan kesejahteraan petani:** Ketika harga minyak sawit stabil, pendapatan petani kelapa sawit cenderung meningkat.
- **Memperkuat posisi tawar Indonesia:** CPOPC memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional mengenai minyak sawit.

Kemenko Marves melalui pembentukan CPOPC telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga minyak sawit Indonesia. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, CPOPC telah berhasil memperkuat posisi minyak sawit di pasar global dan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia.







Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana menerima kunjungan delegasi pemerintah Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Dato 'Sri Najib Tun Razak dan istrinya Rosmah Mansur di Istana Kepresidenan Bogor (11/10/2015). Pertemuan dilakukan dalam suasana persahabata, kedua pemerintahan (RI dan Malaysia) telah sepakat tentang pembentukan Dewan Negara Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries / CPOPC).

Peningkatan Tata Kelola dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia

Kontribusi pelaut dan awak kapal perikanan pada perekonomian nasional Indonesia diperkirakan mencapai 399,42 triliun Rupiah per tahun. Nilai ini sangat signifikan, yang jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2017, mencapai sekitar 3%. Perkiraan tersebut diperoleh dari valuasi atas nilai ekspor perikanan tangkap, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perijinan dari sektor perikanan, perkiraan devisa dari penghasilan pelaut dan awak kapal perikanan migran, perkiraan penghasilan/gaji pelaut, dan perkiraan devisa dari layanan crew change Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia (diperkirakan antara Rp. 5-10 triliun dari jasa pertukaran awak kapal di Merak yang melayani lebih dari 50.000 kapal asing yang melewati Selat Sunda dan di Batam yang melayani pertukaran awak kapal dari 120.000 kapal asing yang melintasi Selat Malaka setiap tahun). Nilai tersebut belum termasuk 76,7 juta ton hasil perikanan tangkap yang diserap sebagai konsumsi dalam kebutuhan pangan nasional. Selain itu, nilai riil sangat mungkin lebih besar dari yang diperkirakan karena ada beberapa data yang tersedia dan digunakan belum merupakan data tahun terakhir.

Sayangnya, sumbangan devisa yang besar dari jasa kepelautan ini belum diiringi dengan pelindungan yang baik terhadap pelaut selaku penyumbang devisa yang cukup besar. Data menunjukkan, pelaut dan awak kapal perikanan Indonesia masih termasuk dalam kelompok rentan yang membuat mereka mudah terjerumus dalam praktek perdagangan manusia, kerja paksa dan perbudakan modern (modern slavery). Tercatat pada periode 2017 sampai dengan 2020 sedikitnya terdapat 5.371 pelaut dan awak kapal perikanan yang menjadi korban penelantaran dan eksploitasi, di mana 8 (delapan) orang di antaranya meninggal dunia. Jumlah ini pun adalah perkiraan kasar mengingat banyak kasus tidak tercatat atau dilaporkan, di antaranya Ketika mereka berangkat melalui jalur-jalur ilegal atau tidak resmi.

Terdapat beberapa Undang-undang yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan.

Perintah pasal 337 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran agar urusan tata kelola profesi kepelautan diurus oleh Kementerian Ketenagakerjaan,

Belum direspons dengan perubahan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2016

Tentang Pengesahan Maritime Labur Convention, 2006,

Belum ditindaklanjuti dengan aturan teknis karena Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang profesi pelaut dan awak kapal perikanan.

Konvensi ILO No. 188 (C.188)

Tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan pun sampai saat ini belum disahkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga lingkungan kerja di sektor perikanan tidak sesuai dengan standar internasional.

Belum lagi Sebagian kapal perikanan Indonesia yang tidak masuk dalam standar Perjanjian Cape Town tentang Keselamatan Kapal Perikanan.





Fair Seas Labour Conference

Rencana Aksi dan Rekomendasi terkait Konvensi ILO 188 (C-188)

Diselenggarakan Forum Grup Disccussion (FGD) mengenai pembangunan Peta Jalan Menuju Aksesi Konvensi ILO C.188 dalam rangka Pelindungan Awak Kapal Perikanan (AKP).

Regulasi melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri agar tiap instansi dapat berkoordinasi dengan baik.

Meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaandisektorlautseperti STCW-F 1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) dan Port State Measure Agreement.

Menyusun Kajian

- Kepentingan nasional ratifikasi K-188;
- Potret kerentanan awak kapal perikanan lokal dan implementasi standar kerja layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Evaluasi implementasi MLC 2006 dan STCW-F 1995 untuk memahami tantangan dan hambatan dalam menjalankan komitmen internasional sejenis.
- Penegakan hukum perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) lokal dan migran untuk menilai sejauh mana mekanisme yang tersedia mampu untuk melindungi AKP.
- Membangun sistem data AKP yang akurat, baik dari segi jumlah dan aduan masalah.
- Meningkatkan sosialisasi ratifikasi K-188 kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pada asosiasi pemilik kapal perikanan dan pengusaha kapal perikanan.
- Meningkatkan jumlah simulasi inspeksi standar kerja di kapal perikanan.
- Memperjelas mekanisme penyelesaian perselisihan antar kementerian dan mekanisme penyelesaian Hubungan Industrial.
- Mendorong penguatan pemerintah desa dalam perlindungan AKP lokal dan migran

Penegakan Hukum Di Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki panjang garis pantai hingga 108.000 Km dengan 17.504 pulau yang tersebar di dalam zona maritim yang luasnya mencapai 6.4 juta km2. Indonesia juga berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.

Luasnya wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia menjadikan berbagai ancaman maritim yang terjadi di Laut Indonesia, diantaranya: IUU *Fishing, human trafficking,* penyelundupan bahan-bahan kimia yang dilarang, pencurian sumberdaya laut, ancaman teroris, perdagangan illegal di laut, pelaku kejahatan bersenjata di wilayah perairan Indonesia, pencemaran lingkungan laut, cagar budaya bawah air yang dicuri, penyelundupan senjata melalui jalur laut, penyelundupan hasil pertanian dan kehutanan, eksploitasi tenaga kerja ilegal, serta berbagai jenis kejahatan lain yang dapat terjadi baik di atas kapal maupun di sektor yang berhubungan dengan aktivitas di laut, termasuk kejahatan terhadap lingkunganmaritim.

Dalam menanggapi ancaman keamanan maritim tersebut, Kementerian/Lembaga di Indonesia telah memiliki personel serta sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya Keamanan Maritim di Indonesia. TNI-AL, Kepolisian, Dirjen Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Bea Cukai, Dirjen KPLP Kementerian Perhubungan, Dirjen Gakum KLHK dan Bakamla.

Beragam macam kejahatan di laut perlu diantisipasi dan ditangani dengan mekanisme yang komprehensif dan sinergi pemanfaatan serta operasional armada pengamanan dan pengawasan dari Kementerian/Lembaga teknis yang berada di lapangan termasuk pemanfaatan teknologi berbasis intelijen/keamanan yang ditempatkan di berbagai fusion center/puskodal/ command center di masing-masing K/L guna menunjang kinerja aparat penegak hukum di laut.



Penandatanganan MoU berbagi data dan informasi pada tanggal 7 November 2023 di Jakarta

Progress Capaian Tahun 2019–2024

2019

Delapan lembaga di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BadanNasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Keamanan Laut dan Badan Riset dan Inovasi Nasional) menginisiasi kerja sama berbagi data dan informasi dengan menandatangani kesepakatan bersama setelah pertemuan Senior Official Meeting (SOM) on Littoral Border Management and Maritime Law Enforcement to Counter Emerging Maritime Law di Yogyakarta. Langkah ini diambil untuk memperkuat penegakan hukum di laut melalui pertukaran data yang efisien dan aman.

13 Desember 2019

kesepakatan ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU berbagi data dan informasi pada tanggal 13 Desember 2019 November 2023, jumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam kesepakatan ini bertambah menjadi sebelas, dengan tambahan tiga lembaga baru: Pusinformar TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

7 November 2023

Serah terima API Gateway dari Kemenko Marves ke Bakamla. Langkah ini diambil untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Bab yang mengatur tentang Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional.

2024

1. Pengembangan Kapasitas SDM:
2. Optimalisasi Interoperabilitas Data:
3. Penguatan Platform API Hub:
4. Peningkatan Kemampuan Dashboard Analytics: Implementasi teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan analitik dashboard.

Grand Design **Pemanfaatan Gas Bumi Nasional**

Desain besar pemanafaatan gas bumi nasional dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi gas alam nasional dan rencana aksi mitigasi untuk pengoptimalan penggunaan gas bumi nasional. Kondisi gas nasional yang selaras antara *supply & demand,* keuntungan ekonomi dan gas menjadi energi berkelanjutan dapat dicapai melalui :

5 strategi

1. Optimasi kekuatan inti yang sudah ada
2. Persiapan untuk kemampuan penggunaan gas bumi di masa depan
3. Memastikan gas bumi yang ekonomis dan berkelanjutan.
4. Perencanaan dan implementasi tepat waktu dan lokasi
5. Implementasi inovasi

Diperlukan strategi untuk menurunkan persentase ekspor LNG dan impor LPG serta pertumbuhan demand untuk meningkatkan serapan gas dalam negeri. Keselarasan antara hulu, hilir, dan distribusi dapat dicapai dengan optimasi ekosistem gas nasional. Selain itu diperlukan juga strategi dalam menarik investor di sektor hulu migas untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Potensi cadangan gas konvensional (kategori P1) 36.3 TCF, sumber dayagas non-konvensional 46 TCF, dan potensi spekulatif gas non-konvensional 574 TCF (no 7 terbesar di dunia).

Cadangan gas konvensional untuk selanjutnya dapat didukung dengan gas non-konvensional. Strategi pemenuhan supply gas bumi Indonesia dapat dicapai dengan menjaga produksi sumur eksisting, pengembangan cadangan menjadi produksi (R to P), dan peningkatan eksplorasi secara masif.

Saat ini produk turunan gas bumi masih impor dalam memenuhi kebutuhan (soda ash, methanol, asetilena, dll). Pupuk Indonesia Grup menggunakan gas untuk menghasilkan produk terbatas pada amoniak dan produk turunannya. Pupuk Indonesia berencana memproduksi produk lainnya seperti methanol, soda ash, blue ammonia, dan produk turunan gas bumi lainnya. Indonesia berpotensi untuk diversifikasi bisnis dan mengurangi kebutuhan impor.

Analisis nilai tambah industri (pupuk, ammonia, & metanol) dan pembangkit listrik. Industri dan Pembangkit Listrik Gas merupakan dua sektor yang memiliki nilai tambah berpotensi mendapatkan subsidi bila Indonesia menetapkan harga gas mengikuti harga pasar.

Penggunaan gas bumi sebagai bahan baku dapat digambarkan dalam pohon nilai tambah industri kimia sebagai produk turunan yang menghasilkan nilai jual/ekonomi lebih tinggi.



Peningkatan kapasitas industri methanol dan turunannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan industri kimia dengan demand domestik 1,7 juta ton per tahun. Saat ini hanya ada 1 produsen di Indonesia kapasitas 660.000 ton per tahun. Produksi ammonia dalam negeri mencukupi kebutuhan domestik terutama sebagai bahan baku pupuk. Produksi ammonia Indonesia tahun 2021 berkontribusi terhadap 5% dari total produksi di dunia.

Penentuan prioritas pemanfaatan gas untuk sektor listrik atau industri petrokimia dapat mempertimbangkan aspek wilayah penyediaan gas dan emisi CO2 yang dihasilkan. PLN memerlukan pengembangan infrastruktur gas dan pengelolaan pasokan gas secara terintegrasi untuk memastikan keandalan dan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan. Kebutuhan gas untuk kelistrikan nasional dibagi dalam 5 cluster dapat dipenuhi dengan LNG Carrier dan supply vessel.

Pemetaan kebutuhan gas bumi dan proyeksi pasokan gas bumi nasional 2023-2035, pemanfaatan gas bumi untuk domestik saat ini mencapai 68% dari pasokan gas bumi nasional (Juli 2022). Pertumbuhan demand dalam negeri secara rata-rata per tahun 2023-2025 adalah 2,4%. Existing supply dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak *(contracted demand).*

Supply gas nasional tidak akan mengalami defisit jika project yang dijadwalkan on stream sesuai target (Tangguh train-3, IDD, Masela, Andaman, dan lainnya). Lima strategi dan deliverable dengan K/L terkait dari Desain Besar Pemanfaatan Gas Bumi. Aktivitas dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan alokasi pada lima strategi yang sudah dipetakan.

Desain besar pemanfaatan gas nasional perlu tindak lanjut dengan usulan dan inovasi dalam konsep ekosistem gas nasional.

Pengembangan Industri *Sustainable Aviation Fuels (SAF)* demi **Dunia Aviasi yang Lebih Hijau**

Perwujudan industri SAF di Indonesia merupakan langkah penting untuk mencapai praktik penerbangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Meningkatnya penekanan global terhadap dekarbonisasi penerbangan dan prospek pertumbuhan SAF yang menjanjikan semakin mendesak Indonesia untuk segera mengembangkan industri SAF dalam negeri.

Selain itu, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam SAF, mengingat peluang pasar aviasi yang luas dan unggul serta kemampuan produksi yang besar yang didasari oleh ketersediaan *feedstock* di Indonesia.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah meluncurkan peta jalan dan rencana aksi nasional pengembangan Industri SAF pada tanggal 18 September 2024 di Bali.

Dokumen tersebut merupakan buah atas kerja keras Kementerian/ Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves selama setahun belakangan.

Dengan menciptakan Peta Jalan dan Kebijakan Nasional SAF, Indonesia akan dapat mengembangkan industri SAF secara domestik sehingga membuka potensi terciptanya nilai ekonomi yang tinggi, kepemimpinan industri regional, dan kedaulatan dan ketahanan energi.

1. Penciptaan nilai ekonomi melalui kapasitas produksi kilang-kilang biofuel Pertamina, diestimasikan bahwa penjualan SAF secara domestik dan ekspor dapat menciptakan lebih dari Rp 12 triliun per tahunnya. Selain dari itu, pengembangan industri SAF juga akan membuka pintu masuk bagi investasi-investasi kilang biofuel lebih lanjut dari swasta maupun BUMN.

2. Menetapkan kepemimpinan industri regional dengan mengambil alih dan memosisikan Indonesia sebagai pemimpin industri SAF melalui pengembangan ekosistem SAF dan kemampuan produksi SAF dan jangkauan pasar ekspor yang paling kokoh di kawasan Asia Tenggara.

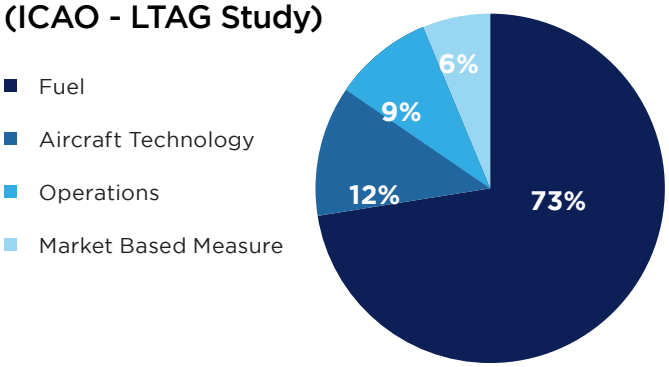
3. Tercapainya kedaulatan dan ketahanan energi dengan memastikan kemampuan secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi sektor aviasi dan mencegah kebocoran bahan baku ke negara tetangga melalui hilirisasi bahan baku SAF.

Pencapaian ketiga potensi ini juga akan mengarahkan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon sektor aviasi dan mendukung Indonesia untuk mencapai target net-zero pada tahun 2060. Peta Jalan SAF ini mencakup mulai dari:

1. Off-take: Memberikan kepastian *off-take* SAF serta mekanisme untuk mengurangi dampak harga
2. Distribusi SAF: Strategi prioritasi saluran distribusi SAF untuk memastikan ketersediaan pada pasar domestik dan ekspor
3. Produksi SAF: Peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan teknologi SAF selaras dengan tren global
4. Ketersediaan bahan baku: Kepastian ketersediaan bahan baku SAF bagi *current generation* SAF maupun *next-gen* SAF

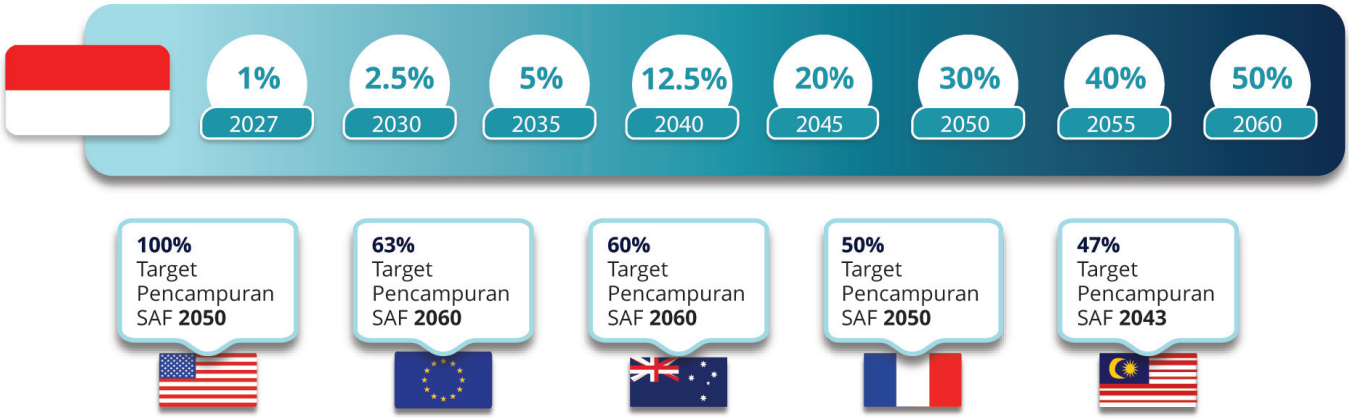
Rencana Aksi Nasional (Renaksi) yang telah dirancang, meliputi 15 program utama dan 61 aktivitas untuk periode 2025-2030. Renaksi ini diharapkan akan memberikan langkah taktis bagi Pemerintah untuk merealisasikan tiga tujuan besar industri SAF Indonesia. Renaksi yang telah disepakati bersama oleh semua Kementerian/ Lembaga terkait diharapkan dapat dituangkan melalui regulasi nasional, melalui Instruksi Presiden untuk menandakan kebangkitan industri aviasi Indonesia.

Potential Contribution in Reducing Carbon Emission
(ICAO - LTAG Study)





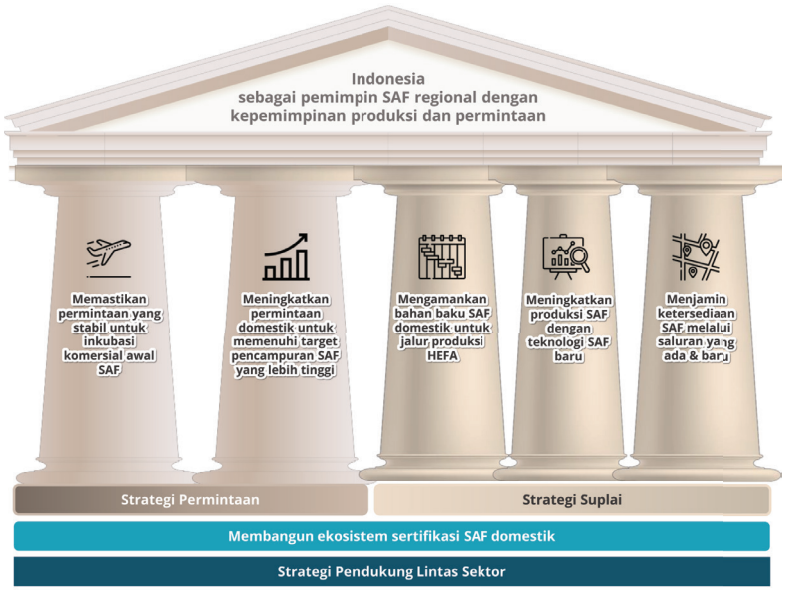
Pertemuan dgn Sekjen ICAO di sela2 ICAO LTAG Stocktacking tgl 11 Okt 2024 di Montreal, Canada.



Sumber: Berbagai sumber publik, Analisis tim kerja lintas Kementerian



(Peta Jalan Nasional Pengembangan Industri SAF di Indonesia)



Membebaskan Aset Negara **di Luar Negeri**

(Koordinasi Pengecualian Aset Pertamina dari Embargo Pemerintah AS terhadap Venezuela)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi semenjak tahun 2023 mengoordinasikan upaya pengecualian Aset Pertamina di Venezuela (melalui Maurel & Prom) yang sebelumnya tertahan operasinya semenjak tahun 2019 dikarenakan Embargo Pemerintah AS kepada Venezuela.

Lobi berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Indonesia (di antaranya oleh Menko Marves kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan AS) merupakan salah satu faktor pendorong\ terbitnya General License 44 (GL 44) oleh Pemerintah AS.

General License 44 (GL44) secara umum mengizinkan semua transaksi pada sektor migas Venezuela untuk 6 bulan ke depan (dapat diperpanjang).

GL44 mengizinkan beberapa hal antara lain:

- Semua aktivitas reproduksi, lifting, penjualan atau ekspor migas dari Venezuela, pembayaran pajak, royalti, biaya2, fees, dividen dan keuntungan;
- Pembayaran untuk barang dan jasa terkait operasional migas di Venezuela
- Otorisasi untuk investasi baru pada sektor migas di Venezuela;
- Pengiriman minyak dan gas kepada kreditor Pemerintah Venezuela atau PdVSA sebagai pembayaran hutang.

Hal ini memungkinkan Aset Pertamina kembali operasional semenjak Oktober 2023 dan telah mendapatkan USD 289 juta hingga bulan Maret 2024.

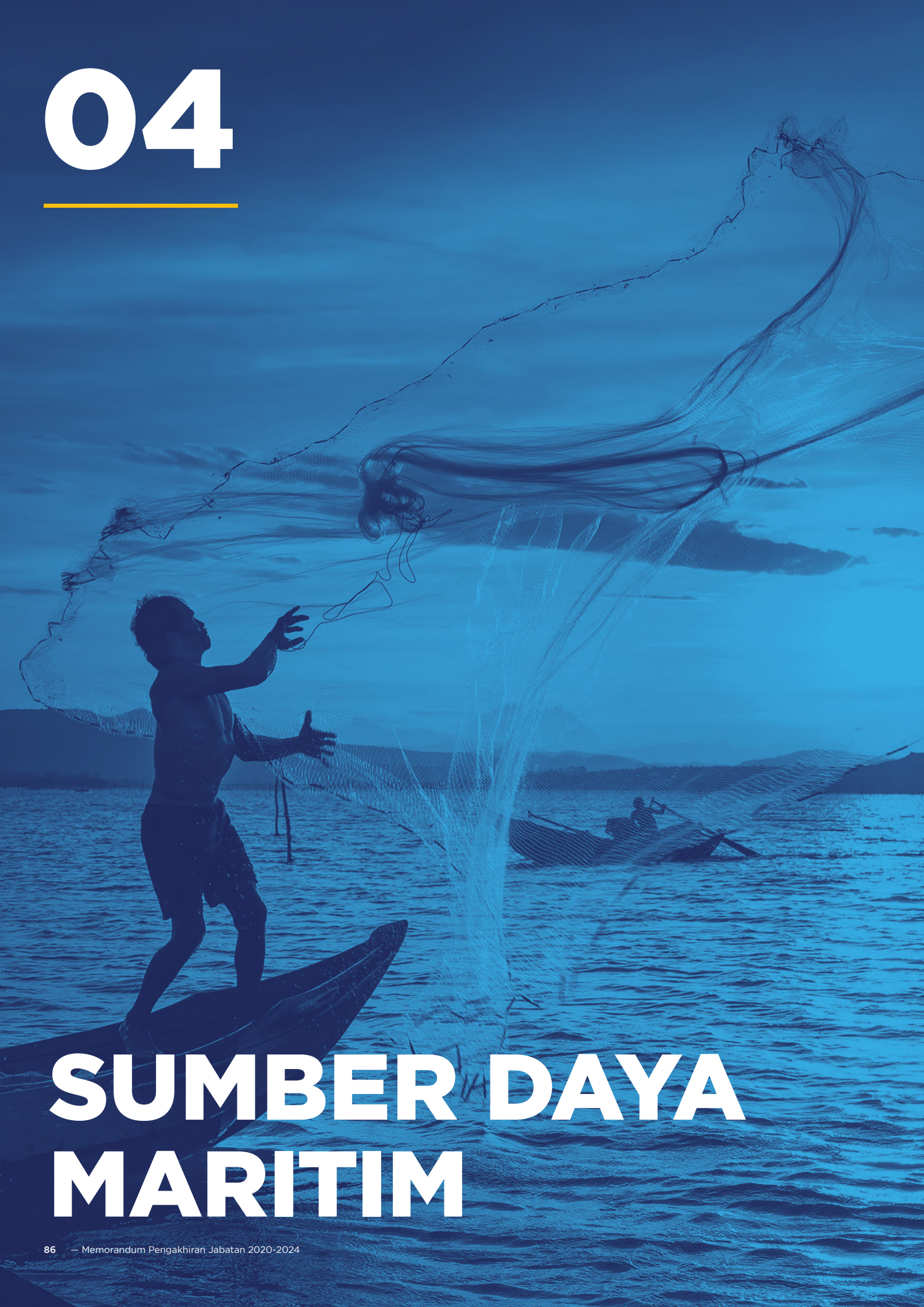
Selain itu, jika tidak ada perubahan kebijakan, Pertamina diproyeksikan bisa meraih pendapatan hingga USD 1 miliar dari aset di Venezuela tersebut yang berasal dari potensi pendapatan pada tahun 2024 dan outstanding debt dari PDVSA (Operator dan Regulator Venezuela) kepada Pertamina.





Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken

04



SUMBER DAYA MARITIM

Revitalisasi **Tambak Udang**

Pemerintah saat ini terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan Industri udang nasional. Hal ini tentunya telah sejalan dengan amanat di dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mana salah satunya terkait Major Project Revitalisasi Tambak di Sentra Produksi Udang dan Bandeng. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa angka pertumbuhan produksi udang nasional ditargetkan mampu mencapai 8% per tahun.

Selain itu, akselerasi Industri Udang Nasional Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait membentuk Pokja Udang Nasional sesuai dengan Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi no 42/DII/2022 yang mensinergikan berbagai bidang untuk peningkatan industry udang.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/DII TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI INDUSTRI UDANG
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 terkait dengan pelaksanaan Agenda Pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Pelaksanaan *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi kebijakan pelaksanaan dan pengawasan lintas pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan produksi industri udang nasional, perlu dibentuk Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Pokja Udang Nasional mentargetkan produksi Udang sampai Tahun 2024 sebesar 2 juta ton dan capaian nilai eksport 4,3 ribu USD. Target ini belum terpenuhi karena tata kelola udang nasional masih banyak perlu pembenahan.

Namun demikian, beberapa hal yang berhasil dikordinasikan seperti perbaikan muara sungai dan irigasi di sentra-sentra produksi udang nasional seperti di Pinrag Sulawesi Selatan, Lampung. Selain itu pembuatan DED irigasi kawasan tambak 1000 ha di berbagai sentra produksi seperti Sukamara, Maros, Gresik.

Kondisi saat ini menunjukan bahwa performa Industri udang dalam negeri belum mampu tumbuh sebagaimana yang telah ditargetkan, baik dari sisi volume produksi maupun nilai ekspor. Merujuk pada laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 pertumbuhan produksi udang nasional hanya mampu tumbuh sebesar 2% yoy, sedangkan nilai ekspornya turun hingga -19% yoy. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah tentunya perlu menyusun kebijakan proaktif melalui perbaikan tata kelola industri. Hal ini tentunya menjadi urgensi, mempertimbangkan bahwa komoditas udang memiliki share terbesar atau mencapai 30% terhadap total nilai ekspor produk perikanan dalam negeri

Kebijakan perbaikan tata kelola yang digagas oleh Pemerintah, mencakup 5 hal utama, yakni pengaturan kesesuaian zonasi, standarisasi retribusi, simplifikasi dan fasilitasi perizinan, perbaikan tata cara budidaya yang lebih ramah lingkungan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi.



berikut merupakan program yang diadakan guna mendukung Butuh Perbaikan Tata Kelola yang Terintegrasi Antar KL untuk Menjaga Kinerja Pertambakan Udang :

capain kebijakan 2024 :

- KKP, Kemendagri, Kemenkeu KLHK, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, BKPM dan BPKP menyepakati perlu ada kebijakan yang saling terkoordinasi untuk mendukung perbaikan tata kelola Industri Tambak Udang. Komitmen ini disampaikan pada saat Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Bapak Menko pada tanggal 15 Mei 2024;
- Kemenkeu, KKP, dan Kemedagri sepakat perlu ada sosialisasi bersama kepada seluruh Pemda bahwa merujuk pada regulasi yang berlaku, Pemda dilarangan melakukan Pungutan/Retribusi secara langsung terhadap usaha pertambakan udang;
- Kemendagri telah mengeluarkan Surat kepada seluruh Pemda, agar mendukung upaya Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambakan udang. Hal ini mencakup Komitmen menjaga kesesuaian zonasi eksisting, tidak melakukan pungutan/retribusi yang tidak diatur dalam regulasi eksisting serta pro aktif mendukung sosialisasi dan fasilitasi perizinan;
- Pemerintah dan Asosiasi telah menyepakati rancangan PermenKLHK yang mengatur terkait Baku Mutu dan IPAL Pertambakan Udang;
- Demi menjaga keberlangsungan dan pengawalan kesesuaian zonasi tambak udang eksisting, Kementerian ATR/BPN berkomitmen akan mengundang Kemenko Marves dan KKP pada saat rakor lintas sektor terkait pembahasan Perda RTRW;
- BPKP telah melakukan reviu kebijakan dan perizinanan tata kelola pertambakan udang nasional dan hasilnya sudah disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh KL terkait

Sumber Data yang menjadi evidence capaian dari revitalisasi tambak udang bersumber dari Pokja udang nasional yang dibentuk oleh KEMENKOMARVES dengan K/L terkait, yang mana hal tersebut tedapat di dalam Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 167/Di Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Tahun 2020-2024.









Pengembangan **Rumput Laut**

Pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi rumput laut sebagai salah satu komoditi perikanan utama nasional. Kemenko Marves dan World Bank bekerja sama dalam pengembangan rumput laut terintegrasi hulu ke hilir.

Kemenko Marves mengembangkan kawasan budidaya rumput laut, di wilayah Teluk Ekas, Lombok Timur, dan akan berkembang hingga ke wilayah NTB di Pulau Sumbawa. Sementara dibutuhkan kawasan seluas 2.400 hektar, akan terus berkembang dalam jumlah yang lebih luas, sesuai dengan kebutuhan. Pertumbuhan ekspor rumput laut Indonesia secara kompetitif mengalami peningkatan setiap tahun untuk aspek nilai dan volume.



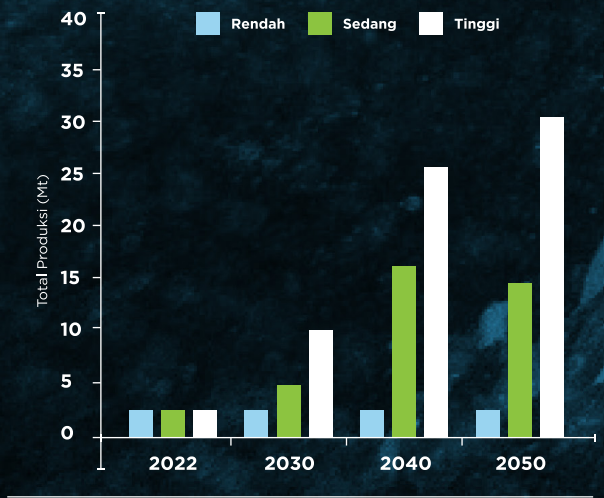
Kondisi budidaya rumput laut saat ini - *Labor Intensive*, tetapi kesejahteraan petani masih rendah

Manfaat Rumput Laut 3P:
People – Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat

63 Ribu
Rumah Tangga Usaha Budidaya Rumput Laut di Indonesia

- **64%** — Pengelola budidaya hanya berpendidikan SD atau bahkan tidak tamat SD
- **50%** — Masih memiliki rumah beratapkan seng
- **40%** — Rumah tangga tinggal di rumah berdinding kayu
- **5.9%** — Memiliki akses ke bank untuk pembiayaan

Perkiraan Permintaan Rumput Laut Terkait Makanan
Sumber: KKPRI



Sumber : Murai et al, 2020. Chen et al (2018), Vellinga (2022) CBI, Island Institut, United Nations, FAO, Standard Chartered Research.

Manfaat Rumput Laut 3P:
Prosperty – Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi

9,6 Juta Ton
Produksi rumput laut nasional 2022

Peringkat **2**
Produksi rumput laut dunia. Untuk produksi rumput laut tropis No.1

400 Juta USD
Nilai ekspor rumput laut Indonesia 2022. Peringkat 5 ekspor perikanan nasional

65 Persen
Produksi akuakultur nasional

13,3 Miliar USD
Nilai industri budidaya rumput laut di tingkat global

Manfaat Rumput Laut 3P:

Planet – Menjaga Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim

Bioindikator, sebagai indikator **kesehatan laut secara keseluruhan**

Meningkatkan Kualitas Air dan **Mencegah Eutrofikasi**

Mencegah Penyakit melalui Biofilter nutrien dan Biofilter polutan di perairan

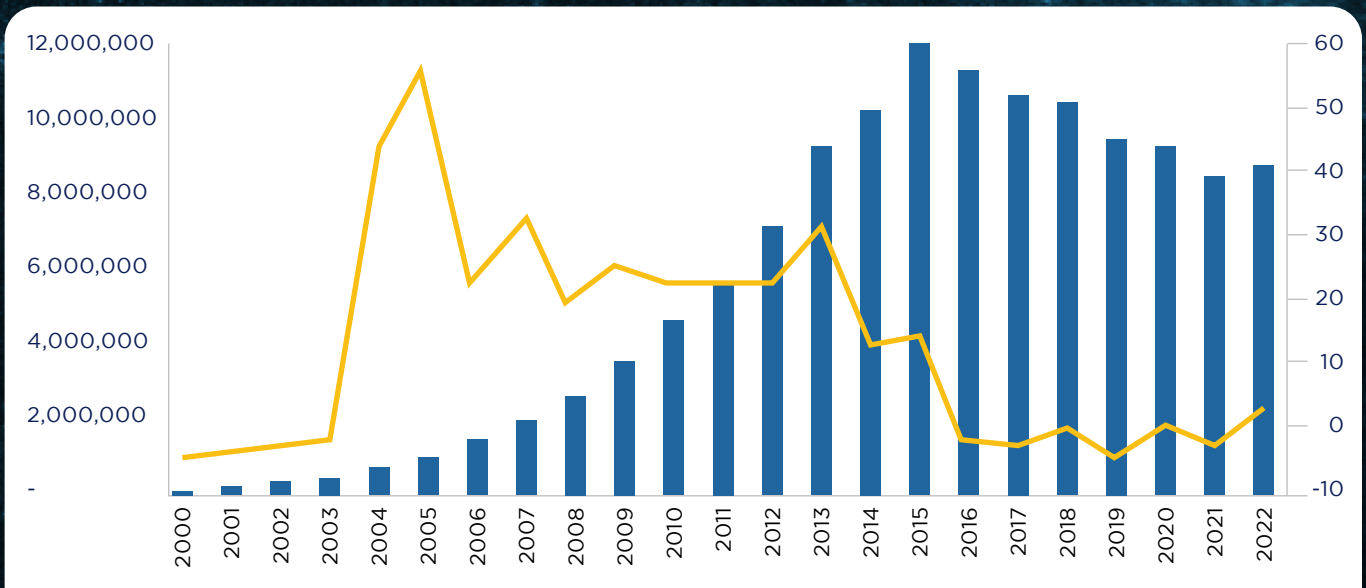
Penyedia Habitat bagi ikan dan organisme lainnya, sebagai bagian **dari rantai makanan untuk biota laut lainnya**

Memproduksi Oksigen untuk kebutuhan binatang laut maupun darat

Mengatur iklim melalui **Penyerapan Karbon** sebesar **173 *Teragams of Carbon*/tahun (61-268 TgC/tahun)**

Tidak membutuhkan lahan di darat, lebih sedikit menggunakan air bersih (tawar), dan tidak menggunakan pupuk

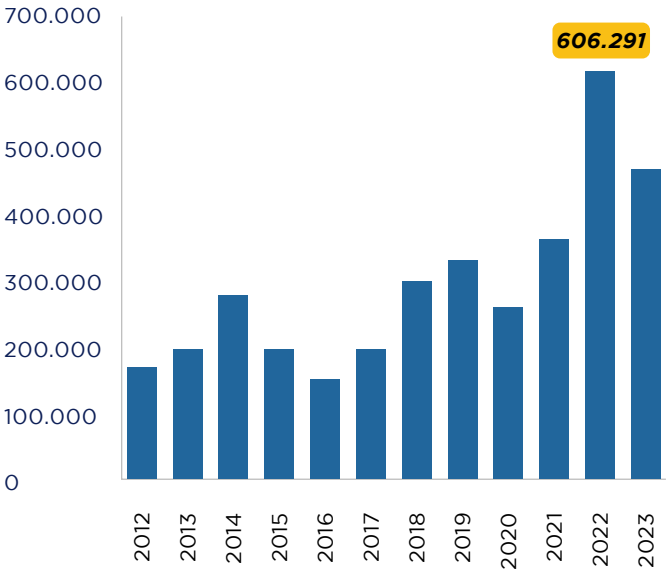
Banyak pakar berpendapat bahwa industri rumput laut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kontributor utama dalam mencapai visi tersebut. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023, produksi rumput laut nasional mencapai 10,7 juta ton, tumbuh sebesar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi terhadap total produksi akuakultur mencapai 63%. Dari segi kinerja ekspor, nilai ekspor rumput laut pada tahun 2023 mencapai 433 miliar USD, berkontribusi sebesar 7,7% terhadap total nilai ekspor produk perikanan nasional. Sebagai bagian dari penguatan visi ekonomi biru yang telah dicanangkan pemerintah, peningkatan produksi dan ekspor rumput laut menjadi salah satu faktor mutlak yang perlu terus dikejar. Selain itu, fokus pengembangannya juga perlu diarahkan pada konsep pertumbuhan yang lebih efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.



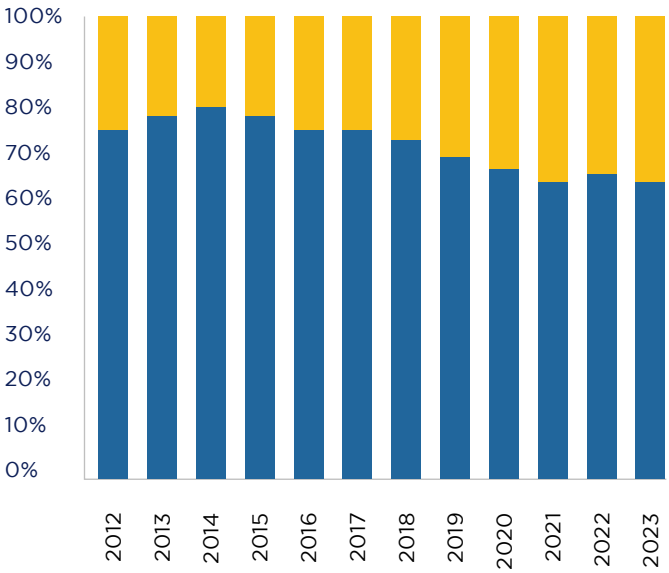
Grafik. Trend pertumbuhan volume produksi rumput laut nasional (FAO dan KKP,2023)

Dalam beberapa tahun kebelakang industri rumput laut nasional tengah menghadapi tantangan produktivitas yang cukup serius. Trend volume produksinya cenderung mengalami perlambatan atau bahkan penurunan (dalam kurun 2019 – 2022 rerata pertumbuhannya dari tahun ke tahun -2,7%). Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya wabah penyakit dan perubahan iklim. Penyakit ice-ice menjadi salah satu wabah yang paling merugikan dalam industri budidaya rumput laut nasional, terutama untuk jenis Eucheuma dan Kappaphycus. Dampak yang ditimbulkan memiliki mangnitude yang sangat besar. Akibatnya, pada beberapa kasus dilaporkan menimbulkan kematian massal jika tidak segera ditangani. Selain itu, untuk individu yang mampu bertahan, dilaporkan mengalami penurunan kualitas produk yang cukup serius yang mana hal ini juga turut mengurangi daya jual rumput laut, sehingga berdampak langsung pada pendapatan petani dan industri rumput laut secara keseluruhan. Disamping itu, biaya untuk pembersihan dan pengelolaan infeksi juga sangat tinggi, menambah beban ekonomi bagi para pelaku usaha.

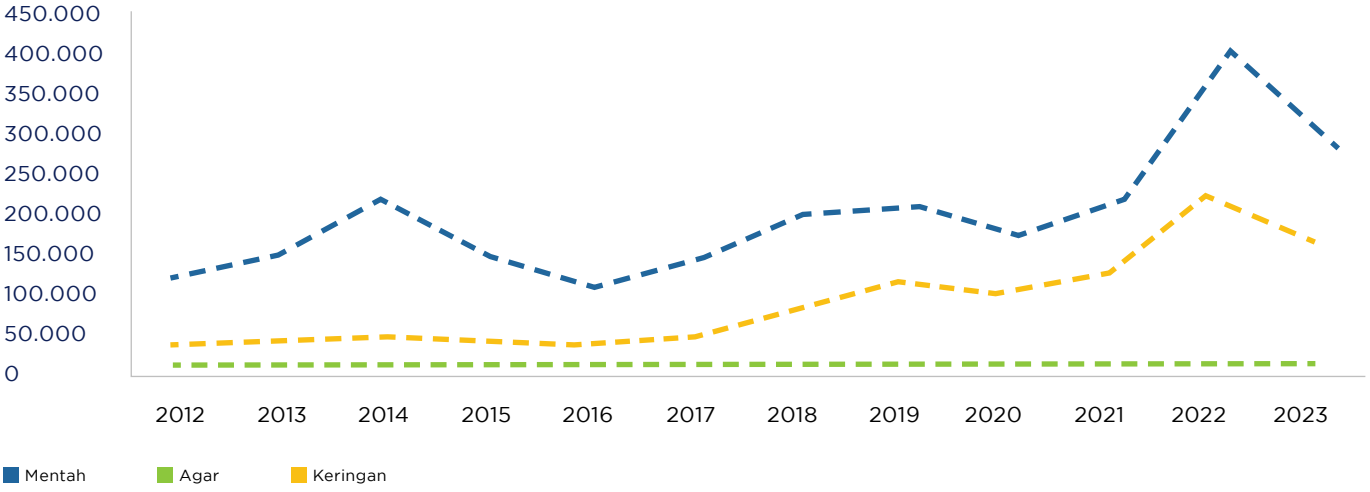
Trend Nilai Eksport Rumput Laut Indonesia 2012-2023 (Ribu USD)



Share Produk Ekspor Mentah & Olahan Rumput Laut (%)



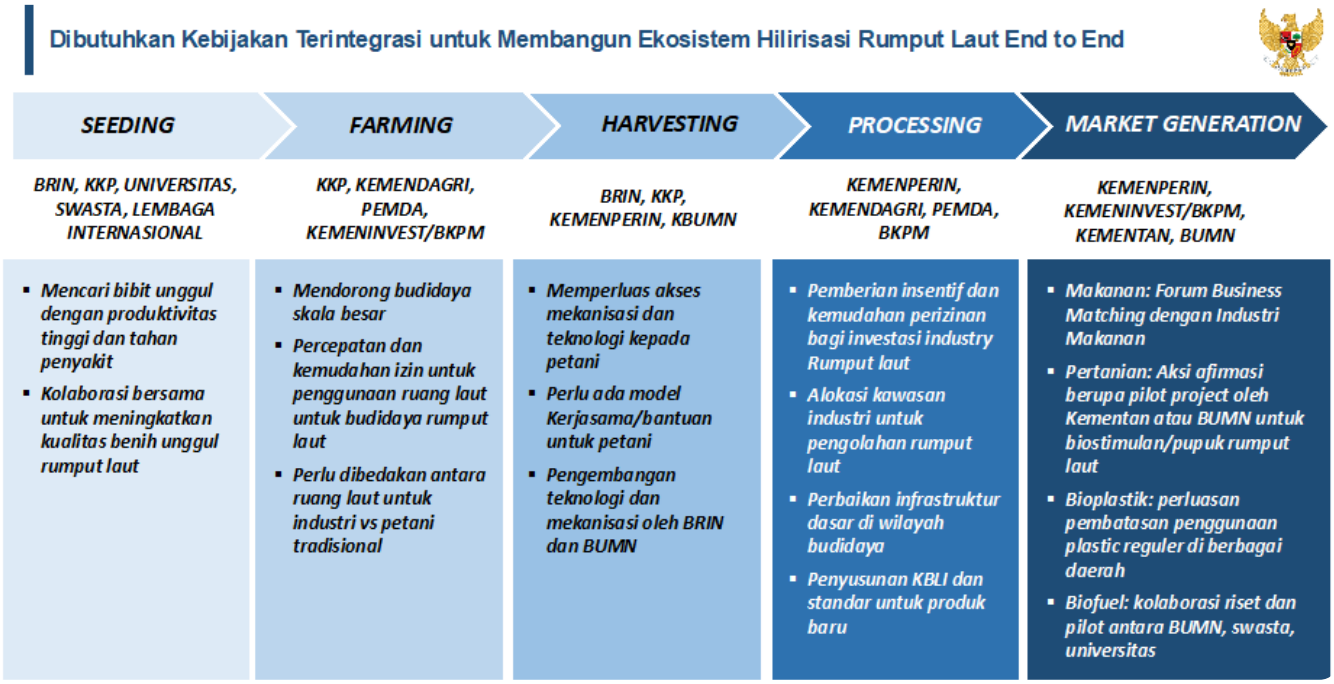
Trend Nilai Ekspor Antara Produk Mentah & Olahan Rumput Laut (Ribu USD)



Dari data di atas dterlihat trend eksprt rumput laut dari 2012-2023 dan share jenis produk dari 2021-2023. Terjadi penaikan produksi dari hamper 200.000 USD dan 400.000 Ribu USD tahun 2023. Sedangkan produk olahan masih didominasi oleh raw material dibanningkan dengan olahan sekitar 60%:40%.

Berdasarkan data dari ITC (International Trade Centre) Trademap Export ,Pada tahun 2022, terjadi peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan, didorong oleh lonjakan permintaan yang sangat besar dari China. Permintaan ini tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga produk rumput laut, yang berujung pada inflasi komoditas tersebut. Namun, memasuki tahun 2023, terjadi pelemahan permintaan dalam ekonomi global yang cukup terasa, yang tidak hanya menekan volume ekspor tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan harga produk rumput laut. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam proses normalisasi harga, setelah mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya.

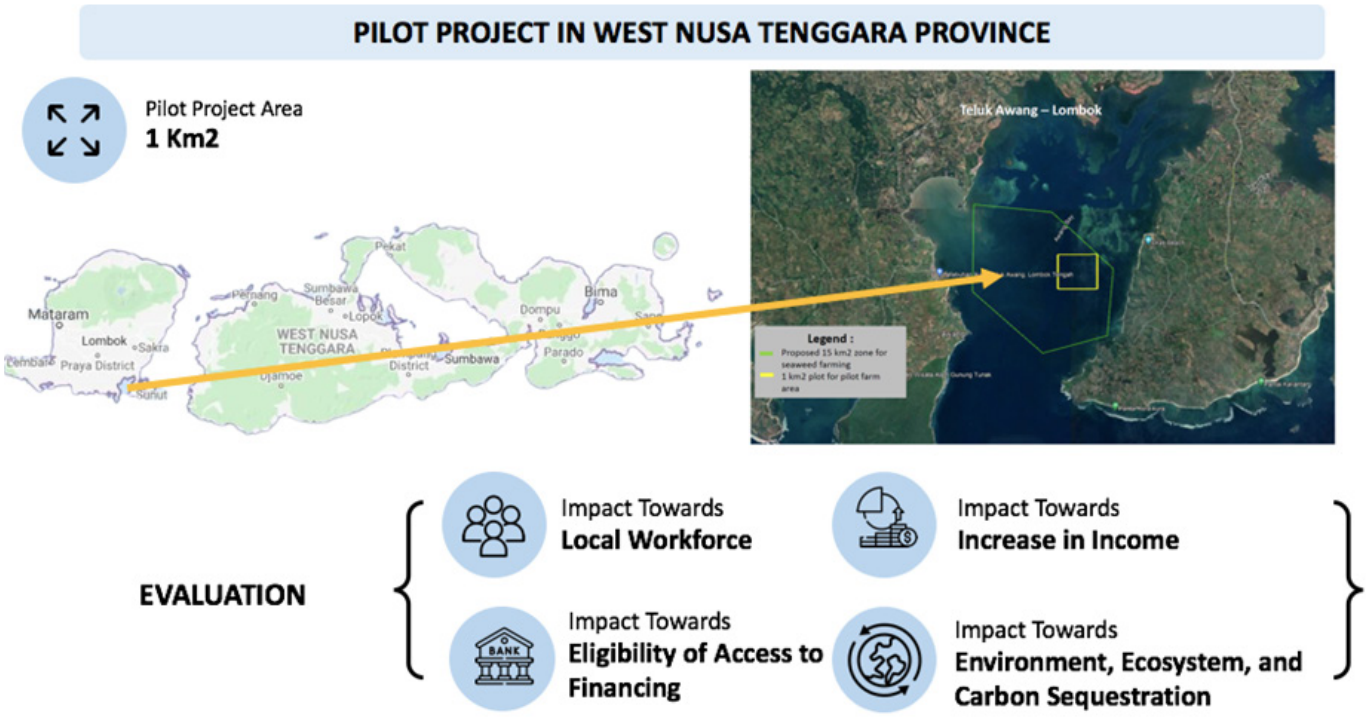
Dalam pelaksanaan kordinasi industrialisasi rumput laut terintegrasi, Kemenko Kemaritiman mendorong beberapa kebijakan yangharus dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir- Seeding sampai dengan market generation.



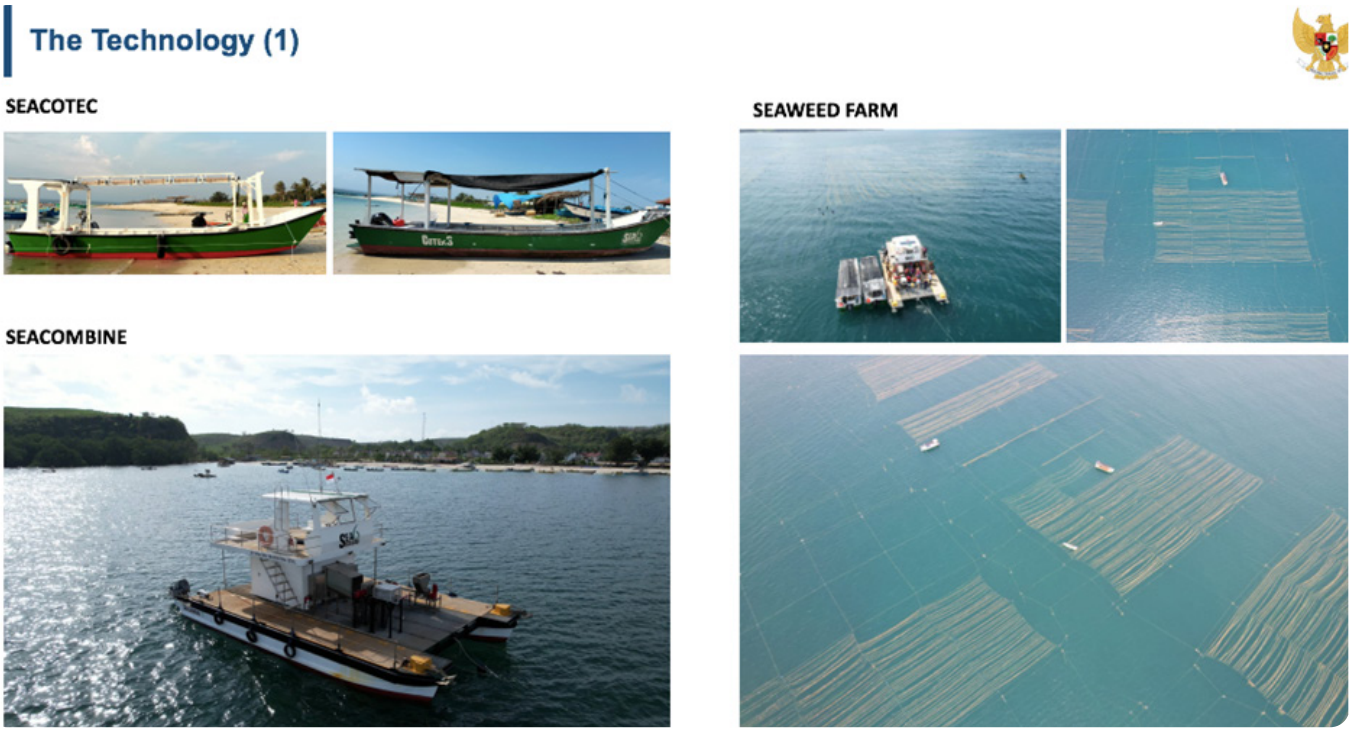
Terkait dengan arahan presiden pada rapat terbatas khusus membahas rumput laut bulan Jui 2023, Kemenko Kemaritiman Melaksanakan Koordinasi dengan capaian seperti di bawah ini.



Piloting Integrated Seaweed Large Scale.



Kemenko Kemaritiman dan Kementerian / lembaga terkait mendorong modelling pengembangan rumput laut skala korporasi yang pertama di Indonesia. Farming dilaknsakan oleh PT. Sea6 Energy yang berbasis di India. Piloting ini menggunakan teknologi mekanisasi dalam kegiatannya sehingga biaya produksi menjadi efektif. Produk yang dihasilkan adalah biostimulan dan bioplastic dan dalam jangka panjang akan mendorong kea rah biofuel.



Beberapa teknologi yang dikembangkan adalah pembuatan mesin pengikat bibit, traktor panen dan kapal pengangkut special. Piloting ini juga mendorong konsep kolaborasi yang saling menguntungkan antara pembudidaya tradisional dan korporasi yang ada di lokasi.

Selain itu, dalam piloting large scale farming ini juga mempertimbangkan pengaruh rumput laut skala besar pada biodiversitas seperti ikan, terumbu karang, seagrass maupun mangrove. Dilakukan survey biodiversitas berkala setiap tahun untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Juga menghitung potensi rumput laut dalam isu perubahan iklim dan penyerapan carbon.

International Tropical Seaweed Research Center

Pada tanggal 22 Mei 2022, Pemerintah Indonesia melounching International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) di Bali. Hadirnya lembaga ini mengingat Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan total produksi 9,6 juta ton pada tahun 2022, sekaligus menjadi produsen utama rumput laut tropis. Negara ini memiliki sekitar 700-an spesies rumput laut dengan berbagai aplikasi. Varietas seperti cottonii, spinosum, glacilaria, caulerpa, dan sargassum merupakan jenis yang saat ini dibudidayakan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan kementerian terkait, secara aktif mendorong pengembangan industri rumput laut di hilir. Penelitian menunjukkan potensi besar untuk produk turunan, seperti biostimulan, pupuk organik, makanan, bioplastik, bahkan biofuel. Uji coba budidaya rumput laut skala besar saat ini sedang berlangsung. Namun, penelitian lanjutan sangat penting untuk menilai dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal, serta dampak lingkungan termasuk pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Selain itu, eksplorasi potensi penyerapan karbon dari budidaya rumput laut juga menjanjikan.

Berbagai penelitian dan aktivitas telah dilakukan oleh banyak lembaga dalam pengembangan rumput laut. Beberapa universitas memiliki pusat studi rumput laut, dan lembaga penelitian juga melakukan kajian tentang potensi, masalah, dan tantangan terkait rumput laut.

Penelitian kolaboratif sangat penting antara berbagai institusi, termasuk lembaga penelitian, perusahaan swasta, universitas, mitra pembangunan, dan pakar global. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan bibit agar produktivitas meningkat, ketahanan terhadap penyakit, serta ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon. Selain itu, upaya bersama juga diperlukan untuk mendorong mekanisasi, pemanfaatan teknologi, dan menggali potensi hilir dari spesies rumput laut lainnya.

Indonesia membutuhkan Pusat Keunggulan untuk mendukung pengembangan hilir rumput laut. Salah satu terobosan strategis adalah pengembangan Pusat Rumput Laut Tropis Internasional. Berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki BRIN sangat representatif dalam mendukung pusat studi ini.

Pusat Keunggulan Internasional untuk Rumput Laut Tropis akan menjadi langkah monumental dalam mendorong kolaborasi global dalam penelitian, pengembangan, dan integrasi aktivitas hulu dan hilir rumput laut. Pusat studi ini akan menjadi titik sentral untuk penelitian ilmiah, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas di industri rumput laut.

ITSRC sendiri berada di BRIN karena sesuai dengan tusi BRIN terkait riset dan inovasi. Selain pemerintah, beberapa lembaga nasional dan internasional juga terlibat dalama dukungan tropical seaweed research center ini seprti World bank, FAO, UNIDO, UNGC, IGCN, MTCRC, Konservasi Indonesia, ARLI, ASTRULI, lembaga swasta, pakar dari iniversitas, maupun ekspert negara-negara lain seperti India, China, Jepang, Korea, Australia dan lainnya.

Tujuan dari ITSRC adalah:

1. **Meningkatkan pengembangan ekonomi industri rumput laut secara inklusif dan berkelanjutan.**

2. **Meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, ahli, dan praktisi, dalam upaya bersama mengembangkan industri rumput laut.**

3. **Mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan industri rumput laut secara berkelanjutan, termasuk regulasi yang memfasilitasi pengolahan hilir dan pertukaran teknologi.**

4. **Membangun jaringan kolaboratif antara peneliti, praktisi, dan pelaku industri dari berbagai negara dan disiplin ilmu untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman.**

5. **Memperkuat kolaborasi penelitian dengan meluncurkan Pusat Rumput Laut Tropis Internasional sebagai Pusat Keunggulan Nasional untuk industrialisasi rumput laut.**

Saat ini beberapa tantangan dalam pengembangan rumput laut. Sebagian rumput laut di Indonesia hanya di ekspor dalam bentuk bahan mentah atau dijadikan karagenan dan agar-agar, Skala kecil dan rendahnya produktivitas budidaya rumput laut disebabkan kurangnya penggunaan mekanisasi dan teknologi serta tantangan perubahan iklim dan penyakit.

Kolaborasi yang melibatkan pemangku kepentingan nasional dan global yang perlu diperkuat. Dalam kolaborasi seaweed beberapa topik terkait rumput laut, termasuk pendekatan inovatif untuk memerangi perubahan iklim peluang komersial, tren pasar, wawasan industry, peluang pembiayaan dan tren baru dalam inovasi bebasis teknologi.

Kegiatan Peluncuran International Center for Tropical Seaweeds (ICTS) dilanjutkan dengan seminar yang mengusung 3 (tiga) tema besar yaitu : Pendekatan Inovatif untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Peluang Komersial dalam Keanekaragaman Hayati Rumput Laut di Indonsia, Wawasan Industri, Tren Pasar dan Peluang Pendanaan Masa Depan untuk Industri Rumput Laut di Indonesia dan Tren Riset dan Teknologi yang Muncul yang Mendorong Inovasi dalam Industri Rumput Laut.



Lebih dari 70% luas Indonesia adalah laut dengan 12 juta ha dialokasikan untuk budidaya. Namun dengan segala keunggulan yang dimiliki, produksi rumput laut Indonesia masih belum optimal. Saat ini budidaya rumput laut baru mencapai 102 ribu ha atau 0,8%-nya saja. Lebih dari 60% ekspor rumput laut masih dalam bentuk mentah atau rumput laut kering, dengan hilirisasi yang terbatas.

Selama ini rumput laut hanya dikirim dalam bentuk mentah. Ke depan, paling tidak rumput laut yang dikirim ke luar negeri sudah dalam bentuk barang setengah jadi. Agar nilai ekonomi dari aktivitas ikutan pengolahannya bisa dilakukan di dalam negeri dan mengendap di dalam negeri.

Melalui budidaya skala besar seluas 100 ha dengan mekanisasi dan teknologi, banyak manfaat ekonomi yang dapat diraih yakni investasi sebesar USD 2-2.5 juta, penciptaan tenaga kerja langsung sebanyak 100-150 orang, produksi rumput laut basah 10-15 ribu ton per tahun, dan setara produksi biostimulant yang dapat mencakup 1-2 juta lahan pertanian.

5 isu yang menjadi hambatan utama, mulai dari aspek regulasi, perizinan berusaha, ketidakstabilan harga, tata kelola di industri pengolahan dan budidaya rumput laut serta permodalan.

Capaian s.d TW I 2024 terkait pengembangan rumput laut oleh masing-masing K/L antara lain:

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama K/L terkait telah melaksanakan fasilitasi investasi sekaligus pilot project budidaya.
- rumput laut terintegrasi hulu–hilir skala besar (luasan hingga 100 Ha) dengan konsep corporate farming di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. Kemenko Marves akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif khususnya terkait dampak aktivitas tersebut mulai dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan pilot project budidaya rumput laut terintegrasi hulu–hilir serta menyiapkan lima lokasi percontohan hilirisasi rumput laut (Wakatobi; Maluku Tenggara; Buleleng; Rote Ndao; dan Lombok).
- Kementerian Perindustrian telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan yang terkait dengan kemudahan perizinan, penyempurnaan KBLI, penyelenggaraan business matching serta insentif pengembangan teknologi.

Target hilirisasi rumput laut (seaweed) akan menghasilkan US$19 miliar atau sekitar Rp304 triliun (kurs Rp16.008 per dolar AS) pada 2030. Hilirisasi rumput laut bakal membuka lapangan kerja yang besar. Untuk setiap 100 hektare bisa mempekerjakan 150 orang.

Laporan World Bank bertajuk Global Seaweed New and Emerging Market Report 2023, Indonesia dan China berapa pada puncak pasar rumput laut dunia sebesar 98 persen. China sendiri memiliki market share sebesar 56 persen, sedangkan Indonesia sebesar 27 persen.





Tim Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim bersama dengan Sea6 sedang melihat proses pemilahan rumput laut di lombok (03/04/2023)



Menko Luhut Bersama dengan Menteri Perindustrian Tinjau Langsung Pengembangan Rumput Laut di Laut Lombok (29/02/2024)



Menko Luhut, Menteri Perindustrian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan foto bersama dengan para pelaku budidaya rumput laut di Lombok (29/02/2024)




Indonesia Berpotensi
Jadi Pemimpin Global
Industri Rumput Laut
media.worldwaterforum.org
1


Iklim tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun memastikan rumput laut Indonesia memiliki kualitas terbaik. Hal ini sering disebut sebagai "Emas Hijau" karena potensi berkelanjutannya.
media.worldwaterforum.org


Rumput laut adalah sumber daya terbarukan yang sangat menjanjikan bagi kemakmuran masyarakat dan planet bumi.
media.worldwaterforum.org
2


Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan riset dan teknologi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan nasional dan global dalam membahas berbagai topik terkait rumput laut.
media.worldwaterforum.org


Meski demikian, saat ini masih ditemui beberapa tantangan dalam pengembangannya. Sebagian rumput laut di Indonesia hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau dijadikan karagenan dan agar-agar.
media.worldwaterforum.org

Pembangunan **Pergaraman Nasional**

Pemenuhan kebutuhan nasional garam diamanatkan pada Pepres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N). Perpres P3N memuat substansi bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan percepatan pembangunan pergaraman nasonal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Selanjutnya, disebutkan bahwa semua kebutuhan garam nasional baik industri dan konsumsi harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024, kecuali garam untuk industri kimia atau chlor alkali. Pelaksanan Percepatan pembangunan pergaraman dilaksanakan pada sentra ekonomi garam rakyat di wilayah provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Dalam implementasinya, proses bisnis hilirisasi pergaraman meliputi tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran. Pelaksanaan proses bisnis tersebut tertuang dalam rencana aksi yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait melalui program dan kegiatatan yang selaras dengan target Perpres P3N.

Produksi dan Kebutuhan Garam Nasional 2015 s.d. 2024 (Dalam Juta Ton)

Tahun	Produksi	Kebutuhan
2015	2.49	3.20
2016	0.14	3.53
2017	1.11	3.86
2018	2.72	4.47
2019	2.85	4.57
2020	1.37	4.46
2021	1.06	4.67
2022	0.77	4.42
2023	2.55	4.96
2024*	2.00	

* Keterangan: Merupakan angka target produksi sesuai Kepmen KP No 69/2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Recana Aksi P3N pada SEGAR.

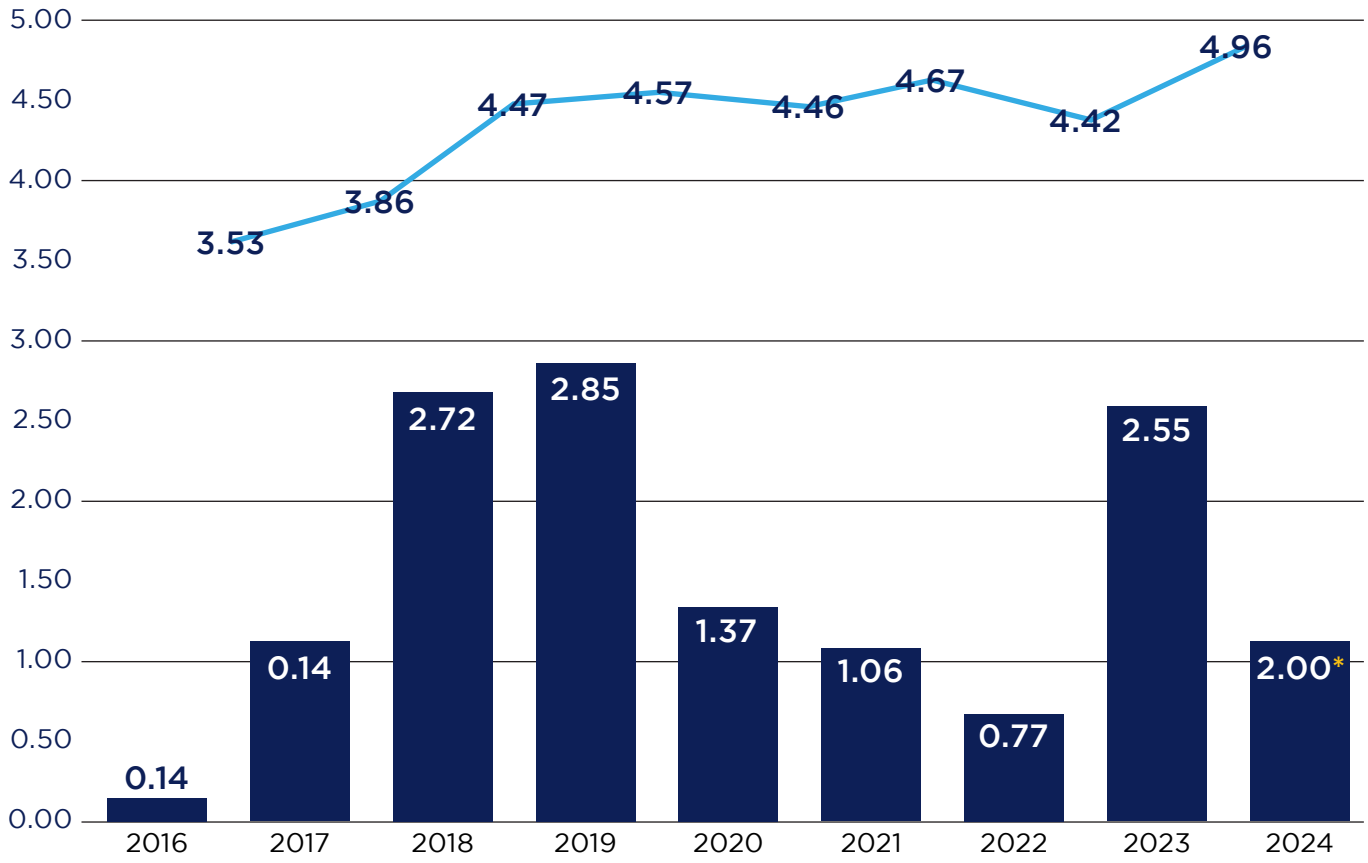


Ladang Garam di Nusa tenggara Timur



Para pekerja sedang memanen garam di ladang garam di Nusa Tenggara Timur (2021)

Grafik Produksi dan Kebutuhan (Dalam Juta Ton)



*Keterangan: Merupakan angka target produksi sesuai Kepmen KP No 69/2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi P3N pada SEGAR

Peraturan	Tentang	Muatan
Permenko Marves No. 5/2023	**Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi P3N**	Menetapkan **mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyesuaian** Renaksi P3N
Permen KP No 15/2023	**Tata Cara Penetapan SEGAR**	SEGAR ditetapkan pada provinsi dengan kriteria: ketersediaan **lahan produksi,** ketersediaan **prasarana dan sarana,** terdapat **pangsa pasar, dan dukungan** pemerintah
Kepmenko Marves No 156 DII Tahun 2023	**Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Renaksi P3N**	Menetapkan tim pelaksana teknis yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Anggota, Tim Verifikator dan Sekretariat
Kepmen KP No 69/2023	**Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi P3N pada SEGAR**	Produksi 2023: **1.7 juta** ton Produksi 2024: **2 juta** ton
Kepmen KP No 7 Tahun 2023	**Sentra Ekonomi Garam Rakyat**	Menetapkan **10 Sentra Garam:** Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, dan Gorontalo

Berdasarkan data trend selama 9 tahun terakhir, kebutuhan garam nasional selalu meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan industri yang membutuhkan garam dari tahun ke tahun.

Dalam rangka pemenuhan tersebut, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam nasional. Total produksi garam nasional pada tahun 2023 mencapai 2.551.731 juta ton, terdiri dari hasil produksi garam rakyat sebanyak 2.214.766 ton, produksi PT Garam sejumlah 310.000 ton, dan dari industri yang mengusahakan lahan ekstentifikasi di NTT sebesar 26,965 ton.

Capaian total produksi garam nasional tersebut melampaui target produksi garam nasional tahun 2023 yaitu sebesar 1.7 juta ton. Sebagai langkah peningkatan kualitas garam produksi nasional tersebut, saat ini sedang dioptimalkan pemanfaatan pabrik pengolahan garam yang dikelola oleh kelompok ekonomi petambak garam di lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Melalui upaya ini kualitas garam produksi nasional ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan garam nasional.

Saat ini tengah dikembangkan teknologi produksi garam tanpa lahan. Salah satu perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi tersebut adalah PT Ainul Hayat Sejahtera di Banten dengan kapasitas terpasang 210 ribu ton/tahun. Pemerintah akan mendorong keberhasilan dari pengembangan teknologi tersebut dan akan mengupayakan dapat diduplikasi di lokasi lain. Secara jangka panjang, diharapkan hasil produksi dari teknologi ini dapat digunakan untuk mensubtitusi garam untuk industri kimia atau chlor alkaliyang saat ini seluruh pemenuhannya dari mekanisme impor.





potret garam yang telah diolah menjadi garam spa, untuk klinik kecantikan di cirebon (2021)

Dalam rangka pencapaian kebutuhan garam nasional untuk mensubtitusi garam impor (kecuali untuk industri kimia atau chlor alkali) sebagaimana amanat pasal 2 Perpres P3N, pada rencana kerja tahun 2024 akan difokuskan pada tiga strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi melalui ekstentifikasi dan integrasi lahan
2. Optimalisasi dan percepatan penerapan teknologi produksi garam tanpa lahan
3. Optimalisasi pemanfaatan pabrik pengolah garam rakyat yang telah dibangun oleh pemerintah, BUMN maupun BUMS.



Potret garam hasil panen di cirebon (2021)

Koordinasi **Eksplorasi Laut Dalam dan Literasi Maritim**







Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 70% wilayah laut dengan total 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Indonesia memiliki potensi mega bio-diversitas sebesar 8.500 biota laut, potensi produksi akukultur laut lebih dari 50 juta ton/tahun, kabel laut yang mendukung arus digitalisasi nasional dan global sepanjang 115.000 km, dan potensi produksi perikanan berkelanjutan lebih dari 12 juta ton/tahun, serta banyak lagi potensi karbon biru dan energi baru terbarukan yang belum digali secara maksimal.

Namun, hingga saat ini baru 19% laut Indonesia yang telah dipetakan, dan kajian yang telah dilakukan di laut dalam Indonesia tentunya lebih kecil. Untuk melakukan pemetaan atau eksplorasi laut Indonesia, Pemerintah Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait (BRIN, Kemenlu, Kemenhan, Kemendikbudristek, Bappenas, Pushidrosal, BMKG, KemESDM, KKP, KLHK, Universitas, dan Konservasi Indonesia) melaksanakan kerja sama untuk menjelajah laut dalam Indonesia dengan Institute of Deep-Sea Science and Engineering (IDSSE)-China Association of Science (CAS) dan OceanX, dengan topik utama kegiatan yaitu: keanekaragaman hayati laut, potensi karbon, asesmen stok ikan, pemetaan potensi gempa, dan inovasi produk.

2022

16 November 2022

Pemerintah Indonesia memulai kerja sama mengenai ekspedisi laut dalam pada 16 November 2022 pada kegiatan G20 Bali dengan penandatanganan Letter of Intent antara Kemenko Marves dengan Oceanographic Research & Exploration Foundation, G Forty Two General Trading LLC dan GTech pada Partnership in Marine Research, Technology and Capacity Development.

2023

25 Mei 2023

Letter of Intent (LoI) dengan Beijing Genomics Institute (BGI) Hong Kong Tech Co.Ltd.

23 Juli 2023

Selanjutnya penandatanganan MoU Pemerintah Indonesia bersama OceanX pada 23 Juli 2023.

8 - 18 September 2023

Dalam pelaksanaan Kerja sama tidak hanya Ekspedisi Laut Dalam juga terdapat Capacity Building untuk mendukung Literasi Maritim Indonesia. Pelaksanaan Ekspedisi Laut Dalam dimulai pada Tahun 2023 dengan kegiatan Young Explorer Program Batch 1 dengan meneliti laut Dalam dari Azores ke Malta dengan para peneliti Indonesia dan Mahasiswa Indonesia dari 8 - 18 September 2023.

2024

20 Feb - 22 Mar 2024

Pada 2024, diawali dengan pelaksanaan "Java Trench Joint Expedition" pada tanggal 20 Februari – 22 Maret 2024 menggunakan Kapal Riset IDSSE-CAS "Tan-Suo-Yi-Hao" dengan 4 orang peneliti Indonesia dan 1 orang security officer (SO). Hasil dari ekspedisi tersebut diperoleh data dan sampel dalam bentuk biota laut, sedimen dan batuan laut dalam yang selanjutnya disimpan oleh BRIN dan akan diteliti lebih lanjut oleh para periset. Pelaksanaan ekspedisi ini juga memecahkan rekor MURI dengan penyelaman terdalam mencapai 7.192 meter oleh orang Indonesia

4 Mei - 9 Agustus 2024

Pada 4 Mei - 9 Agustus 2024 telah dilaksanakan Indonesia Exploration Mission bersama OceanX dengan rute dari Banda Aceh, teluk bayur, tanjung priok, Benoa, dan berakhir di Bitung. Pada ekspedisi bersama ini menghasilkan temuan-temuan biota laut yang baru serta ditemukan biota laut yang hampir punah di laut Indonesia. semua sampel yang diambil dalam pelaksanaan ekspedisi ini disimpan dan dikelola oleh pemerintah Indonesia yang dikelola oleh BRIN. Hasil dari ekspedisi laut dalam ini selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan produk dan solusi inovatif seperti aplikasi dalam kedokteran, bioteknologi, dan ilmu material yang memiliki potensi protein fungsional. Tidak hanya biota laut dengan adanya ekspedisi laut dalam telah dilakukan penelitian juga mengenai potensi gempa Megathrust Bawah Laut.

Tidak hanya fokus pada Riset dalam ekspedisi laut dalam Pemerintah Indonesia juga menitik beratkan pada Aspek Pendidikan sebagai bentuk Literasi Maritim bagi masyarakat khususnya pelajar Indonesia. Bentuk realisasi dalam aspek pendidikan yaitu Young Explorer Program pada Indonesia Exploration Mission sejak 4 Mei - 9 Agustus 2024 dengan jumlah mahasiswa yang ikut untuk meneliti di atas kapal dengan rute Jakarta - Bali dan Bali - Bitung dengan jumlah 30 Mahasiswa Indonesia dari berbagai Universitas di Indonesia dan Internasional.

7 Mei – 26 Agustus 2024

Pada 7 Mei – 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan “Indonesia -OceanX Exploration Mission 2024” dengan rute dari Batam, Banda Aceh, Teluk Bayur, Tanjung Priok, Benoa, dan berakhir di Bitung. Misi ini menghasilkan temuan biota laut, pegunungan bawah laut, taman bawah laut, sedimen dan batuan laut dalam, serta juga ditemukan ikan coelacanth (ikan raja laut) yang dinyatakan hampir punah. Semua data dan sampel yang diperoleh dalam misi ini, disimpan oleh BRIN untuk diteliti lebih lanjut oleh para periset. Hasil dari Misi ini selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan produk dan solusi inovatif seperti aplikasi dalam kedokteran, bioteknologi, dan ilmu material yang memiliki potensi protein fungsional. Tidak hanya biota laut, pada Misi ini juga dilakukan penelitian mengenai potensi Megathrust bawah laut sebagai upaya mitigasi bencana alam.

Tidak hanya fokus pada kegiatan riset, Misi ini juga menitikberatkan pada Aspek Pendidikan sebagai bentuk dukungan Penguatan Literasi Maritim Indonesia, khususnya kepada generasi muda. Bentuk realisasinya adalah pelaksanaan Young Explorer Program kepada 19 orang pelajar Indonesia dan 11 orang pelajar internasional (Amerika Serikat, Filipina, dan Singapura), yang ikut meneliti laut dalam dengan rute Jakarta – Bali dan Bali – Bitung pada tanggal 9 Juli – 10 Agustus 2024.

7 Mei - 27 Agustus 2024

Sejak tahun 2023 - 2024 telah dilakukan University Lecture Tours di beberapa Universitas Indonesia yaitu: University Lecture Tours 23 - 25 September 2023 di Institute Teknologi Bandung dan Institute Sepuluh Nopember dengan peserta lebih dari 300 peserta. Pada 4 Mei - 27 Agustus 2024 telah dilakukan University Lecture Tours di beberapa lokasi yaitu Institute Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Indonesia, dan diakhiri di Universitas Sam Ratulangi dengan jumlah peserta lebih dari 1000 mahasiswa. Dalam pelaksanaan ekspedisi laut dalam juga menghasilkan dua film dokumenter terkait laut Indonesia sebagai sarana edukasi masyarakat yaitu: Earthquake 20 Years After Aceh Tsunami dan Indonesia Deep Sea Exploration. yang bertujuan menampilkan wawasan ilmiah tentang megathrust, gunung berapi, gempa bumi, dan berbagai aspek budaya yang akan menjadi bagian integral dari Misi Ekspedisi Bersama Indonesia - OceanX serta melihat lebih dekat keindahan keanekaragaman hayati laut Indonesia ekologi laut di laut dalam Indonesia.

Selain itu, pada Misi ini juga dibuatkan sebuah film mengenai ikan purba “coelacanth” (ikan raja laut) oleh NHK Jepang, dimana ikan ini dinyatakan punah pada 66 juta tahun yang lalu, dan fosil coelacanth yang telah ditemukan diperkirakan berusia 410 juta tahun. Film ini akan ditayang secara global sebagai salah satu temuan luar biasa di Indonesia.






ST-253 XR







Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan berada di anjungan saat mengunjungi kapal OceanXplorer milik *OceanX*. *OceanX* merupakan sebuah organisasi nirlaba asal Amerika Serikat yang memiliki kapal penelitian laut yang dilengkapi dengan teknologi canggih.



Kapal selam tanpa awak (ROV) milik *OceanX* memulai penyelaman melaksanakan misi "Mission 2024" untuk meneliti perairan di RI terutama ekosistem perikanan dan zona megathrust.





Pipa Kabel Bawah Laut

Dalam upaya penatalaksanaan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut (Kepmen KP 14/2021) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut (Kepmen KP 42/2022). Berdasarkan monev tahun 2023, terdapat penambahan 7 pipa tergelar, kesemuanya berada di alur koridor serta penambahan 11 kabel tergelar, 5 di dalam koridor dan 6 di luar koridor.





Bangunan dan instalasi di perairan, seperti pipa dan kabel bawah laut, memiliki peran yang sangat strategis sebagai infrastruktur penunjang perekonomian nasional. Infrastruktur ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga memastikan stabilitas sektor-sektor krusial seperti minyak dan gas bumi, kelistrikan, dan telekomunikasi. Sebagai objek vital nasional, pipa dan kabel bawah laut harus dijaga, dikelola, serta ditata dalam rencana tata ruang laut dan zonasi guna menjamin keselamatan pelayaran, keamanan nasional, dan optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan lainnya.

Instalasi pipa dan kabel bawah laut memerlukan perencanaan yang cermat terkait penentuan koridor dan lokasi penempatannya. Mengingat pentingnya hal ini, pemerintah membentuk Tim Nasional Penataan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 107 Tahun 2020, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52/DI Tahun 2023. Tim ini berperan untuk mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait dalam memastikan pembangunan, pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur bawah laut dilakukan secara sinergis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan infrastruktur ini dapat dikelola secara efisien dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, dirasakan perlu adanya penyesuaian terhadap kerangka peraturan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ditemui di lapangan. Sepanjang tahun 2024, di samping melaksanakan kegiatan rutin dalam lingkup Tim Nasional, capaian progres lainnya yakni telah dilaksanakan FGD bersama pakar dan pemangku kepentingan terkait, workshop kerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika Serikat, serta studi banding ke Singapura. Melalui rangkaian kegiatan dan diskusi tersebut, direkomendasikan perlunya revisi terhadap Kepmen KP 14/2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Perubahan Kepmen KP 14/2021 ditargetkan untuk dapat ditetapkan pada tahun 2024.





Capaian Penggelaran Pipa dan Kabel Bawah Laut

Kabel Telekomunikasi

Jumlah Proyek (56)

Kabel Listrik

Jumlah Proyek (30)

Pipa

Jumlah Proyek (21)

Sumber Data: e-pipakabel (September 2024)

*Untuk Proyek Kabel Telekomunikasi yang tidak mencantumkan nilai investasi digunakan nilai rata-rata investasi kabel laut senilai US$ 40.000 (Rp. 600 juta) per kilometer panjang kabel (ASKALSI)

Nilai Investasi

Sumber Data: Kemenko Marves



Proyek Yang Telah Tergelar

Proyek Kabel Telekomunikasi

- LINGGA INTER ISLAND
- PATARA 2
- ANAMBAS INTERISLAND
- BALI-LOMBOK-NUSAPENIDA

- BIFROST
- PEACE SA
- SEAX - Tanjung Bemban

- SUNGSANG-MUNTOK

- SKKL ADC

- SKKL MIST

- SKKL ECHO

Proyek Kabel Listrik

- PHE OSES - PULAU PABELOKAN - PLATFORM ZELDA P

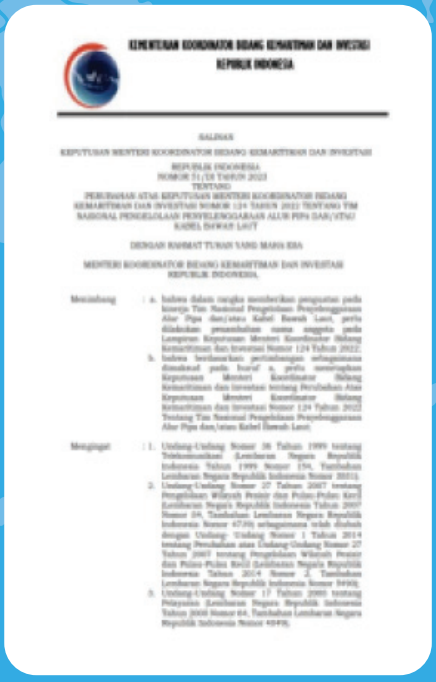
Proyek Pipa

- PHE OSES - TITI A-KARMILA A
- PHE ONWJ - LPRO-NGLJ
- PHE ONWJ - ALP FPRO-ALPR ECOM
- PHE OSES - TITI A-ZELDA PC
- LAWELAWE-RDMP RU V

- MEDCO E&P NATUNA LTD - FOREL-BRONANG
- MEDCO E&P NATUNA LTD - BAWAL-BRONANG

Sumber Data: e-pipakabel (September 2024)

SK Menko Marves Nomor 51/DI Tahun 2023



Tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Proses penggelaran pipa dan kabel bawah laut melalui Timnas berdasarkan SK tesebut di atas bertujuan untuk mengakselerasi proses perizinan di berbagai K/L terkait.

Salah satu capaian Timnas, proses marine survey yang sebelumnya memakan waktu **2 tahun, dipangkas** menjadi **rata-rata ±40 hari kerja** melalui Timnas.

Telah dilakukan Upaya digitalisasi proses melalui e-pipakabel di bawah pushidrosal.

Proses penggelaran pipa dan kabel bawah laut melalui Timnas masih **perlu perbaikan dan penguatan** melalui pengaturan terkait **penambahan landing point intensional, kabel dan pipa Internasional yang melintasi perairan Indonesia, penyederhanaan proses bisnis** agar bisa dilakukan secara paralel dan pengaturan teknis lainnya sebagai bahan **revisi Kepmen 14/2021** dan **Kepmen 42/2022 menjadi sebuah Peraturan Menteri.**

Percepatan Pengelolaan *Management Authoriy Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (MA CITES)*

Indonesia memiliki dua Otoritas Pengelola (Management Authority/MA) CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang diatur oleh peraturan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditetapkan sebagai MA CITES untuk jenis tumbuhan dan satwa liar. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan menetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai MA CITES untuk jenis ikan.

Keputusan mengenai peralihan otoritas MA CITES untuk jenis ikan telah disepakati dalam pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan, dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan serta Dirjen KSDAE yang mewakili Menteri KLHK. Keputusan tersebut menggarisbawahi perlunya peralihan otoritas MA CITES untuk jenis ikan dari KLHK ke KKP secara bertahap. Keputusan ini sudah tidak dapat didiskusikan lagi, dan saatnya bagi setiap pihak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Sekretariat CITES Internasional telah menerima publikasi resmi dari pemerintah Indonesia, yang dikirim melalui Kementerian Luar Negeri, untuk mengesahkan peralihan otoritas MA CITES jenis ikan ke KKP. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tingkat menteri dan dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sejak 24 Juli 2020, KKP telah resmi menjadi MA CITES untuk jenis ikan bersirip, yang tercantum dalam situs resmi Sekretariat CITES. Pengalihan ini tidak hanya mencakup perubahan otoritas tetapi juga implikasi pada perizinan, pembinaan, dan pengawasan yang sebelumnya berada di bawah KLHK. Pengalihan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, termasuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelaku usaha.





Dari Tahun 2020, capaian yang telah dicapai dalam koordinasi MA CITES ini adalah :

- Notifikasi penetapan KKP sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) ke Sekretariat CITES (KKP sebagai MA CITES Pisces).
- Penetapan status perlindungan 20 spesies jenis ikan bersirip melalui KepmenKP Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penetapan Jenis Ikan yang Dilindungi.
- Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama Nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2021 atau Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2021 tentang Pengaturan Koordinasi Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia oleh MenKP dan MenLHK
- Revisi Permendag No. 122/2018 tentang pemisahan persyaratan penerbitan PE antara TASL-KLHK dan ikan-KKP dan Revisi Permenkeu No. 1821/2019 tentang pengawasan Permendag No.122/2018, menyesuaikan revisi Permendag No.122/2018
- Saat ini terdapat 455 jenis ikan yang telah di kelola KKP sebagai management authority (MA) CITES jenis ikan.
- KKP melalui Direktorat KEBP dan UPT PSPL telah memperoleh PNBP Pemanfaatan CITES Jenis Ikan sebesar 21.14 milyar Rupiah (2022), 22.4 milyar Rupiah (2023) dan 12.75 milyar Rupiah (periode Januari-Juni 2024).
- Penetapan Regulasi, SOP dan PNBP untuk pemanfaatan CITES Pisces meliputi:
    - Regulasi pemanfaatan CITES (Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 dan Permen KP Nomor 10 Tahun 2021);
    - Penerbitan perizinan berusaha dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) (PP Nomor 5 Tahun
    - 2021) baik penangkapan dari alam liar maupun hasil budidaya.
    - Petunjuk Pelayanan Teknis dan SOP Pelaksanaan Tata Kelola Pemanfaatan CITES (melalui penetapan 8
    - Kepdirjen PRL);
    - Pengaturan pungutan PNBP (PP Nomor 85 Tahun 2021); dan 5) Penetapan Harga Patokan (Kepmen KP Nomor 13 Tahun 2022).
- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES, meliputi:
- Penetapan kuota pengambilan nasional (melalui penetapan Kepmen KP)Penetapan kuota ekspor (melalui Kepdirjen PRL dan Surat Penetapan Direktur KKHL KKP)
    - Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) secara online melalui e-SAJI
    - Pelaksanaan Audit dan Perhitungan Potensi, dan
    - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Ditjen KKHL, KKP
- Dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan CITES Pisces, KKP didukung oleh 29 UPT dan wilayah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh UPT PSPL Ditjen PKRL telah tersertifikasi ISO 9001;2025 terkait Sistem Manajemen Mutu.
- Dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pemanfaatan CITES jenis ikan, KKP didukung 6 pangkalan, 8 stasiun dan 58 Satwas yang tersebar di Indonesia. UPT Pengawasan sudah terdapat hampir diseluruh Pelabuhan Perikanan yang berjumlah 538 unit.
- Untuk optimalisasi pengelolaan MA CITES, KKP juga berkoordinasi dan kolaborasi dengan K/L seperti:
    - Penyusunan dokumen NDF, penentuan kuota, dan pleno hasil audit pengembangbiakan CITES jenis Ikan dengan BRIN.
    - Pengintegrasian Sistem e-SAJI dengan INSW Bea Cukai, Kemenkeu. Hal ini untuk efisiensi proses perizinan, sehingga tidak perlu mengurus dokumen perizinan berulang-ulang.
- Pelaksanaan sosialisasi perizinan pemanfaatan jenis Ikan yang dilindungi/ Appendiks CITES kepada K/L terkait (seperti BRIN, Kemendag, Kemenkeu, BKPM, Barantin, dan KKP) dan juga kepada pelaku usaha (melalui kegiatan ekspo, gerai pelayanan, audiensi, dan kunjungan lapangan).
- Peningkatan kualitas layanan perizinan dan kemudahan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas UPT dan petugas (admin) perizinan pelaku usaha, sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengakses dan mengurus perizinan.

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, pelaksanaan Management Authority (MA) CITES untuk jenis ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjukkan capaian yang signifikan. Dalam upaya pengelolaan jenis ikan yang terdaftar dalam CITES, KKP berhasil mengelola sebanyak

455

Jenis Ikan

menjadikannya otoritas pengelola yang efektif dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), KKP mencatatkan hasil yang positif dari pemanfaatan CITES jenis ikan.



Capaian ini mencerminkan peningkatan kinerja yang stabil dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang dilindungi oleh CITES.



Sebagai langkah strategis, KKP juga menetapkan sejumlah regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pemanfaatan CITES jenis ikan. Regulasi tersebut mencakup Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 dan Permen KP Nomor 10 Tahun 2021, yang mengatur pemanfaatan CITES secara menyeluruh. Selain itu, KKP juga mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, serta menetapkan SOP dan petunjuk teknis tata kelola pemanfaatan CITES. Pengaturan PNBP juga diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, dengan penetapan harga patokan berdasarkan Kepmen KP Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam bidang pelayanan perizinan, KKP telah menetapkan kuota pengambilan nasional dan ekspor, serta menerbitkan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) secara online melalui platform e-SAJI. KKP juga melaksanakan audit, perhitungan potensi, dan survei kepuasan masyarakat untuk memastikan kualitas layanan yang optimal.

Dalam menjalankan tugasnya, KKP didukung oleh 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan seluruh UPT PSPL Ditjen PKRL telah tersertifikasi ISO 9001:2025 terkait Sistem Manajemen Mutu. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pemanfaatan CITES jenis ikan, KKP didukung oleh 6 pangkalan, 8 stasiun, dan 58 Satuan Pengawas (Satwas) yang tersebar di Indonesia, dengan UPT Pengawasan yang terdapat hampir di seluruh pelabuhan perikanan.

Kolaborasi dan koordinasi juga menjadi bagian penting dalam capaian ini. KKP bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan dokumen Non-Detriment Findings (NDF), penentuan kuota, serta pleno hasil audit. KKP juga menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangbiakan CITES jenis ikan, serta mengintegrasikan sistem e-SAJI dengan Indonesia National Single Window (INSW) Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, untuk efisiensi proses perizinan.

Sosialisasi perizinan juga terus dilakukan oleh KKP, baik kepada kementerian dan lembaga terkait maupun kepada pelaku usaha. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti ekspo, gerai pelayanan, audiensi, dan kunjungan lapangan, untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi/Appendiks CITES.

Untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, KKP juga melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas UPT dan admin perizinan pelaku usaha, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengakses dan mengurus perizinan.

Terakhir, dalam kancah internasional, KKP turut berpartisipasi aktif dalam forum CITES seperti Conference of the Parties (COP19), Standing Committee, dan berbagai workshop CITES, menunjukkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan dan pengelolaan CITES jenis ikan di tingkat global.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Management Authority (MA) CITES, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian:

- Tumpang tindih definisi antara satwa liar dan sumber daya ikan antara UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU Nomor 45 Tahun 2009.
- Tumpang tindih kewenangan pengelolaan antara PP Nomor 8 Tahun 1999 dan PP Nomor 60 Tahun 2007.
- Jumlah pembudidaya arwana yang teregistrasi CITES di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia.

National Blue Agenda Actions Partnership



Inisiatif ini berfokus pada pengembangan Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Action Partnership - NBAAP) yang merupakan bagian dari strategi pembangunan maritim Indonesia. Program ini diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022 sebagai upaya kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, dan mitra pembangunan. Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang terkait dengan sektor maritim, termasuk tata kelola sumber daya maritim, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur.

Capaian Tahun Sebelumnya

National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)

2020

- NBAAP, diluncurkan saat KTT G20 di Bali 2022, adalah upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, dan mitra Pembangunan.

2023

- *Mapping* kegiatan Ocean yang terkandung dalam RPJMN bersama *development partners* dan UN *Agencies.*

Rencana 2024

- Rencana pertemuan *Steering Commmittee* NBAAP;
- *Mapping output* indikator rPJMN 2020-2024;
- Pembuatan *information center/* NBAAP *website* sebagai pusat informasi Blue Agenda.

Program Mapping From Each Task Force

Blue Health

- 7 RPJMN 46 Program
- MPAs Mangrove Marine Debris
- MSP Restoration coastal areas

Blue Food

- 5 RPJMN 77 Program
- Fisheries production
- Seaweed, Cath under MSY, Aquaculture cluster, Fish consumtion

Blue Innovation

- 2 RPJMN 27 Program
- Capacity building
- Innovation

Blue Finnance

- 2 RPJMN 32 Program
- Fisheries export Growth of Fisheries GDP
- Financing SMEs Fishgeries investment

Capaian dan Rencana National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)

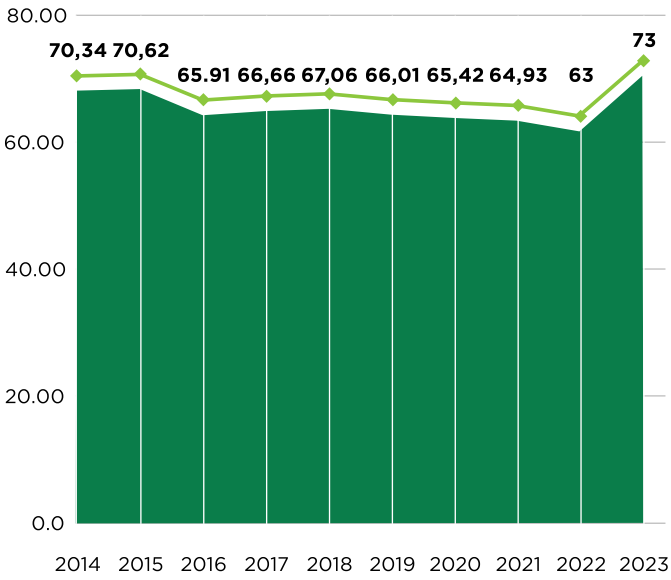
Gambar di atas menyajikan ringkasan capaian dan rencana kerja dari *National Blue Agenda Action Partnership* (NBAAP) atau Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional. NBAAP merupakan sebuah inisiatif kolaboratif yang melibatkan pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, dan mitra pembangunan untuk mendukung implementasi Agenda Biru atau *Blue Agenda*.

Capaian Tahun Sebelumnya:
- NBAAP diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2020.
- Telah dilakukan pemetaan program yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan laut (Blue Health), makanan laut (Blue Food), inovasi (Blue Innovation), dan pendanaan (Blue Finance).
- Terdapat 46 program untuk Blue Health, 77 program untuk Blue Food, 27 program untuk Blue Innovation, dan 32 program untuk Blue Finance yang terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Tahun Ini:
- Akan dilakukan pertemuan komite pengarahan NBAAP untuk menyusun rencana kerja.
- Fokus pada beberapa isu utama seperti restorasi mangrove, produksi perikanan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pertumbuhan ekspor perikanan.
- Mengintegrasikan hasil-hasil NBAAP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Kendala:
- Tantangan utama adalah membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan Kemitraan Pembangunan Agenda Biru Nasional.
- Secara keseluruhan, NBAAP telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengoordinasikan berbagai program dan inisiatif untuk mencapai tujuan Agenda Biru di Indonesia. Namun,masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan program ini

Indeks
Kesehatan Laut Indonesia



OHI Indonesia

sumber: OHI.org (2023) diolah

Capaian Hasil Pengukuran IKLI tahun 2020 - 2022

2020	73,44
2021	73,06
2022	75,65
2023	76,37

Laut memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencakup penyediaan sumber pangan, penghidupan, hingga nilai budaya dan rekreasi. Untuk memastikan keberlanjutan laut, penilaian kesehatan laut menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai kesehatan laut berdasarkan penyediaan manfaat dan layanan berkelanjutan dari laut yang sehat. OHI menilai aspek-aspek seperti penyediaan pangan, perlindungan pantai, penghidupan pesisir, hingga nilai budaya laut.

Di Indonesia, kerangka OHI diadopsi dan dimodifikasi menjadi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), yang disusun untuk menilai kesehatan laut Indonesia secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

IKLI memiliki sepuluh sasaran utama yang merupakan hasil adaptasi dari OHI. Sepuluh sasaran ini mencerminkan berbagai manfaat yang diharapkan masyarakat dari laut yang sehat, yaitu:

1. Peluang Perikanan Artisanal – memastikan akses berkelanjutan bagi nelayan tradisional.
2. Keanekaragaman Hayati – melindungi spesies laut dan ekosistemnya.
3. Penyimpanan Karbon – menjaga ekosistem yang mampu menyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim.
4. Perairan Bersih – memelihara kebersihan laut dari limbah dan polusi.
5. Penghidupan Pesisir dan Ekonomi – mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
6. Perlindungan Pesisir – melindungi daerah pesisir dari kerusakan alam dan pembangunan yang tidak terkendali.
7. Penyediaan Pangan – menjaga ketersediaan sumber pangan laut.
8. Produk Alami – mempertahankan sumber daya alam dari laut yang berkelanjutan.
9. Rasa terhadap Tempat – melestarikan nilai budaya dan sosial yang melekat pada laut.
10. Pariwisata dan Rekreasi – mempromosikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut.

Indeks ini disusun berdasarkan skor dari sepuluh sasaran tersebut, yang dihitung melalui beberapa dimensi, yaitu kondisi saat ini dan kemungkinan di masa depan, serta aspek keberlanjutan dan tekanan yang memengaruhi tiap sasaran. Hasil penilaian ini mencerminkan status kesehatan laut Indonesia secara keseluruhan dan digunakan untuk membuat kebijakan strategis guna melestarikan ekosistem laut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menginisiasi dan mengoordinasikan pengembangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan IKLI dilakukan melalui modifikasi kerangka OHI agar sesuai dengan kondisi dan tantangan lingkungan laut Indonesia.

IKLI pertama kali dihitung pada tahun 2020 dan perhitungan ini terus berlanjut hingga 2023. Kemenko Marves telah menyusun Pedoman Pengukuran IKLI, yang menjadi acuan utama bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengukuran kesehatan laut Indonesia.



Pada tahun 2024, Kemenko Marves melanjutkan koordinasi terkait implementasi IKLI dengan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penyusunan SK dan Pembentukan Kembali Tim Kerja Perhitungan IKLI Pada tahun 2024, Kemenko Marves menyusun Surat Keputusan (SK) untuk membentuk kembali Tim Kerja Perhitungan IKLI, yang sebelumnya pernah dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Setmenko Marves hingga tahun 2021. Tim ini akan bertugas untuk mengoordinasikan perhitungan IKLI secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
2. Ekspos Hasil Perhitungan IKLI 2020-2023 Rencana ekspos hasil perhitungan IKLI periode 2020 hingga 2023 akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik dan pemangku kepentingan terkait kondisi kesehatan laut Indonesia dalam kurun waktu tersebut.
3. Sosialisasi IKLI di Tingkat Daerah Pada tahun 2024, Kemenko Marves juga berencana untuk melakukan sosialisasi IKL Daerah kepada pemerintah provinsi, dengan menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai percontohan dalam pengembangan IKL Daerah.
4. Pengembangan Aplikasi Kalkulator Perhitungan IKLI Sebagai langkah untuk memudahkan perhitungan dan pemantauan kesehatan laut, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan aplikasi kalkulator perhitungan IKLI yang dapat digunakan secara dinamis. Aplikasi ini akan memfasilitasi proses pengukuran skor IKLI secara lebih efisien dan akurat.
5. Perhitungan IKLI Agregat Tahun 2024 Rencana perhitungan IKLI agregat tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2024. Hasil perhitungan ini akan memberikan gambaran kondisi kesehatan laut terkini dan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) merupakan instrumen penting untuk menilai kondisi kesehatan laut dan memandu kebijakan terkait pengelolaan laut berkelanjutan. Dengan pengembangan yang terus berjalan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, IKLI diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia. Langkah-langkah strategis pada tahun 2024, termasuk pembentukan kembali Tim Kerja, ekspos hasil perhitungan, serta pengembangan aplikasi kalkulator, akan semakin memperkuat implementasi IKLI dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut untuk generasi mendatang.

05

INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Wujud Nyata **untuk Pengurangan Emisi Karbon**

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi dunia. Mengubah gaya hidup ke angkutan massal, kendaraan listrik, dan memanfaatkan energi bersih menjadi langkah penting.

Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi juga membawa kontribusi besar dalam pengelolaan lingkungan. Kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara, sehingga kualitas udara yang sehat dapat terjaga. Penggunaan energi bersih, ramah lingkungan, menjadi bukti nyata pemenuhan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Komitmen beralih ke KBLBB dimulai dengan penerbitan Perpres 55 Tahun 2019 yang direvisi dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Melalui peraturan tersebut, Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi kendaraan listrik, diantaranya insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, PPN Ditanggung Pemerintah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), juga penyesuaian syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Langkah ini disusul dengan regulasi dan implementasi untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya, mendorong kendaraan operasional pemerintah segera berganti menjadi kendaraan listrik. Kini, industri kendaraan listrik dalam negeri menggeliat, baik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, hingga bus listrik. Hingga bulan Agustus 2024, lebih dari 170 ribu unit kendaraan listrik telah mengaspal. Lebih dari 1.600 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (charging station) dan 2.200 unit tempat penukaran baterai juga sudah tersedia untuk melayani masyarakat.

Dalam mendukung ketahanan energi dalam sektor transportasi saat ini pemerintah mendukung perkembangan kendaraan listrik guna mendukung tercapainya energi yang bersih dan ramah lingkungan. Saat ini Kendaraan listrik dijadikan solusi alternatif yang sedang dikembangkan dalam mendukung energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dan mengurangi polusi dan emisi gas buang akibat penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor.

Saat ini kendaraan listrik semakin banyak dikembangkan. Kendaraan listrik menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi dampak krisis energi. Dengan menggunakan mobil listrik tentunya juga akan mampu menciptakan teknologi yang ramah lingkungan karena polusi udara akan berkurang. Mendukung kebijakan paris agreements dan mengurangi emisi karbon di sektor transportasi, industri baterai dan mobil listrik di Indonesia sedang melakukan tahap percepatan dalam perkembangannya.

Di hulu pun, industri baterai listrik telah hadir di tahun 2024 dengan kapasitas produksi 10 GWh dan akan ditingkatkan menjadi 30 GWh pada Tahun 2025. Semua upaya ini dilakukan agar langit Indonesia semakin biru.

Ini merupakan saat yang tepat untuk menyongsong era baru transportasi bebas polusi, era baru industri dan hilirisasi, dan era baru ekosistem penunjang kendaraan listrik. Apalagi jika kita menggunakan baterai produksi dalam negeri.





INSENTIF KENDARAAN LISTRIK BERLAKU **20 MARET 2023**

Luhut menyebut adanya pemberian insentif untuk KBLBB ini dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia

TUJUAN

- Meningkatkan efisiensi energi
- Kualitas udara bersih
- Ketahanan energi
- Ramah lingkungan
- Konservasi energi sektor transportasi
- Mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap import bbm
- Terwujudnya energi bersih

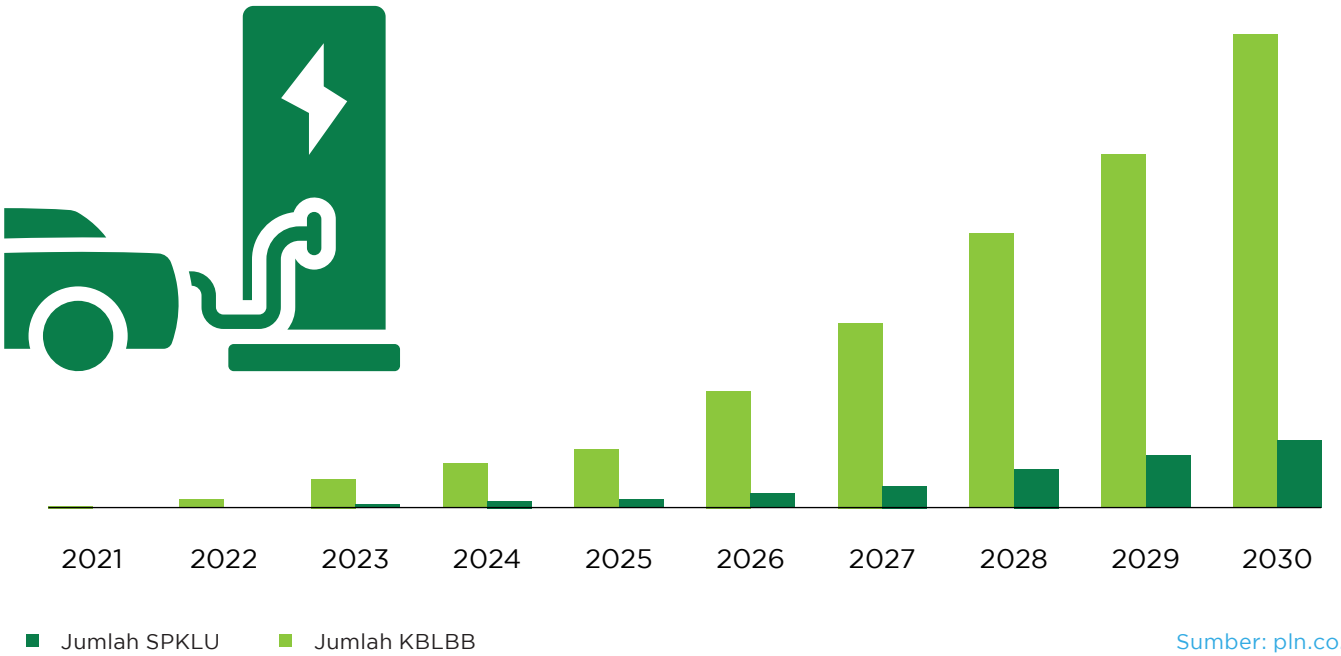
FAKTA LAINNYA

- Insentif diberikan kepada konsumen kendaraan listrik, bukan kepada produsen

> **"Bahwa kita akan mulai (pemberian insentif) di 20 Maret 2023. Semua sudah pada titik final."**
>
> Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves)



Roadmap KBLBB & SPKLU



Sumber: pln.co.id

PLN telah berhasil membangun 1.**615 Unit EV** Charger di **1.154 titik lokasi** (data sd. Agustus 2024) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wilayah	Jumlah Mesin per Jenis Kecepatan Charging				Total	Jumlah Lokasi
	UFC	FC	MC	SC		
NASIONAL	**157**	**252**	**596**	**610**	**1.615**	**1.164**
SUMATERA	27	35	102	59	223	183
JAWA	95	167	399	372	1.033	701
BALI	16	19	23	39	97	48
KALIMANTAN	10	9	33	46	98	81
SULAWESI	5	11	20	53	89	77
MALUKU	2	0	4	9	15	15
NUSA TENGGARA	1	10	15	21	47	38
PAPUA	1	1	0	11	13	11



Manfaat dari penggunaan kendaraan listrik dapat membantu untuk mengatasi masalah polusi udara di perkotaan. Pengembangan mobil listrik dan sepeda motor listrik memiliki potensi menurunkan emisi polutan (CO, NOx, HC, SO2, dan PM) yang cukup signifikan. Berdasarkan total emisi CO2 yang dilepaskan, terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi tersebut yaitu sektor listrik (42%), transportasi (23%), dan perumahan (6%).

Kendaraan listrik baterai mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE) dalam mengurangi polusi udara dan emisi GRK. Kendaraan listrik menghasilkan polusi udara yang jauh lebih sedikit dan dapat dikatakan mendekati nol bila dibandingkan dengan kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE). Kendaraan listrik cocok untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di daerah perkotaan. Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) adalah suatu langkah percepatan yang dilakukan guna mewujudkan implementasi kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Dengan adanya KBLBB maka memberikan solusi dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan penghematan biaya energi dan ketergantungan import BBM, sebagai alat transportasi yang bebas polusi dan ramah lingkungan, serta solusi alternatif dalam mendukung pengurangan Emisi di Indonesia.

Ajang Presidensi G20 2022 meneguhkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, menuju energi berkelanjutan, mengelola transisi energi sampai net zero emission yang telah menjadi target ditahun 2060. Pemerintah mempersiapkan armada kendaraan listrik yang digunakan dalam perhelatan KTT G20 sejak Februari 2022. Selaras dengan salah satu isu proritas G20 yaitu transisi energi, kendaraan listrik turut menjadi salah satu infrastruktur pendukung pelayanan transportasi VVIP dan delegasi dari negara G20 yang hadir pada puncak kegiatan KTT G20 tanggal 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Bali.

Melalui koordinasi Kemenko Marves, secara umum Pemerintah menyiapkan 1.452 kendaraan listrik untuk membantu mobilitas penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022, dengan rincian 962 mobil listrik, 454 motor listrik, dan 36 bus listrik, yang berasal dari berbagai produsen otomotif diantaranya Hyundai Genesis Electrified G80, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq, Lexus UX300e, Toyota BZ4X, Wuling AirEV, dan sepeda motor listrik Zero DSR dan Energica untuk pengawalan dan penyelamatan Paspampres dan Kepolisian.

Selain itu, sebanyak 36 bus listrik baik berukuran sedang maupun besar disiapkan melayani para peserta dan delegasi G20 untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya. Bus listrik tersebut melayani beberapa rute, seperti dari Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC)—Apurva Kempinski Bali dan Lapangan Lagoon—Apurva Kempinski Bali untuk para delegasi.Lalu ada pula rute dari Intercontinental Jimbaran ke Apurva untuk para panitia (Tim Sherpa), serta dari Bali International Convention Center ke Apurva, GWK, dan Tahura Mangrove untuk para wartawan atau media peliput kegiatan G20.

Untuk mendukung kelancaran penggunaan kendaraan listrik, PLN telah menyiapkan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) sebanyak 299 unit yang terdiri dari 78 SPKLU Ultra Fast Charging, 21 SPKLU Fast Charging dan 200 Home Charging yang tersebar di seluruh area KTT G20 di Bali.

Kesuksesan penggunaan mobil listrik selama KTT G20 sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita mampu mengembangkan kendaraan listrik serta menjadi momentum awal dari konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik di Indonesia.

Kemenko Marves sebagai pioneer dan Kementerian yang pertama menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas operasionalnya. Penggunaan kendaraan listrik ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan KTT G20 yang telah berlangsung pada November 2022, dan juga bertujuan untuk mencapai tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai presidensi dalam pertemuan G20 yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, serta arsitektur kesehatan global.



Sumber: BPMI Setpres



Sumber: PLN



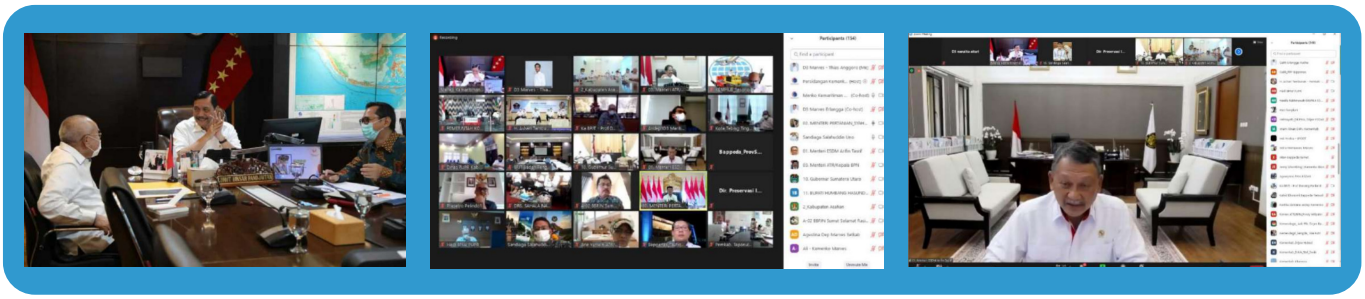
Sumber: BPMI Setpres

Pemerataan Pembangunan dengan Infrastruktur Memadai

(Pembangunan Wilayah 3T)

Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, Infrastruktur dan Transportasi untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, menumbuhkan pusat ekonomi baru, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Kemenko Marves telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat.



Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang - Bunga Tanjung di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

Salah satu proyek yang dikawal oleh Kemenko Marves adalah pembangunan jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang - Bunga Tanjung di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pembangunan jalan akses ke pelabuhan tercantum dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Pembangunan jalan ke pelabuhan Teluk Tapang telah terhubung sepanjang 23,47 km, penanganan aspal telah dilaksanakan sepanjang 17,87 km, dan sisanya telah dilakukan penyiapan badan jalan sepanjang 5,60 km pada tahun 2024.



Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu

Pembangunan Jalan Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apuh (Pulau Enggano), Bengkulu

Jalan Lingkar Enggano merupakan Ruas Jalan Provinsi dengan nama sesuai SK Gubernur Nomor L.444. DPUTR Tahun 2019 Banjarsari – Malakoni – Kayu Apuh (Pulau Enggano) dengan Panjang 32,82 Km yang menjadi prioritas utama pembangunannya. Kondisi eksisting jalan dengan aspal penetrasi sepanjang 22,7 Km dan jalan Tanah sepanjang 9.3 Km dengan kriteria (aspal penetrasi) rusak berat sepanjang 9 Km, rusak sedang sepanjang 6 Km dan rusak ringan sepanjang 7 Km;



Before





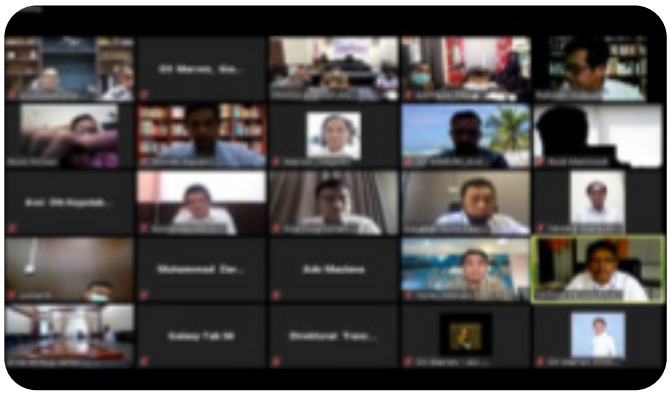
After





Kordinasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Logistik Teluk Rambut - Pulau Siantan, Anambas









Pelaksanaan kegiatan pengaspalan dan Agregat Jalan Akses Pusat Pertahanan Natuna, Oktober 2020

Pengembangan Wilayah **Untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan Rebana

Pengembangan Wilayah Untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berperan dalam pengawasan pelaksanaan PSN program percepatan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tiga Perpres yang menjadi fokus Utama adalah:

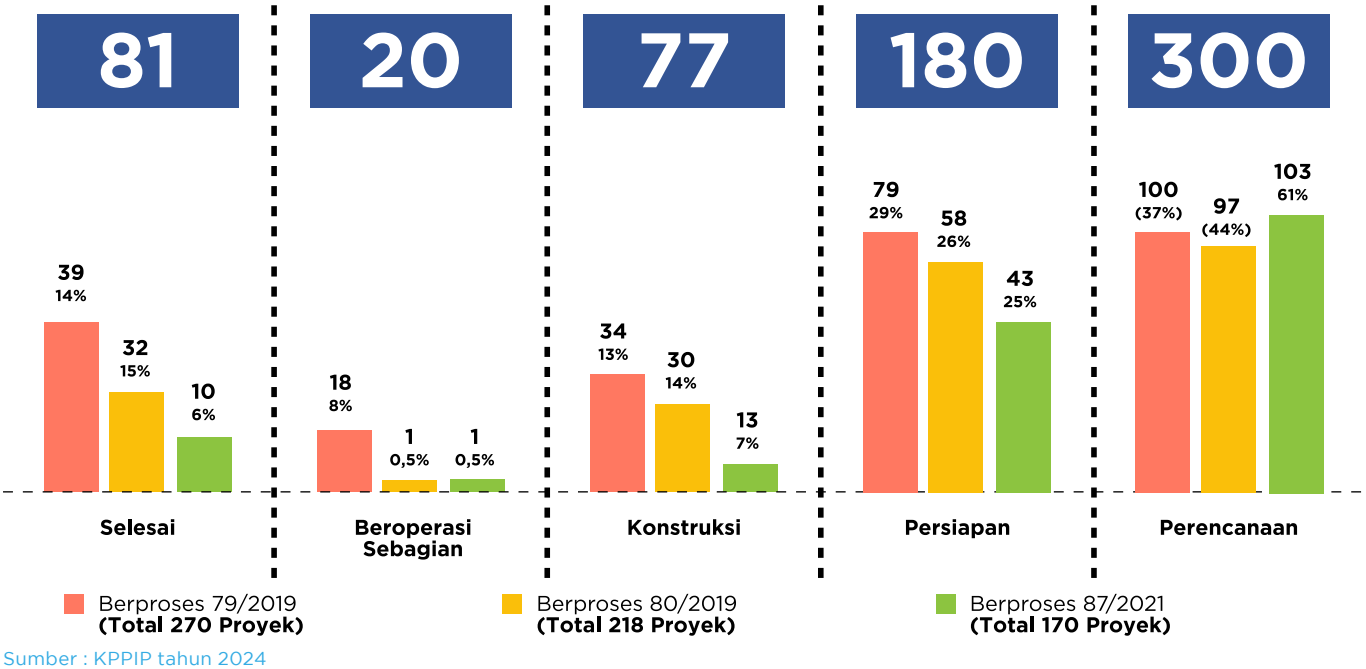
1. Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang,

2. Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya -Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan

3. Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Kemenko Marves sebagai Wakil Ketua KPPIP memastikan berbagai inisiatif pembangunan infrastruktur dan transportasi yang tercantum dalam Perpres tersebut dapat diimplementasikan sesuai rencana, guna mendorong kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan yang strategis ini. Dengan koordinasi yang efektif dan pemantauan yang ketat dilaksanakan untuk mengatasi berbagai tantangan, memastikan integrasi proyek-proyek pengembangan, serta memfasilitasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

Capaian pembangunan yang telah didukung oleh Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021 dalam bentuk infografis sebagai berikut:



Sumber : KPPIP tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada regional dan nasional yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Amanat Perpres 87 tahun 2021 juga menyebut bahwa Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Pemerintah membenahi kawasan ini dengan membangun sejumlah infrastruktur meliputi jalan tol bandara, terminal, pelabuhan, pembangkit listrik, kilang minyak, hingga geothermal.

Pengembangan Kawasan Rebana dilakukan untuk mengarahkan investasi menuju bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat serta wilayah lain di sekitarnya untuk menyebarkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya bertumpu pada bagian barat Provinsi Jawa Barat. Rebana Metropolitan akan sedemikian terasa sebagai salah satu episentrum perekonomian baru di tanah air.

Kawasan Rebana Metropolitan telah dilengkapi sejumlah fasilitas infrastruktur antara lain Jalan Nasional, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), rel Cikampek-Cirebon,Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban, BIJB Kertajati, serta terminal Subang, Indramayu dan Cirebon.

Hingga tahun 2024, proyek-proyek yang telah selesai di Kawasan Rebana meliputi:

- Rekonstruksi Jalan Legok – Conggeang (Kab. Sumedang)
- Rekonstruksi Jalan Conggeang – Buah dua (Kab. Sumedang)
- Preservasi Jalan Cipasung - Subang - Cilebak (Kab. Kuningan) - Kutaagung/ Dayeuhluhur (Kab. Cilacap)
- Pembangunan Jalan Cipari – Cisantana (Kab. Kuningan)
- Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
- Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Kab. Sumedang)
- Pembangunan Terminal Tipe B Ciledug (Kab. Cirebon)
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) Jatigede (Kab. Sumedang)
- Rehabilitasi Waduk bendungan Darma (Kab. Kuningan)

Selain dukungan terkait pembangunan infrastruktur, Kemenko Marves juga berperan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyiapan sumber daya manusia dalam rangka penyediaan tenaga kerja terampil guna mendukung pengembangan kawasan Rebana. Salah satu proyek yang saat ini sedang dilaksanakan dan ditargetkan selesai tahun 2024 adalah Pembangunan Kampus Politeknik Manufaktur II Majalengka *(Gedung Technopole dan I-Smart Building).*





Sumber: Polman, 2024

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan terdiri atas 6 kabupaten yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sebagai bentuk pengentasan disparitas pembangunan antara kawasan Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan. Konsep pengembangan yang digunakan adalah konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis Sumber Daya Alam yang diharapkan dapat menghasilkan spread-effect yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Hingga tahun 2024, proyek yang telah selesai di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sebanyak 1 (satu) proyek yaitu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Kabupaten Cianjur. Sedangkan proyek yang beroperasi sebagian yaitu



Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Cikajang, yang telah beroperasi adalah jalur dari Cibatu-Garut.

Pembangunan **Pelabuhan Patimban**

Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, dan menjamin keselamatan pelayaran termasuk eksplorasi gas. Serta dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini telah diresmikan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor pada 20 Desember 2020.

2018 — **2022** — **2027** — **2032** — **2042**

TAHAP I-1 (2018-2022)	TAHAP 1-2 (2022-2022)	TAHAP II (2017-2032)	TAHAP III KPBU (2017-2032)
• **Terminal Peti Kemas** 35 Ha (Kap,250,000 TEUs) • **Terminal Kendaraan** 25Ha (Kap, 218,000 CBU)	• **Terminal Peti Kemas** 66 Ha (Kap, Kumulatif 3,75 Juta TEUs) • **Terminal Kendaraan** 25 Ha (Kap, Kumulatif 600,000 CBU) • **Roro Terminal** 200m	• **Terminal Peti Kemas** Kap, Kumulatif 5,5 Juta TEUs	• **Terminal Peti Kemas** Kap, Kumulatif 7,5Juta TEUs
↓	↓	↓	↓
Selesai dibangun juli 2022	**Progres Pembangunan s/d 2025**	**Pembangunan direncanakan Melalui KPBU**	**Pembangunan direncanakan Melalui KPBU**

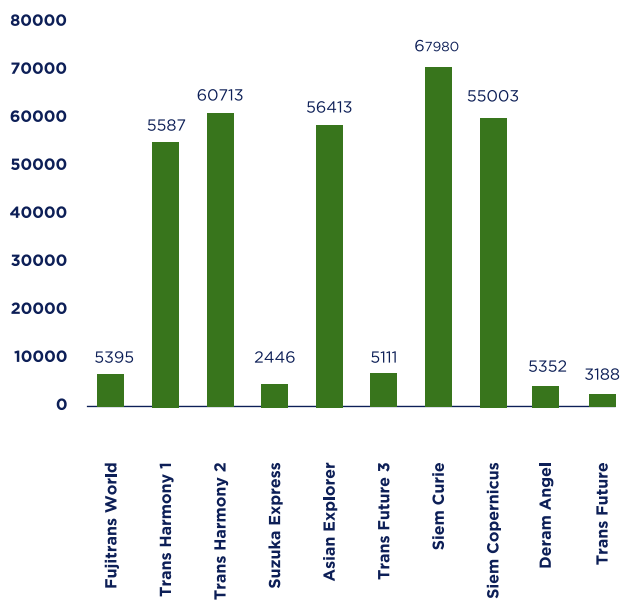






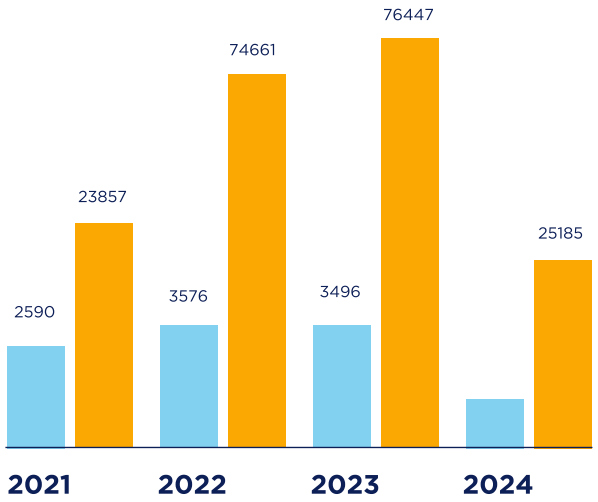


Rekapitulasi Kegiatan Bongkar Muat Kapal Internasional Des 2021 - Mei 2024

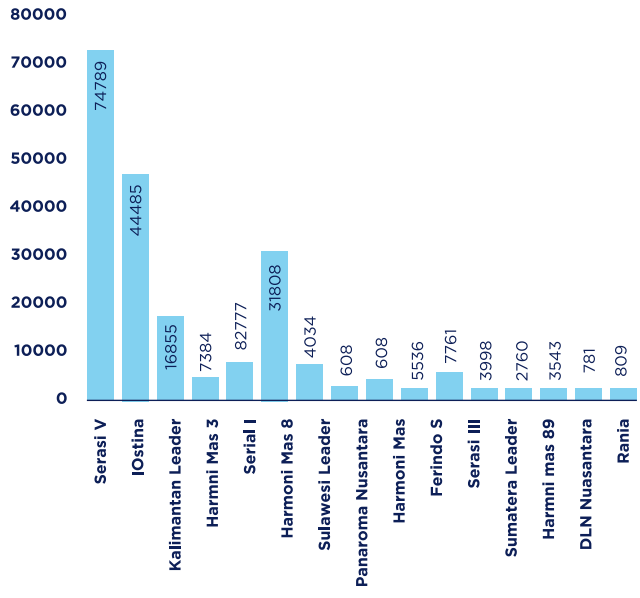


Total = 317.183 CBU

Total Bongkar Muat Kapal Domestik Tahun 2021 - 2024

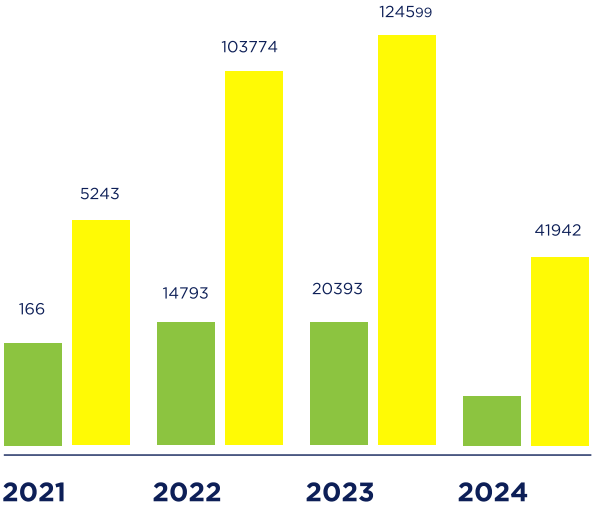


Rekapitulasi Kegiatan Bongkar Muat Kapal Domestik DES 2021 - Mei 2024



Total = 213.428 CBU

Rekapitulasi Bongkar Muat Kapal Internasional 2021 - 2024



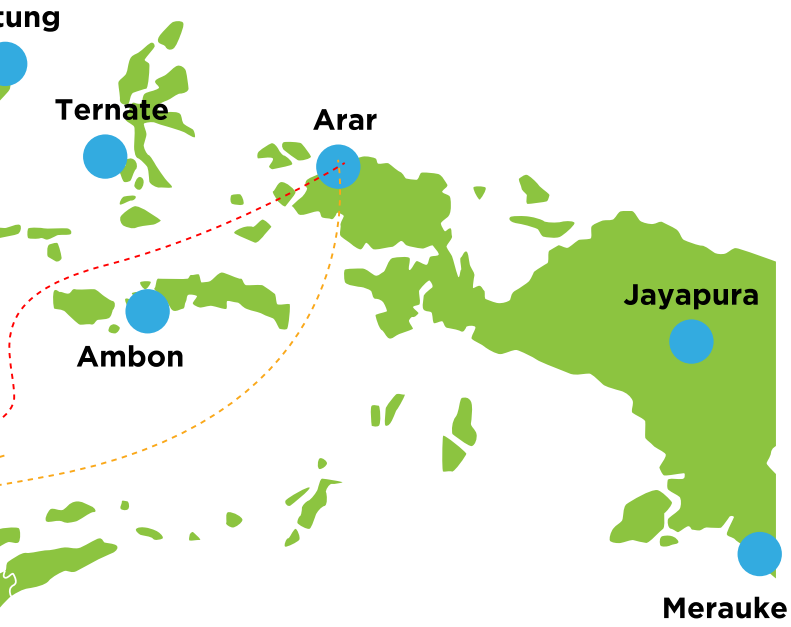
Merajut Konektivitas **dalam Kelancaran Distribusi Logistik**

Pengendalian Program Tol Laut



Keterangan Program	Nilai (Rp Triliyun)
24 Pelabuhan Strategis	243,696
“Short Sea Shipping”	7,500
Fasilitas Kargo umum dan “Bulk”	40,615
Pengembangan pelabuhan nonkomersil	198,100
Pengembangan pelabuhan komersil lainnya	41,500
transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan	50,000
Revitalisasi Industri galangan kapal	10,800
kapal untuk 5 tahun kedepan	101,740
Kapal Patroli	6,048
Total	**699,999**

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA



Program Tol Laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antar wilayah dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting di daerah 3TP, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas harga barang antar wilayah di Indonesia.

Pada 2015, realisasi muatan kapal sebanyak 88 teus dan 30 ton. Kemudian pada 2016 meningkat menjadi 2.742 teus dan 4.159 ton, 2017 (233.139 ton), 2018 (234.305 ton), 2019 (8.067 teus), 2020 (18.128 teus), 2021 (23.880 teus dan 842,85 ton), dan pada 2022 realisasi muatan kapal tol sebanyak 28.991 teus dan 983 ton.

Sejak awal dicanangkan, proyek yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini semakin menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah enam trayek menjadi sekitar 13 trayek.

Pada 2024 ini, penyelenggaraan kewajiban pelayanan tol laut telah melayani 37 trayek (berdasarkan SK DJPL Nomor KP-DJPL 528 Tahun 2024) dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Jumlah tersebut meningkat signifikan sejak diluncurkan pada 2015, yaitu sebanyak tiga trayek dan tiga kapal, yang menyinggahi 11 pelabuhan.

Sejak dimulai pada 4 November 2015, rute tol laut ditambah tiap tahun. Pada 2015 hingga 2016, ada enam rute tol laut yang singgah di 31 pelabuhan dengan subsidi mencapai Rp 218 miliar. Pangkalan pemuatan barang dilakukan di tiga pelabuhan, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu pelayaran satu rute berkisar 21-28 hari sekali perjalanan.

Tahun 2017, rute tol laut ditambah dari enam menjadi 13 dan singgah di 41 pelabuhan. Dari 13 rute itu, 11 rute di antaranya berawal dari Pelabuhan Tanjung Perak. Operator tujuh rute adalah PT Pelni dan enam rute oleh swasta. Subsidi pemerintah tahun ini Rp 380 miliar.

Keterangan

Termasuk Pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lainnya
Kapal, Pelabuhan Panjang, Sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, dan Cirebon
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
1.481 Pelabuhan
83 Pelabuhan
Jalan Akses, Kereta Pelabuhan, dan Kereta Pesisir
12 Galangan Kapal
Kapal kontainer, barang perintis, “Bulk Carrier”, “Tug” & “Barge”, tanker, kapal Rakyat
Kapal Patroli dari kelas IA sampai dengan V



Dokumentasi Peti Kemas Pelni dimuat ke armada Tol Laut



Container Crane pada armada Tol Laut di Pelabuhan Tahuna di Sangihe



Potret pemandangan Pelabuhan Tahuna di Sangihe

Pelayaran Rakyat Guna **Menjangkau Daerah 3T**

Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk Pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Sejak tahun 2017 Kemenhub menganggarkan pembangunan kapal pelra sebanyak 200 unit yang digarap secara bertahap. Pada 2018, Kemenhub sudah menyerahkan sebanyak 94 unit kapal pelra sejumlah kepada pemda yang membutuhkan angkutan perairan. Bantuan ini menjadi stimulasi pemerintah pusat kepada pemda hingga memberi dampak sosial dan ekonomi daerah untuk konektivitas Tol Laut guna menjangkau daerah-daerah terluar, terpencil dan terisolir (3T).



Pemberdayaan Pelra berupaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional dalam meningkatkan produktivitas rakyat. Sebagai salah satu komponen penting dalam ketahanan konektivitas nasional.

Pelra berfungsi mengisi kebutuhan angkutan laut non peti-kemas, armada keperintisan, dan armada perdagangan tradisional berbendera Indonesia dari dan ke daerah-daerah pelosok dan terluar di Nusantara.

Sejak Tahun 2021, Kemenko Marves telah menyusun Rencana Aksi Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, yang mengacu pada Perpres 74/2021. Tentu saja implementasinya guna perbaikan dan peningkatan kondisi Pelra ini perlu dilaksanakan secara bertahap, dengan pelibatan semua pemangku kepentingan.

Kapal Pelra



Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa



Pelabuhan Rakyat Paotere



Tol
Trans Sumatera

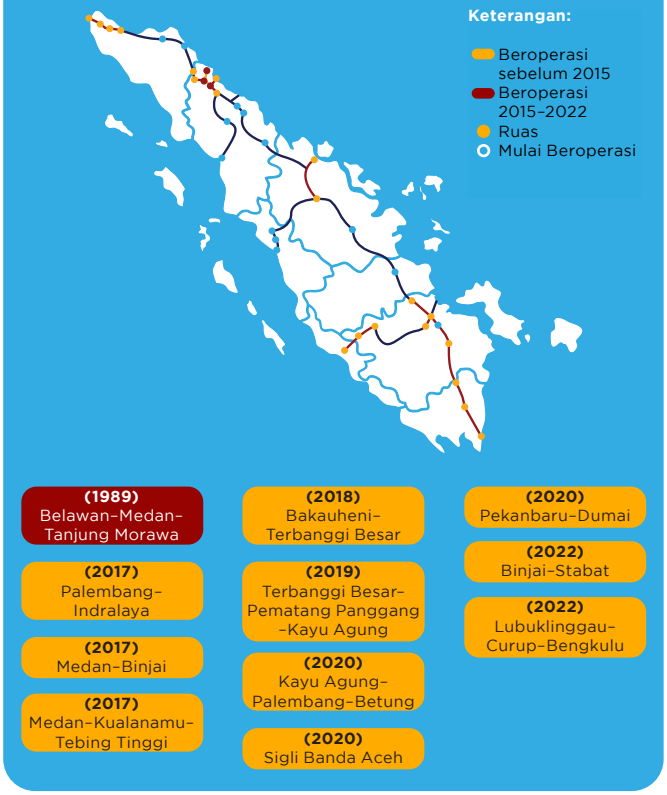
Mungulik Siasat, untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ada banyak kendala yang dulu dihadapi. Mulai dari lambatnya perizinan, keterbatasan lahan, tumpang tindih peraturan, hingga ketersediaan biaya. Jalan tol tak tersambung, bandara dan pelabuhan semrawut, membuat pergerakan barang serta orang terhambat. Konektivitas tidak ada, biaya logistik jadi mahal, sehingga pertumbuhan mandeg. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan mengulik siasat agar infrastruktur segera terbangun.

Proyek Strategis Nasional-lah pilihannya, semua demi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun Oktober 2023 terdapat 170 Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan. Sebagian besar ada di luar Jawa. Kendala pembiayaan diatasi dengan melibatkan swasta. Tentu saja, APBN/APBD tetap menjadi sumber utamanya. Semua diatur sesuai dengan resiko dan level kerumitan yang berbeda-beda. Efek dari semua itu, daya saing membaik, kala infrastruktur juga baik dan terintegrasi.

Pembangunan Tol Trans Sumatera

Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera dari Banda Aceh sampai Bakauheni dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk selesai pada 2024. Hingga akhir September 2022, lebih dari 700km jalan tol sudah beroperasi.



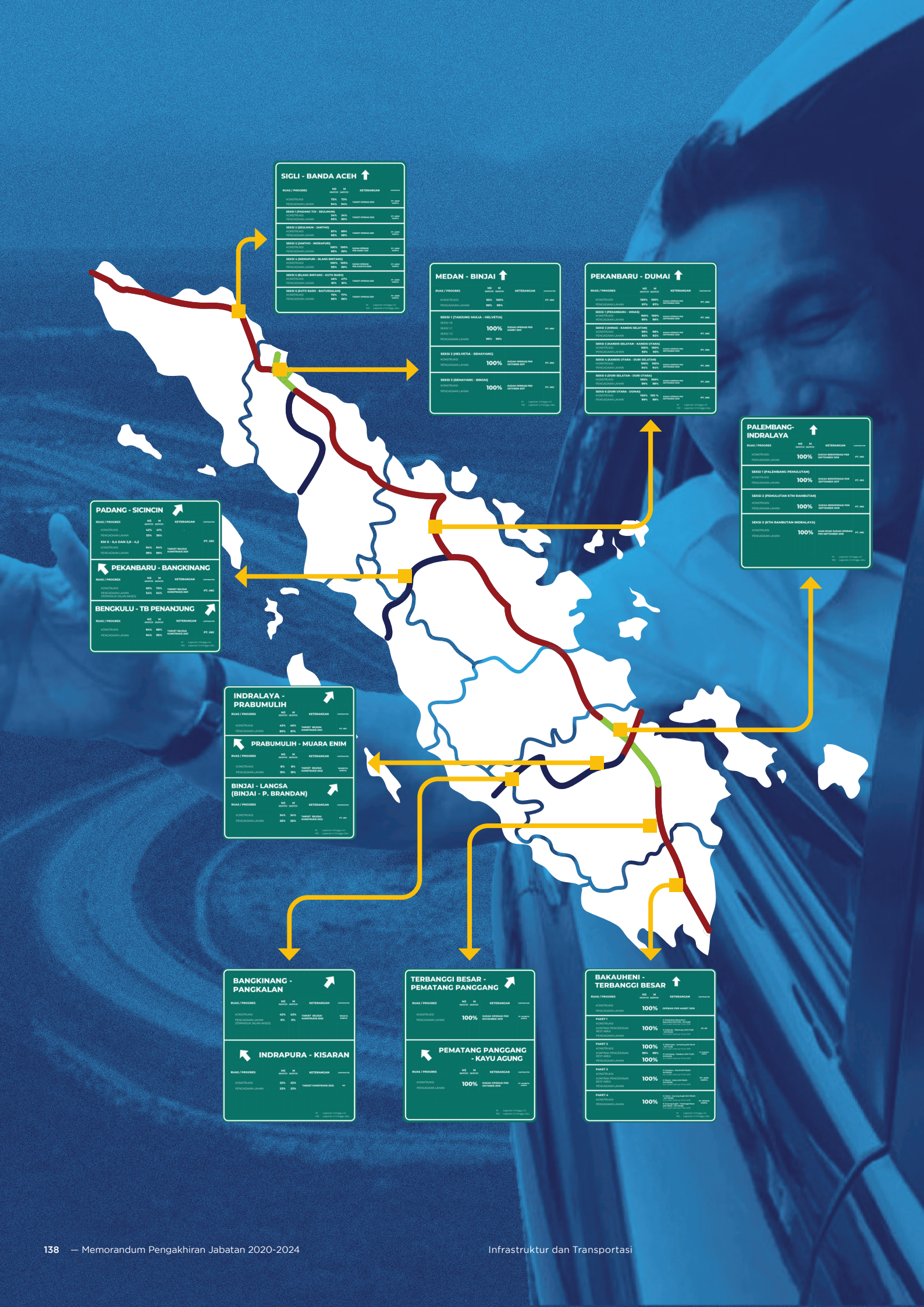
Jalan Tol Trans-Sumatra adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatra, dari Lampung hingga Aceh. Jalan Tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak.

Progres pembebasan lahan dan konstruksi dari 13 ruas JTTS, di mana 5 di antaranya telah beroperasi. 12 di antaranya rampung dan beroperasi pada pertengahan 2023.

Kecuali untuk ruas Padang-Sicincin yang karena kemarin karena ada keterlambatan dalam penyerahan lahan, ini baru akan selesai di awal 2024.

Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera dari Banda Aceh sampai Bakauheni dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk selesai pada 2024. Hingga akhir 2023, lebih dari 700 km jalan tol sudah beroperasi.

Sejumlah 5 ruas tol yang sudah beroperasi antara lain Medan-Binjai (17 km), Pekanbaru-Dumai (131 km), Palembang-Indralaya (22 km), Terbanggi Besar-Kayu Agung (189 km), dan Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km). Ada juga ruas Tol Taba Penanjung-Bengkulu yang baru dioperasikan.


SIGLI - BANDA ACEH
MEDAN - BINJAI
PEKANBARU - DUMAI
PALEMBANG-INDRALAYA
PADANG - SICINCIN
PEKANBARU - BANGKINANG
BENGKULU - TB PENANJUNG
INDRALAYA - PRABUMULIH
PRABUMULIH - MUARA ENIM
BINJAI - LANGSA (BINJAI - P. BRANDAN)
BANGKINANG - PANGKALAN
INDRAPURA - KISARAN
TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG
PEMATANG PANGGANG - KAYU AGUNG
BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR

Pengendalian Pelaksanaan MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional

Arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tahap pertama pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang mencakup 14 ruas paling lambat pada 2024.

Arahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.

Kemenko Marves mengawal proses percepatan pengadaan tanah khususnya terkait dengan proses konsinyasi serta mendatangkan investor untuk percepatan pembangunan JTTS.

Dukungan Pemerintah diberikan melalui APBN yang disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Dukungan Konstruksi, Pembebasan Lahan, Sekuritisasi Aset dan Penjaminan. Tidak hanya APBN saja, pembiayaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera juga melibatkan pembiayaan kreatif dan unik dari PT SMI serta sinergi SMV lain dibawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah meyakini bahwa proyek jalan tol di Sumatera tidak hanya meningkatkan konektivitas serta akses transportasi dan logistik di wilayah Sumatera, namun diharapkan pula memberikan manfaat ekonomi dan dampak positif pada sektor lainnya.





Investasi Jalan Tol Trans Sumatera

Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya	Nilai Investasi Rp3.828 T	Jalan Tol Betung - Tempino -Jambi	Nilai Investasi Rp25.192 T
Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar	Nilai Investasi Rp16.796 T	Jalan Tol Batu Ampar - Hang Nadim	Nilai Investasi Rp6.250 T
Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang	Nilai Investasi Rp10.085 T	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe	Nilai Investasi Rp16.854 T
Jalan Tol Pekanbaru - Dumai	Nilai Investasi Rp16.210 T	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli	Nilai Investasi Rp20.355 T
Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim	Nilai Investasi Rp24.107 T	Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	Nilai Investasi Rp23.790 T
Jalan Tol Medan - Binjai	Nilai Investasi Rp2.500 T	Jalan Tol Padang - Pekanbaru	Nilai Investasi Rp80.410 T
Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	Nilai Investasi Rp13.454 T	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh	Nilai Investasi Rp12.354 T
Jalan Tol Rengat - Pekanbaru	Nilai Investasi Rp21.220 T	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api	Nilai Investasi Rp14.289 T
Jalan Tol Parapat - Tarutung - Sibolga	Nilai Investasi Rp28.488 T	Jalan Tol Rantau Parapat - Kisaran	Nilai Investasi Rp12.868 T

Foto: Dokumentasi KCIC

Mewujudkan **Ibu Kota Nusantara**

Dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. IKN dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

IKN akan mengubah orientasi Pembangunan menjadi Indonesia-sentrism serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dengan diundangkan berbagai peraturan perundangan dimana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara Menko Marves ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jumlah perolehan lahan dari ex pelepasan kawasan hutan tahap I seluas 36.150 Ha

Kemenko Marves mendorong sehingga dapat terbit peta tematik yang menjadi dasar penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di area yang clean and clear seluas 34.000 Ha,

terdiri dari:

- HPL 05 PPU seluas 70.300 m2 (Bank Indonesia)
- HPL 06 PPU seluas 346.800 m2 (PSSI)
- HPL 007 PPU seluas 253,39 Ha
- HPL 008 PPU seluas 25.637,85 Ha
- HPL 018 KUKAR seluas 8,14 Ha

Terdapat sisa seluas 2.085,61 Ha yang belum clean and clear dan memerlukan peran koordinasi Kemenko Marves dalam melakukan analisa masalah dan pengambilan keputusan sehingga hak-hak pihak ke 3 (masyarakat) dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat, yang pada akhirnya dapat diberikan legalitas berupa penerbitan sertifikat HPL kepada OIKN.







Menko Marves Luhut B. Pandjaitan Bersama MenPupr dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ibu Kota Nusantara (11/08/2024)

IKN SEBAGAI SUPERHUB

6 KLUSTER EKONOMI

1. Kluster Industri Teknologi Bersih
2. Kluster Farmasi Terintegrasi
3. Kluster Industri Pertanian Berkelanjutan
4. Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan
5. Kluster Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia
6. Kluster Energi Rendah Karbon.

2 KLUSTER PENDUKUNG

1. Kluster Pendidikan Abad ke-21
2. Smart City dan Pusat Industri 4.0







Merajut Konektivitas dalam Kelancaran Transportasi

Bandara, Pelabuhan, Jalan Tol dan Perkeretaapian (Makassar - Parepare)

Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang transportssejak tahun 2019 hingga 2024 dengan jumlah atau penambahan pelabuhan, bandar udara dan panjang ruas tol yakni:

Terdapat 11 Bandara yang sudah selesai yakni (Update Tw I 2024) Bandara Buntukunik, Ngloram, Nabire Baru, Siboru, Mandailing Natal, Banggai Laut, Sobaham, Bolaang Mongondow, Singkawang, Pohuwato dan Kediri.

BEFORE 2019 : 681 > AFTER 2024 : 692

12 Pelabuhan Penyeberangan baru yang telah dibangun Pelabuhan Penyeberangan (Pulau Telo, Bias Munjul, Sampalan, Siompu, Kadatua, Leti, Weda, Kaimana, Batanta, Salawati, Bade dan Letung)

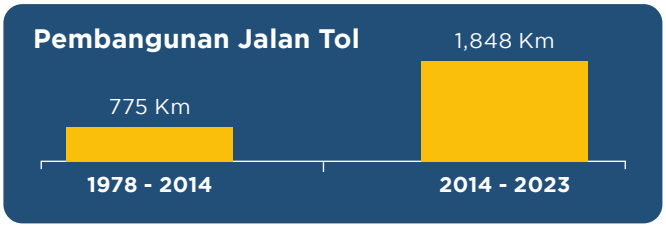
BEFORE 2019 : 286 > AFTER 2024 : 298

Pembangunan Jalan Tol Telah Mendorong Ekonomi di Jawa. Indonesia telah mempercepat pembangunan jalan tol secara signifikan dalam 9 tahun terakhirmelalui Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera

Indonesia memiliki rencana rinci pembangunan total 18 ribu km jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Indonesia pada tahun 2050

11 **Lokasi Pembangunan Bandara Baru**

12 **Pelabuhan Penyeberangan**



17,864
km total jalan tol

34 JALAN TOL

- Serang – Panimbang (2025)
- Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga (> 2024)
- 5Ciawi - Sukabumi - Ciranjang – Padalarang (2026)
- Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (2026)
- Serpong – Balaraja (> 2024)
- Semanan – Sunter (2026)
- Sunter - Pulo Gebang (> 2024)
- Kemayoran - Kampung Melayu (> 2024)
- Pasar Minggu – Casablanca (> 2024) Jalan Tol Probolinggo – Besuki)
- Krian - Legundi - Bunder – Manyar (2029)
- Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (2026)
- Solo - Yogyakarta - Kulon Progo (2026)
- Semarang – Demak (2025)
- Binjai – Langsa (> 2024)
- Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung – Padang (> 2024)
- Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh – Bukittinggi
- Yogyakarta - Bawen (2025)
- Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi (2025)
- Jambi - Rengat (> 2024)
- Rengat - Pekanbaru(> 2024)
- Simpang Indralaya - Muara Enim (> 2024)
- Lubuk Linggau - Curup – Bengkulu (> 2024)
- Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas
- Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya) (2029)
- Akses Pelabuhan Patimban (> 2024)
- Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka – Mengwi (2027)
- Kayu Agung - Palembang – Betung (2025)
- Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoyo Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated))
- Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung:
    1. North - South Link Bandung; dan
    2. Bandung Inter Urban Toll Roa

CAPAIAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN S.D TAHUN 2023

Proyek Strategis Nasional di lingkungan Kemenhub merujuk pada PermenkoNomor 6 Tahun 2024 Tentang “Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional”

Jalan Tol

Target : 356 KM

Capaian : 217,78 KM

Jalan Baru

Target : 557 KM

Capaian : 377,55 KM

Jembatan

Target : 9.030 M

Capaian : 5.956,8 M

Flyover/ Underpass

Target : 3.090 M

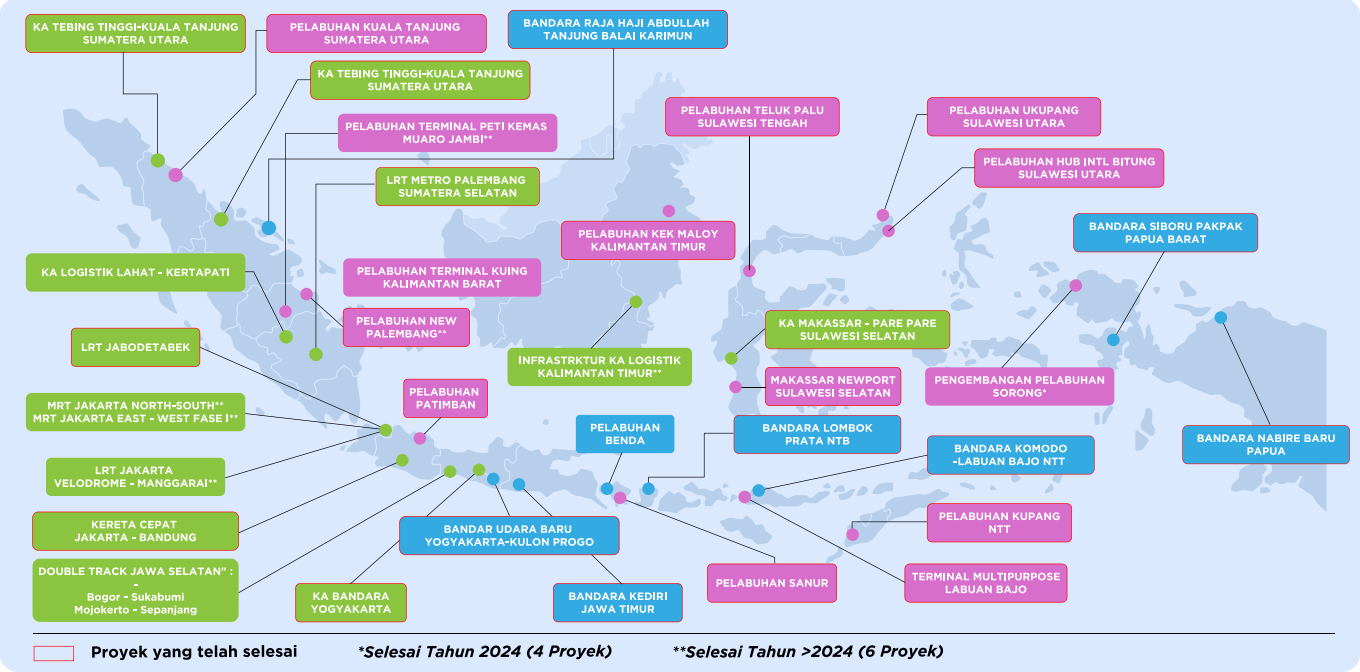
Capaian : 1.620 M

1.980 km
Jalan Nasional

IKN
75 Km Jalan Tol
96 Km Jalan Inti
357 Unit Hunian ASN

SEBARAN PROYEK PSN SEKTOR TRANSPORTASI

Proyek Strategis Nasional di lingkungan Kemenhub merujuk pada PermenkoNomor 6 Tahun 2024 Tentang “Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional”



Terdapat 35 PSN sektor transportasi, terdiri dari :

- Sektor Bandar Udara, sebanyak **7 PSN**
- Sektor Kereta Api, Terdapat **13 PSN**
- Sektor Pelabuhan, Terdapat **15 PSN**

Status Penyelesaiian 35 PSN

25 Selesai Konstruksi
4 Selesai tahun 2024
6 Selesai di atas tahun 2024



PENYELESAIAN KONSTRUKSI DI TAHUN 2024

JALAN TOL OPERASI TAHUN 2024

NO	RUAS JALAN TOL	SEKSI	PANJANG (km)	KETERANGAN
1	Indrapura-Kisaran	Seksi 2: Limapuluh-Kisaran	32,15	SLO 28 Maret 2024
2	Pekanbaru-Padang	Bangkinang-Pangkalan Tahap 1	24,70	SLO 28 Mei 2024
3	Cimanggis-Cibitung	Seksi IIB: IC Cikeas-JC Cibitung	19,65	SLO 5 Juli 2024
		PANJANG TOTAL:	**76,50**	

NO	RUAS JALAN TOL	SEKSI	PANJANG (km)	TARGET PENYELESAIAN KONSTRUKSI (KONTRAKTUAL)
1	Kuala Tj-Tebing Tinggi-Parapat	Sebagian Seksi 2: Kuala TJ -Indrapura	10.15	Telah ULF 10-12 Juli
		Seksi 3: Tebing Tinggi - Seberlawan	30,00	Telah ULF 10-12 Juli
		Seksi 4: Seberlawan-Sinaksak	15,63	Telah ULF 10-12 Juli (sebagian Seksi 4)
2	Serpong-Balaraja	Seksi 1B (Sta 3+970- Sta 9+845)	4,695	Telah ULF 25 Juli
3	Sigli-Banda Aceh	Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum)	24,67	September
4	Solo-Yoyakarta-NYIA KulonProgo	Seksi 11: (SS Kartasura - SS klaten)	22,30	September
		Seksi 1.2: (SS Klaten - SS Purwomartani)	20,075	Desember
5	Jalan Tol Akses IKN	Seksi 3A-1: Karangjoang - KKT Kariangau	9,275	Desember
		Seksi 3B-1: KKT Kariangau -Sp Tempadung	6,087	September
		Seksi 5A: Sp Tempadung - J.N.P Balang	1,675	Desember
		Seksi 5B: J.N.P Balang - SP Riko	13,275	Desember
		Seksi 6A: SP Riko-Rencana Outer Ring Road IKN	6,28	Oktober
		Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road IKN-So.3ITCI	6,18	Oktober
6	Betung-Jambi	Seksi 1-3 Bayung Lencir - Tempino	34,10	September
7	Binjai-Langsa	Seksi 3: Tanjung Pura - Pangkalan Brandan	19,00	September
8	Probolinggo-Banyuwangi	Seksi 1.1 (Gending-Suko)	3,88	Desember
		Seksi 1.2 (Suko-Krakasan)	9,00	Desember
9	Pekanbaru-Padang	Padang-Sicincin	36,60	Desember
10	Jakarta-Cikampek II Selatan	Paket III: Taman Mekar - Sadang	27,85	Desember
		TOTAL:	**305,72**	

Jumlah atau penambahan jalur kereta api sebelum tahun 2019 hingga 2024 ketika berakhirnya masa pemerintahan Indonesia Maju.

Uraian *Description*	Satuan *Unit*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalur KA *Lenght of Railway Line*	M	5.285.998	5.380.818	5.569.378	5.940.138	6.221.698	6.325.916	6.466.197	6.642.313	6.880.918

PANJANG JALUR KA EKSISTING
9.114.122 m

AKTIF/BEROPRASI
6.880.918 m

TIDAK AKTIF/TIDAK BEROPERASI
2.233.204 m

TAHUN 2024
6.927.00 msp
JALUR KERETA API TERBANGUN



Sumatera

- Jalur KA Aktif di Sumatera: 1.863.008 m
  - Wilayah Sumatera Bagian Utara: 721.383
  - Wilayah Sumatera Bagian Barat: 232.411 m
  - Wilayah Sumatera Bagian Selatan: 909.294
- Perlintasan Sebidang
  - Resmi dijaga: 210 Unit
  - Resmi tidak dijaga: 113 Unit
  - Liar: 507 Unit
- Jalur KA Tidak Aktif di Sumatera: 1.872.790 m

Jawa

- Jalur KA Aktif di Jawa: 4.882.950 m
  - Wilayah Jakarta Banten: 983.373 m
  - Wilayah Jawa Bagian Barat: 1.211.867 m
  - Wilayah Jawa Bagian Tengah: 1.601.155 m
  - Wilayah Jawa Bagian Timur: 1.086.555 m
- Jalur KA Tidak Aktif di Jawa dan Madura: 1.872.790 m

Sulawesi

- Jalur KA Aktif di Sulawesi: 108.880 m

Papua

- Jalur KA Aktif di Papua: 26.000 m













Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar-Parepare antar Maros-Barru dan Depo Kereta Api Maros yang diselenggarakan di Depo Kereta Api Maros, Kabupaten Maros, pada Rabu, 29 Maret 2023.

Solusi Pembangunan **Berbasis Alam**

Pengendalian *Blue Infrastructure* Terintegrasi

Implementasi infrastruktur biru yang merupakan bagian dari konsep ekonomi biru mengacu pada pengembangan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kelautan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Blue infrastructure” mengacu pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan pesisir, seperti pelabuhan, jaringan transportasi laut, pembangkit listrik tenaga laut, fasilitas pariwisata, dan perlindungan pantai. Ini berperan dalam meningkatkan konektivitas antara wilayah produksi dan distribusi, meningkatkan akses ke objek wisata, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian masyarakat. Strategi pembangunan infrastruktur biru ini penting dalam konteks mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

Dasar pelaksanaaan dari Blue Infrastructure yakni, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, beserta Rencana Aksi Kebijakan (periode 5 tahun), yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi tahun 2021-2025. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah juga menetapkan peraturan presiden khusus di beberapa wilayah provinsi, misalnya: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Regulasi ini, sebenarnya, dapat menjadi pelajaran yang dapat diterapkan di lokasi lain seperti wilayah lintas batas untuk mempercepat pengembangan infrastruktur biru terpadu dan konektivitas..

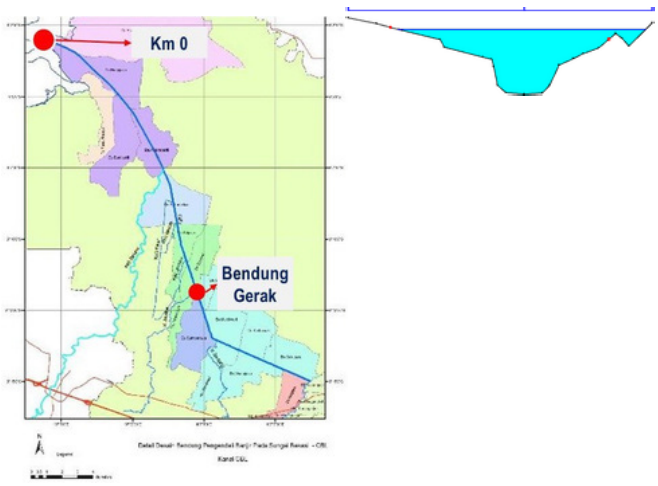
Perlindungan Pesisir untuk 5 Kawasan Urban di PANTURA JAWA, pengembangan 18 Waduk Serbaguna (proyek utama nomor 28) dan proyek utama nomor 36. Pemulihan 4 DAS Kritis. Dimana tiga contoh proyek utama ini dilakukan secara terintegrasi di satu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya di area pelabuhan dan area pendukung sekitarnya merupakan contoh pengembangan infrastruktur biru dan sekaligus ekonomi biru.

Beberapa integrasi proyek-proyek utama dan proyek strategis nasional di wilayah pesisir utara Jawa menggunakan pendekatan infrastruktur biru, antara lain:

- Rencana pengembangan perlindungan pesisir yang terintegrasi dengan waduk lepas pantai untuk kebutuhan air baku yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir di DKI Jakarta.
- Cirebon, tanggul perlindungan pesisir terintegrasi dengan bendungan penyimpanan air untuk produksi garam. Pengaturan area sekitarnya juga terintegrasi dengan pelabuhan perikanan dan rehabilitasi pesisir dengan penanaman mangrove untuk mengatasi abrasi pesisir.
- Pekalongan, integrasi infrastruktur biru juga dilakukan, bahkan pelabuhan perikanan dipindahkan ke daratan untuk menyelamatkan masyarakat dari banjir pasang laut dan penurunan tanah.
- Inisiatif infrastruktur biru (abu-abu-hijau) dilakukan dalam pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Semarang dan Jalan Tol Semarang Demak.
- Konsep infrastruktur biru juga diterapkan dalam rehabilitasi Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar-Bali, dan pemanfaatan sumber daya air danau/waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya, seperti yang ditampilkan pada acara G20 Indonesia.

Capaian Pelaksanaan Program s.d Akhir Tahun 2023





Sumber: Dokumentasi Pemprov. DKI Jakarta

Pengendalian Banjir & Pengaman Pesisir DKI JAKARTA

1. **Dry DAM:** Reduksi Banjir 11,9% (Ciawi 111,75 m3/det & Sukamahi 15,47 m3/det)
2. **Drainase dan Normalisasi Sungai:** 13 Muara Sungai; i.e. Kali Cakung: DED, Bendung Gerak CBL: Koordinasi, Sudetan KBT
3. **Tanggul Pantai & Laut PTPIN/NCICD:** KLHS-IFSP, Update Perpres Tim, Konsep WLP, Integrasi MRT+SundaKelapa

Pembangunan Bendung Gerak Inland Waterway Cikarang – Bekasi – Laut

1. Kanal CBL saat ini memiliki lebar yang bervariasi antara 30 m – 120 m dan kedalaman antara -4 < H <-2 mdpl. Untuk menanganai banjir dan kebutuhan waterway maka dibutuhkan normalisasi kanal CBL dengan sepanjang 18.6 km; lebar dasar kanal = 55 m; lebar permukaan kanal = 75 m; elevasi dasar kanal = 4.5 m.
2. Pembangunan bendung gerak pengendali banjir pada km 20,5 dan juga ground sill pada dasar kanal untuk menjaga morfologi sekitar sungai.



Rekayasa Pantai dan Pengamanan Pesisir Cirebon Raya

1. Penanganan Rob Cirebon-Indramayu: 10 Kegiatan (2021-2024), diantaranya: Pembangunan Pengaman Pantai & Groin Pantai Gebang (2022-2023).
2. Integrasi dengan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Gebang Mekar
3. Pengendalian Abrasi dan Banjir Rob Kawasan Pesisir Krangkeng, Indramayu.
4. Integrasi dengan Pemanfaatan Air Laut (tua) untuk Produksi Garam Rakyat

- **Pengendalian Banjir & Pengaman Pesisir Pekalongan.**

1. Pelabuhan Perikanan PPN Pekalongan - onshore
2. Pengaman Pantai - Tanggul laut (pasir)
3. Kolam retensi
4. Bendung Gerak
5. Pengendalian Banjir

Peta Rencana Desain Sistem Loji-Banger



Pengendalian Banjir & ROB Pekalongan

Paket I

- Tanggul = 2.87 Km
- Long Storage = 2.87 Km
- Parapel = 5.62 Km
- Normalisasi Sungai Mrican = 6km
- Rumah Pompa dan Pompa

Paket II

- Tanggul = 2.23 Km
- Long Storage = 2.23 Km
- Parapel = 4,6 Km
- Normalisasi Sungai Bremi dan Meduri
- Rumah Pompa dan Pompa

Paket III

- Tanggul = 2.23 Km
- Long Storage = 2.3 Km
- Parapel = 4,6 Km
- Rumah Pompa dan Pompa

- **Integrasi Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Rob (Semarang – Demak)**

1. Kajian Dampak Pembangunan Tol terhadap Ekosistem Pesisir (akses nelayan, hidrodinamika, sosial ekonomi) dan Kontribusinya terhadap Pengamanan Pantai (banjir-rob)
2. Penyelesaian Tata Ruang KSN Kedungsepur.
3. Penyelesaian Permasalahan Tanah Hilang (tenggelam) Percepatan Permen ATR/BPN, Tim ad hoc.
4. Rekayasa Pantai: Seksi 1 Tol Semarang - Demak ruas Semarang - Sayung. 3 lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi (46 hektar).
5. Kajian Resiliensi Pesisir (Ekosistem: Banjir Rob, Abrasi, Land Subsidence, Keanekaragaman Hayati, Sosial Ekonomi Masyarakat)
6. Integrasi dengan Program Green Infrastructure Blue Infrastructure.

Tanggul Laut Terintegrasi Jalan Tol Semarang - Demak



- **Panjang 271,175 km**
- **Luas 5,352,216 m2**
- **1.523 bidang**

Kenadala

Terdapat 426 bidang tanah seluas kurang lebih 394.43 Ha yang belum keluar peta bidang dari BPN karena kondisi tergenang.

Solusi

- Kejelasan status tanah dan melakukan percepatan pembebasan tanah.
- Kontribusi terhadap pengamanan pantai (banjir-rob) ?

Progres

- Pembebasan tanah : 31,87 %
- Realisasi konstruksi : 11,285%

Upper catchment management

Reduced water demand

Renewable energy from water

Improved agricultural practices and local food production

River restoration

Protection of critical infrastructure

Examplar campus/ business park

Water management improves public realm and microclicmate

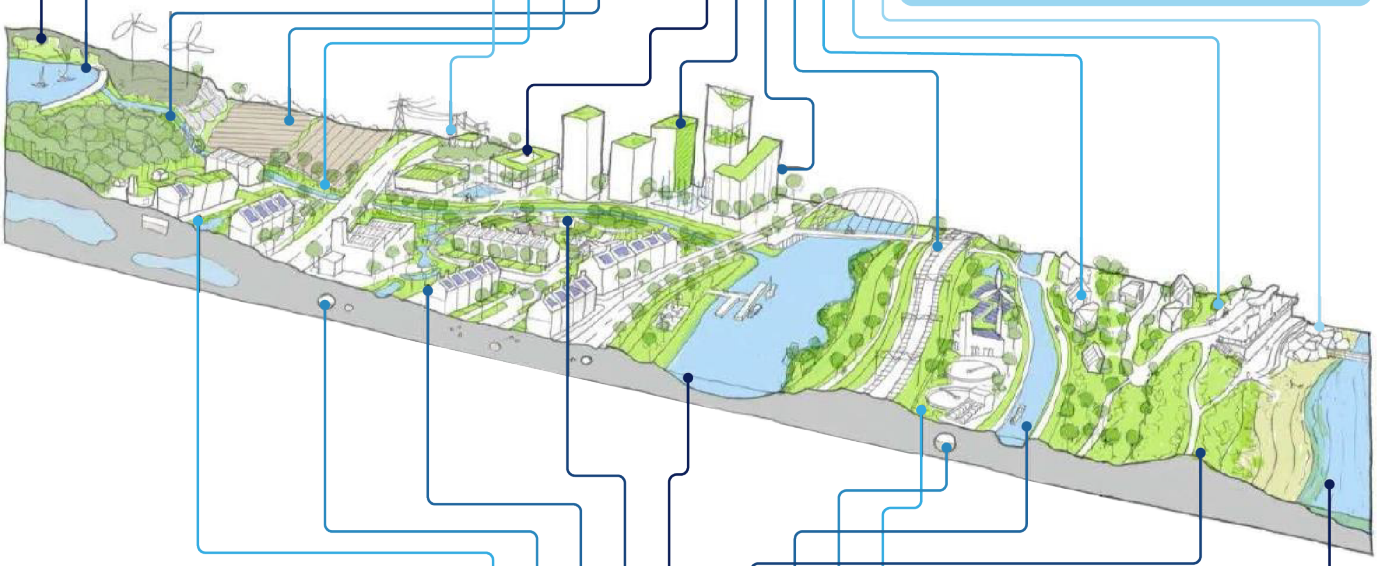
High quality energy and water efficient buildings

Water-resilent infrastructure

Water cycle informs sustainable spatial planning and land use

Flood-resilent development

Coastal defences protecting settlements



Water sensitive urban extension with decentralised supply/treatment

Extended asset life for existing infrastructure

Integrated buildings and landscape retrofit for water and energy efficiency

Multifunctional green grid incorporates water management

Revitalised river space with flood compatible uses

Treatment works of the future

Smart infrastructure facilitates better water management

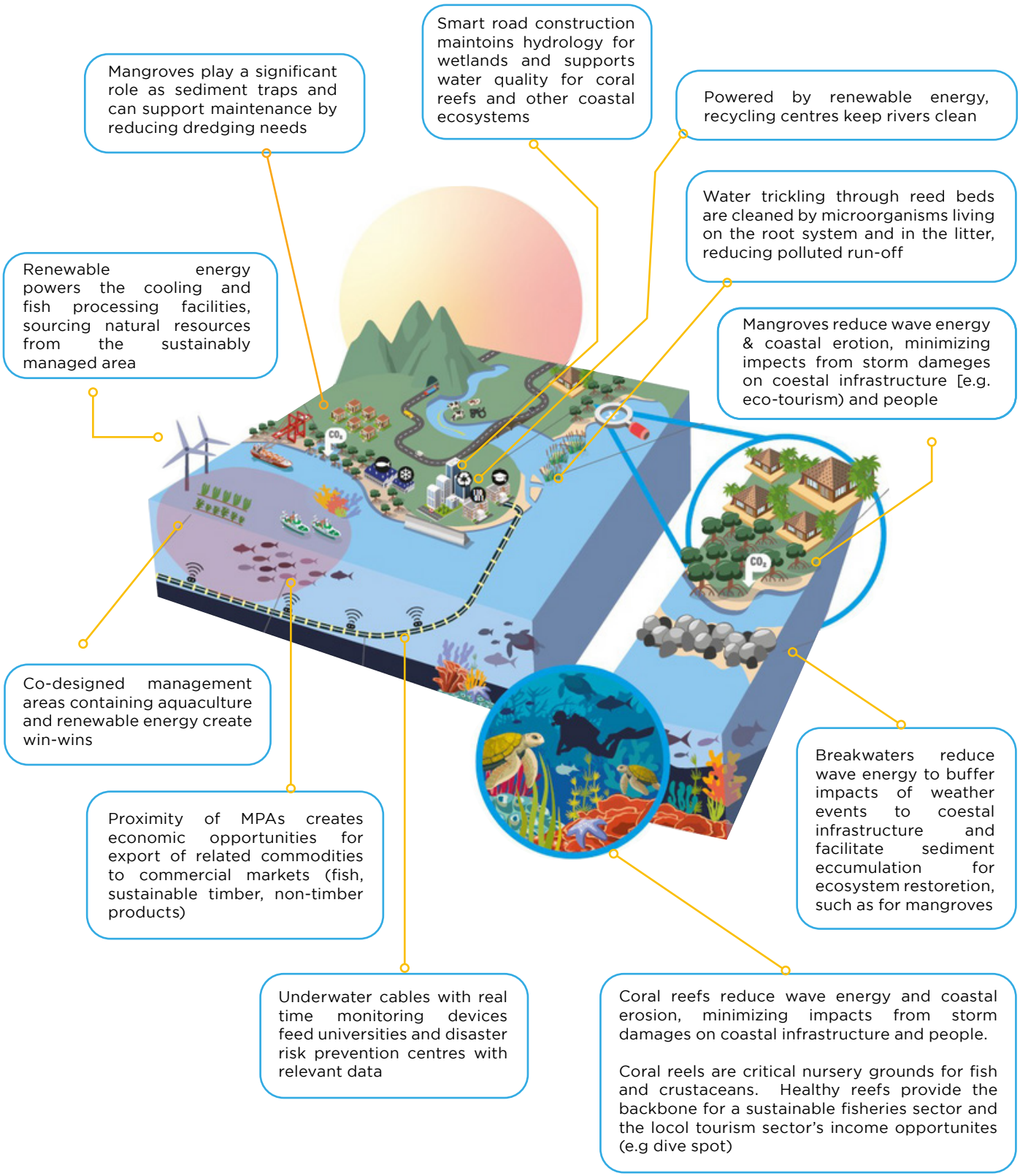
Restored and revitalised canals and waterways

Dynamic natural coast provides habitat and amenity

Improved water quality

Infrastruktur biru (*Blue Infrastructure*)
sebagai opsi alternatif menggantikan infrastruktur tradisional.

1. Mempromosikan keberlanjutan,
2. Melindungi ekosistem, dan
3. Kemungkinan menghemat uang masyarakat melalui instalasi dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah.
4. Terintegrasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik lokal (mempertimbangkan potensi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang paling optimal).

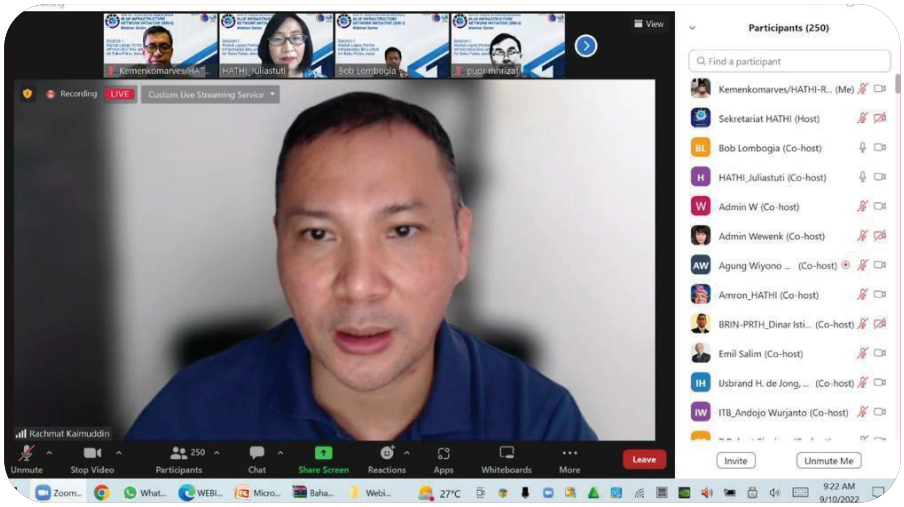












Deputi Rachmat Ajak Stakeholders Berkolaborasi untuk Mengantisipasi Ancaman Ketahanan Ai



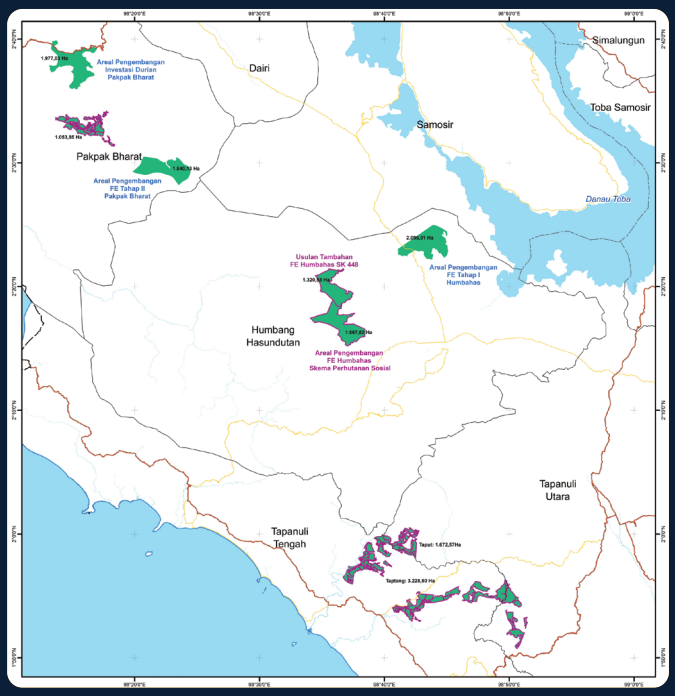
Kemenko Marves Bersama HATHI Dorong Infrastruktur Biru Melalui Penyediaan Energi Terbarukan dan Pemanfaatan Bangunan Air

06



LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Food Estate: Investasi Masa Depan Bagi Generasi Anak Cucu









Sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19, Food Estate ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi ancaman gangguan pada rantai pasok pangan yang muncul dengan mengelola lahan terbengkalai menjadi lahan produktif. Program Food Estate di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Food Estate juga berfungsi sebagai area percontohan untuk penerapan kebijakan pangan nasional terpadu yang didasarkan pada analisis usaha tani, keberadaan off taker, dan dukungan penelitian yang komprehensif.

Program Food Estate dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan prioritas (beras, jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih). Sesuai arahan Presiden RI dalam rapat terbatas pada 23 September 2020, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah menjadi lokasi prioritas. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) diberikan mandat untuk mengelola Food Estate Sumatera Utara dengan luasan Area of Interest (AoI) mencakup 15.057 hektar tersebar di empat kabupaten (Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara).





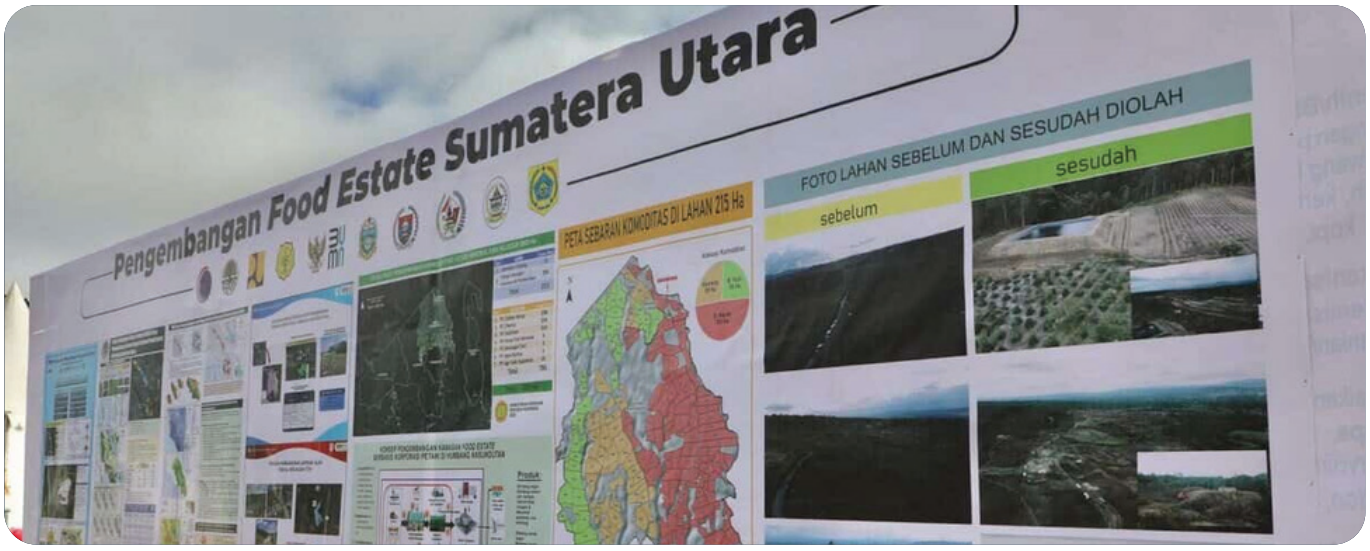
Menko Luhut mencoba traktor di Perkebunan Foodestate di Humbang hasudutan (09/04/2021)



Menko Luhut dampingi Presiden Jokowi Kunjungan ke Wilayah Foodestate di Toba (27/10/2021)









Menko Luhut dampingi Presiden Jokowi Kunjungan ke Wilayah Foodestate di Toba (27/10/2021)



Proses Panen Kentang oleh Petani Food Estate, di Desa Hutajulu, Perkebunan Kentang, Sumatera Utara (27/10/2021)

Pengembangan Food Estate Sumatera Utara menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan dari tahun 2020 hingga pertengahan 2024, Pengembangan Food Estate Sumatera Utara menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2024. Saat ini akumulasi luas tanam mencapai +/- 600 ha di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat dengan lima komoditas utama (Kentang, Bawang Merah, Cabai, Kubis, dan Jagung). Beberapa komoditas telah melebihi produktivitas nasional, contohnya pada 2024 Kentang tercatat sebesar 22 ton/hektar (nasional 15-20 ton/hektar) dan Bawang Merah 13 ton/hektar (nasional 10 ton/hektar). Selain itu, juga akan dikembangkan budidaya durian di Kabupaten Pakpak Barat.

Tak hanya itu, untuk menunjang proses budidaya di Food Estate Sumatera Utara, telah dibangun infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju kawasan sepanjang 8,59 km, jalan dalam kawasan sepanjang 15,68 km, jalan usaha tani 12,3 Km, dan total 13 embung serta jaringan irigasi yang dapat mengairi kawasan seluas 1.000 hektar area penanaman di Humbang Hasundutan dan 200 hektar di Pakpak Bharat.

Pengembangan Food Estate Sumatera Utara mengacu pada Rencana Induk FE Sumut 2020-2024 yang ditetapkan melalui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No.19/2023. Untuk keberlanjutan program Food Estate Sumatera Utara, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

> **"Kita Siap Kembangkan Food Estate Sumatera Utara Empat Tahun ke Depan"**
>
> Luhut B. Pandjaitan



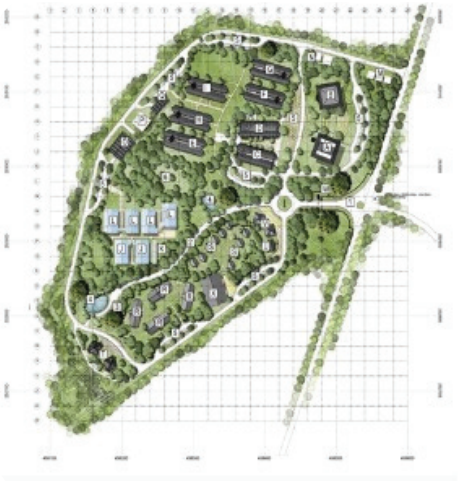
Food Estate Sumut dikelola dengan sistem klaster melalui kerja sama dengan investor/*off-taker* dan petani mandiri. Saat ini terdapat kerja sama dengan 6 investor yang telah diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama.

Tidak hanya Food Estate Sumatera Utara, Kemenko Marves juga telah menyusun Area of Interest Food Estate Papua di Kab. Keerom seluas 3.720 hektar dengan komoditas utama tanaman jagung.

Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2)

Pembangunan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 500 Ha. Pembangunan Tahap I telah selesai 12 bangunan dan pada Pembangunan Tahap II direncanakan untuk dibangun 13 bangunan yang ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Oktober 2024. TSTH2 nantinya akan menjadi aset Kemendikbudristek yang dioperasikan oleh IT-Del. Untuk peresmian beberapa gedung yang telah selesai dibangun, akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan September 2024. Selanjutnya untuk peresmian kawasan TSTH2 secara keseluruhan, rencananya akan dilakukan oleh presiden terpilih pada bulan Februari atau Maret 2025 nanti.

Di dalam kawasan TSTH2 juga akan dibangun Kebun Tanaman Obat yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang kan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan September 2024.



Terdapat beberapa kerja sama yang telah dilakukan Kemenko Marves bersama dengan mitra internasional terkait lainnya, diantaranya adalah:

- Zhejiang University : Kerja Sama Pendidikan, Pertukaran Mahasiswa, maupun melakukan penelitian di Tiongkok.
- National Development and Reform Commission (NDRC) : Kerja Sama Pusat Konservasi, Penelitian, dan Inovasi Tanaman Obat Indonesia Tiongkok.
- Beijing Genome Institute (BGI) : Kerja Sama Riset Genomik dan Pengadaan Alat Next Generation Sequencing (NGS).
- Forum Bisnis RI-RRT (pengembangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan kesehatan, mulai dari herbal dan food estate, perikanan, Energi Baru Terbarukan (EBT), dll).
- Penyelenggaraan Online Training on Traditional Chinese Medicine dengan NDRC Tiongkok.

Strategi pengembangan:

- Pengembangan Sains dan Teknologi Genomik untuk hortikultura dan tanaman herbal Indonesia melalui kerja sama riset dengan mitra dalam dan luar negeri inkubasi teknologi untuk melahirkan start-up.
- Menjadi “hub” dan akselerator riset serta “etalase” potensi hortikultura dan tanaman herbal Indonesia;
- Melakukan “teaching industry” untuk perguruan tinggi dan lembaga terkait;
- Melakukan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Konstruksi Pembangunan TSTH2 Tahap II







Rehabilitasi **Ekosistem Mangrove**

Percepatan Rehabilitasi Mangrove

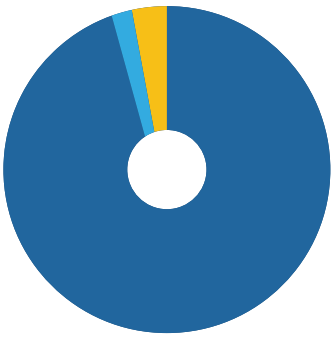


Foto: X @kemenkomarves

RPJMN 2024 menargetkan luasan rehabilitasi ekosistem mangrove sebesar 60.000 hektar. Menyadari urgensi aksi iklim yang meningkat, Pemerintah melalui koordinasi Kemenko Marves berdasarkan Perpres 120/2022 menetapkan target merehabilitasi 600.000 hektar mangrove pada tahun 2024.

Data World Bank, Indonesia memiliki setidaknya 3,5 juta hektar mangrove, 23% dari total seluruh populasi mangrove di dunia, dengan persebarannya dalam 92 spesies. Populasi mangrove tersebut dapat membantu mengatasi dampak dari setidaknya 3,1 miliar ton karbon, setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 2,5 miliar kendaraan bermotor. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi mangrove terbesar di dunia.

Realisasi Rehabilitasi Hingga 2023



CSR/TJSL

1.276 Ha

Dana Lainnya
(DAK, DBH-DR)

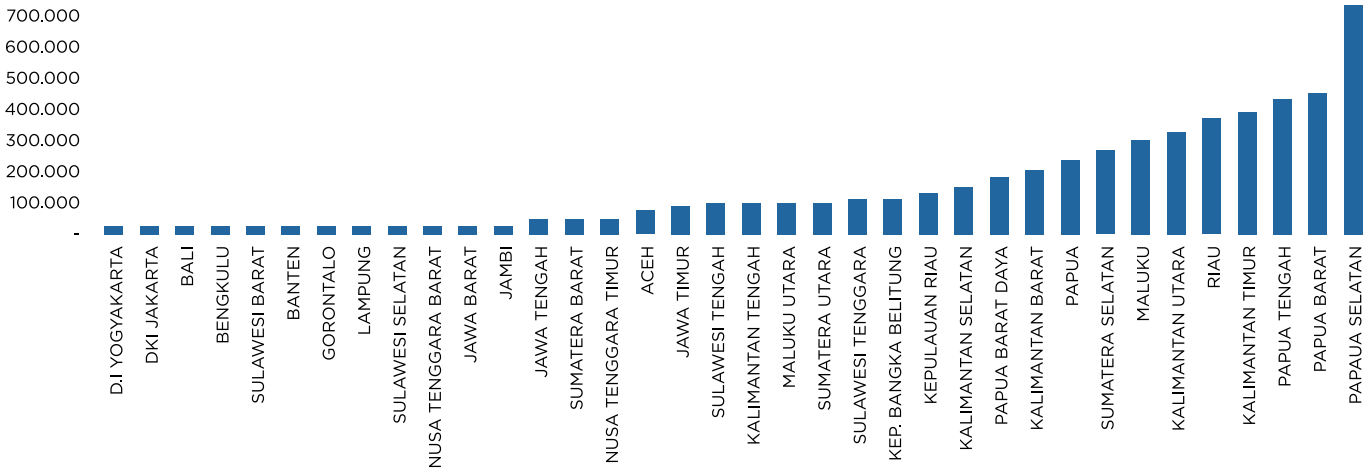
1.276 Ha

Pemerintah

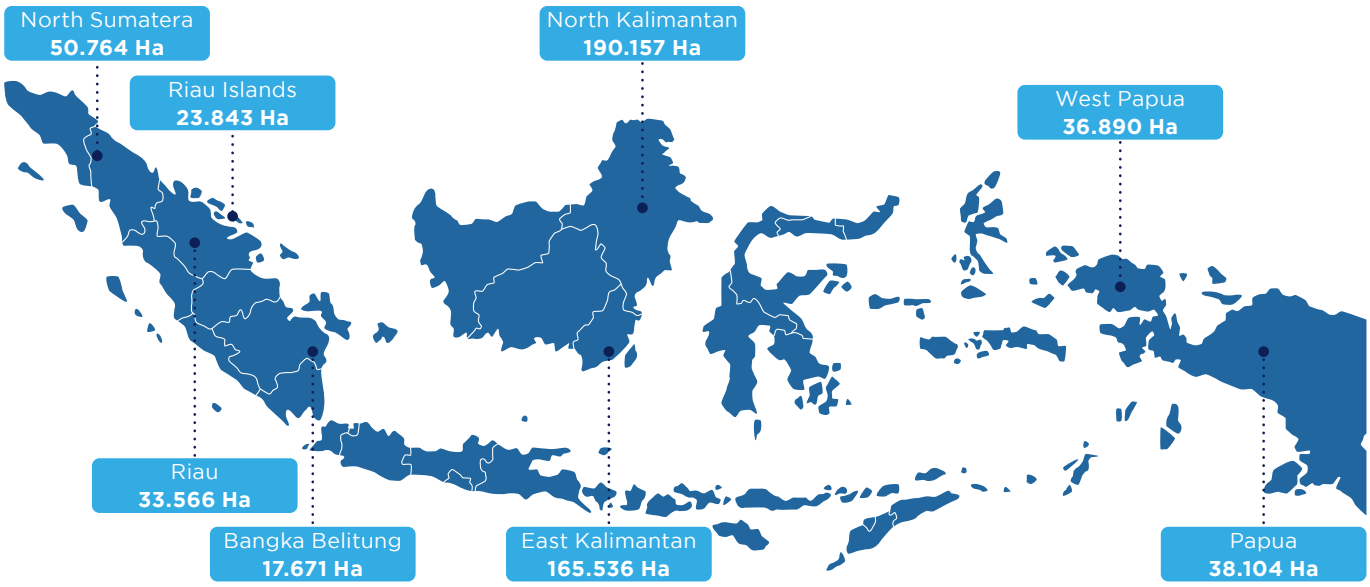
106.000 Ha

Mangrove merupakan ekosistem penting di kawasan pesisir. Selain memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dan habitat bagi berbagai spesies, mangrove juga memiliki potensi besar untuk menyerap karbon.
Indonesia memandang penting untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu solusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui konsep Nature Based Solution atau Ecological Based Approach in efforts to mitigate climate change. Upaya Indonesia dalam menjaga ekosistem mangrove melalui rehabilitasi dan konservasi telah diapresiasi oleh dunia dan telah menjadi isu penting pada gelaran UNFCCC dan COP-28 Dubai.

Luas Mangrove Per Provinsi



Target rehabilitasi mangrove di 9 Provinsi

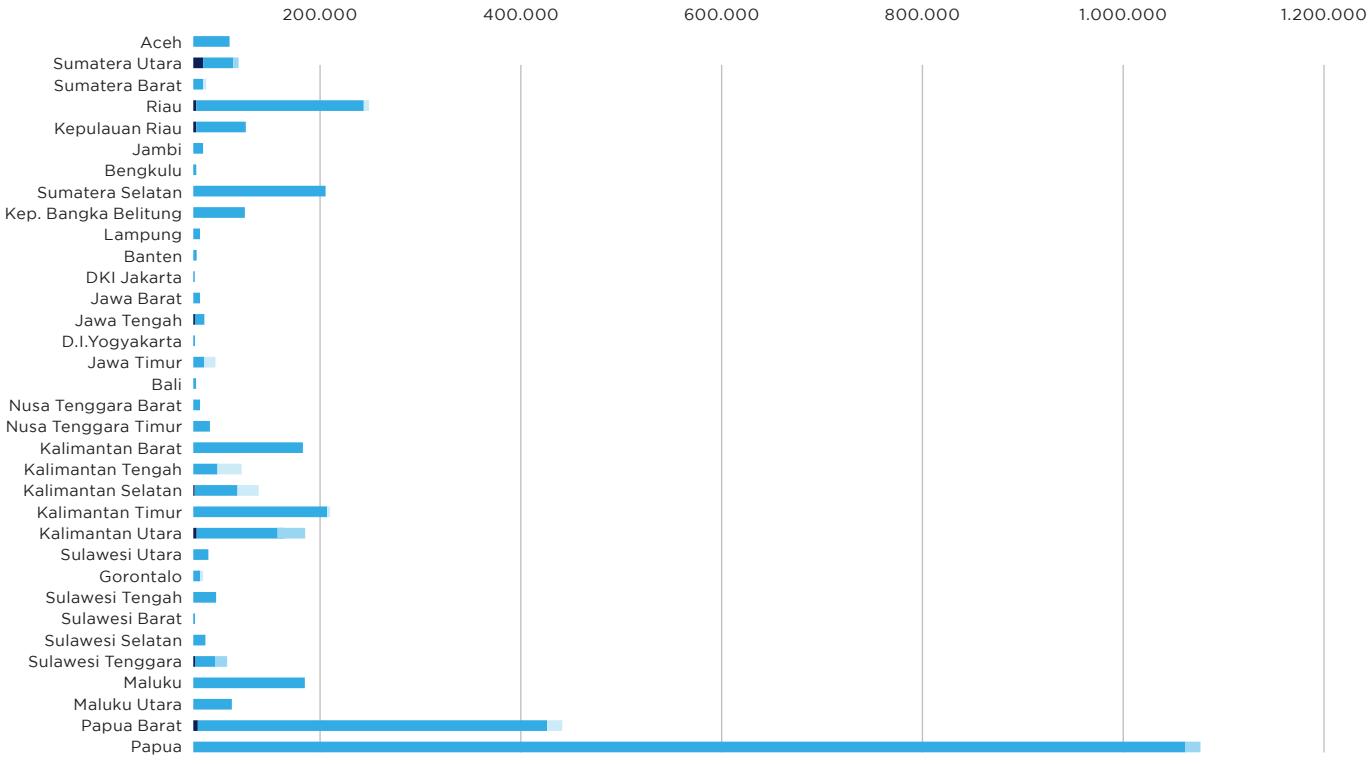


Kemenko Marves dalam upaya pengelolaan mangrove menyelenggarakan:

- Aksi bersih sampah plastik dan penanaman mangrove di Kawasan Tahura Denpasar. Kawasan Tahura Mangrove di Bali ini merupakan salah satu contoh baik pengelolaan mangrove di Indonesia.
- Penyerahan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Segara Gunabatu Lumbang Kota Denpasar.
- Program penanaman mangrove di Jakarta Mangrove Ecotourism Centre Pantai Indah Kapuk. Penanaman mangrove ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Islands Hackathon

KONDISI DAN SEBARAN MANGROVE INDONESIA

Peta Mangrove Nasional, 2021



sumber: dokumentasi Kemenko Marves



Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai menjadi salah satu hasil konkret keberhasilan Indonesia dalam melakukan restorasi mangrove. Tahura ini tempat penanaman dan pembenihan mangrove. Ini adalah komitmen dan bukti keberhasilan Indonesia soal climate action.

Memiliki luas 1.300 hektare, Tahura Mangrove Ngurah Rai telah menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 spesies fauna. Indonesia menunjukkan ke dunia, Indonesia sudah berhasil melakukan restorasi karena mangrove juga ini banyak manfaatnya baik untuk manusia maupun ekosistem sekitarnya.

Selain itu telah dilakukan Groundbreaking International Mangrove Research Center MBZ-JKW di Kura Kura Bali pada 19 Mei 2024. Urgensi terhadap perlindungan ekosistem mangrove, pemerintah Indonesia dan pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) telah menyepakati MoU untuk bersama-sama mengetuai Mangrove Alliance for Climate (MAC) dan akan membangun Mohammed Bin Zayed - Joko Widodo International Mangrove Research Center (MBZ-JKW IMRC) di Indonesia.



Menko luhut laksanakan Ground Breaking “The Mohammed Bin Zayed - Jokowi Dodo” International Mangrove Research Centre di Bali (19/05/2024)

Ada tiga fungsi jasa lingkungan mangrove.

- Habitat and nursery function di mana mangrove menjadi habitat tempat berlindung dan berkembangbiaknya berbagai jenis fauna dan biota laut.
- Coastal protection and erosion control yang akan menjadi buffer zone dalam menstabilisasi sedimen dan purifikasi air, perlindungan garis pantai, erosi, mitigasi bencana seperti tsunami dan badai.
- Sebagai nutrient cycling and carbon sequestration. Mangrove dalam banyak penelitian memiliki kemampuan untuk menyimpan huge stocks of carbon, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan menyimpan karbon di hutan-hutan terrestrial.



‘Penandatanganan Kesepahaman Bersama Rehabilitasi Mangrove sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR)’. Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti di Bali, Kamis (17/11/2022).

Setelah ditunjuk menjadi Ketua Bersama Aliansi Mangrove untuk iklim atau *Mangrove Allice for Clime (MAC)* disela-sela COP-28 Desember lalu, **Indonesia dan UAE mencapai kesepakatan untuk mendirikan *International Mangrove Research Center* (IMRC) di Bali.**



April 2024 lalu, Kemenko Marves dan Pemerintah UAE menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai **Pengurangan Kebocoran Sampah Plastik ke Laut di Indonesia**. Pada kesempatan yang bersamaan, diumumkan bahwa seremoni peletakan batu pertama **IMRC Mohamed Bin Zayed - Joko Widodo (MBZ - Joko Widodo IMRC)** akan diselenggarakan di sela-sela perhelatan *World World Forum* Ke-10, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2024.

Dibangunnya IMRC bertujuan **membantu meningkatkan dan mendorong pertukaran pengetahuan terkait mangrove, dan wadah komunitas global untuk bekerja sama dalam peningkatan kapasitas dan pemanfaatan mangrove bagi iklim.**

MBZ - Joko widodo IMRC diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur, mengembangkan teknologi, dan mendorong perubahan perilaku di seluruh masyarakat terkait peran penting.

Tekan Emisi Karbon, **untuk Net Zero Emission**

(Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)



Penyelesaian masalah polusi tidak bisa dilakukan secara instan melalui kebijakan yang tidak didasari latar ilmu pengetahuan. Tiga strategi Menko Marves Luhut B. Pandjaitan untuk mengatasi polusi udara, yakni mempercepat transisi kendaraan listrik, pengecekan emisi karbon, penyediaan water mist generator atau pompa air bertekanan tinggi.

Akhir tahun 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa polusi udara memicu 6,7 juta kematian prematur setiap tahun.

Menurut temuan LHK, mayoritas atau 44 persen polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebabkan oleh kendaraan bermotor. Lalu, 34 persen dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan sisanya dari rumah tangga seperti pembakaran.

Carbon pricing tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai pengurangan emisi. Carbon pricing perlu didukung dengan kebijakan yang kuat, akuntabilitas dan transparan.



Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil penghasil karbon dioksida demi melindungi lingkungan, mengatasi penyebab perubahan iklim, dan memenuhi kesepakatan iklim nasional dan internasional.

Penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZEO 2060 sebagai bagian dari usaha menuju Indonesia Emas tahun 2045.



Penyelamatan Danau, Untuk Siapa?

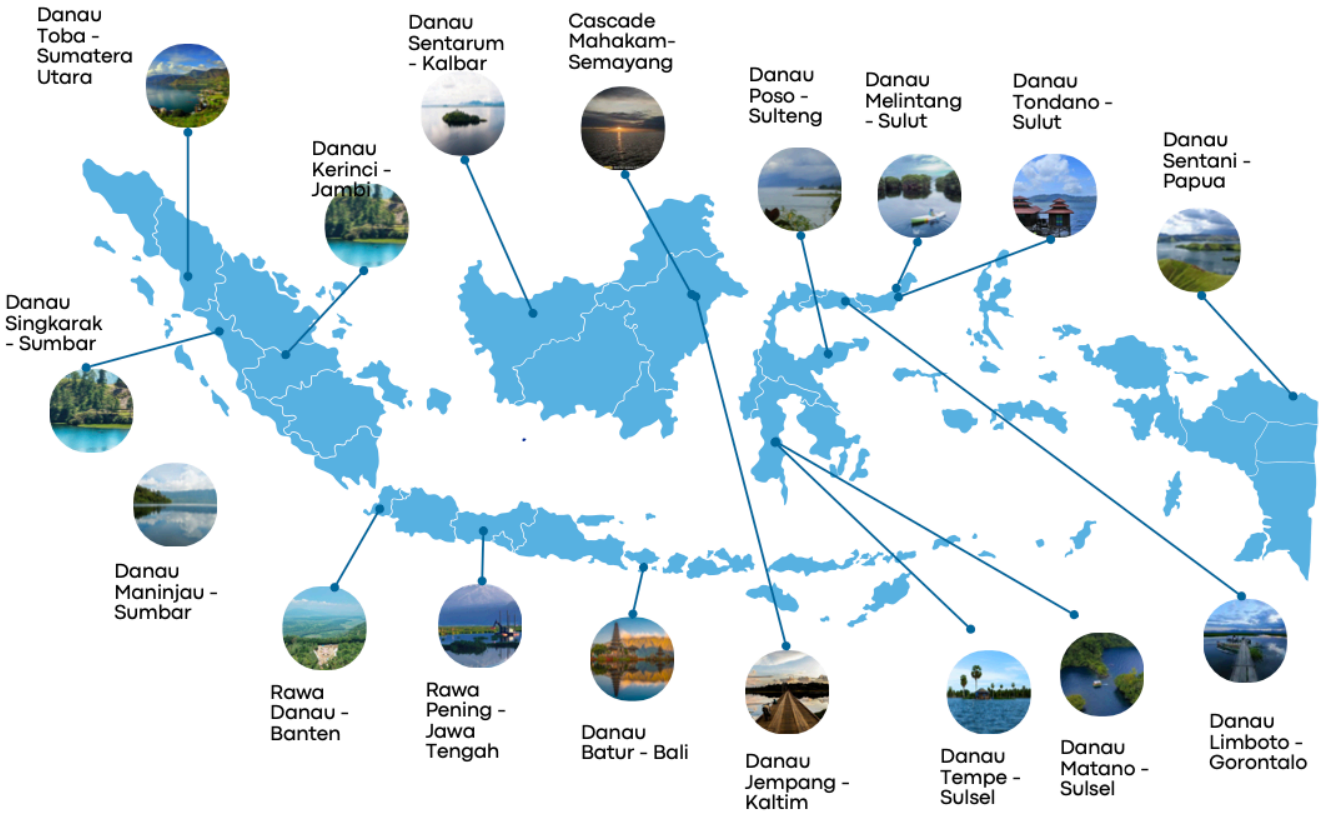
Penanganan 15 Danau Prioritas Nasional

Danau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Saat ini, beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan punahnya jenis biota endemik.

Dengan terjadinya kondisi tersebut, maka menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan serta mengembalikan kondisi danau maka diperlukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar kementerian /lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan secara terpadu melalui program penyelematan danau prioritas nasional.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah, untuk melaksanakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Secara total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami. Luas seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi.

Ditetapkan 15 (lima belas) danau prioritas nasional.



	Danau	Luas Max		Danau	Luas Max
Sumatera	170	3.700 KM2	**Jawa & Bali**	31	62 KM2
Kalimantan	139	1.142 KM2	**Papua**	129	600KM2
Sulawesi	30	1.559 KM2			

Pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya yang kurang terkendali menyebabkan kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat. Upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional.

Dilakukan berbagai upaya pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat.

Pengelolaan danau disusun dengan memperhatikan karakter masing-masing danau baik secara bio-geo-fisik, sosial maupun ekonomi.

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dilakukan melalui lima strategi utama, yaitu pengintegrasian program dan kegiatan ke dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan; penyelamatan ekosistem perairan, sempadan, dan daerah tangkapan air; penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data; pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran pemangku kepentingan; serta pengembangan potensi wisata berkelanjutan.

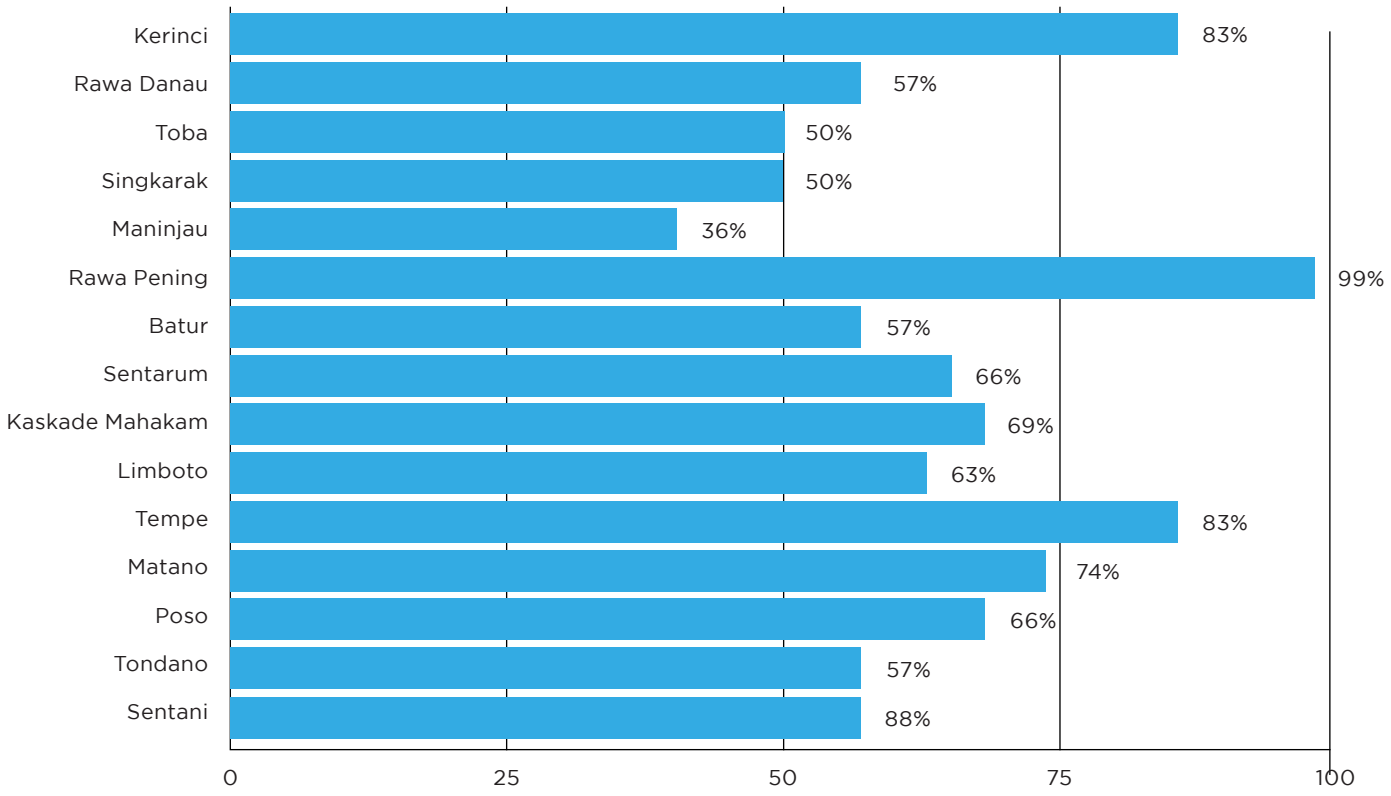
Dari 534 kegiatan upaya penyelamatan 15 danau prioritas nasional dengan 32 sub kegiatan dan 5 strategi salah satu output yang dihasilkan adalah diluncurkannya aplikasi SI Danau dilakukan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 terkait penyelamatan danau. Sehingga perlu dikembangkan sistem informasi danau yang memprioritaskan 15 danau dan akan dikembangkan untuk danau- danau lainnya.

SI Danau adalah portal sistem informasi yang berisi data base dari hasil pengamatan pengukuran dan riset pada danau di Indonesia. Sistem tersebut dirancang supaya dapat membantu masyarakat dalam mencari berbagai informai tentang danau di Indonesia.



Tren Status Mutu

Pemantauan Manual



Pilah Sampah dari Sumber Penghasil Sampah

Penanganan Sampah Laut

Penanganan Sampah Laut diterbitkan dan kemudian diterapkan, beragam upaya mulai dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penanganan sampah yang ada di laut, termasuk sampah plastik.

Selama lima tahun berjalan, produksi sampah di laut diakui sudah berkurang hingga 41,68 persen. Meski demikian, persentase itu dinilai masih belum cukup karena targetnya adalah berkurang 70 persen pada 2025.

Dengan sisa waktu dua tahun dari sekarang, Pemerintah Indonesia bekerja ekstra keras untuk bisa mewujudkan target 70 persen. Hal itu, agar beban untuk bisa mencapai target pada 2040 bisa berkurang, di mana Pemerintah menargetkan laut sudah terbebas dari sampah secara penuh.

Penanganan sampah plastik di laut tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia saja. Namun juga, masyarakat dan para pemangku kepentingan lain.





foto: Pantai Sukaraja, Bandar Lampung, Lampung. ANTARA FOTO

5 Strategi penanganan sampah laut

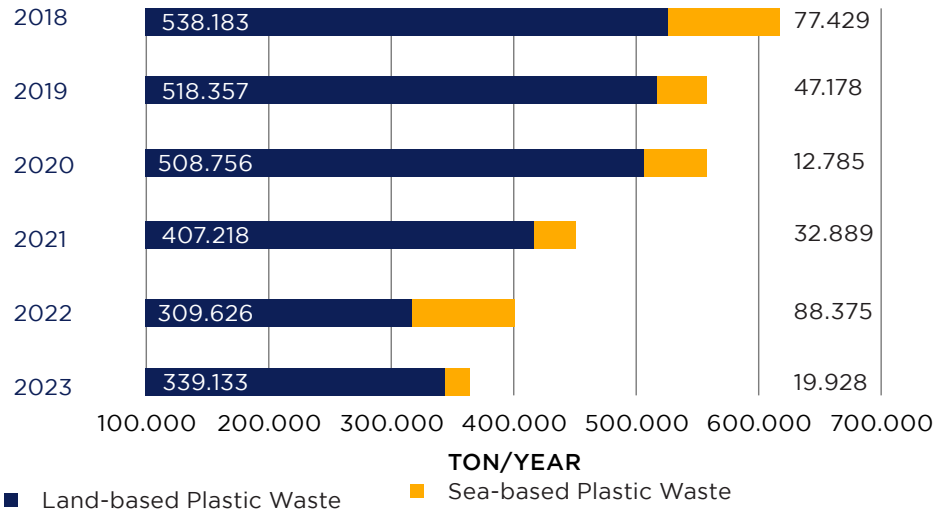
- Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan;
- Pengelolaan Sampah Bersumber dari Darat;
- Pengelolaan Sampah di Pesisir dan Laut;
- Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- Penelitian dan Pengembangan

5 Langkah yang dilakukan Kemenko Marves

- Assesment terhadap hotspot dari marine plastic debris dan kota dari sumber sampah tersebut;
- Design kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada leakage sampah ke lautan;
- Pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut;
- Pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan, serta Pengurangan penggunaan plastik
- Pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.

Capaian presentase pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut tahun 2023 sebesar 41,68% yang terdiri dari 339.133 ton berasal dari sampah darat dan 19.928 ton berasal dari sampah laut.

Total Sampah Plastik di Laut (Ton)



PENURUNAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT

41,68%

ATAU SETARA DENGAN PENGURANGAN SEBESAR

256.614

2018	2019	2020	2021	2022	2023
615.675	566.075	521.541	440.107	398.001	359.061

Percepatan capaian presentase pengurangan 70% kebocoran tahun 2025 dapat ditempuh dengan berbagai strategi.

- Meningkatkan tingkat pengumpulan sampah;
- Meningkatkan pelarangan penggunaan plastic sekali pakai atau turunannya di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Menerapkan skenario Extended Prodecer responsibility (EPR) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk produsen;
- Meningkatkan pengelolaan sampah di kapal penumpang dan Pelabuhan;
- Mengintegrasikan seluruh platform data dan monitoring persampahan;
- Menggencarkan kegiatan edukasi dan penyadartahuan publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat.

Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RANPSL) 2018 – 2023

Infrastruktur

- Peningkatan jumlah industri daur ulang plastik dari 217 pada tahun 2018 menjadi 254 pada tahun 2022 dengan kapasitas produksi mencapai2.638.038 juta ton/tahun.
- Bank Sampah meningkat dari 7.000 unit pada tahun 2018 menjadi 25.000 unit pada tahun 2022.
- Sampah yang dikelola meningkat sebesar 43.000 ton dari84.000 ton pada tahun 2018 menjadi 127.000 ton pada tahun 2022.
- Pembangunan 3 TPST di Denpasar yaitu TPST (Kesiman Kertalangu, Tahura, Padang) dengan kapasitas hingga 1.020 ton/hari.
- Pembangunan sarana dan prasarana penanganan sampah di 16 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
- Pembangunan 331 TPS3R dari tahun 2018-2022
- Pembangunan 3 TPST dengan teknologi RDF di Kabupaten Cilacap dan Bantar Gebang
- Pembangunan 1 infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Surabaya
- 5 pelabuhan perikanan telah menerapkan sertifikasi manajemen lingkunganinternasional ISO 14001 yang menandakan semakin baiknya pengelolaansampah di pelabuhan
- Pembangunan RDF di Bantar Gebang, Bekasi yang mampu menampungsampah hingga 2500 ton/hari.

Regulasi

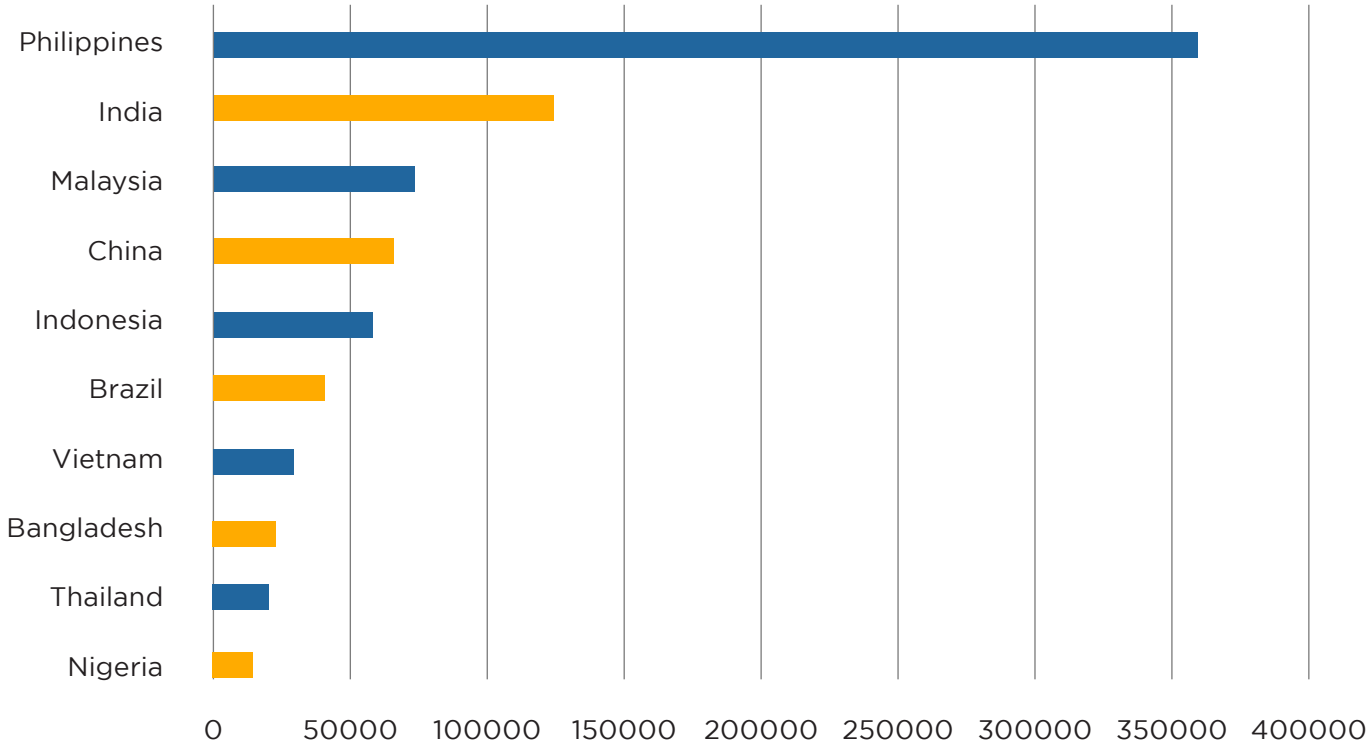
- Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/ 2019 tentang Peta Jalan PenguranganSampah oleh Produsen (63 produsen telah berkomitmen untuk mengurangisampah dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan).
- Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
- Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentangTata Cara Penghitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, di mana pengelolaan sampahmenjadi salah 1 program prioritas
- Larangan plastik sekali pakai diterapkan di 101 kabupaten/kota dan 2 provinsi

Peningkatan Kesadaran

- Membuat bahan yang diperlukan dan menerapkannya di lebih dari 100 sekolahpercontohan di seluruh Indonesia akan mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah.
- 1751 kepala sekolah dilatih Kemdikbud mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang di dalamnya terdapat materi mengenai pengelolaan sampah melalui Bimtek UKS dan SNP.
- Gram Bulan Cinta Laut (Bulan Cinta Laut/BCL) yang melibatkan 477 nelayan di 14 Lokasi dengan total sampah terkumpul sebanyak 88,5 ton
- Aksi bersih sungai dan laut sejak tahun 2018 terkumpul sebanyak lebih dari 43.200 ton sampah dengan melibatkan 22.694.328 relawan
- Sosialisasi tata cara pengelolaan sampah bagi penumpang oleh awak kapal saat kapalakan berlayar di 15.701 kapal penumpang
- Pelaksanaan Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) 2021 tingkat Asia Tenggara di Mandalika & Pulau Samal (Filipina), yang diikuti oleh lebih dari 350 start-up
- Pelaksanaan Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI), dengan sampahterkumpul sebanyak 130,75 ton, di 120 masjid, 50 gereja, 2 pura, 2 universitas, 190 sekolah, dan pondok pesantren

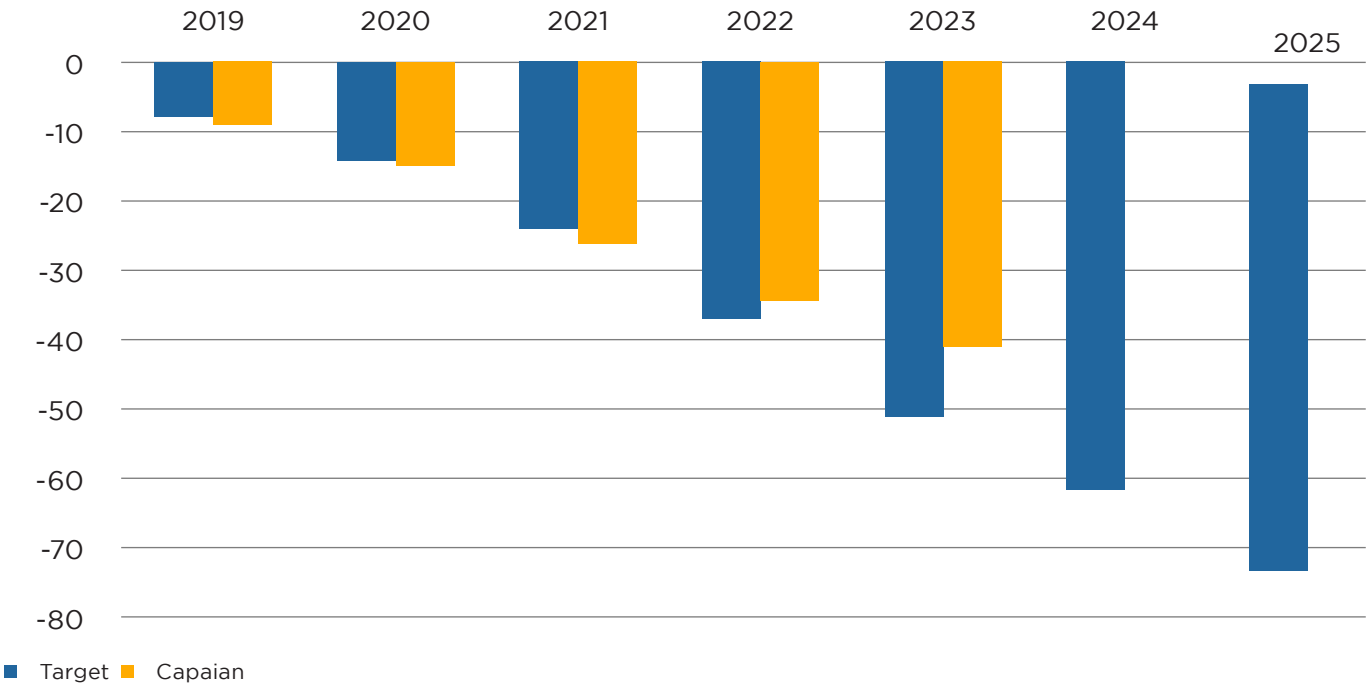
POSISI INDONESIA DALAM PENELITIAN GLOBAL SAMPAH PLASTIK LAUT

Top 10 Countries in the world that release the most plastic into oceans (tons), 2021



MEIJER, ET AL. 2021; THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI ON WORLD POPULATION REVIEW DATA, 2022.

Target dan Capaian Pengurangan Sampah Plastik di Laut



CATATAN: HASIL DAPAT BERUBAH JIKA DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI DENGAN MENYESUAIKAN JUMLAH DATA YANG SUDAH TERSEDIA

GERAKAN SEDEKAH SAMPAH INDONESIA (GRADASI)



24 Provinsi 62 Kabupaten/Kota

Provinsi Aceh
Kabupaten Aceh Tengah

Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan
Kabupaten Tapanuli Selatan

Provinsi Sumatera Barat
Kota Padang

Provinsi Sumatera Selatan
Kota Palembang

Provinsi Lampung
Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Pringsewu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten Bangka

Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten Karimun

Provinsi Banten
Kota Serang
Kota Cilegon
Kabupaten Tangerang Selatan
Kabupaten Lebak

Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Pinrang

Provinsi Maluku Utara
Kota Ternate

Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Kota Jakarta Pusat
Kota Jakarta Utara
Kota Jakarta Selatan
Kota Jakarta Barat
Kota Jakarta Timur

Provinsi Jawa Barat
Kota dan Kabupaten Bekasi
Kota dan Kabupaten Bogor
Kota Depok
Kabupaten Sukabumi
Kota Bandung
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis

Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Pati
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Tegal
Kabupaten Kendal
Kabupaten Cilacap

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo

Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
Kabupaten Tabalong
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Jepara
Kabupaten Jombang
Kota dan Kabupaten Malang
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Tuban
Kabupaten Sampang
Kota Surabaya

Provinsi Bali
Kota Denpasar

Provinsi Maluku
Kota Maluku Tengah

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Kalimantan Barat
Kota Singkawang

Provinsi Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Timur
Kota Bontang
Kabupaten Paser

Provinsi Sulawesi Barat
Kabupaten Polewali Mandar

Citarum
Kembali Harum

Melalui kerja kerja dan kolaborasi yang solid, program Citarum Harum telah menuai berbagai capaian yang membanggakan. Di antaranya adalah penurunan signifikan tingkat pencemaran air yang dulu statusnya cemar berat menjadi cemar ringan, peningkatan upaya penghijauan di hulu sungai, pengoptimalan pengelolaan sampah di sepanjang DAS Citarum, Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai.

Dalam waktu yang relatif cepat banyak capaian yang didapat yang antara lain peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dari skor 33,43 (status cemar berat pada Tahun 2018) menjadi skor 50,78 (status cemar ringan pada Tahun 2023), pengurangan luasan lahan kritis dan luas genangan di Cekungan Bandung, penertiban bangunan liar di sempadan sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

INDEKS KUALITAS AIR DAS CITARUM



Legenda

- Cemar Berat
- Cemar Ringan
- Mutu Air Kelas II

*Mutu Air Kelas II

Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan yang mempersyaratkan mutu air yang sama.



ACADEMIC

KNOWLEDGE POWER

Universitas dan lembaga penelitian sebagai penelitian pusat dan Gagasan Proyek Mendasar untuk Mendukung Citarum.

COMMUNITY

SOCIAL POWER

Menjaring komunitas dan perkumpulan komunitas kreatif untuk bersosialisasi Program Penanganan Citartum dan Mitigasi Bencana kepada masyarakat luas

GOVERMENT

POLITICAL POWER

- Perumusan kebijakan melalui keputusan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
- Penegakan Hukum Lingkungan
- Penghargaan dan hukuman

ACADEMIC

COMMUNIVATION POWER

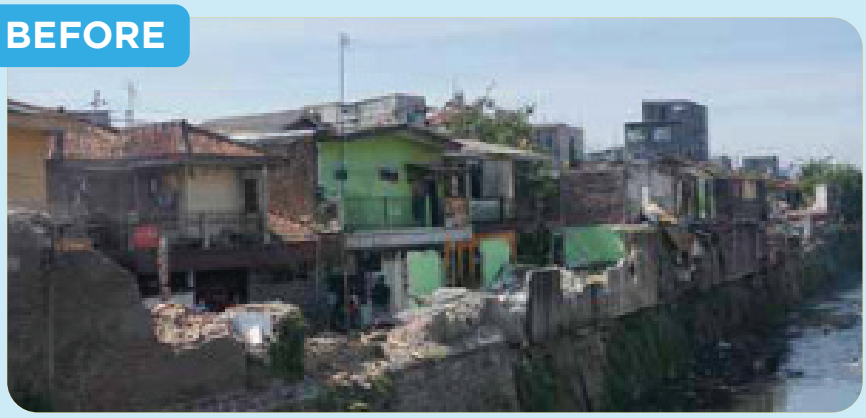
- Keunggulan Milenial (Media Sosial)
- Platform AI sebagai media edukasi (cetak, audio, visual, online)

BUSINESS

ENABLER

Menyediakan segala sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan, menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

BEFORE

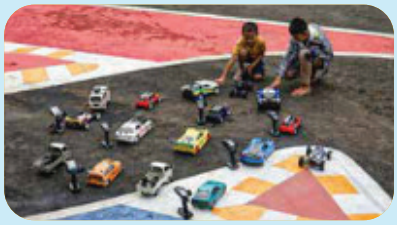






AFTER









Penataan sempadan sungai dan pembangunan ruang publik





Keberlanjutan Citarum Harum

Inilah waktunya bergerak dari diri sendiri! Berhenti membuang sampah ke sungai. Hindari penggunaan plastik sekali pakai dan mulai beralih ke tas jinjing atau kemasan yang bisa digunakan kembali. Sadarkah kita bahwa sampah terutama plastik yang kita buang, bisa saja hanyut ke sungai? Atau bahkan berakhir di lautan?

Hanya dengan bersama8sama, kita akan bisa memulihkan DAS Citarum telah menghidupi lebih dari 25 juta jiwa penduduk. Kita pun bisa menjadi bagian perubahan, dimulai dari sikap dan perilaku kita untuk peduli dan bertanggung jawab.

Sebagai sebuah bukti capaian keberhasilan program Citarum Harum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertepatan dengan agenda World Water Forum ke810 meluncurkan buku LCitarum Harum: Merawat Sungai, Menyelamatkan KehidupanL pada 20 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, khususnya dalam pemulihan Sungai Citarum yang selama ini menjadi salah satu sungai terpenting di Indonesia.









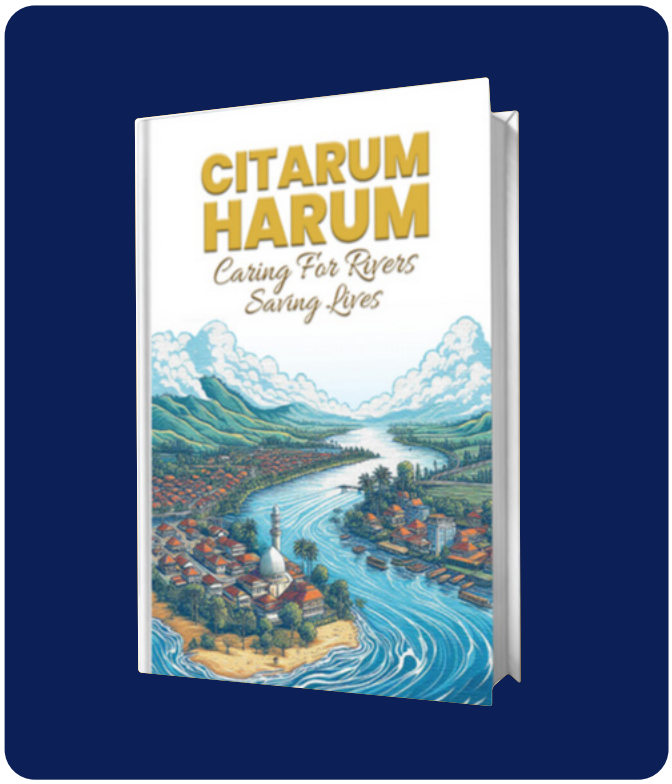
Menko Luhut Bersama Deputi Bidang Koordiansi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti kunjungan ke Sektor 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Desa Saguling, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut, Kasad juga meninjau inovasi Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat (Bengpuspal Puspalad), berupa ponton pembersih sampah sungai dan danau, Sabtu (10/8/2024).

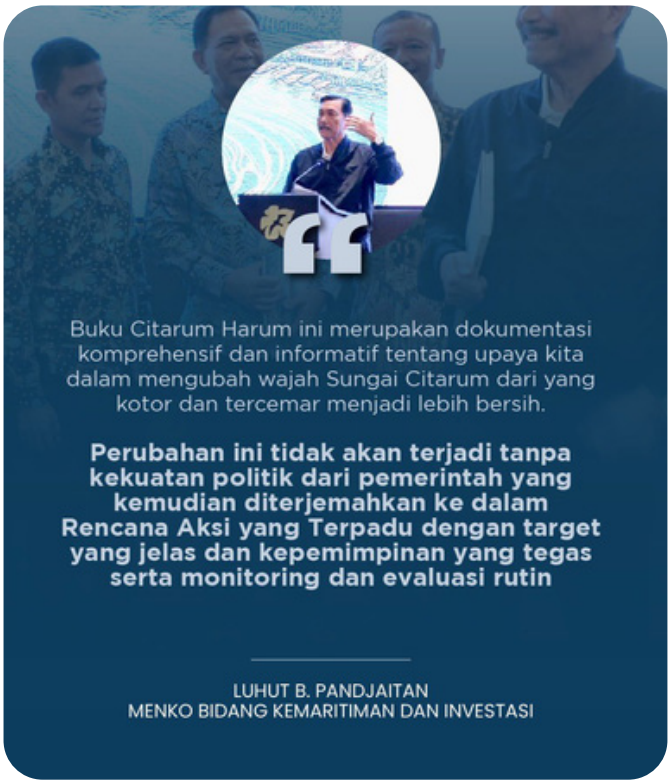
Buku ini merupakan dokumentasi penting sebagai bagian dari showcase yang menggambarkan capaian program Citarum Harum dan menjadi upaya berkelanjutan untuk merehabilitasi dan melestarikan Sungai Citarum.

Buku Citarum Harum ini merupakan dokumentasi komprehensif dan informatif tentang upaya Pemerintah Indonesia beserta stakeholders terkait dalam memulihkan kualitas air Sungai Citarum dari cemar berat menjadi cemar ringan.

Perubahan ini tidak akan terjadi tanpa kekuatan politik dari pemerintah yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi yang terpadu dengan target yang jelas dan kepemimpinan yang tegas melalui monitoring dan evaluasi rutin.

Keberlanjutan dalam menjaga DAS Citarum memerlukan komando dan master plan yang dapat diterapkan juga pada DAS lainnya, baik di Indonesia dan luar negeri. Dengan peluncuran buku ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian yang telah diraih tetapi juga memperkuat komitmen kita untuk terus melangkah maju.







Prakarsa **Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman**

Prakarsa Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman atau *Green Infrastructure Initiative* (GII) merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jerman yang dimulai pada tahun 2019 dan dimaksudkan untuk mempersiapkan, membiayai, dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan ("hijau"). Proyek-proyek GII dirancang agar dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan/atau adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan mempertimbangkan aspek gender. Selain itu, GII diharapkan dapat berkontribusi secara langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari Agenda 2030 sebagai bagian dari implementasinya, khususnya SDG 9 (Infrastruktur tangguh dan industrialisasi berkelanjutan), SDG 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan produksi berkelanjutan), dan SDG 13 (Aksi iklim).

GII berfokus pada tiga sektor, yaitu: Ekonomi Sirkular (Pengelolaan Limbah Padat), Pengelolaan Air dan Air Limbah, dan Transportasi Umum Perkotaan. GII mencakup enam provinsi mitra di Indonesia: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur/NTT.

Di bawah naungan GII, terdapat program kerja sama teknis *Green Infrastructure Development* (GID) yang diimplementasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari pihak Pemerintah Indonesia serta GIZ yang mewakili Pemerintah Jerman. Kerja sama teknis ini dibiayai melalui hibah dari Kementerian Federal Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ). GID dirancang melalui koordinasi erat dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW). GID bertujuan untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim, dan mempersiapkannya sejelas mungkin agar proyek-proyek tersebut dapat direncanakan dan diimplementasikan secara rinci dengan dana bantuan keuangan (*Financial Cooperation*/FC) dari KfW atau sumber pendanaan lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan kapasitas organisasi mitra negara di tingkat nasional dan sub-nasional (provinsi, kabupaten, dan kota terpilih) sehubungan dengan proses identifikasi, persiapan, dan prioritas proyek infrastruktur untuk Prakarsa Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman. Proses persiapan mencakup penyusunan rencana konseptual, studi pra-kelayakan, serta studi kelayakan, dan melengkapi dokumen kriteria kesiapan untuk proyek – proyek yang akan didorong pembangunannya.



Untuk membantu mempercepat proses pengambilan keputusan strategis proyek-proyek GII, Komite Pengarah (*Steering Committee*) tingkat tinggi dibentuk, yang terdiri dari Menteri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BMZ, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, serta Duta Besar Jerman dan Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan Komite Pengarah GII. Berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan, terdapat 18 proyek yang telah disetujui untuk dilakukan studi pra-kelayakannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 94 tahun 2023, untuk mendukung proses persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut, Satuan Tugas Nasional (*National Task Force*) dibentuk untuk memberi rekomendasi teknis terkait kelayakan dan kesiapan usulan, serta menjadi platform koordinasi antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (*Provincial Task Forces*), dan perwakilan Pemerintah Jerman. Semenjak terbentuk pada 5 Juli 2023, Satuan Tugas National telah terbukti efektif dalam menyusun masukan teknis, menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan, dan mendorong disepakatinya keputusan strategis di tingkat tinggi.

Sejauh ini telah terdapat 18 proyek dalam daftar usulan, di mana 5 di antaranya telah diajukan untuk masuk ke dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (*Blue Book*). Proyek-proyek tersebut adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Citarum (Bojongsoang, Kota Bandung dan Kota Cimahi), Peningkatan Penyediaan Air Minum Bengawan Solo Ayu (Surakarta, Klaten dan Wonogiri), Kediri *Regional Sanitary Landfill*, BRT Surabaya Raya dan BRT Semarang Raya. Sedangkan beberapa proyek lainnya ditangguhkan karena belum termasuk prioritas Pemerintah dan kurangnya kelengkapan *Readiness Criteria* (RC),

Saat ini persiapan kajian kelayakan proyek GII masih berlangsung dan akan selesai seluruhnya di Februari 2025. Di antaranya adalah Pra-Studi Kelayakan Proyek Rebana *Regional Sanitary Landfill* di Provinsi Jawa Barat dan Peningkatan Penyediaan Air Minum / Pengelolaan Sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).



Gambar 1. Kunjungan Lapangan ke Calon Lokasi IPAL dan co-treatment IPLT Cimahi



Gambar 2. Kunjungan Lapangan ke Sumber Mata Air Klaten



Gambar 3. Kunjungan Lapangan ke SPALD-S Kota Kupang



Gambar 4. Kegiatan Road to the 10th World Water Forum di Sektor 6 Sungai Citarum, 30 April 2024



Gambar 5. Pertemuan National Task Force Kedua,9 November 2023



Gambar 6. Indonesian Pavilion pada the 10th World Water Forum, Bali, 22 Mei 2024



Pengelolaan Limbah Padat

Pemerintah Indonesia terus berupaya dan berkomitmen mengembangkan strategi yang komprehensif – dari sisi kebijakan dan kapasitas kelembagaan – untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat lokal; peningkatan kapasitas pengelolaan limbah di perkotaan; mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan mempromosikan aksi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mengubah sampah menjadi energi.

Pada bulan Maret 2019, Pemerintah Indonesia merilis program nasional yang ambisius untuk pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% dan sampah padat sebesar 30%. Inisiatif ini adalah bagian dari Global Plastic Action Partnership, yang menggunakan model analitis inovatif untuk pengambilan keputusan berbasis data, untuk memperkirakan investasi yang dibutuhkan, tahapan waktu, jejak lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak proyek terhadap kehidupan masyarakat.



Pengelolaan air dan air limbah

Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia terus mengalami urbanisasi. Saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan; jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga hampir tiga perempatnya pada tahun 2045, tepat pada peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia.

Analisis Bank Dunia menunjukkan, hanya 2 persen rumah tangga di pusat kota Jakarta, yang berpenduduk 10 juta jiwa, terhubung ke sistem pembuangan limbah umum. Sebagian besar rumah tangga di perkotaan memiliki tangki septik (septic tank) – tetapi bocor, meresap ke tanah, sehingga hampir tidak perlu disedot. Sementara kotoran rumah tangga yang disedot tidak selalu disalurkan ke fasilitas pengolahan limbah. Sehingga data Bank Dunia mencatat, sebanyak 95 persen air limbah Indonesia mengalir ke ladang pertanian, sungai, dan saluran terbuka.

Dampak kesehatan dari hal ini sangat besar. Kualitas air tanah yang semakin buruk berkontribusi langsung terhadap kematian bayi (212 per 1000 kelahiran dibandingkan dengan 59 per 1000 kelahiran di negara berpenghasilan menengah lainnya di Asia Tenggara). Penderita tifus di Indonesia juga sangat tinggi dibanding negara di wilayah dan tingkat pendapatan yang setara. Stunting juga masih menjadi masalah kesehatan yang parah di Indonesia.



Angkutan Umum Perkotaan

Sektor transportasi menyumbang sekitar 30% dari total emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia – secara komparatif lebih besar dari rata-rata global yang sekitar 23%.

Presiden Joko Widodo terus berupaya meningkatkan konektivitas dan transportasi umum, Dua sektor ini menjadi prioritas sosial dan lingkungan yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi lebih banyak orang di lebih banyak tempat, mengurangi kemacetan dan polusi udara serta mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi – tanpa berkontribusi terhadap total emisi GHS.

Kemacetan dan polusi udara berdampak terhadap ekonomi, kesehatan dan perubahan iklim. Kota-kota besar di Indonesia menjadi target bagi pengentasan masalah-masalah ini. Sekitar 50% dari Proyek Strategis Nasional Pemerintah Indonesia didedikasikan untuk infrastruktur transportasi, namun masih kurang dari seperempatnya yang masuk dalam kategori infrastruktur hijau.

Potensi Investor GII. a.i

- Pengumpulan sampah dan pemilahan bahan yang bisa didaur ulang termasuk pengurangan, pemisahan sampah di sumbernya atau di pusat pengelolaan.
- Perlindungan banjir dan rehabilitasi tempat pembuangan akhir yang ada.
- Pembangunan tempat pembuangan akhir yang bersih dan terkontrol.
- Peningkatan kualitas pasokan air untuk masyarakat secara merata dan bisa diandalkan.
- Analisis sumber air baku untuk jaringan pasokan baru atau yang sedang berkembang – baik pasokan lokal atau pasokan regional.
- Mengurangi kebocoran air dan pendapatan. Digitalisasi sistem pengumpulan limbah dan penagihan.
- Perbaikan dalam prosedur diagnostik dan pengoperasian dan manajemen digital.
- Meningkatkan keamanan air di perkotaan Pengenalan atau peningkatan semua moda angkutan umum dari bus reguler, busway, BRT, mini bus (angkot) dan taksi ke sistem kereta api seperti MRT, LRT/trem; termasuk pembangunan infrastruktur terkait (bawah/jalan layang, jalur bus, simpang susun, dll).
- Elektrifikasi angkutan umum (baterai listrik, bus troli) dengan integrasi solusi energi terbarukan.
- dll

Pemanfaatan Limbah **Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)**

01. Dasar hukum pelaksanaan pemanfaatan Faba

a. PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. PERMENLHK No. 19 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun
c. KEPMENLHK No. 998 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun Berupa Fly Ash dan Bottom Ash Dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Acuan SNI Pemanfaatan FABA

a. SNI 9264 : 2024 tentang Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash sebagai bahan pelapis material potentially acid forming untuk mencegah pembentukan aie asam tambang pada kegiatan tambang terbuka.
b. SNI 9092 : 2022 tentang Spesifikasi Timbunan Pilihan dan Lapis Fondasi menggunakan Abu Batu Bara (Fly Ash dan Bottom Ash/ FABA)
c. Keputusan Menteri Pertanian No. 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
d. SNI 4433:2016 tentang Spesifikasi Beton Segar Siap Pakai
e. SNI 0096:2007 tentang Genteng Beton
f. SNI 15-2049-2004 tentang Semen Portland
g. SNI Nomor 03-0691-1996 tentang Bata Beton (Paving Block)
h. SNI 03-0349-1989 tentang Bata Beton untuk Pasangan Dinding



A. Fly ash B. Bottom ash



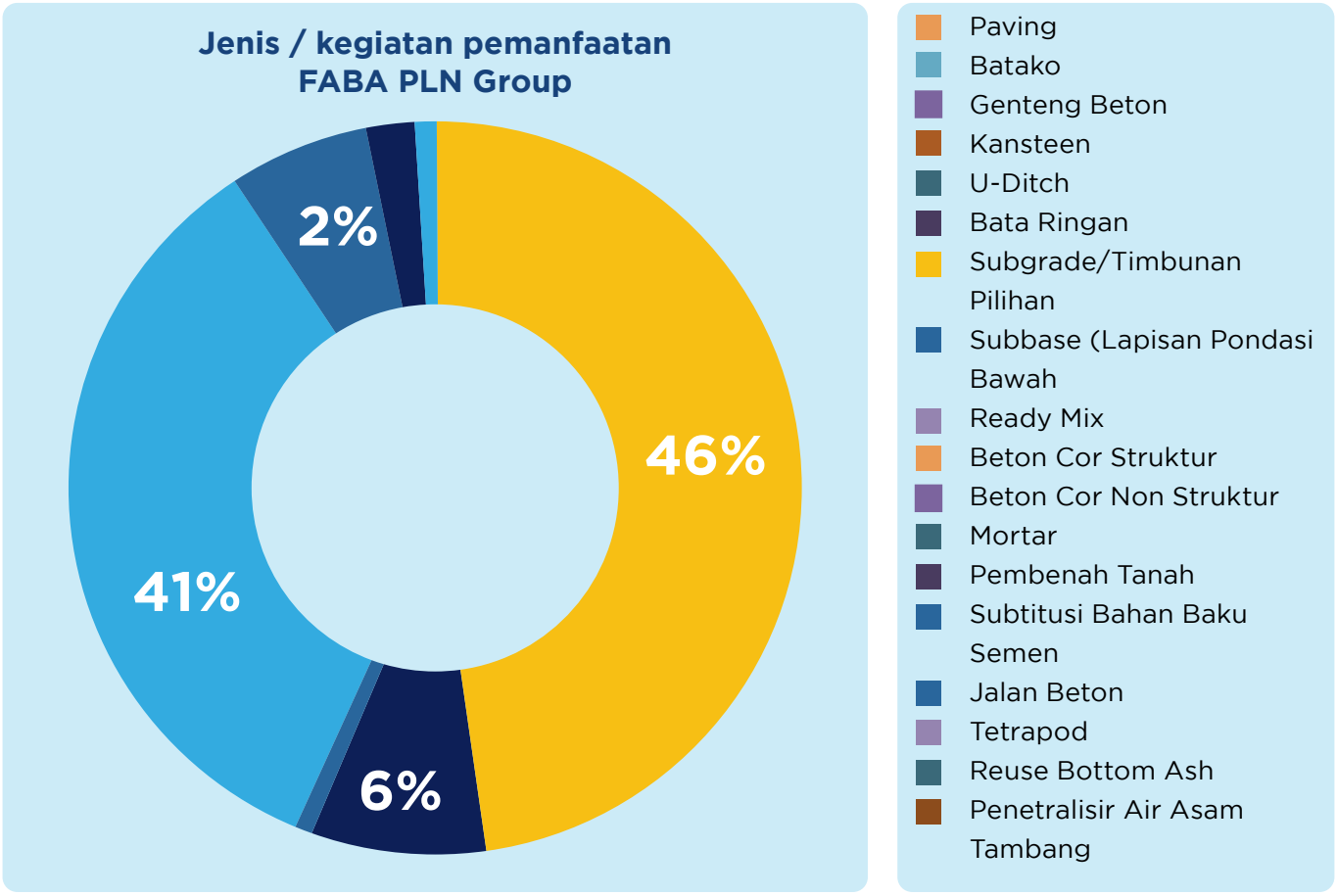


02. Data Produksi dan Pemanfaatan Faba masing masing PLTU (2020 - 2024)

No	Nama Pembangkit	2020		2021		2022		2023		Sem I 2024	
		Produksi	Pemanfaatan	Produksi	Pemanfaatan	Produksi	Pemanfaatan	Produksi	Pemanfaatan	Produksi	Pemanfaatan
1	PLTU Tanjung Jati B	338.768	202.519	417.905	111.779	420.848	139.049	395.189	237.113	205.229	99.486
2	PLTU Air Anyir	13.638	5	14.543	126	12.723	7.768	15.481	28.873	9.784	19.355
3	PLTU Suge	8.035	1	9.150	1.170	9.371	11.208	9.262	11.615	4.542	3.191
4	PLTU Sumbawa	1.342	0	860	122	4.849	3.619	7.797	7.736	3.942	4.326
5	PLTU Jeranjang	20.594	0	24.854	422	40.898	30.617	32.522	40.094	13.912	12.181
6	PLTU Ropa	7.021	0	4.760	6.648	4.956	6.447	4.862	4.974	1.977	1.977
7	PLTU Bolok	6.665	0	7.191	948	7.069	8.841	7.036	12.649	3.695	3.208
8	PLTU Tidore	6.057	0	6.269	0	5.690	4.226	20.853	13.709	6.305	4.297
9	PLTU Holtekamp	1.535	0	3.116	0	5.706	5.388	4.654	9.278	2.567	5.480
10	PLTU Malinau	0	0	0	0	0	0	1.827	756	586	297
11	PLTU Suralaya 1-7	680.282	395	637.586	18.116	547.656	153.036	516.481	481.355	249.138	196.355
12	PLTU Suralaya 8	73.045	0	69.952	1.875	89.566	58.299	74.787	98.074	46.697	33.001
13	PLTU Palabuhan Ratu	152.847	87.454	143.468	92.068	164.871	107.166	188.282	182.674	71.998	71.888
14	PLTU Lontar	146.754	127.040	168.001	94.725	152.819	106.684	173.788	181.964	98.152	103.703
15	PLTU Labuan	95.228	49.531	86.693	45.991	111.494	45.680	104.809	65.196	75.614	49.744
16	PLTU Adipala	71.954	186	76.102	80.279	89.014	122.055	67.594	123.803	34.124	28.007
17	PLTU Ombilin	133.990	0	129.341	2.780	106.450	170.352	98.574	64.569	58.866	38.389
18	PLTU Teluk Sirih	23.932	2	44.239	5.522	45.937	13.736	53.913	69.830	23.557	20.743
19	PLTU Pangkalan Susu	52.433	0	63.060	13.114	19.242	16.885	56.362	55.579	36.576	32.334
20	PLTU Labuhan Angin	9.109	0	12.266	281	12.364	1.853	13.080	215.748	11.632	15.762
21	PLTU Tanjung B. Karimun	10.767	0	9.485	50	5.015	2.390	3.569	11.792	2.183	4.124
22	PLTU Sintang	8.583	0	9.286	650	12.925	7.670	9.443	12.569	4.796	8.192
23	PLTU Bengkayang	25.573	0	27.530	596	45.556	23.115	33.088	29.735	15.986	45.640
24	PLTU Berau	0	0	2.873	67	4.529	2.359	3.492	5.359	2.801	2.095
25	PLTU Asam - Asam	32.359	492	43.391	7.750	62.332	72.465	58.987	106.787	22.401	42.116
26	PLTU Sanggau	6.487	0	8.749	427	7.309	4.043	8.547	14.656	4.738	7.694
27	PLTU Barru	19.790	62	21.354	14.228	15.254	13.939	21.558	18.340	10.659	7.356
28	PLTU Paiton 1-2	126.767	36.999	148.921	63.665	123.447	317.436	119.105	237.978	64.885	49.072
29	PLTU Tanjung Awar - Awar	96.772	86.592	114.995	19	120.632	104.507	109.026	162.584	91.208	91.296
30	PLTU Paiton 9	105.772	24.398	97.197	17.320	84.802	77.365	60.589	86.117	22.221	16.144
31	PLTU Pacitan	100.193	0	70.775	23.014	115.514	153.227	112.368	179.434	46.368	93.169
32	PLTU Indramayu	151.252	142.459	180.278	138.198	169.053	133.757	184.419	151.840	74.396	68.553
33	PLTU Rembang	82.775	68.752	80.452	55.001	78.308	56.530	87.930	67.292	49.412	28.223
34	PLTU Bukit Asam	20.350	0	40.201	0	46.861	42.895	82.353	188.924	26.758	67.354
35	PLTU Tarahan	34.903	0	53.478	87	52.496	16.875	26.598	24.720	20.036	14.236
36	PLTU Sebalang	38.578	104	47.291	27.533	44.700	32.513	41.826	106.362	11.331	10.445
37	PLTU Nagan Raya	52.542	0	30.900	0	33.594	16.617	37.991	113.034	19.540	65.712
38	PLTU Tenayan	32.674	0	27.138	0	39.038	27.064	37.359	67.371	15.577	18.544
39	PLTU Tembilahan	5.093	0	5.633	0	5.832	3.106	5.184	4.972	2.771	2.813
40	PLTU Ketapang	9.577	0	9.841	1.885	15.762	8.248	8.025	25.319	3.783	6.189
41	PLTU Kaltim Teluk	40.649	0	31.776	37.323	45.572	18.100	39.560	27.471	17.523	11.783
42	PLTU Pulang Pisau	13.652	76	13.629	9.013	16.455	23.654	18.184	43.908	11.182	16.875
43	PLTU Nii Tanasa	10.658	298	5.553	674	7.744	10.981	7.079	9.454	4.014	2.675
44	PLTU Amurang	29.522	0	23.097	534	20.606	25.905	25.593	62.279	12.663	8.379
45	PLTU Punagaya	13.754	16	20.178	4.393	28.517	27.675	49.061	31.429	21.911	18.152
46	PLTU Anggrek	5.444	0	20.332	540	7.721	4.081	10.417	17.225	6.738	6.720
47	PLTU Ampana	0	0	776	0	1.076	1.564	4.237	8.365	1.669	2.246
	Jumlah	**2.917.716**	**827.381**	**3.064.469**	**878.933**	**3.062.173**	**2.240.990**	**3.052.741**	**3.720.905**	**1.546.443**	**1.459.519**

03. Jenis jenis / kegiatan pemanfaatan FABA

1. Paving
2. Batako
3. Genteng Beton
4. Kansteen
5. U-Ditch
6. Bata Ringan
7. Subgrade/ Timbunan Pilihan
8. Subbase (Lapisan Pondasi Bawah
9. Ready Mix
10. Beton Cor Struktur
11. Beton Cor Non Struktur
12. Mortar
13. Pembenah Tanah
14. Subtitusi Bahan Baku Semen
15. Jalan Beton
16. Tetrapod
17. Reuse Bottom Ash
18. Penetralisir Air Asam Tambang



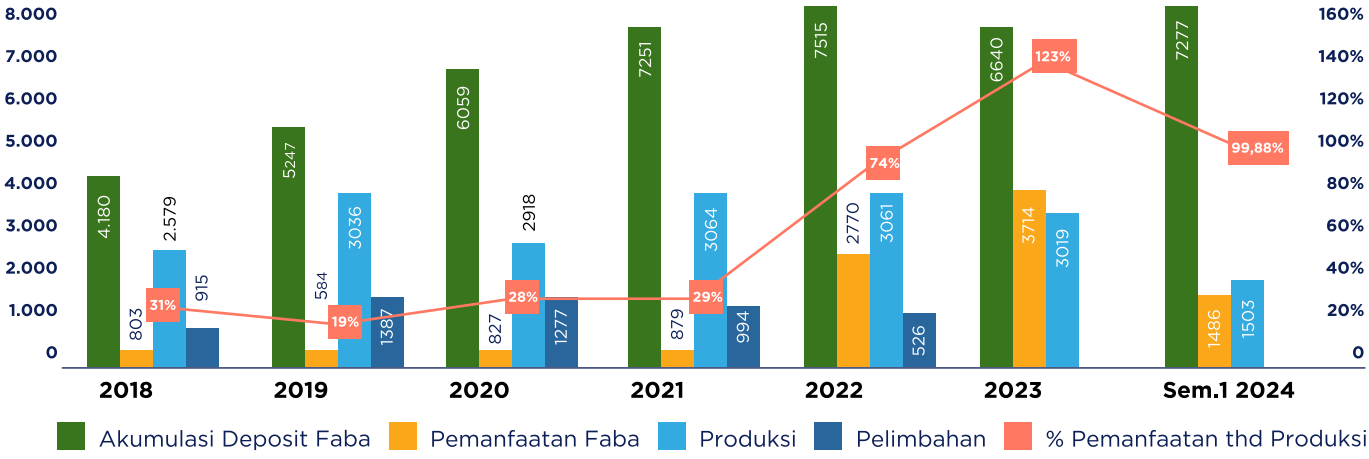
Berdasarkan pie chart diatas, dapat dilihat bahwa jenis pemanfaatan terbesar adalah untuk **Subgrade** atau **timbunan pilihan** sebesar 46%, kemudian subtitusi **bahan baku semen** sebesar 41%, disusul **subbase** atau **lapisan pondasi bawah** sebesar 6%, **pencegah air asam tambang** sebesar 1,96%, dan **paving** sebesar 1,5%.

04. Stakeholder / pemda /masyarakat, penerima manfaat FABA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non bahan Berbahaya dan Beracun, yang termasuk ke dalam pemanfaat langsung Limbah non-B3 (FABA) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelompok orang dan Badan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha.

Mengadopsi dari peraturan tersebut, sampai dengan saat ini PLTU di PLN Group telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 200 pemanfaat FABA diantaranya adalah Badan Usaha yang memiliki perizinan berusaha (Industri), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah daerah, TNI/Polri dan Masyarakat di sekitar PLTU.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sem.1 2024
Akumulasi Deposit Faba	4180	5245	6059	7251	7515	6640	7277
Penambahan Deposit Faba				1192	265	875	638
Pemanfaatan Faba	803	584	827	879	2270	3714	1486
% Pemanfaatan thd Produksi	31%	19%	28%	29%	74%	123%	98.88%
Produksi	2578	3036	2918	3064	3061	3019	1503
Pelimbahan	915	1387	1277	994	526	-	-



Pada pie chart di atas pemanfaat terbanyak adalah dari sektor industri, tercatat sebanyak 82 perusahaan industri **mengambil FABA dari PLTU milik PLN Group**. Berdasarkan data, sebagian besar perusahaan industri tersebut bergerak dibidang konstruksi sehingga FABA yang diambil akan dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan semen dan (beton ready mix), sebagian kecilnya dimanfaatkan oleh PT Guguk Tinggi Coal yang bekerja sama dengan PLTU Ombilin untuk melakukan pemanfaatan FABA sebagai penetralisir air asam tambang. Pemanfaatan kedua terbesar adalah dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dari 59 UMKM yang bekerja sama dengan masing masing PLTU PLN Group, sebanyak 36 UMKM memanfaatkan FABA dari PLTU Bolok untuk pembuatan Batako. Selain ke masyarakat dan Pemerintah Daerah, Instansi TNI / Polri juga melakukan pemanfaatan FABA. Pemanfaatan terbesar dilakukan oleh Rindam 2 Sriwijaya yaitu sebanyak 67.354 ton untuk stabilisasi lahan dengan mengambil FABA dari PLTU Bukit Asam.

05. Kendala pemanfaatan Faba

Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PT PLN Group memiliki beberapa kendala diantaranya adalah :

1. **Lokasi PLTU jauh dari pemanfaatan**

   Lokasi pltu yang jauh dari pemanfaat maupun medan yang susah menyebabkan tingginya biaya transportasi FABA ke lokasi pemanfaat sehingga menjadi kurang ekonomis

2. **Persepsi negatif Masyarakat tentang FABA.**

   Sebagian kecil masyarakat ada yang menganggap FABA sebagai material yang berbahaya bagi kesehatan, untuk mengatasi hal ini PLN Group berusaha menyosialisasikan Pemanfaatan FABA kepada masyarakat dan memberikan contoh implementasi pemanfaatan FABA yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga Pemahaman FABA sebagai material yang berbahaya tidak lagi bererdar di kalangan masyarakat

3. **Terbatasnya Standar pemanfaatan FABA**

   Berdasarkan PP 19/ 2021 pemanfaatan FABA sebagai produk harus memenuhi syarat dan produk sesuai dengan Standar Produk antara lain SNI; standar yang ditetapkan pemerintah atau standar International. Untuk ragam pemanfaatan yang belum memiliki Standar Produk membutuhkan Kajian dan perlu mengajukan permohonan persetujuan standar produk kepada menteri. PLN Group terus melakukan kajian dan penelitian bersama dengan Kementerian terkait seperti misalkan Pemanfaatan FABA Sebagai Air Asam Tambang dan Pemanfatan FABA sebagai Pembenah tanah.

06. Nilai Tambah Pemanfaatan FABA

Dalam memaksimalkan pemanfaatan FABA, PT PLN (Persero) juga mengusung konsep ekonomi sirkular dimana pemanfaatan yang dilakukan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Prinsip ekonomi sirkular menekankan pada pengurangan limbah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali material untuk menciptakan rantai produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Implementasi Pemanfaatan FABA yang dimaksud adalah seperti pembuatan Paving Block, Bata Merah dan/atau Batako yang bekerja sama dengan Masyarakat atau UMKM disekitar unit pembangkit. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PLN, berbagai masyarakat di desa sekitar PLTU dan UMKM turut membantu pemanfaatan FABA. Tercatat sebanyak 59 UMKM dan 47 Desa di Sekitar Pembangkit PLN Group sudah memiliki MoU Pemanfaatan FABA dengan masing masing Unit Pembangkit, yang sebagian besar untuk Pembuatan Paving dan Stabilisasi lahan di desa tersebut.

07. Rencana Pemanfaatan FABA di Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berkoordinasi dengan kementerian dan Lembaga lainnya terus mendorong sosialisasi pemanfaatan faba di sektor infrastruktur. Kementerian dan lembaga terkait yakni Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kantor Sraf Presiden dan PT.PLN /PLTU.

PT PLN (Persero) tengah berdiskusi secara intensif dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan pemanfaatan FABA sebagai Pembenah tanah. Adapun rencana implementasi Pemanfaatan tersebut akan dilakukan di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Saat ini pada beberapa lokasi PLTU ada potensi pemanfaatan FABA dari landfill yang akan digunakan untuk timbunan pilihan pada proyek infrastruktur, dan juga industri semen, sehingga potensi pemanfatannya akan cukup massive, serta ramah lingkungan. Untuk itu PLN melakukan kajian pemanfaatan FABA dari landfill sesuai rekomendasi KLHK, dan saat ini sedang tahap pengambilan sample FABA berdasarkan umur, untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan FABA yang sudah berada di Landfill, agar bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Program Rehabilitasi Mangrove Menjadi Aksi Konkrit Pengendalian Perubahan Iklim

Marves - Tangerang, Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Dunia, Hari Konservasi Alam, Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, serta Hari Maritim Nasional ke-59, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Pemprov Banten, Pemkab Tangerang, Kemenko PMK, BPDAS Citarum Ciliwung, PT PLN, PT Bukit Asam, PT Pelindo, PT Trimegah Bangun Persada, dan PT Nestle lakukan Aksi Penanaman Mangrove, pelepasliaran Belangkas dan aksi sosial yang mengikutsertakan siswa SD dan SMP pada Kamis (31/08/2033).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) Kemenko Marves, Nani Hendiarti memberi sambutan pembukaan pada acara Aksi Penanaman Mangrove bersama . Deputi Nani menjelaskan pentingnya aksi menanam mangrove ini terlaksanakan karena adanya keresahan atas 60% dari total keseluruhan penduduk Indonesia tinggal di pesisir dan rentan terkena bencana alam dan juga perubahan iklim. Maka dari itu, atas kegiatan penanaman mangrove ini diharapkan dapat terbentuknya benteng pesisir Indonesia yang sekaligus menjadi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Hal itu juga yang sangat di apresiasi bukan hanya dari nasional namun juga global karena program rehabilitasi mangrove 600.000 hektar merupakan yang terbesar di dunia. Untuk itu, perlu dilakukan bersama karena program rehabilitasi tidak hanya menanam namun juga memelihara, yang sudah bagus, tidak boleh dirusak karena kontribusinya besar sekali untuk dunia dan juga memiliki nilai ekonomi,” ujar Deputi Nani.

Deputi Nani hadir bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Marves, Ibu Devi Pandjaitan, beserta Ketua dan anggota DWP yang mendukung dan membantu menyukseskan program TJSL Mangrove.

“Dalam pelaksanaan program mangrove peran ibu-ibu sangat besar mulai dari penyiapan, pemeliharaan bibit, penanaman, dan menumbuhkan nilai ekonomi dari produk turunannya. Hal ini bisa menambah pendapatan keluarga. Bibit yang diberikan perlu dijaga, karena dengan memelihara pohon kita turut berkontribusi memelihara bumi kita,” jelas Deputi Nani dalam sambutannya.

Deputi Nani berpesan untuk terus mengembangkan program menanam mangrove dimana tidak berhenti pada penanaman namun merencanakan upaya strategis dan inovasi sehingga aksi penanaman juga dilakukan pada jenis pohon selain mangrove. “Apa yang sudah dilakukan jika dijaga dengan baik, inginnya target pertumbuhan yang sudah ditanam bisa diatas 70%, hal inilah yang perlu dijaga bersama, karena merupakan kontribusi kita untuk generasi mendatang. Literasi kepada masyarakat seperti yang dilakukan hari ini perlu terus dijaga dan dilakukan secara rutin bersama,“ tutup Deputi Nani.

Bibit mangrove sebanyak 15.000 batang yang merupakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) ditanam pada lahan seluas 3 (tiga) hektar di kawasan Ketapang Urban Aquaculture, Banten. Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan (Kadis LHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan, juga hadir dan mengutarakan harapannya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pesisir terutama *green economy.* “Kegiatan pada hari ini diharapkan berdampak terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir berbasis pelestarian lingkungan atau green economy dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Kadis Wawan Gunawan.

Perwakilan Kemenko PMK, KKP, BRGM, dan DWP Kemenko Marves yang juga ikut serta pada rangkaian kegiatan diperkenalkan dengan Produk UMKM masyarakat setempat guna meningkatkan nilai perekonomian masyarakat.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia G. L. Kalake, Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Marsetio, Direktur RPDM Ditjen PDSRH KLHK. serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Marsyal Rasyid.

No.SP-185/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2023
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Ibu Devi Menunjukkan Bibit Mangrove yang akan ditanam untuk Rehabilitasi Mangrove Desa Mauk.



Sesmenko Berikan Bibit Mangrove Sebagai Simbol Percepatan Rehabilitasi Mangrove Kepada Siswa Sekolah Dasar Desa Mauk.



Ibu Devi Pandjaitan bersama Sesmenko dan Para Jajaran Foto Bersama Pelepasan Bibit Kepiting Tapal Kuda atau Merostomata.



Ibu Devi Pandjaitan Beserta Sesmenko dan Jajaran Foto Bersama dengan Siswa Siswi SD Desa Mauk, Setelah Berikan Bibit Mangrove.

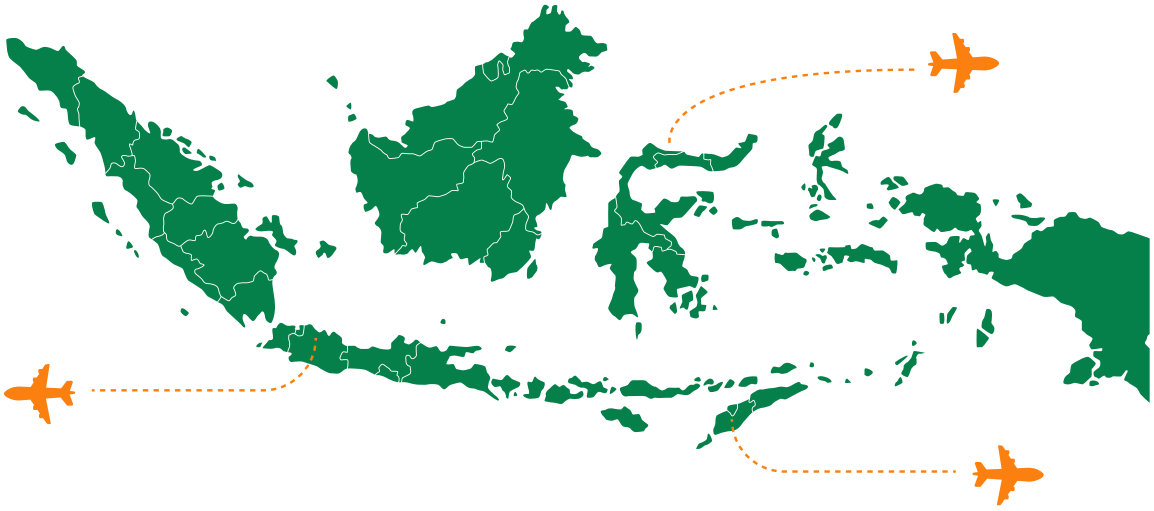


07

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pariwisata Tetap **Menjadi Primadona**

Pengembangan 5 DPSP





Danau Toba
(386,76 hektare)



Borobudur
(309 hektare)



KEK Mandalika
(1.175 hektare)



Labuanbajo
(400 hektare)



KEK Likupang
(197,4 hektare)

Bicara soal pariwisata Indonesia, Bali masih menjadi primadona. Padahal, Indonesia punya beragam destinasi wisata lain dengan keindahan alam dan budaya yang tidak kalah menarik dibanding Pulau Dewata. Berangkat dari situlah, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah mulai mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan sejumlah destinasi wisata lain di luar Bali. Lima diantaranya kini dinamai Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (5 DPSP), yang diyakini mampu mendongkrak industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang.

Lima DPSP yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini tersebar di lima provinsi di bagian barat, tengah, hingga timur Indonesia. Lima DPSP tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Likupang di Sulawesi Utara.

Tujuan pembangunan 5 DPSP adalah mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas.Fokus pembangunan meliputi pengembangan infrastruktur aksesibilitas, amenitas, hingga jaringan telekomunikasi. Termasuk pula pengembangan produk wisata, perbaikan ekosistem ekonomi kreatif, hingga persiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap lokasi.

Sampai dengan akhir September 2024, progres penyelesaian 101 isu pengembangan 5 DPSP adalah 95,3% dalam status ‘selesai’, ‘dalam pembahasan’, dan ‘sedang berjalan’. Selanjutnya seluruh isu ditargetkan selesai hingga akhir 2024.

Untuk mewujudkan lima DPSP sebagai destinasi pariwisata berkualitas, Pemerintah telah menerapkan indikator pariwisata berkualitas. Pariwisata berkualitas memberikan dampak baik khususnya pengalaman wisata yang lebih baik bagi wisatawan dan menjaga aspek lokal dan keberlanjutan lingkungan. Capaian Indeks Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism/QT) 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada 5 DPSP dengan Borobudur sebagai DPSP peringkat tertinggi.



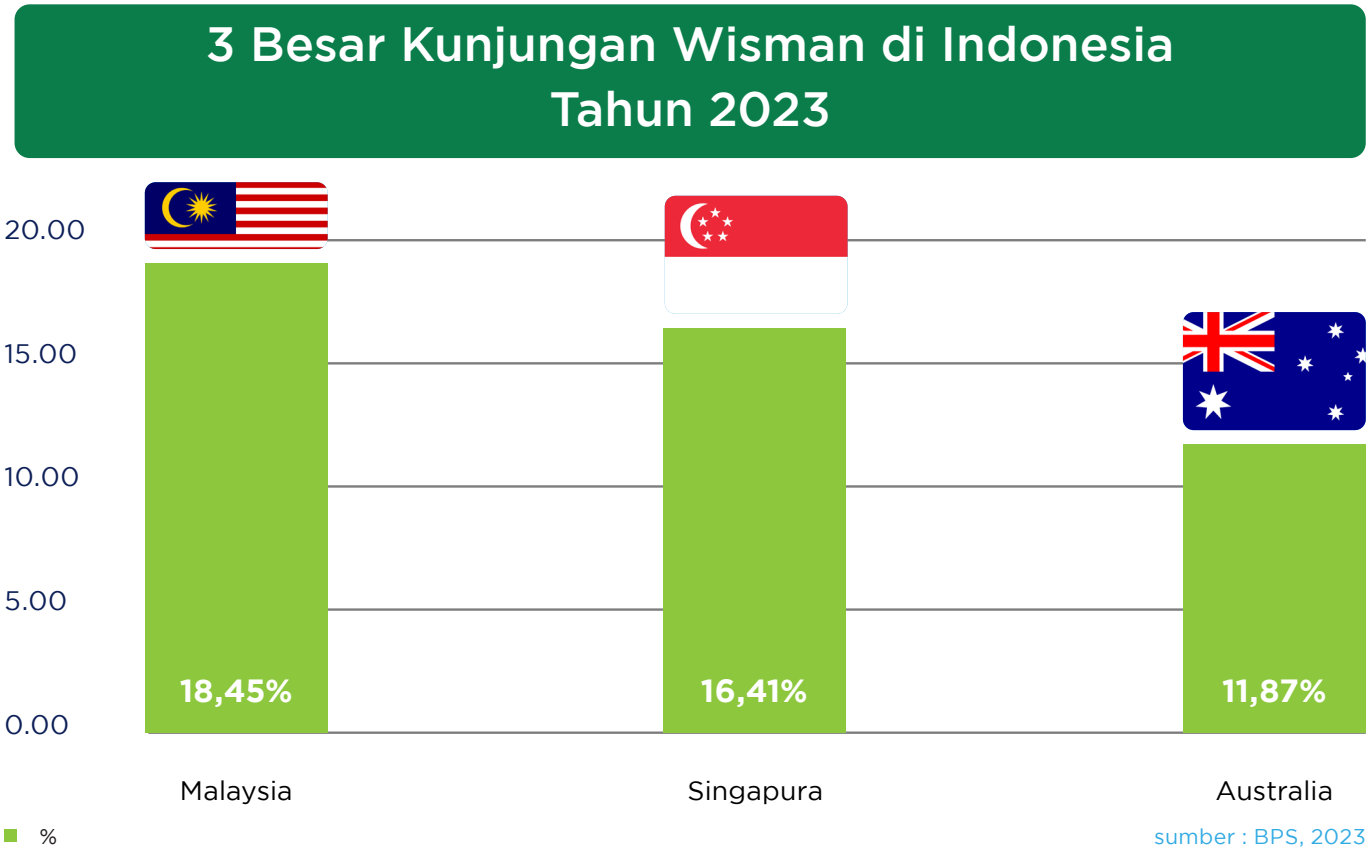
Kunjungan Wisman di Indonesia Tahun 2023 dalam Angka

Upaya-upaya terus dilakukan agar 5 DPSP mampu menarik minat lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Berbagai penyelenggaraan event kelas dunia di lima DPSP hingga tahun 2024 telah sukses dilaksanakan.

Penyelenggaraan event kelas dunia pada 2024 itu ke depan akan didukung melalui pendanaan Indonesia *Quality Tourism Fund.* Upaya ini dilakukan berkat kesuksesan ajang balap internasional MotoGP yang mampu memberikan nilai tambah kepada Indonesia sebesar Rp4,5 triliun pada 2022

Selain MotoGP, event yang sukses diselenggarakan di 5 DPSP antara lain: F1Powerboat dan Aquabike Jetski Championship di Danau Toba, Marathon Borobudur Run, Borobudur *International Festival,* World Super Bike (WSBK), Labuan Bajo Maritime Festival (LBMF), Likupang Tourism Festival, dll. Dari gelaran tersebut jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara hingga tahun 2023 mencapai 1,14 juta kunjungan.

- Pada Juli 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia mencapai 1,31 juta kunjungan, meningkat 16,91% dibanding Juli 2023. Total kunjungan Januari-Juli 2024 mencapai 7,75 juta kunjungan,naik 20,75% dibandingkan periode yang sama pada 2023.
- Kunjungan wisman selama Juli 2024 didominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia (13,56%), Australia (12,73%), dan Tiongkok (9,62%).
- Perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Juli 2024 sebesar 77,24 juta perjalanan dan secara kumulatif Januari-Juli 2024 jumlah kunjungan wisnus sebesar 598,72 juta perjalanan, meningkat 18,03% dibandingkan periode yang sama pada 2023.
- Selanjutnya jumlah perjalanan wisatawan nasional pada Juli 2024 mencapai 917,8 ribu perjalanan dan secara kumulatif hingga Juli 2024 mencapai 5,34 juta perjalanan, meningkat 22,15% dibandingkan 2023. Adapun tiga negara tujuan utama wisnas adalah Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 56,36%, meningkat 1,72% dibandingkan periode yang sama pada 2023. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini merupakan dampak dari persiapan Ibu Kota Nusantara.

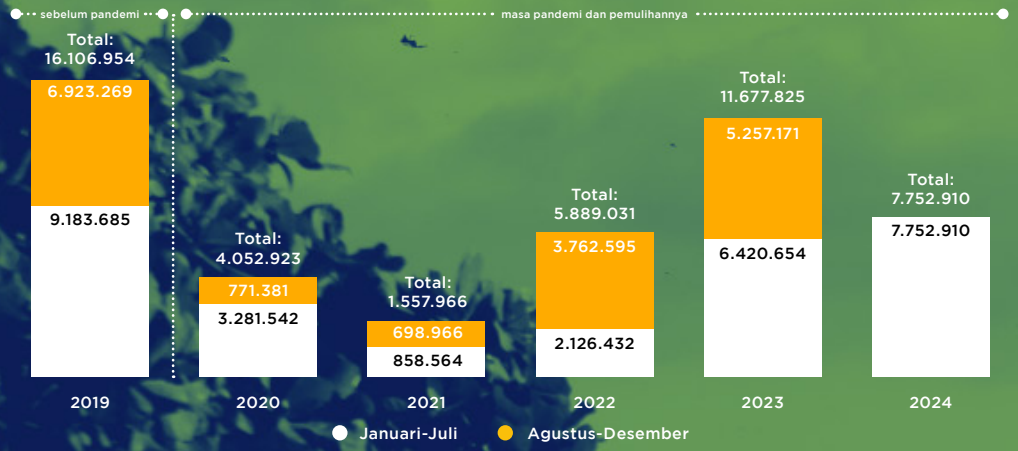


sumber : BPS, 2023

Perkembangan Pariwisata Juli 2024

Berita Resmi Statistik No. 65/09/Th. XXVI, 2 September 2024

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (ribu kunjungan)

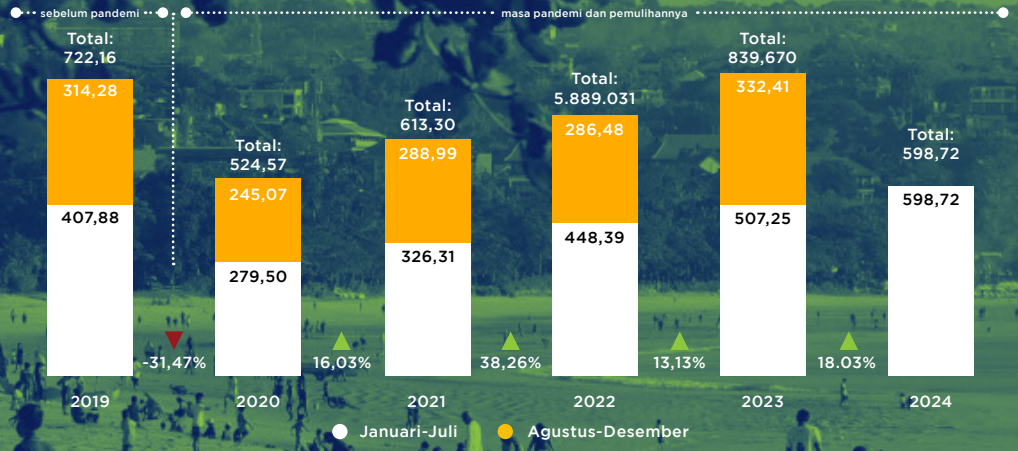


Hingga Juli 2024

Jumlah kunjungan wisman mencapai **7.752.910** kunjungan

Kunjungan Wisman hingga Juli 2024 secara kumulatif (c-to-c) meningkat sebesar **20,75 persen.**

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara (juta kunjungan)



Hingga Juli 2024

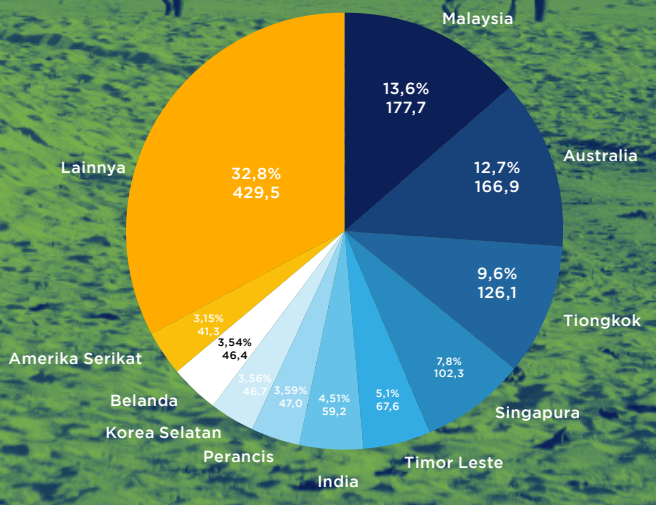
Jumlah perjalanan wisnus mencapai **598,72** juta perjalanan

Perjalanan Wisnus Periode Januari—Juli 2024 meningkat sebesar **18,03** persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023

Daerah Tujuan Utama Perjalanan Wisatawan Nusantara



Kunjungan Wisman Menurut Kebangsaan, Juli 2024 (Ribu Kunjungan)



Danau Toba - Sumatera Utara

Danau Toba dinobatkan sebagai Danau terbesar se-Asia Tenggara dan menjadi salah satu danau terdalam di dunia. Keindahan dan keunikan alam Danau Toba terjadi karena letusan **"Supervulcano"** dari gunung api purba Toba. Dua event olahraga balap air internasional pun telah sukses diselenggarakan di Danau Toba yaitu Formula 1 Powerboat dan Aquabike World Jetski Championship.

Kedua event lomba tersebut diselenggarakan oleh kesatuan olahraga balap air yang telah popular di dunia yakni Union Internationale Motonautique (UIM). Perbedaan kedua lomba tersebut dapat terlihat dari transportasi yang digunakan, Formula 1 Powerboat menggunakan perahu motor sedangkan aquabike jetski menggunakan jetski. Kedua event olahraga air ini juga dilaksanakan di lokasi yang berbeda. Pada Formula 1 Powerboat 2023 dan 2024 hanya dilaksanakan di satu Kabupaten yaitu Toba. Aquabike World Jetski 2023 dilaksanakan di empat kabupaten yaitu Karo, Dairi, Samosir, dan Toba.

Event olahraga tersebut telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak berganda. Contohnya, pada Formula 1 Powerboat 2023 telah memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 391 Miliar.











Borobudur – Magelang







Salah satu sudut atau sisi pemandangan Candi Borobudur yang berada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah, (10/01/2020). Candi ini dibangun dengan gaya Mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. (Sumber PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC))

Fokus pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur sepanjang 2020 hingga 2024 adalah mewujudkan kawasan Borobudur sebagai destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain: pengaturan jumlah dan akses pengunjung ke struktur candi, penataan parkir dan pedagang, penghijauan di zona 2 Kompleks Candi Borobudur, pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang, dan penyelarasan berbagai kebijakan terkait kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Upaya penyelarasan kebijakan dilakukan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur yang telah ditetapkan oleh Presiden pada 20 September 2024. Perpres tersebut merupakan kebijakan revolusioner yang ditetapkan sebagai respons terhadap berbagai konflik kepentingan dalam pengelolaan Borobudur sejak tahun 1992, di antaranya adalah gugatan terkait Pajak Daerah, temuan BPKP mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Selain itu, berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2023 bahwa empat dari 20 desa di Borobudur (Giripurno, Giritengah, Ngadiharjo, dan Wringinputih) masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Perpres mengamanatkan tentang beberapa hal, yaitu:

a. Pelaksanaan manajemen destinasi tunggal oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC);
b. Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur yang melibatkan masyarakat melalui Forum Komunikasi;
c. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur;
d. Pengembangan pariwisata berkualitas (*quality tourism*) untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata yang berkualitas; dan
e. Pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap undang-undang dengan pendampingan serta pengawasan dari BPKP.

Lebih lanjut, selain sebagai langkah inovatif dan transformatif dalam pengembangan destinasi prioritas, penetapan Perpres tersebut juga merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam melestarikan Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, sekaligus mewujudkan Borobudur sebagai destinasi wisata spiritual dan pusat toleransi antarumat beragama.

Mandalika - Lombok

Setelah sukses menggelar *World Superbike Championship (WSBK)* yang ketiga kalinya sejak tahun 2022 di sirkuit Mandalika - Lombok NTB. WSBK 2022 dihadiri 51.629 penonton, dan tahun 2023 dihadiri 70.000 penonton.

Sirkuit Mandalika menggelar MotoGP yang perdana pada tahun 2022, kini sirkuit internasional tersebut rutin setiap tahun menyelenggarakan ajang Balapan Motor bertaraf internasional. Event internasional ini pun sukses menarik 103.000 kunjungan penonton, jauh di atas target sebanyak 80.000 kunjungan.

Event lainnya yang diselenggarakan di kawasan mandalika yakin Shell Eco Marathon. Event tersebut adalah kompetisi merancang, membangun, dan menguji kendaraan ramah energi bagi pelajar dan mahasiswa. Lebih dari 70 tim dari 13 negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah mengambil bagian dalam kompetisi ini.

Tingginya antusiasme masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara dalam setiap event yang diselenggarakan dapat mendongkrak citra pariwisata Indonesia, sekaligus membuka peluang usaha di sekitar Mandalika. Sehingga, ke depannya dapat meningkatkan nilai ekonomi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat, khususnya Mandalika.









Labuan Bajo – NTT



Gugusan pulau padar menawarkan panorama alam dengan gugusan bukit yang artistik mengelilingi pulau ini dengan hamparan pasir putih dan birunya laut.

Salah satu lokasi side event G20 di Labuan Bajo adalah Creative Hub Puncak Waringin, Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Labuan Bajo juga mengadakan festival dalam rangkaian side event G20. Beberapa di antaranya adalah Flores the Singing Island, Flores Writers Festival, serta Ideathon #RinduLabuanBajo.

Labuan Bajo Street Carnival sebagai Side Event KTT ASEAN 2023 sukses meramaikan Lapangan Wae Kesambi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pengunjung acara ini diperkirakan mendekati 1.000 orang. Beragam penampilan, stand UMKM, dan pertunjukan musik sukses meningkatkan antusiasme warga setempat.

Pesta Rakyat ini dilaksanakan sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan KTT ASEAN sebagai motor penggerak kebangkitan perekonomian serta pembuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya.

Event lainnya yakni Labuan Bajo Maritime Festival (LBMF) 2023, mengetengahkan keajaiban dunia maritim Indonesia sejak masa silam hingga kini, dan telah berperan aktif dalam membangun peradaban dunia melalui teknologi kapal Phinisi maupun Jung serta mempelopori terciptanya Jalur Rempah Maritim dari Nusantara hingga Afrika Timur dan telah mendorong dunia menjadi satu kesatuan geografis tanpa batas.

LBMF 2023 menyajikan rangkaian Festival Kuliner Jalur Rempah yang dihidangkan di seluruh restoran, hotel, hingga industri ekraf berkelas mikro di Labuan Bajo, Pasar dan Pameran Rempah Nusantara, Pameran Phinisi, Adu Ketangkasan Belah dan Sisit Tuna, Marching Band, dan band penampil asli NTT.





Likupang – Sulawesi Utara

Likupang Tourism Festival yang berlangsung di Pantai Paal, Desa Wisata Marinsow, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merupakan event pariwisata yang diselenggarakan sejak tahun 2021 sebagai event unggulan di Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan bulan Juli setiap tahunnya.



Event ini diisi dengan beragam atraksi, lomba, pameran, pertunjukan seni budaya, konser musik dan lainnya. Tujuan dari event untuk:

- Promosi Potensi Pariwisata Likupang Sebagai DPSP dan Kabupaten Minahasa Utara secara umum,
- Memperkenalkan kebudayaan, kearifan budaya lokal di Minahasa Utara,
- Meningkatkan PAD & manfaat ekonomi terhadap masyarakat dari sektor pariwisata,
- Mengenalkan produk destinasi berbasis alam & budaya serta
- Meningkatkan lapangan kerja serta perekonomian yang didorong oleh sektor pariwisata.



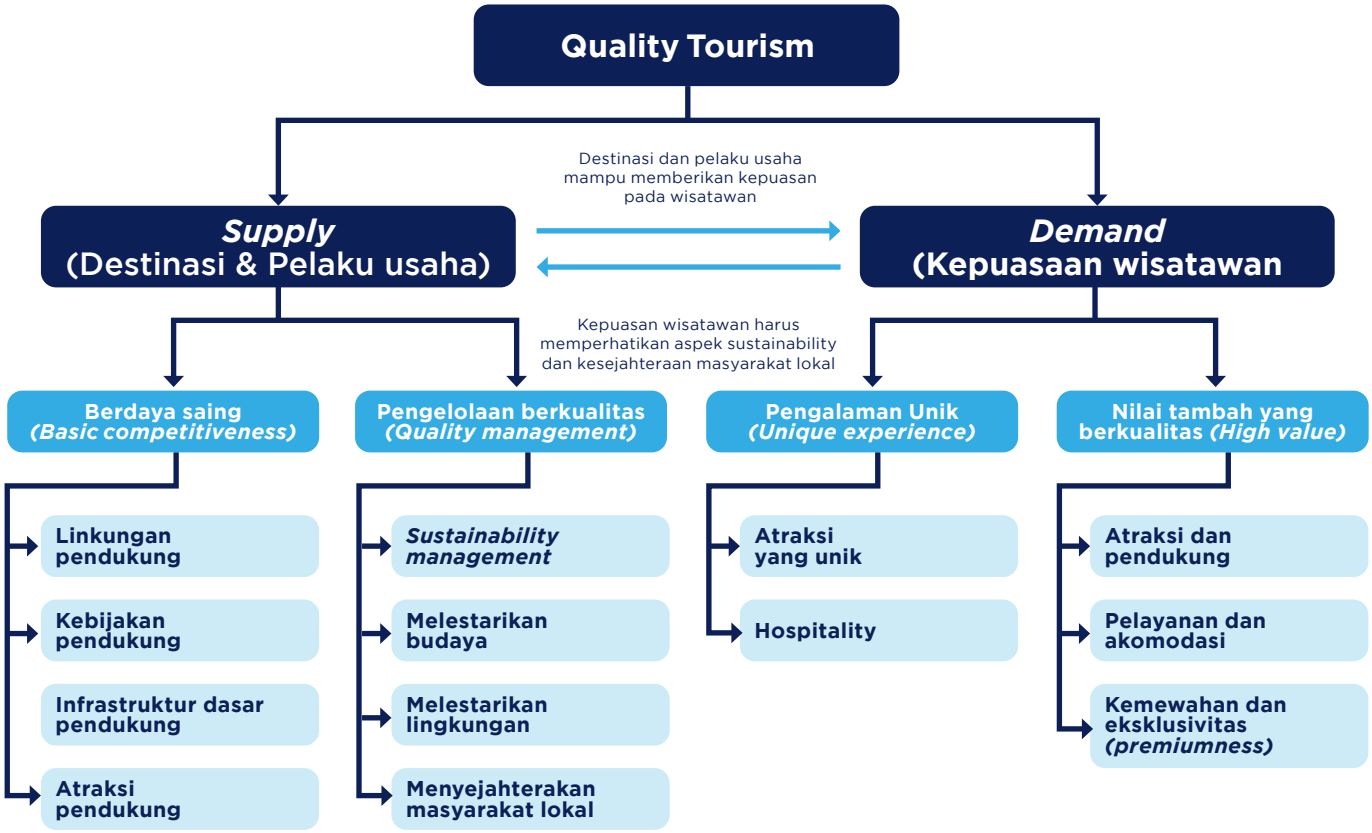
Likupang Tourism Festival melibatkan sekitar 2.000 personel sebagai pendukung acara dan target pengunjung 60.000 orang.



Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata)

Sejak 2019, Sekber Pariwisata yang terdiri atas Kemenko Marves, Bank Indonesia, Kemenparekraf, dan Bappenas, melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka mengakselerasi kinerja pariwisata nasional guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Upaya akselerasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata nasional yang beriorientasi pada pariwisata berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Studi mengenai penentuan indikator pariwisata berkualitas diinisiasi oleh Bank Indonesia pada 2020. Hasil studi menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata berkualitas terdiri atas empat aspek utama, yaitu aspek daya saing dasar (*basic competitiveness*), memenuhi nilai-nilai berkelanjutan (*sustainability*), memberikan pengalaman unik (*unique experience*), dan bernilai tinggi (*high value*).



Gambar 1. Indikator Pariwisata Berkualitas

Selanjutnya, pengembangan indikator dilakukan bersama Sekber Pariwisata pada 2022 dan disepakati menjadi salah satu acuan untuk mengukur penerapan aspek-aspek pariwisata berkualitas di 5 DPSP. Pengukuran penerapan pariwisata berkualitas di DPSP merupakan langkah penting yang secara konsisten dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional.

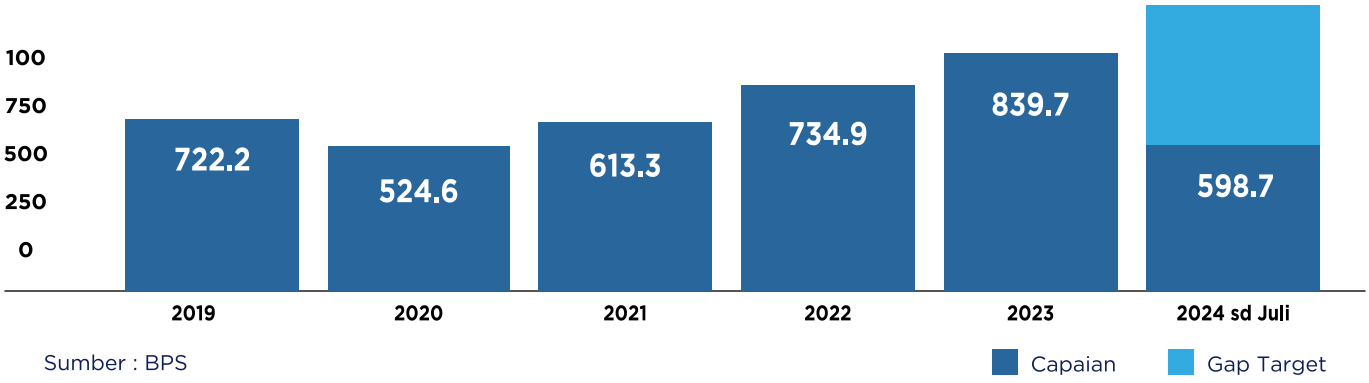
Rank	2022	Skor (1–7)	Rank	2022	Skor (1–7)	Rank	2022	Skor (1–7)	Perge-rakan skor
1	Nusa Dua*	6.48	1	Nusa Dua*	6.48	1	Nusa Dua*	6.48	↓
2	Borobudur	4.64	2	Borobudur	4.64	2	Borobudur	4.64	↑
3	Mandalika	3.89	3	Mandalika	3.89	3	Mandalika	3.89	↑
4	Labuan Bajo	3.84	4	Labuan Bajo	3.84	4	Labuan Bajo	3.84	↑
5	Danau Toba	3.47	5	Danau Toba	3.47	5	Danau Toba	3.47	↑
6	Likupang	3.37	6	Likupang	3.37	6	Likupang	3.37	↑

Gambar 2. Hasil Pengukuran Penerapan Indikator Pariwisata Berkualitas di 5 DPSP dengan Nusa Dua sebagai *benchmark*-nya

Liburan Seru, Cinta Negeri!

Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)

Grafik 2. Jumlah Perjalanan Wisnus (Milliar Perjalanan)



Sumber : BPS

Dalam upaya meningkatkan pariwisata domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, **Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)** resmi diluncurkan pada 13 Desember 2022. Program BBWI bertujuan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan target 1,25 - 1,5 miliar perjalanan per tahun. BPS menyampaikan, pada tahun Januari-Juli 2024 sudah tercapai 598,7 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), naik 18,03% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

Terdapat empat strategi BBWI yakni (a) memperkuat kampanye dan citra program Bangga Berwisata di Indonesia, (b) integrasi kampanye dengan paket pariwisata, (c) penyediaan transportasi yang efisien dan terjangkau, dan (d) penguatan aspek keberlanjutan dalam aktivitas pariwisata. Saat ini, BBWI telah diimplementasikan melalui promosi, penyelenggaraan event, travel fair, kebijakan penambahan hari libur, serta pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah. Keseluruhan strategi ini memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga, masyarakat, dan industri lainnya.

BBWI secara khusus menyasar kelompok masyarakat berpengeluaran menengah ke atas, khususnya generasi muda dan dewasa (usia 15-59 tahun) seperti Gen Z dan Milenial. Program ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan lokal untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata dalam negeri. Dengan demikian, BBWI tidak hanya akan memperkuat sektor pariwisata nasional, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.



International Quality Tourism Conference 2024 Sumber : Tim BBWI



DIATF Surabaya 2024
Sumber : Tim BBWI



Anugerah BBWI 2023
Sumber : Tim BBWI

Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)

"Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Bidang Marves, Menparekraf, dan pimpinan K/L terkait lainnya, rumuskan terlebih dahulu terkait skema tourism fund. Hal tersebut penting guna mendukung budaya maupun sport yang saat ini menjadi kekuatan negara Indonesia. Apabila pemerintah benar-benar serius mengurusi hal tersebut akan menjadi nilai ekonomi yang cukup besar."

Arahan Presiden pada Ratas Desember 2023 dan Juli 2024

Terbatasnya sumber dana untuk promosi pariwisata menjadi tantangan dalam penguatan sektor pariwisata. Selama ini, sebagian besar dana pengembangan infrastruktur serta pelaksanaan kegiatan kepariwisataan bergantung pada anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dan investasi swasta. Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki persentase alokasi anggaran sektor pariwisata terkecil, yaitu 0,18% dari total APBN. Sedangkan Thailand dan Singapora mengalokasikan 0,26% serta Malaysia 0,48% dari total anggaran.

Selain masalah keterbatasan alokasi, pendanaan dari pemerintah juga tidak fleksibel, baik waktu ketersediaan, maupun peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Sementara itu kegiatan pariwisata telah diketahui memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan negara. Salah satu jenis kegiatan kepariwisataan yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pelaksanaan kegiatan bersaklala internasional. Kegiatan tersebut, selain mendatangkan devisa dari wisatawan mancanegara yang berkunjung juga dapat mendorong demand creation dari sektor pariwisata, serta citra positif Indonesia. Citra positif tersebut selain berdampak pada sektor pariwisata juga akan meningkatkan keyakinan negara luar untuk berinvestasi di Indonesia.



Dalam rangka menanggulangi permasalahan pendanaan kepariwisataan terutama pada kegiatan berskala internasional, maka diinisiasi pembentukan Dana Pariwisata Berkualitas atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
IQTF muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan kegiatan pariwista berskala internasional. Usulan ini berdasar pada kebutuhan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan pasar. Salah satu alasan utama pembiayaan ini adalah karena kegiatan pariwisata berskala internasional sebagain besar belum layak secara bisnis, namun sangat berdampak positif bagi perekonomian nasional..

IQTF direncanakan sebagai entitas yang dapat mengelola dan mengalokasikan dana untuk membeli hak penyelenggaraan (hosting/talent/commitment fee) kegiatan berskala internasional. Pendanaan IQTF bersumber dari APBN, APBD, kontribusi wisatawan asing, hasil investasi dana yang dikelola serta sumber lain yang sah. IQTF akan dikelola dengan skema dana abadi dan ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan pariwisata berskala internasional serta mendukung konservasi lingkungan di sekitar destinasi wisata. Pengelolaan keuangan IQTF akan dilaksanakan oleh BLU yang memiliki izin investasi. Sementara pengelola program dilakukan oleh badan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif-Kemenparekraf.

Saat ini, Kemenko Marves bersama K/L terkait telah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden mengenai IQTF dan menunggu pengesahan dari Presiden.

Geopark Indonesia yang Mendunia

Indonesia berinisiatif mengembangkan konsep Geopark sebagai salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan pada kawasan-kawasan yang memiliki warisan geologi.

Hingga September 2024, sidang Dewan UNESCO Global Geopark menyetujui 2 geopark baru yakni Geopark Meratus dan Kebumen sebagai global geopark, yang akan ditetapkan melalui Sidang UNESCO 2025. Dengan demikian, saat ini terdapat 12 UNESCO global geopark (UGGp) di Indonesia sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.

12 UNESCO global geopark (UGGp)

1. **Geopark Batu** (2012)
2. **Geopark Gunung Sewu** (2015)
3. **Geopark Rinjani-Lombok** (2018)
4. **Geopark Ciletuh-Palabuhanratu** (2018)
5. **Geopark Belitong** (2020)
6. **Geopark Kaldera Toba** (2020)
7. **Geopark Ijen,** (2023)
8. **Geopark Maros Pangkep** (2023)
9. **Geopark Merangin Jambi,** Bali (2023)
10. **Geopark Raja Ampat** (2023)
11. **Geopark Meratus** (2024)
12. **Geopark Kebumen** (2024)

Hal ini menjadikan Indonesia negara dengan jumlah UNESCO global geopark terbanyak ke-4 di dunia dan peringkat pertama di Asia Tenggara.

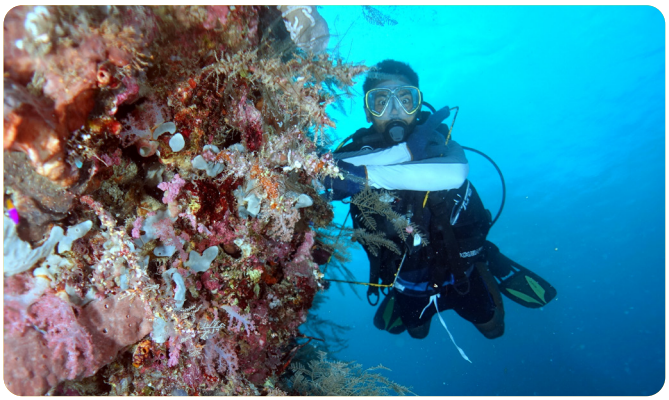
Terkait regulasi, pengembangan geopark di Indonesia didasarkan pada Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang diamanatkan sebagai Ketua Dewan Pengarah KNGI menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Mekanisme, Tata Kerja, Keanggotaan, dan Struktur Organisasi KNGI.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan geopark secara berkelanjutan melalui kerja yang terintegrasi. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian, Lembaga, serta para pemangku kepentingan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengelolaan geopark.

Pengembangan geopark berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan geopark Indonesia merupakan kerja keras antara Komite Nasional Geopark Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Jaringan Geopark Indonesia. Moto pengembangan geopark, "Memuliakan bumi, mensejahterakan rakyat," sangat nyata dirasakan dampaknya di Indonesia.



Maros Pangkep Geopark





IJEN UGGp





Raja Ampat



Merangin



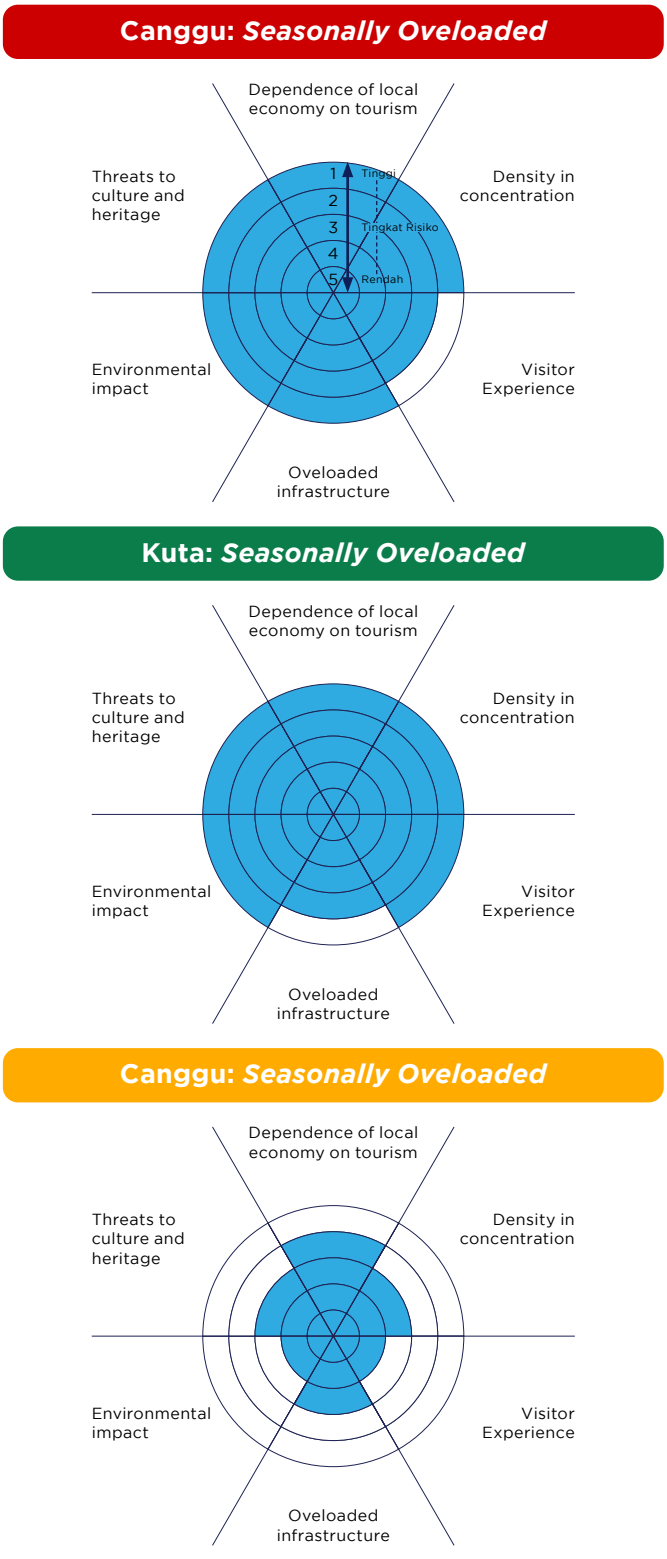


Menuju Bali sebagai **Destinasi Pariwisata Berkualitas**

Bali, sebagai destinasi wisata internasional, dikenal dengan keindahan alam dan kebudayaan, serta keramahan masyarakatnya. Selain itu, struktur ekonomi Provinsi Bali masih terkonsentrasi pada sektor pariwisata dengan pangsa **51%** dari PDRB dan sebanyak **71%** kunjungan wisatawan terpusat di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, *dan Tabanan) yang menyebabkan rentan terhadap overtourism* **(gambar 1).**

Tingginya jumlah wisatawan berdampak pada munculnya berbagai tantangan seperti keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, ketertiban hukum, dan kualitas pengalaman wisata. Sepanjang Januari - Agustus 2024, Polda Provinsi Bali mencatat 426 kasus pelanggaran oleh WNA dengan mayoritas berasal dari Jerman, Australia, Rusia, dan AS. Selain itu terdapat celah bagi usaha sarana dan prasarana oleh asing, yang berdampak pada penataan dan pengendalian ruang yang tidak terkendali.

Melihat kondisi di atas, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil langkah konkret untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bali melalui tiga strategi, yaitu (1) pengawasan di Bali melalui Satuan Tugas; (2) diversifikasi pariwisata ke seluruh kabupaten; (3) akselerasi implementasi pariwisata berkualitas dan Ekonomi Kerthi Bali. Ketiga langkah tersebut dilakukan dengan kolaborasi anatara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penegak Hukum, dan tokoh masyarakat.



Gambar 1. Asesmen Tingkat Risiko Konsentrasi Wisatawan Terhadap Ekonomi, Lingkungan, Budaya, Infrastruktur dan Pengalaman Pariwisata di Canggu, Kuta, dan Ubud
Sumber: Bank Indonesia diadaptasi dari studi McKinsey, 2024

Sail **Teluk Cenderawasih**



Teluk Cendrawasih Papua merupakan salah satu kawasan dengan ekosistem yang paling kaya dan lengkap di Indonesia yang jika dikelola secara terintegrasi dapat menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia di Papua dan Pasifik dengan mendorong kekuatan ekonomi biru (*blue economy*) dan menjadikannya sebagai sumbu pertumbuhan ekonomi Indonesia di Pasifik. Sail Teluk Cendrawasih merupakan pintu masuk untuk memastikan dan memantapkan Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik. Sail Teluk Cendrawasih mampu menjahit sumber daya, modalitas dan kekuatan maritim Indonesia.

Sail Terus Cendrawasih merupakan kolaborasi lintas stakeholder antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Swasta, dan Masyarakat. Launching Sail Teluk Cendrawasih diadakan 3 November 2023, dihadiri oleh Menko Marves dan Bapak Presiden RI meresmikan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Samber – Binyeri, Biak Numfor, Papua.

Dampak Kegiatan STC Tahun 2023 adalah:

1. Dampak Ekonomi

a. Berdasarkan Jumlah Kunjungan orang sebanyak 6.521 orang dengan lama tinggal selama 12 hari dengan rerata pengeluaran per hari untuk akomodasi, transportasi, makan dan kebutuhan lainnya sebesar Rp1.000.000,- maka pengeluaran uang pengunjung diperkirakan sebesar Rp78.252.000.000,-

b. Perputaran Uang UMKM-Ekraf. Jumlah rerata kunjungan sebanyak 4.000 orang dengan rerata pengeluaran per orang sebesar Rp50.000, selama 7 hari maka perkiraan transaksi UMKM-Ekraf sebesar Rp1.400.000.000,-

c. Investasi terafektasi, sebanyak dua Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang Perikanan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp500.000.000.000,-





2. Dampak Sosial

Biak dan Kawasan Teluk Cenderawasih semakin dikenal dan menjadikannya sebagai kawasan yang berpotensi mengalami percepatan pembangunan yang inklusif, berpotensi menjadi kawasan dengan hilirisasi ekonomi dan sumberdaya unggulan yang mampu menyerap lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan diminati untuk dikunjungi.

3. Dampak Budaya

Revitalisasi Budaya melalui keterlibatan lima segmentasi budaya yakni:

a. 1.200 Penari Kolosal
b. 800 Peserta Devile Budaya Nusantara
c. 1.500 pemain ukulele
d. 1.000 pemain suling
e. 100 pemain standbass
f. 2.500 peserta Parade Budaya Nusantara
g. 170 Peserta Parade Yospan
h. 250 Peserta Parade Wor Byak
i. 100 Peserta Parade Perahu Tradisional Suku Biak (5 Perahu: Wai Mansusu dan Wai Ron)
j. Parade 624 Perahu Nelayan Tradisional Biak (Budaya Maritim)
k. 7.000 Peserta Parade Merah Putih

International Quality Tourism Conference **(IQTC) 2024**



Industri pariwisata di ASEAN telah berkembang pesat, memberikan manfaat seperti peningkatan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, namun juga menghadirkan tantangan seperti dampak negatif terhadap lingkungan dan over-tourism. Seiring perubahan preferensi wisatawan menuju destinasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, diperlukan perubahan dalam industri untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkualitas serta menetapkan standar pengelolaan yang baik. Dua strategi utama meliputi penyusunan dan penerapan standar pariwisata berkualitas serta komitmen internasional untuk menjalankannya.

Penerapan standar destinasi pariwisata berkualitas di ASEAN+3 penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Kolaborasi antara negara anggota dan pemangku kepentingan diperlukan untuk berbagi praktik terbaik, memberikan pelatihan, serta menciptakan visi bersama mengenai pariwisata berkualitas. Dengan standar yang tinggi, destinasi akan lebih menarik bagi wisatawan berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan kawasan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan *1st International Quality Tourism Conference (IQTC)* 2024 untuk mendorong dialog tentang pariwisata berkualitas di ASEAN+3 pada 29-30 Agustus2024 di Bali.

Adapun tiga tujuan penyelenggaraan IQTC 2024 adalah: (a) meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan akan pentingnya pariwisata berkualitas serta mendorong praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab, (b) merumuskan strategi regional yang komprehensif untuk pariwisata berkualitas dan menetapkan standar pariwisata berkualitas, serta (c) menjalin kerja sama dengan World Economic Forum (WEF) untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkualitas. Pada jangka menengah panjang, IQTC akan menjadi jembatan bagi penerapan standar pariwisata berkualitas di kawasan ASEAN, dengan dua parameter utama yakni dampak ekonomi yang inklusif dan signifikan, dan terjaganya keberlanjutan lingkungan, sosial, serta budaya.

Membangun Ekosistem Penerbangan Nasional yang Efisien

Harga tiket pesawat domestik yang tinggi telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Isu ini dipandang menjadi salah satu penghambat dalam mencapai target pergerakan wisatawan nusantara yakni 1,25 hingga 1,40 miliar perjalanan hingga akhir 2024.

Tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi akibat ekosistem penerbangan nasional yang dinilai masih belum efisien. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat melalui penyediaan harga tiket yang terjangkau dan melakukan sembilan langkah efisiensi penerbangan.

1. **Evaluasi Biaya Operasi Pesawat**
   Mengidentifikasi potensi efisiensi dari komponen biaya operasi pesawat
2. **Penguatan Kebijakan Konektivitas dan Persaingan Usaha**
   (i) Kebijakan membagi operasional base maskapai, (ii) Pengaturan Kapasitas Rute, (iii) Perpanjangan Monopoli Rute Baru, (iv) Kontrak Multi-years Penerbangan Perintis, (v) Penyesuaian Kebijakan penguasaan slot penerbangan.
3. **Penyesuaian Kebijakan TBA Berdasarkan Kepadatan Rute**
   Kebijakan TBA hanya bagi rute penerbangan yang "padat - tidak padat, untuk rute penerbangan 'sangat padat', mengikuti mekanisme pasar.
4. **Evaluasi Peran Pendapatan dari Kargo Terhadap Pendapatan Maskapai**
   Evaluasi pendapatan kargo maskapai nasional, sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan TBA
5. **Pemberian insentif PP DTP Tiket Penerbangan**
   Insentif ditujukan secara langsung untuk tiket penerbangan yang dibeli oleh masyarakat.
6. **Multiprovider avtur untuk menurunkan harga avtur**
   Mengkaji potensi multiprovider dalam penyediaan avtur untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing
7. **Akselerasi Pembebasan Be Mask dan Pembukaan Lartas**
   Bagi impor komponen penerbangan khusus
8. **Penghilangan Double Charge pada PPN Avtur dan Tiket Pesawat**
9. **Penghilangan Double Charge pada Tarif Tike Pesawat**
   Yang diberlakukan bagi penerbangan yang melakukan transfer sebelum ke tujuan.

Langkah efiesiensi pada butir 7 direalisasikan melalui relaksasi kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) suku cadang untuk industri bengkel pesawat atau *maintenance, repair and overhaul (MRO)*, dan operator penerbangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Relaksasi ini merupakan upaya untuk menekan biaya *overhaul* dan perbaikan pesawat yang menyumbang sekitar 16,19 persen dari harga tiket pesawat, nomor dua setelah biaya pemakaian bahan bakar avtur yakni sebesar 35,76 persen.

Lebih lanjut, langkah efisiensi pada komponen biaya operasional pesawat juga dilakukan melalui uji coba penurunan harga avtur sebesar 14% - 16% pada bandar udara di 3 DPSP selama periode Maret hingga Agustus 2024, yakni pada Bandara Siborong-Borong Silangit (DTB), Bandara Internasional Lombok (LOP), dan Bandara Labuan Bajo (LBJ).

Untuk mencapai target jangka menengah-panjang tersebut, konferensi menyepakati tiga hal penting. Pertama, penyampaian indikator pariwisata berkualitas Indonesia kepada perwakilan negara-negara ASEAN dan organisasi pariwisata internasional merupakan langkah inisiatif Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional pertama yang menerapkan standar destinasi pariwisata berkualitas. Kedua, komitmen penguatan penerapan pariwisata berkualitas juga diperkuat melalui kolaborasi dengan seluruh entitas industri pendukung pariwisata, seperti aviasi, telekomunikasi, sektor keuangan, dan agen perjalanan. Ketiga, sinergi dan kolaborasi disepakati bersama kementerian/lembaga terkait, ***World Economic Forum (WEF), Global Sustainable Tourism Council (GSTC), World Bank,*** serta perwakilan industri pendukung pariwisata, guna mempercepat implementasi indikator pariwisata berkualitas dan meningkatkan peringkat Indonesia dalam ***Travel and Tourism Development Index (TTDI).***







Kita Bela
Kita Beli

Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian bangsa. Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) harus konsisten dan meluas agar produk negeri sendiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, telah terbit Keppres 15 Tahun 2021 tentang Tim Gernas BBI.

Tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan Gernas BBI. Ruang bagi UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa semakin terbuka. Pada 2023, penggunaan produk dalam negeri bagi K/L, pemda, BUMN melejit hingga sekitar Rp 1.349,8 triliun. Pada 2023 UMKM yang *onboarding* ke ekosistem digital sebanyak 25,2 juta UMKM dan transaksi mencapai Rp887 miliar di 13 provinsi terpilih. Per Januari s/d September 2024, tercatat total 674 pelatihan dan 561 pameran, dengan jumlah transaksi sebesar Rp4 triliun, hasil reaktivasi di 20 daerah.

Faktor pentingnya, kemudahan bagi UMKM untuk mendaftar pada katalog elektronik. Namun, itu belum cukup. Pemakaian komponen dalam negeri juga harus diperbesar. Pemerintah memberikan insentif sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam katalog elektronik. Strategi ini memuluskan jalan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.



Foto: Dokumentasi Kemen Parekraf



Sejumlah model mengenakan busana produk dan karya lokal dengan motif khas pada acara peresmian kampanye Beli Kreatif Danau Toba di Debang Resort di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (20/2/2021).



Program Beli Kreatif Danau Toba dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu (20/2/2021) dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo secara virtual.



Upaya Indonesia bangkit di masa pandemi, yaitu menghidupkan kembali sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan program Beli Kreatif Danau Toba. Program 2021 ini bertujuan untuk mendorong UMKM di salah satu Destinasi Super Prioritas yaitu Danau Toba, Sumatra Utara.

Kualitas Oke, **Harga Murah!!**

Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

Dengan TKDN, produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah maupun pengadaan pada sektor badan usaha sebagai pengguna barang dan sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018. Selain itu produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa juga didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut.

Presiden Jokowi membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2018, tujuannya untuk optimalisasi penggunaan produk dalam Negeri. Menko Marves ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional P3DN. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung perkembangan industri dalam negeri termasuk UKM dan UMKM lokal yang ada di Indonesia. Dengan memilih produk dalam negeri sebagai produk bisnis, juga membantu para pebisnis dan juga produsen lokal untuk berinovasi dan berkembang lebih baik lagi dalam menciptakan suatu produk.

Produk lokal dengan kualitasnya yang bagus, memiliki harga yang relatif murah, bahkan sangat terjangkau. Inilah salah satu keunggulan apabila memilih produk dalam negeri.

Kualitas oke, Harga Murah!



Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mencicipi produk makanan yang diproduksi UMKM usai membuka acara Lagawi Festival 2022 di Pulau Tegal Mas, Lampung, Kamis (23/6/2022). Pulau Tegal Mas menjadi tuan rumah pelaksanaan Lagawi Fest Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Lampung.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut B. Pandjaitan meladeni ajakan foto di sela-sela ketika mengunjungi stand pameran dalam Acara Puncak Peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/06/2021).

Indonesia adalah tiga besar dunia kontributor sektor ekonomi kreatif pada PDB Nasional, setelah USA (11,2%) dan Korea Selatan (8.67%). Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang saling melengkapi, pariwisata merupakan wadah, sedangkan ekonomi ekonomi kreatif mengisi konten wadah pariwisata.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Jejaring ekonomi kreatif terdiri dari pelaku ekonomi kreatif menurut definisi UU 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Industri kreatif mendapat momen karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Umum PBB Nomor 74/198 telah menetapkan tahun 2021 sebagai tahun internasiona ekonomi kreatif. Indonesia memprakarsai resolusi PBB mengenai kemajuan ekonomi kreatif dunia tersebut.

Tiga sub sektor ekonomi kreatif menjadi penyumbang terbesar struktur PDB dan ekspor. Kuliner menyumbang sebesar 41%, fashion berkontribusi sebesar 17% dan kriya sebesar 14,9%.

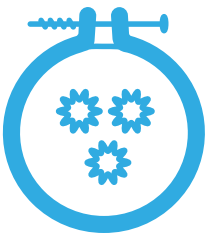
3 Subsektor Ekraf Penyumbang Struktur PDB dan Ekspor



Fashion
17%

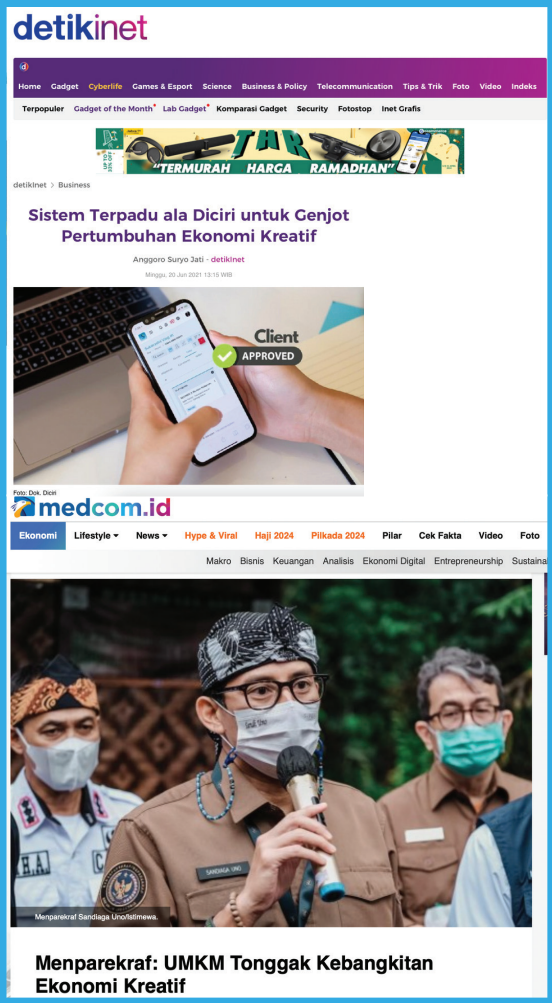


Kuliner
41%



Kriya
14,9%

"UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen di tahun 2020; dengan targetnya di 2021 adalah 62,36 persen dan 65 persen di tahun 2024"


detikinet

Sistem Terpadu ala Diciri untuk Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Anggoro Suryo Jati - detikinet

medcom.id

Menparekraf: UMKM Tonggak Kebangkitan Ekonomi Kreatif

Pemerintah mendorong gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini merupakan momentum bagi Industri Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi dengan pemenuhan permintaan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, dimana Pemerintah telah mencanangkan Program Substitusi Impor sebesar 5% pada tahun 2023.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan P3DN, Pemerintah mewajibkan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk menggunakan produk hasil industri dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri [P3DN] dan Implementasi Inpres 2 Tahun 2022

Pada 30 Maret 2022, Presiden telah memberikan arahan melalui Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selama dua tahun terakhir, terus dilakukan upaya penyelesaian arahan Inpres 2 Tahun 2022, dari 43 pasal telah terselesaikan 5 pasal dan 38 pasal masih dalam proses. Menurut laporan LKPP dan Kementerian BUMN, realisasi belanja PDN oleh K/L, pemda, dan BUMN mengalami peningkatan signifikan. Pada 2022 realisasi mencapai Rp762,75 triliun, pada 2023 realisasi mencapai Rp1.249 triliun, dan per 4 Oktober 2024 realisasi mencapai Rp1.634,66 triliun.

Enam capaian besar Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah:

1. Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonomi dari belanja Produk Dalam Negeri tahun 2023 di kisaran 1,13% dari *baseline* PDB dan dampak tenaga kerja sebesar 2,9 juta atau 2,16% dari *baseline.*
2. Per 4 Oktober 2024, jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 9,8 juta produk, melebihi target 5 juta produk pada 2023.
3. Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD)/ Kartu Kredit Indonesia (KKI) telah diluncurkan melalui berbagai tahap. KKPD pada 29 Agustus 2022, KKI fisik pada 8 Mei 2024, dan KKI *online* pada 2 Agustus 2024.
4. Integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan.
5. Implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp1,8 Triliun.
6. Penguatan dasar hukum melalui penyusunan Rancangan Undang Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik telah diselesaikan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan P3DN telah diselesaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim P3DN lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN.
3. Integrasi dan digitalisasi pengadaan:
   - kode KBLI dan KBKI sudah mengalir ke dashboard LKPP;
   - penyederhanaan syarat e-katalog; dan
   - integrasi E-Catalog dengan SIINAS, dan ke KKPD/KKI.

Capaian Implementasi P3DN

Peningkatan Realisasi Belanja PDN

2023	2024
Rp1.249 T	Rp1.634,7 T

Peningkatan Jumlah Produk di e-Katalog

2023	2024
4,8 Jt	9,8 Jt

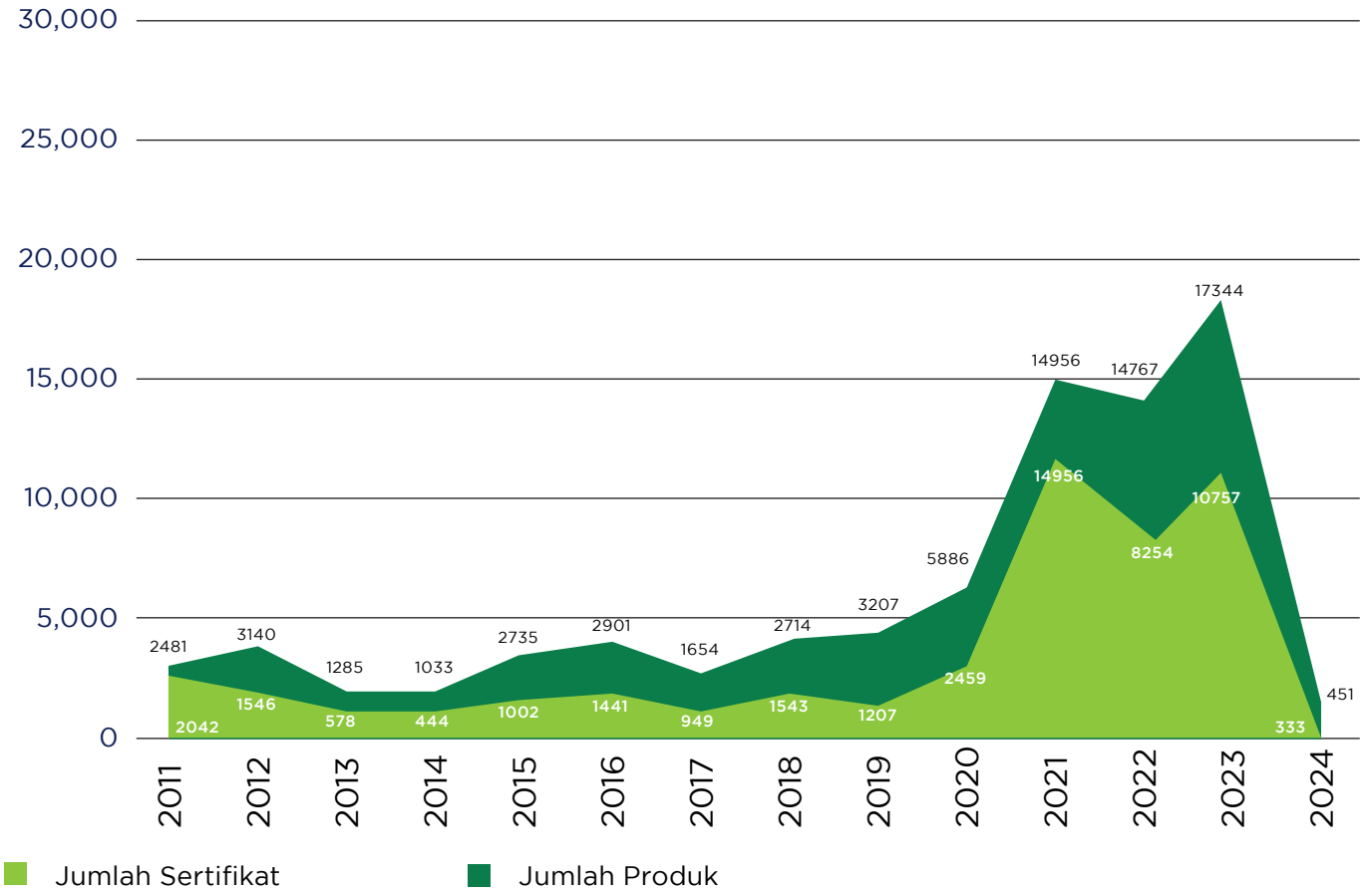
Pertumbuhan Ekonomi
Q1 - Q3 2024

1,53%
Setara Rp133,4 Trillion

Penyerapan Tenaga Kerja

2,16%
Setara 2,9 Jt orang
2024

Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat (TKDN)



ALUR PROSES SERTIFIKASI TKDN
(MANDIRI/NON FASILITASI KEMENPERIN)



Gim **Lokal**

Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional



Maraknya permainan gim yang dikonsumsi masyarakat menjadikan industri gim sebagai industri konten terbesar di dunia dengan pendapatan global lebih dari Rp3.000 triliun. Nilai ini 330 persen lebih besar dari industri film. Industri gim nasional mempunyai tantangan berupa penguasaan pangsa pasar gim lokal di dalam negeri hanya mencapai 0,5 persen, sedangkan 99,5 persen dikuasai asing.

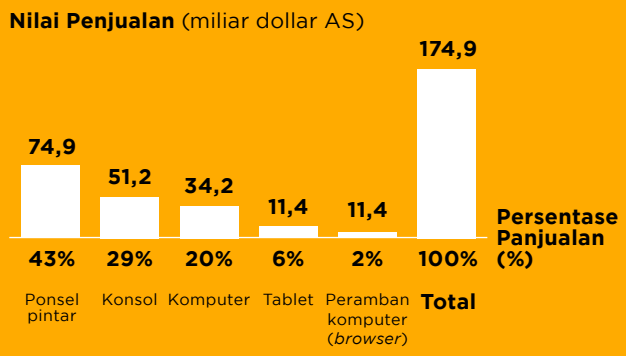
Industri gim nasional mempunyai tantangan berupa penguasaan pangsa pasar gim lokal di dalam negeri hanya mencapai 0,5 persen, sedangkan 99,5 persen dikuasai asing. Untuk telah terbit Perpres 19/ 2024 tentang percepatan pengembangan industri gim nasional. Di dalamnya terdapat 7 pilar penguatan ekosistem gim nasional, mencakup Pengembangan SDM, pembukaan akses pembiayaan, peningkatan promosi dan akses pasar, penyediaan infrastruktur teknologi, penyusunan peraturan terkait, pembangunan industri perangkat keras, dan aktivasi gim di kawasan regional dan global.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama K/L, asosiasi AGI, CAKRA dan pihak terkait lainnya,terus berupaya mengembangkan industri gim nasional.

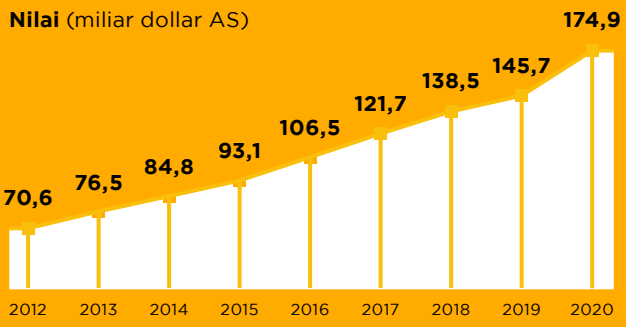


Pada 2025, potensi pasar gim Indonesia diprediksi mencapai US$2,5 miliar (setara Rp. 36 triliun). Bonus demografi Indonesia menjadi pangsa pasar potensial industri gim global. Hal ini ditandai dengan meningkatnya unduhan gim di Indonesia yang mencapai 3,37 miliar kali pada tahun 2022 atau peringkat ke-3 terbesar di dunia.

Nilai Penjualan Gim di Dunia Berdasar *Platform*



Nilai Perolehan Industri Gim Dunia



Perolehan Industri Gim Dunia Berdasar Wilayah (2020)

Wilayah Nilai Perjualan		Persentase
Asia Pasifik	**84,3** miliar dolar AS	**48%**
Amerika Utara	**44,7** miliar dolar AS	**26%**
Eropa	**32,9** miliar dolar AS	**19%**
Amerika Latin	**6,8** miliar dolar AS	**4%**
Timur Tengah dan Afrika	**6,2** miliar dolar AS	**3%**
Total	**174,9** miliar dolar AS	**100%**

*Data hingga November 2020

Sumber : Newzoo dan WePC; Diolah Litbang Kompas/Avn
Infografik : Ismawadi

Indonesia Spice Up ***the World***

Program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan kuliner dan rempah-rempah Indonesia ke kancah global. Program ini juga berfokus pada peningkatan daya saing produk rempah Indonesia di pasar internasional serta mendukung ekspor industri kuliner Indonesia. Beberapa tujuan utama program ini adalah meningkatkan ekspor rempah-rempah dan bumbu jadi Indonesia, mempromosikan kuliner Indonesia secara global seperti rendang, sate, nasi goreng, dan lainnya di restoran-restoran internasional, dan mengembangkan restoran Indonesia di luar negeri.

Indonesia Spice Up the World (ISUTW) telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 November 2021 di Expo 2020 Dubai. Beberapa program yang tumbuh untuk mendukung ISUTW adalah diskon 20% pengiriman bumbu dan rempah ke luar negeri untuk tarif angkutan udara, dengan menggunakan Garuda Indonesia, dikembangkannya program *Indonesian Restaurant Fundraising* (IndoStar) oleh Kemenparekraf yang dirancang untuk mendukung dan mempromosikan restoran-restoran Indonesia yang berada di luar negeri. Program ini bertujuan untuk menggalang dana dan memberikan bantuan finansial serta sumber daya bagi para pemilik restoran Indonesia agar mereka dapat memperluas jangkauan bisnis mereka, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkenalkan kuliner Indonesia ke pasar global. Dilakukan juga kerja sama dengan In Journey Aviation Services untuk aktivasi program di event-event nasional seperti Waisak di Borobudur.

Untuk mengukuhkan program ISUTW telah disusun Kepmenko Marves tentang Komite Indonesia Spice Up the World yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, BUMN, asosiasi, dan swasta. Hal ini dilakukan untuk memperkuat program lintas sektoral untuk *Indonesia Spice Up the World.*









Sumber: GAPMMI

Sumber: Kemenparekraf











Sumber: InJourney Aviation Service

Percepatan Transformasi Digital Kemenko Marves

Penyederhanaan aplikasi dan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tujuh K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves.

Permasalahan utama adalah inefisiensi birokrasi yang tercermin pada 'kesemrawutan' dengan adanya 1.222 aplikasi di tujuh K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Hal ini membuat kebingungan masyarakat, pemborosan APBN/APBD, dan ketidakpastian bagi investor. Adapun beberapa hal yang dihasilkan pada koordinasi percepatan transformasi digital di 7 K/L adalah integrasi layanan *Government to Business* (G2B) ke *Online Single Submission* (OSS), integrasi layanan *Government to Citizen* (G2C) ke Portal Indonesia Satu yang dikelola oleh Kemenkominfo dan KemenPAN-RB.

Sebagaimana arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital tanggal 12 Juni 2023, Kemenko Marves telah mengoordinasikan 7 K/L untuk memangkas aplikasi-aplikasi tersebut menjadi 852 aplikasi serta menggunakan satu aplikasi layanan G2B melalui OSS dan satu aplikasi layanan G2C melalui Portal Indonesia Satu.



Perizinan Penyelenggaraan **Event Secara Daring**

Pada Rapat Internal Kabinet pada tanggal 1 Agustus 2023, Presiden mengarahkan agar setiap pemangku kepentingan terkait menyiapkan mekanisme digitalisasi perizinan penyelenggaraan event. Proses penyederhanaan perizinan penyelenggaraan event dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring maupun luring. Hasilnya adalah penyederhanaan dan digitalisasi proses bisnis serta integrasi layanan Presisi Polri ke dalam OSS, serta menggunakan layanan pembayaran Simponi Kemenkeu.

Penyederhanaan ini menghasilkan proses bisnis yang lebih singkat dengan memangkas tahapan perizinan, mengurangi pengisian data dari 63 field menjadi 33 field, dan dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen yang harus disampaikan oleh penyelenggara event. Puncaknya telah dilakukan *Grand Launching* oleh Polri pada 24 Juni 2024 yang diresmikan oleh Presiden.

Sejauh ini, Sistem Perizinan Penyelenggaraan *Event* telah memberikan hasil positif melalui penertiban enam perizinan *event* dan terdapat enam pengajuan perizinan yang sedang berjalan.

6 Event pengajuan yang telah berhasil

No	Nama Acara	Pengisi Acara	Promotor	Lokasi & Tanggal Acara	Biaya Pengamanan
1	Konser 30 Tahun Gigi	Band Gigi, Ariel Kris Dayanti, Mahalini, HiVi!, Perunggu, Afgan, Fanny Soegi	Mata Hati Telinga	Stadium GBK (Gelora Bung Karno 24 Agustus 2024	Rp. 13.376.000
2	Pesta Rakyat TMII	Maliq & D'Essentials & Fourtwnty	Bhumi Visatanda Indonesia	Taman Mini Indonesia Indah 18 Agustus 2024	Rp. 17.240.000
3	Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway	Isyana Sarasvati, Yura Yunita, Christine Tambunan, Nino Prabowo, Gabriel Havrianto, Yuyun Arfah, Swain Mahisa, Mirabeth Sonia, Alicia Hartono, Alsant Nababan, Taufan Purbo	Perada Swara Production	JiExpo Kemayoran (PRJ) 17 Agustus 2024	Rp. 10.478.000
4	Pekan Gembira Ria	Gildcoustic, Denny Caknan, Guyon Waton, Fiersa Besari, NDX A.K.A, Mr Jono & Joni, Shaggydog, Ayu Aulia, Sherry Jolieca, Ricky W Miraza, Irfan Sebaztian, Bunga Aurellie, Liyan Zeftian	Semua Pasti Gembira	JiExpo Kemayoran (PRJ) 10-11 Agustus 2024	Rp. 31.730.000
5	Social Chic Jakarta 2024	Raisa, Mahalini, Tiara Andini, bilal Indrajaya, Teddy Adhitya, Bernadya, Vidi, HiVi!, JKT48, Nadhif Basalamah, Ghea Indrawati, Feby Putri, Tulus, Vierratale, Juicy Luicy, Sal Priadi, Adikara, Vionita	Beekind Optimal Maksimal	Stadium GBK (Gelora Bung Karno 2-4 Agustus 2024	Rp. 72.302.000
6	Ruang Indonesia Festival	Denny Caknan, Feast, Feel Koplo, Fourtwnty, Guyon Waton, Hindia, Idgitaf, Mr.Jono Joni, Nadin amizah, Ndarboy Genk, NDX AKA, Reality Club, Tipe-X, Tulus, Dere, Feby Putri, The Changcuters, Vierratale, Gildcoustics	Expo Infonesia Jaya	JiExpo Kemayoran (PRJ) 16-18 Agustus 2024	Rp. 118.670.000

Tabel 1: Pengajuan Event yang Telah Berhasil

Sumber: Telkom, Bank Mandiri, per 11 September 2024

6 Event pengajuan yang sedang berjalan

No	Nama Acara	Pengisi Acara	Promotor	Lokasi & Tanggal Acara	Biaya Pengamanan
1	Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40	Kahitna, Maliq & D'essentials, RAN, KIM, HIVI!	Imajinasi Aksi Dunia	JCC 17 September 2024	Menunggu Verifikasi Polri
2	Lifetime Tribute to Chrisye Concert	Rizky Febian, Eva Celia, Mahalini, Afgan, Once, Andien, Kevin Aprilio, Pasha, David Bayu	Kreatif Pesona Indonesia	Stadium GBK (Gelora Bung Karno) 16 September 2024	Menunggu Verifikasi Polri
3	PESTAPORA 2024	Dewa 19, Ari Lasso, Tulus, Afgan, Bunga Citra Lestari, dsb	Boss Pencipta Kreasi	JiExpo Kemayoran (PRJ) 20-22 September 2024	Menunggu Verifikasi Polri
4	The Greatest Melly Goeslaw	Melly Goeslaw, Marcello Tahitoe, Dinda Ghania, Putri Ariani, Rossa	Aloka Persada	Ancol Beach City International Stadium 29 September 2024	Menunggu Verifikasi Polri
5	PWC Fest	RAN	Merkurius Komunikasi Jaya	Stadium GBK (Gelora Bung Karno) 13 September 2024	Menunggu Verifikasi Polri
6	High School Festival	Suara Kayu, Raffi Ahmad, Jemimah Cita, Lyodra, Agatha Chelsea	Festival Generasi Baru	Community Park PIK 23 November 2024	Menunggu Verifikasi Polri





Sumber Foto: BPMI Setpres

Saat ini, Perizinan *Event Online* akan dikembangkan untuk event skala internasional dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) dan Kemnkeu (Ditjen Bea Cukai), dan akan dikembangkan untuk perizinan event di Lima DPSP dan Bali.

08

INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Konektivitas
Untuk Masa Depan

Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung



Tunnel 6 Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) sedang dibangun (2022)
Foto: Dokumentasi KCIC



Menko Luhut Dampingi Presiden Joko Widodo meninjau langsung perkembangan konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berupa terowongan (tunnel) dua yang ada di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (17/01/2022)

Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung berhasil diwujudkan. Peletakan batu pertama pada tahun 2016 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023, mewujudkan konektivitas di masa depan.

Kereta cepat yang dinamakan Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat), terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi. Kereta cepat generasi terbaru bertipe CR400AF electric multiple unit (EMU), KCJB disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia.

Setelah diresmikan, Kereta Cepat Whoosh menawarkan perjalanan tanpa biaya untuk masyarakat. 17 Oktober 2023, pengoperasian Kereta Cepat Whoosh secara komersial resmi dimulai, diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping di Beijing, RRT.

Kehadiran Kereta Cepat Whoosh diharap mampu memecahkan berbagai permasalahan nasional, salah satunya mengatasi kepadatan arus transportasi Jakarta-Bandung yang selama ini bergantung pada jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta- Padalarang) dan Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi). Kereta Cepat Whoosh menjadi jawaban untuk membangun konektivitas antar kota dan antar kawasan demi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional.

Kereta dengan kecepatan 350km/jam, jarak antara Jakarta-Bandung bisa ditempuh dengan waktu maksimal dari 46 menit, Jakarta - Bandung serasa terbang dengan whoosh.

KJCB menjadi salah satu transportasi massal ramah bagi difabel, bayi, lansia, dan ibu hamil. Fasilitas kursi penumpang khusus yang dilengkapi dengan tempat menyimpan kursi roda serta toilet yang didesain khusus bagi kemudahan mobilisasi kursi roda.

KCJB menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi TOD (Transit Oriented Development).

Proyek Kereta Cepat merupakan hal baru khususnya dari sisi teknologi, kecepatan, konstruksi dan juga model pembiayaan.

Pencapaian pada sektor transportasi yang sudah diraih saat ini, kelak dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang.

Rute Jakarta → Bandung 142,3 KM

Tipe Kerata Generasi CR400AF electric multiple unit (EMU)

Waktu Tempuh Max 46 Menit

Jam Operasional 05.30 - 22.00 WIB

Tegalluar

45,584 KM

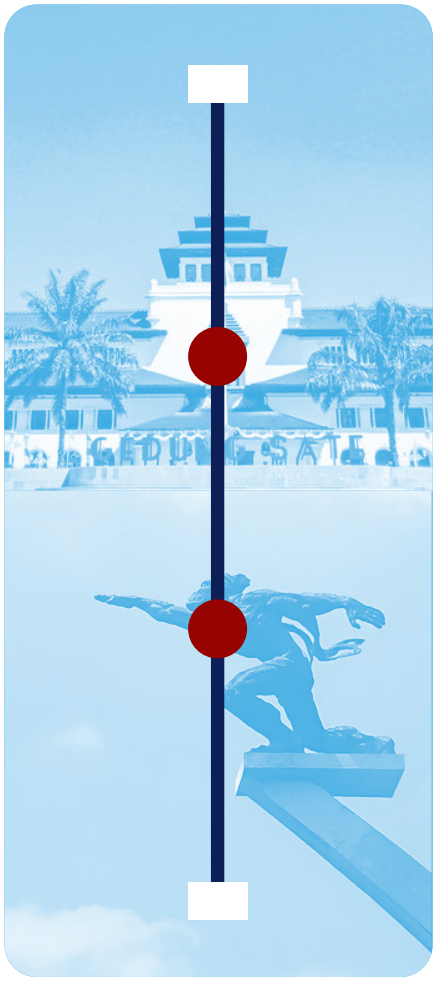
Padalarang

55,550 KM

Karawang

41,566 KM

Halim



GRAFIK JUMLAH PENUMPANG

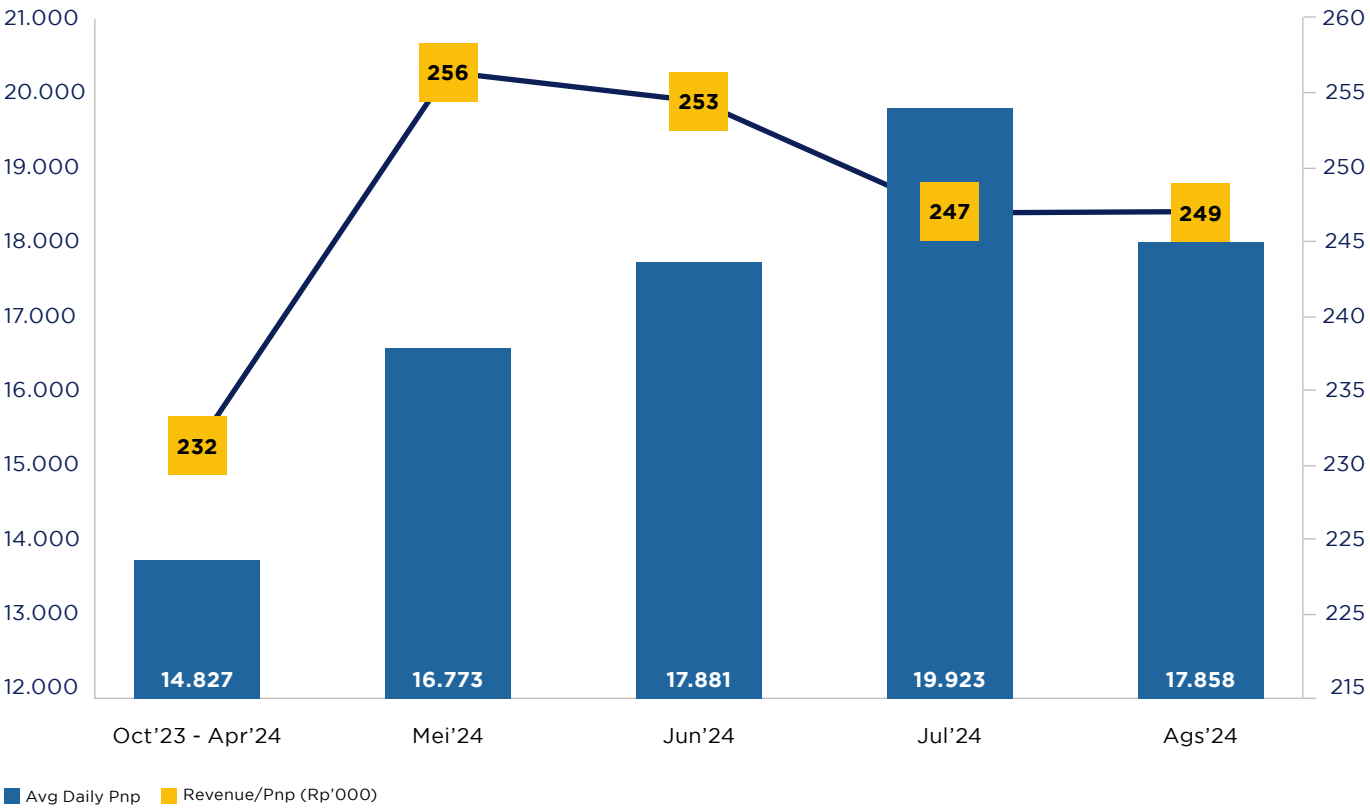








Foto : Dokumentasi KCIC

FINANSIAL

Achievement:

- 17% Interim Payment Ke-40 telah dibayarkan
- Drawdown ke-12 telah terealisasi sebesar USD 34 Million per September 2023.

Critical Points:

- Outstanding 2 CS yang perlu diselesaikan.

Points of Concern:

- Cost Overrun Pemenuhan 25% Pendanaan Cost Overrun telah dipenuhi oleh Pemegang Saham, selanjutnya 75% Pendanaan Cost Overrun akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pemegang Saham.
- Review Feasibility Study & Financial Model KCIC telah menyampaikan Dokumen Reviu FS ke Para Pemegang Saham, MoT dan juga Sponsor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
- Penyesuian Masa Konsesi telah dikirimkan proposal penyesuaian masa konsesi ke MoT, saat ini dalam proses Pembahasan draft amandemen konsesi dengan MoT dan juga LO dari Kejaksaan Agung untuk pengajuan Rp 0,- biaya konsesi, selanjutnya akan dilakukan review oleh BPKP dan ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023.
- Pinjaman Cost Overrun dari CDB Pemerintah Indonesia sedang dalam proses finalisasi skema Pinjaman CDB kepada KCIC melalui PT KAI.
- Interim Payment Ke-41 masih dalam tahap review CDJO.

KONSTRUKSI

Achievement:

- Akses DI Pandjaitan Progres pelaksanaan konstruksi sudah open traffic, proses konstruksi sudah selesai dilaksanakan.
- Akses Toll Stasiun Halim ruang lingkup pekerjaan WIKA sudah mencapai 100% dan ruang lingkup pekerjaan Jasa Marga sudah mencapai 100%.
- Jembatan Cibiru Hilir sudah open traffic per Agustus 2023. Pelaksanaan konstruksi sudah selesai dilaksanakan.
- Water Supply sudah beroperasi sejak Oktober 2023.
- Pekerjaan Konstruksi Stasiun
- Padalarang sudah mencapai 100%.

Critical Points:

- Memorandum of Agreement (MOA) Stasiun Padalarang terkait dengan harga VO Stasiun Padalarang sedang sirkuler tandatangan oleh KCIC, HSRCC dan CDJO.

Points of Concern:

- Pekerjaan Akses Stasiun & Depo agar dapat dimonitor secara ketat.
- Izin Operasi pengujian dan pengurusan dokumen perizinan ditargetkan paling akhir tahun 2023.

O&M Readiness

Achievement:

- Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Kementerian Perhubungan sudah mengirimkan surat terkait Pemenuhan Evaluasi dan Verifikasi Dokumen SMKP Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT. KCIC.
- Izin Operasi Sarana KCJB Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana KCJB sudah terbit. Izin Usaha Sarana sudah dilakukan pembayaran PNBP.
- Pengesahan Sistem dan Prosedur No. KP-DJKA 194 Tahun 2023 tentang Pemeriksa dan Perawatan Level 1 & 2 Sarana (EMU/CIT) sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Sertifikat Uji Pertama Sarana No. KP-DJKA 195 Tahun 2023 sudah diberikan untuk 4 trainset EMU oleh Kementerian Perhubungan.
- Training HSR batch 3 sedang diselenggarakan di PPI Madiun.

Critical Points:

- Uji Pertama Prasarana dalam tahap pengujian.
- O&M Readiness Budget, biaya Personnel Training disepakati untuk peserta training sejumlah 500 personel. Jumlah peserta yang harus mengikuti training sebanyak 600 personel.
- Kontrak OM Konsorsium proses negosiasi dengan pihak Operation and Maintenance Consortium (OMC).

Points of Concern:

- Sertifkasi personel TKA telah terbit 155 smartcard dari DJKA dan sedang proses pengajuan sebanyak 27 smartcard.

Whoosh Progress Report

2023

Cut off:
December 05th

4 Stations
1 Depot

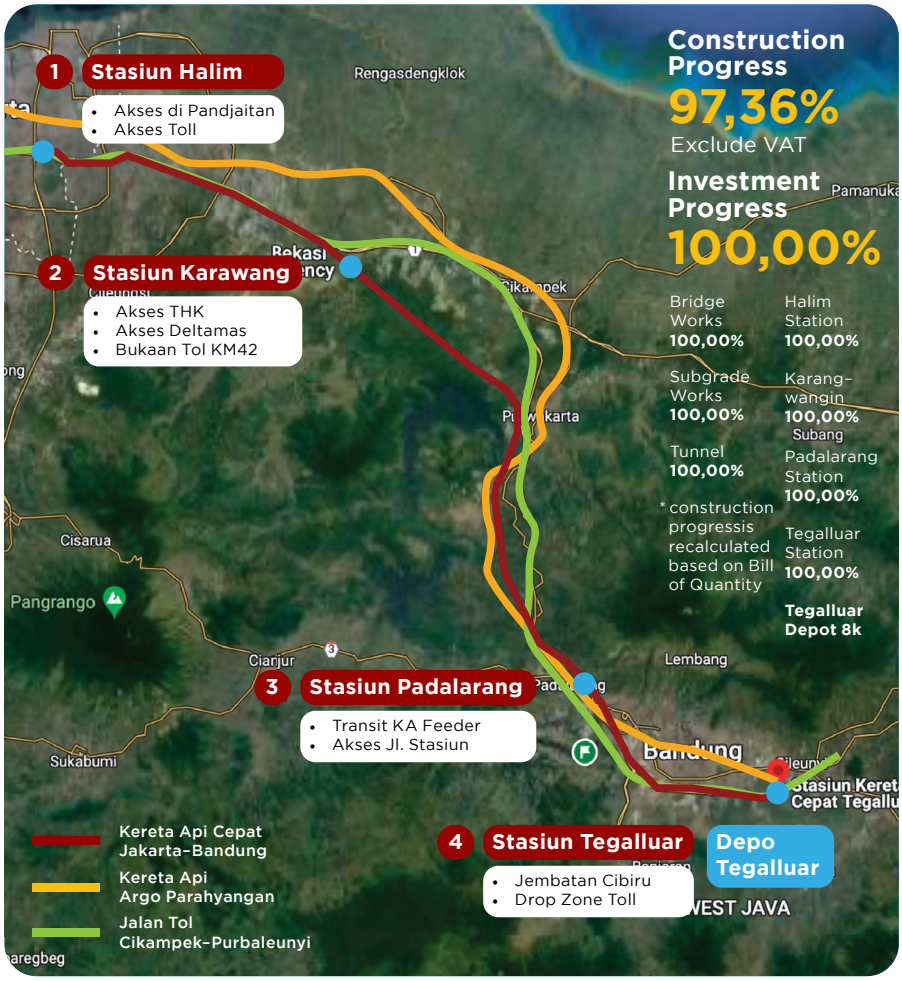
Total
142,3 km

***Remaining Works:**
1. Station Access
2. Relocation on Existing Infrastructure

Type of Structure

13	19,2km	23,58km	16,82km	82,7km
Tunnels	Cutting	Embankment	Tunnel	Elevated

No.	Station	Station Function	Remarks
1.	Halim	Origin and End Station	Elevated
2.	Karawang	Intermediate Station	At Grade
3.	Padalarang	Transit Station to BDG Central	At Grade
4.	Tegalluar	Interm Origin and End Stiuatio	At Grade



EMU

Technical Specifications

CR400AF

CRRQ QINGDAO SIFANG

Signalling
CTCS-3, CTCS-2 as backup

Travel Times
36-45 minutes

142,3 km
Double track

Traction Voltage
Single Phase
AC 25kV/50Hz

Speed
Up to 350km/h

Disaster Monitoring & Control
7 Earthquake Sensors
17 Wind Sensors
8 Rain Sensors
6 Overpass Sensors

CAPACITY
1 TRAINSET-8 CARS

First Class, Business Class, Premium Economy and Dining Car

First Class	:	18
Business Class	:	28
Premium Economy	:	555
passengers		601

Height
5,05 meters

Length
208,95 meters



Rail Gauge
1435 mm

Wujudkan Jabodebek **Tanpa Macet**

Light Rail Transit



LRT Jabodebek resmi beroperasi pada akhir Agustus 2023. Kehadiran LRT Jabodebek diharapkan dapat menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Terdapat 434 perjalanan LRT Jabodebek yang siap melayani penumpang setiap hari. Dimana kapasitas satu rangkaian LRT Jabodebek dapat menampung hingga 1.308 penumpang.

Total ada sebanyak 31 trainset (rangkaian kereta) akan disiapkan, dengan rincian guna keperluan operasional terdapat 27 trainset (rangkaian kereta), serta sebanyak 4 trainset (rangkaian kereta) akan digunakan sebagai cadangan. Setiap trainset (rangkaian kereta) LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

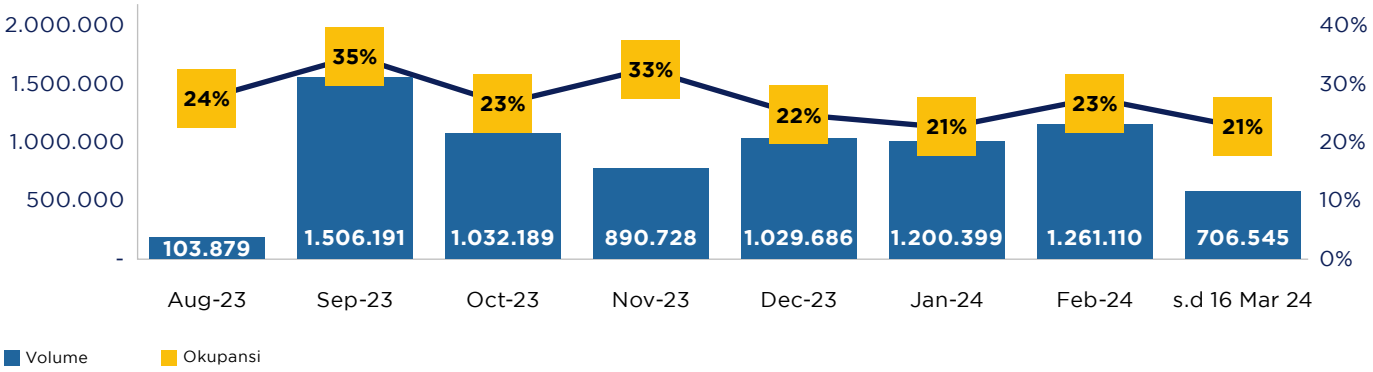
LRT Jabodebek melayani masyarakat di 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Stasiun-stasiun tersebut adalah Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.





Foto: Dokumentasi KAI

GRAFIK JUMLAH PENUMPANG





Dampak Ekonomi LRT Jakarta

Dampak Ekonomi Langsung

Total Penghematan biaya operasional kendaraan **US$ 1.831 Juta**

Total penghematan waktu **US$ 7.395 Juta**

Total pengurangan emisi **US$ 126 Juta**

Total pengurangan kecelakaan lalu lintas **US% 1.831 Juta**

Dampak Ekonomi Langsung

Peningkatan harga properti di sepanjang rute LRT

Peningkatan daya saing di Jakarta





Foto: Dokumentasi KAI



Foto: Dokumentasi KAI

Masa Depan Industri **Energi Hijau Indonesia**

Investasi Industri Hijau

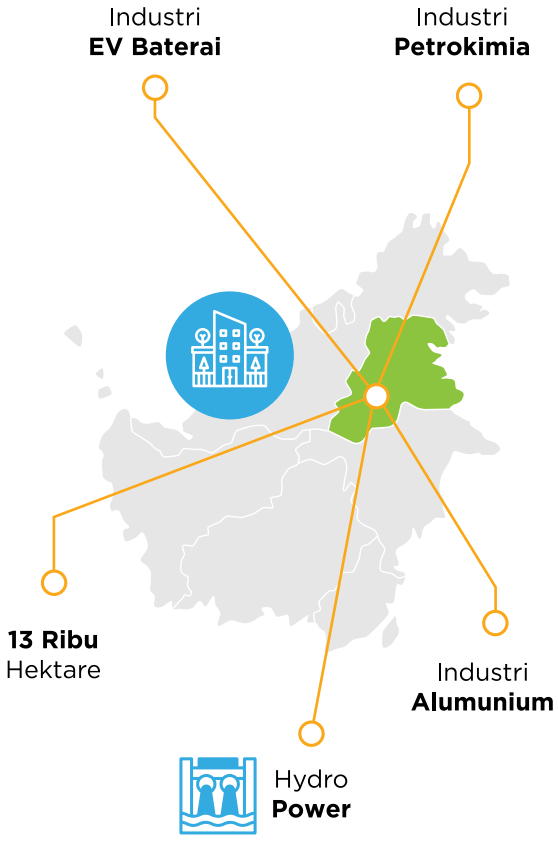
Siapa yang tak kenal dengan istilah Indonesia Sentris? Ide orisinil untuk mengubah arah pembangunan bukan hanya di Jawa. Ketimpangan dan kesenjangan diselesaikan dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan titik-titik ekonomi baru di luar Jawa.

Kebijakan Indonesia Sentris diwujudkan dalam bentuk peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan berusaha. Membangun dari pinggiran, Tol Laut, Tol Langit, Jembatan Udara, Pembangunan Desa, Pembangunan Perbatasan, Pembangunan di Kalimantan hanya sebagian bukti nyata Indonesia Sentris bukan sekedar jargon.

Sokongan ekonomi dari luar Jawa secara perlahan merangkak naik. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mendekati 50% di tahun 2022.

Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (green energy).

Kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13 ribu hektare yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai, pembangunan petrokimia (petrochemical), pembangunan industri alumunium. Yang semuanya didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara.





KIPI Tanah Kuning merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target luas pengembangan mencapai 30.000 hektare.

Investasi yang akan difasilitasi di kawasan industri ini antara lain pemurnian dan pengolahan mineral, pergudangan, properti, perdagangan, dan komersial.

Tahap awal, lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri ini seluas 10.100 Ha dengan pasokan listrik dari PLTA Mentarang Induk (Malinau) yang saat ini tengah tahap persiapan konstruksi oleh perusahaan konsorsium Indonesia dan Malaysia

PENTINGNYA KAWASAN INDUSTRI HIJAU

- Menghasilkan produk hijau berdaya saing tinggi, kecenderungan investor saat ini ingin berinvestasi di sektor hijau, dan aturan dari negara barat yang menseleksi produk tidak ramah lingkungan.

- Membantu Pemerintah Merealisasikan Bauran Energi (Target EBT 2025 sebesar 23%), kawasan Industri akan menggunakan bauran sumber energi hijau: PLTA (Hydro), Biomassa, PLTS.

- Menjadi Kawasan Industri yang menghasilkan Produk2 “Substitusi Impor” , sehingga akan menurunkan nilai Impor dan membantu kesehatan neraca dagang Indonesia, berbagai produk petrokimia seperti Bensin Euro V, Solar Euro V, Benzena, Paraksilena, isobutana, Propane. Serta produk-produk hilirisasi lain sehingga menurunkan angka kebutuhan impor.

- Membantu Pemerintah Merealisasikan Penurunan Emisi Karbon; 31,89% sendiri, dan 43,20% bantuan internasional pada 2030, menghasilkan produk yang penting bagi target penurunan emisi karbon: Renewable Fuels, New energy battery, electric truck, ternary cathode, smelter aluminium.

- Menjadi Kawasan Industri yang Akan Meningkatkan Nilai Tambah Berbagai SDA Mineral di Indonesia, menjadi motor penggerak hilirisasi berbagai mineral yang banyak terdapat di Indonesia seperti: Nikel, Bauksit, Tembaga, Timah.







Foto: dokumentasi BPMI Setpres/Laily Rachev

> **Sampai akhir 2023 sudah ada 10 perusahaan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pengelola KIHI**

Gubernur Kalimantan Utara
Zainal Arifin

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, antara lain industri smelter, baja, aluminium, energi terbarukan dan logistik. Pembangunan KIPI di Kabupaten Bulungan ini dimulai sejak 2021. Pembangunannya terus berjalan sejak Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama proyek tersebut pada 21 Desember 2021.

Salah satu industri unggulan yang akan dibangun di kawasan ini adalah pabrik petrokimia, yang diproyeksikan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 4x16 juta ton per tahun. Pembangunan infrastruktur dasar KIHI telah dimulai, antara lain jalan akses, jaringan listrik dan telekomunikasi.

Pembangunan pelabuhan internasional yang tidak terpisahkan dari pengembangan kawasan industri ini juga telah dimulai. Tahap pertama pelabuhan ini ditargetkan selesai pada 2025.

RI Punya Kawasan Industri Hijau

TERBESAR DI DUNIA



Lokasi	Bulungan Kalimantan Utara
Pemilik Tanah	Bulungan Kalimantan Utara
Luas Tanah	16.400 Hektare
Target Luas Tanah	30.000 Hektare
Tenaga Kerja yang dibutuhkan	100-300rb Pekerja

"Ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia, karena menyangkutkan lahan sampai detik ini 16.400 hektare dan targetnya 30 hektare"



Joko Widodo
Presiden RI

Posisi Strategis

Kalimantan Utara

Dilewati ALKI II, salah satu urat nadi perdagangan laut Indonesia



Kegiatan Utama
Pengelolaan Mineral, Kelapa Sawit, Kakao, Perikanan

Luas Area Industri
10.160 Ha Desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kalimantan Utara

Nilai investasi pembangunan
Rp. 269.624 Milyar

Proyeksi Tenaga Kerja
60.000 Orang

Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)

Landasan Hukum
PP No 3/2016

KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN INTERNASIONAL (KIPI) MANGKUPADI DAN TANAH KUNING

Peraturan Presiden No.56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Peraturan



Cluster 3

3.484,68 Ha

- Industri CPO dan turunannya
- Industri Olahan Kayu, Pengolahan dan pengawetan ikan, daging, dan buah.
- Industri Pangan, makanan, dan
- Penyulingan air.

Mangkupudi dan Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan - Kaltara

Lokasi

Luas

10.100 Ha

Cluster 2

2.981,37 Ha

- PLTU
- Industri produksi batu-bara dan minyak bumi
- Industri Bahan Galian Bukan Logam

Konsep KIP

- Penggerak pembangunan di Indonesia wilayah utara
- Pusat pembangunan di Provinsi Kaltara
- Pusat peningkatan nilai tambah sumber daya alam

Cluster 1

3.621,87 Ha

- Smelter 1
- Smelter 2
- Industri Elektronik
- Industri Kendaraan Bermotor
- Industri Alat Angkut

Hilirisasi
Mineral dan Batubara

Hilirisasi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, baik itu hasil tambang seperti mineral dan batubara, maupun dari sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas dapat melonjak signifikan.

Hilirisasi batubara merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Dan diperkuat dengan peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 124 PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas tambang batubara wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri. Kegiatan pengembangan tersebut antara lain pembuatan kokas (coking), pencairan Batubara (coal liquefaction), atau gasifikasi batubara, termasuk di antaranya gasifikasi batubara bawah tanah alias underground coal gasification.

Menurut catatan **ada 11 perusahaan** yang telah menyatakan komitmennya untuk melakukan hilirisasi batubara, beberapanya adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Peningkatan nilai tambah ini masih berat begitu bicara ke nilai tambah, maka seluruh proses nilai tambah yang ada di Indonesia, ada kelemahan besar, kita tidak punya teknologi, kita membayar (teknologi) terlalu mahal contoh perusahaan batubara dalam negeri seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan melakukan hilirisasi batubara namun terkendala karena teknologi yang dibawa oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yaitu Air Products mundur dari proyek hilirisasi kedua perusahaan tersebut. Ketidakberdayaan Indonesia untuk urusan hilirisasi batubara ini terlihat jelas ketika Air Products memutuskan angkat kaki dari proyek hilirisasi bersama PTBA dan Kaltim Prima Coal (KPC). Keterbatasan teknologi ini bukan hanya menghambat hilirisasi batubara saja melainkan komoditas lainnya.

Jenis Kegiatan Peningkatan nilai tambah batubara (PP 77/2014 dan Permen ESDM 25/2018)

1. Peningkatan Mutu Batubara (Coal Upgrading)
2. Pembuatan Briket Batubara (Coal Briquetting)
3. Pembuatan Kokas (Cokes Making)
4. Pencairan Batubara (Coal Liquefaction)
5. Gasifikasi Batubara (Coal Gasification)
6. Coal Slurry / Coal Water Mixture

Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menghitung potensi penghematan melalui gasifikasi abtubara untuk menggantikan kebutuhan LPG (Liquid Petroleum) Impor mencapai Rp 14 Triliun





Ada delapan teknologi hilirisasi batubara yang sedang dikembangkan, antara lain gasifikasi batubara, pencairan batubara, briket batubara, cokes making, coal upgrading, ekstraksi batubara, blending facility, hingga penerapan CCS dan CCUS.



Proyek entitas-entitas group PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terlibat dalam proyek hilirisasi batubara, yaitu proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi methanol sebesar 1,8 juta ton per tahun PT Kaltim Prima Coal yang bekerja dengan PT Kaltim Nusantara Coal, juga proyek coal to methanol PT Arutmin Indonesia yang direncanakan memiliki kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun.

BUMI terus mempersiapkan proyek hilirisasi batubara sambil menunggu beberapa peraturan terkait antara lain pengenaan tarif PNBP batubara 0%, pengaturan harga jual batubara untuk hilirisasi, Pembangunan PLTU untuk proyek hilirisasi, dan lain-lain.

Demikian pula dengan mineral, seperti tembaga, nikel, emas, timah, bauksit dan alumunium, yang merupakan bahan baku industri-industri berat untuk lebih dioptimalkan pemanfaatannya dalam menghasilkan devisa yang besar. Misalnya untuk nikel, dari produk ini sudah didapat devisa sebesar USD10 miliar.

Kebijakan hilirisasi produk-produk pertambangan adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2022 mendatang ada 52 unit smelter yang beroperasi, terdiri dari smelter nikel sebanyak 29 buah, 9 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, serta 4 smelter seng dan timbal.

Beberapa kegiatan diplomasi dengan melakukan kerja sama internasional dalam sektor pertambangan, diantara yang sedang berlangsung tahun 2024 yaitu::

1. Critical Minerals Agreement US

Perjanjian yang memungkinkan Indonesia mempertahankan akses pasar Amerika Serikat (AS) meskipun Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) diterapkan.

Perkembangan Terkini:
Diskusi sedang berlangsung; beberapa Senator AS menyuarakan ketidaksetujuan karena standar ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) Indonesia di sektor nikel dan industri pertambangan secara keseluruhan.

2. MoU-Indonesia-AustraliaElectric Vehicle Collaboration

Membangun mekanisme bilateral untuk memajukan kerja sama dan kolaborasi dalam ekosistem dan infrastruktur baterai kendaraan listrik.

Perkembangan Terkini:
Diskusi mengenai rencana kerja telah dimulai; Australia telah menjanjikan AUD 2 juta untuk penelitian dan pemetaan rantai pasokan.

3. Indonesia-EU CEPA

Negosiasi untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi Indonesia-Eropa, mencakup barang, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, dan keberlanjutan.

Perkembangan Terkini:
Indonesia, melalui kelompok kerja Manajemen Sumber Daya Ekonomi (ERM), sedang meninjau pembatasan impor barang modal industri berbasis nikel untuk mendukung industri dalam negeri. Dalam pembicaraan terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merekomendasikan pelonggaran pembatasan Kode HS untuk produk-produk ini.

4. Indonesia-Canada CEPA

Negosiasi perdagangan bilateral untuk meningkatkan hubungan ekonomi, akses pasar, dan investasi lintas sektor.

Perkembangan Terkini:
CMD (Dialog Mineral Kritis) sedang berlangsung: dialog Indonesia-Kanada tentang mineral kritis, termasuk nikel. Indonesia memberikan masukan non-paper tentang ekonomi, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, pengembangan industri, dan kerja sama ESG.

5. Minerals Security Partnership (MSP)

Kolaborasi 14 negara dan Uni Eropa untuk mendorong investasi publik dan swasta dalam rantai pasokan mineral kritis yang bertanggung jawab secara global.

Perkembangan Terkini:
Amerika Serikat telah mendekati Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Keamanan Mineral (MSP). Komunikasi antara kedua negara mengenai kemitraan ini masih berlangsung.

6. The Panel on Critical Energy Transition Minerals (CETM)

CETM merupakan kelompok yang dibentuk oleh PBB yang bertugas mengembangkan prinsip-prinsip sukarela global untuk memastikan praktik yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan dalam rantai nilai mineral kritis untuk transisi energi terbarukan.

Perkembangan Terkini:
Pertemuan ketiga diadakan di Nairobi pada 20-21 Agustus 2024, dengan fokus pada finalisasi dokumen hasil yang berisi prinsip-prinsip panduan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk rantai nilai mineral yang bertanggung jawab dan adil guna mendukung transisi energi global.

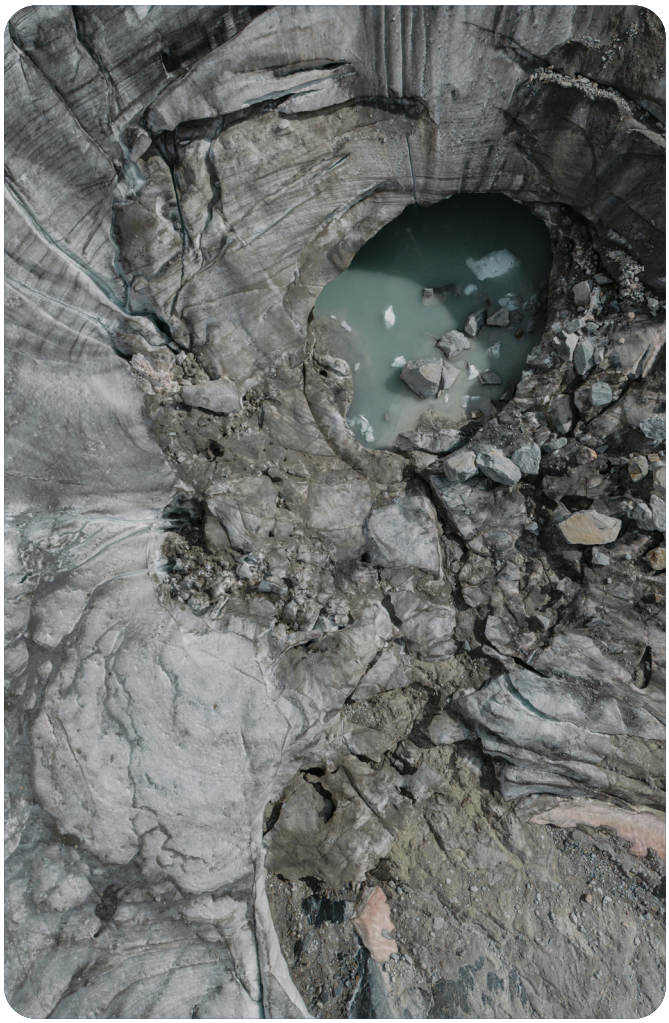
7. Forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

Inisiatif ekonomi regional untuk mempromosikan perdagangan, ekonomi hijau, dan ekonomi berkelanjutan.

Perkembangan Terkini:
Indonesia berencana mendaftarkan nikel dan turunannya sebagai Sektor Kritis dan Barang Utama (CSKG) dalam proposal mereka ke forum tersebut. Indonesia juga bekerja untuk bergabung dengan dewan rantai pasokan forum, dengan fokus pada kerja sama dan regulasi untuk mendukung rantai pasokan nikel Indonesia.

ESG merupakan keharusan yang mesti diterapkan pada proyek hilirisasi nikel menjadi mobil listrik. Dimana produk dari perusahaan dengan skor ESG yang tinggi mudah diterima di pasar global.

Pemerintah secara aktif mempromosikan penerapan kriteria keberlanjutan di antara perusahaan pertambangan. Kemenko Marves melalui Asdep Pertambangan, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2022 telah mengadakan sosialisasi terkait pentingnya ESG di dunia pertambangan dengan mengundang IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) sebagai pembicara.

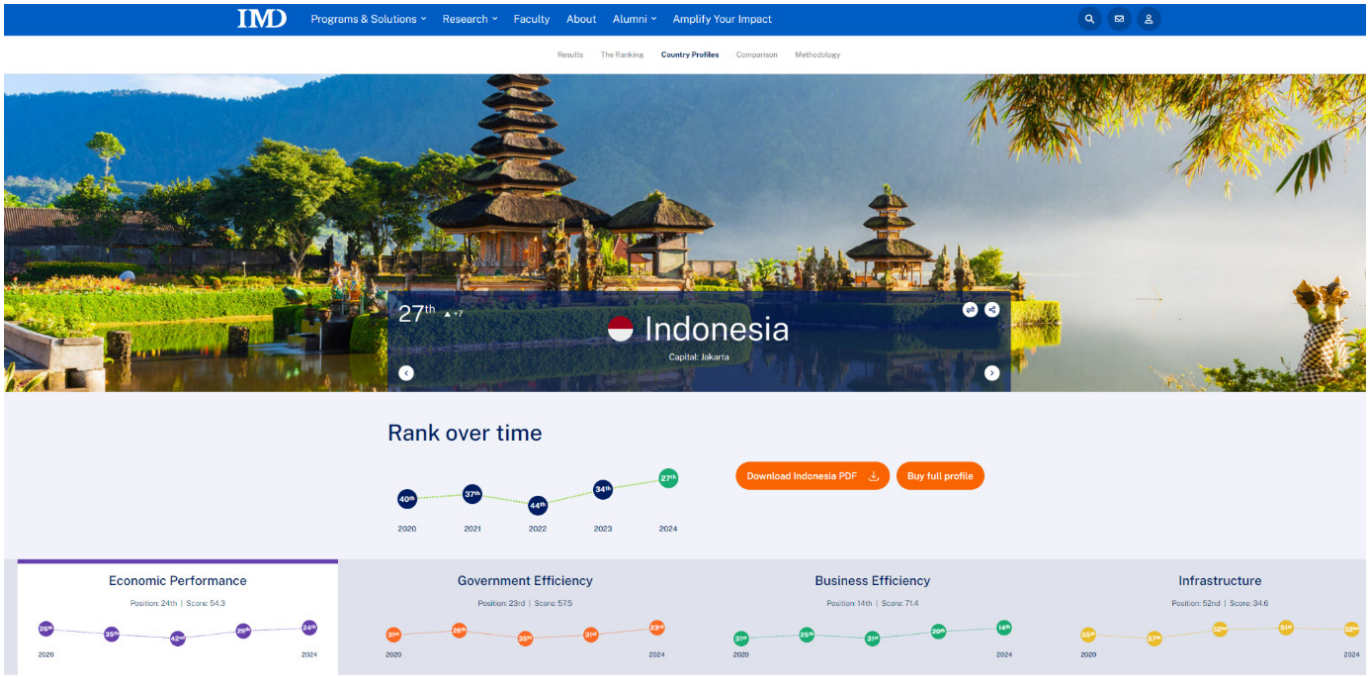




Perbaikan Iklim **Investasi dan Realisasi Investasi 2020-2024**

Selama kurun 5 tahun terakhir 2019-2024, koordinasi perbaikan iklim investasi dicapai melalui pengawalan implementasi Undang-undang Cipta Kerja serta pengembangan sistem perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terus ditingkatkan integrasinya dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di daerah. Penanganan Pandemi Covid-19 yang baik turut menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia.

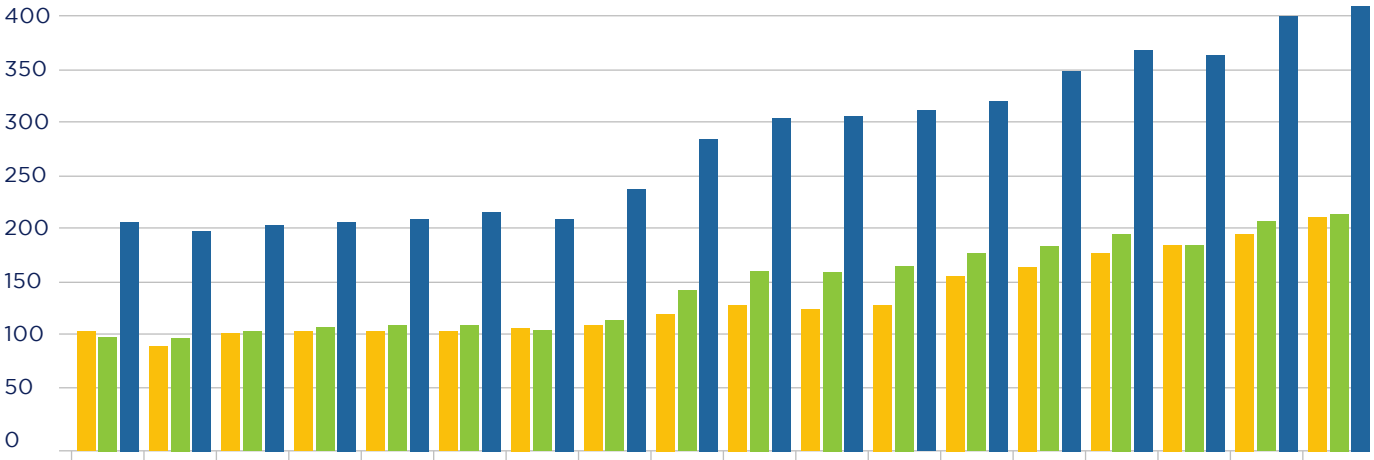
Buah perbaikan iklim investasi ini ditunjukkan dari rangking Indonesia pada IMD World Competitiveness Ranking yang terus meningkat yaitu rangking 40 pada tahun 2020 dan rangking 2024 pada tahun 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada aspek Government Efficiency yang meningkat dari rangking 31 ke rangking 23, serta aspek Business Efficiency yang meningkat dari rangking 31 ke rangking 14. Ke depan, perbaikan efisiensi sektor pemerintahan dan pelayanan publik akan terus dilakukan melalui keterpaduan layanan digital yang telah diinisiasi dengan pembentukan Government Technology (INA Digital).



Sumber: IMD - International Institute for Management Development

Perbaikan iklim investasi sejalan dengan pertumbuhan realisasi investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, total realisasi investasi terus meningkat dari 826,3 triliun pada tahun 2020 menjadi 1.455,8 triliun di tahun 2023. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tumbuh dari 413,5 triliun di 2020 menjadi 504,3 triliun pada 2023, sementara investasi PMA (Penanaman Modal Asing) meningkat dari 412,8 triliun menjadi 951,5 triliun pada periode yang sama. Pada pertengahan 2024, tren ini berlanjut dengan total investasi mencapai 829,5 triliun di dua triwulan pertama saja.

Perkembangan Realisasi: 2020- Juni 2024



	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	2020				2021				2022				2023				2024	
PMDN	112.7	94.3	102.9	103.6	108.8	106.2	113.5	119.3	135.2	139.0	138.9	139.6	151.9	163.5	178.2	181.4	197.1	211.1
PMA	98.0	97.6	106.1	111.1	111.7	116.8	103.2	122.3	147.2	163.2	168.9	175.2	177.0	186.3	196.2	181.4	204.4	217.3
Total		210.7	191.9	209.0	214.7	219.7	223.0	216.7	241.6	282.4	302.2	307.8	314.8	328.9	349.8	374.4	365.8	401.5	428.4

Keterangan: Dalam Rp Triliun

Trend Negara 2020- Juni 2024

2020	2021	2022	2023	JAN-JUN 2024
SINGAPURA US$ 9,8 M - (34,1%)	**SINGAPURA** US$ 9,4 M - (30,2%)	**SINGAPURA** US$ 13,3 M - (29,1%)	**SINGAPURA** US$ 15,4 M - (30,5%)	**SINGAPURA** US$ 8,9 M - (31,5%)
R.R. TIONGKOK US$ 4,8 M - (16,7%)	**HONGKONG, RRT** US$ 4,6 M - (14,8%)	**R.R. TIONGKOK** US$ 8,2 M - (18,0%)	**R.R. TIONGKOK** US$ 7,4 M - (14,8%)	**R.R. TIONGKOK** US$ 9,8 M - (34,1%)
HONGKONG, RRT US$ 3,5 M - (12,1%)	**R.R. TIONGKOK** US$ 3,2 M - (10,2%)	**HONGKONG, RRT** US$ 5,5 M - (12,1%)	**HONGKONG, RRT** US$ 6,5 M - (12,9%)	**HONGKONG, RRT** US$ 3,8 M - (13,6%)
JEPANG US$ 2,6 M - (9,1%)	**AMERIKA SERIKAT** US$ 2,5 M - (8,2%)	**JEPANG** US$ 3,6 M - (7,8%)	**JEPANG** US$ 4,6 M - (9,2%)	**AMERIKA SERIKAT** US$ 2,0 M - (7,1%)
KOREA SELATAN US$ 1,8 M - (6,3%)	**JEPANG** US$ 2,3 M - (7,3%)	**MALAYSIA** US$ 3,3 M - (7,3%)	**MALAYSIA** US$ 9,8 M - (34,1%)	**JEPANG** US$ 1,8 M - (6,4%)

Sumber: Kementerian Investasi BKPM

Penyusunan **Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim**

Pemerintah telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai negara dengan laut dua pertiga lebih luas daripada luas daratan serta posisi negara maritim besar yang berdaulat dan makmur dengan memberdayakan potensi ekonomi maritim adalah impian yang harus dicapai bersama. Salah satu indikator dalam mencapai Poros Maritim Dunia tersebut adalah bagaimana Indonesia memaksimalkan sektor ekonomi maritim. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambanganbekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim sebagai indikator pembangunan maritim.

Penyusunan PDB Maritim mulai tahun 2021 mengacu pada standar internasional UN OCEAN Account sehingga penghitungannya dapat diperbandingkan dengan negara-negara lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim terdiri dari 12 klaster diantaranya adalah Perikanan dan Budidaya Maritim, Sumber Daya Energi Maritim hingga Perdagangan Maritim. Klaster-klaster tersebut terbentuk dari 374 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Dari setiap KBLI ini terdapat informasi nilai tambah ekonomi yang dihitung dari jumlah produksi selisih harga. Data-data ini dikumpulkan secara administratif pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait melalui workshop, focus group discussion, kunjungan lapangan, maupun bersurat resmi langsung.



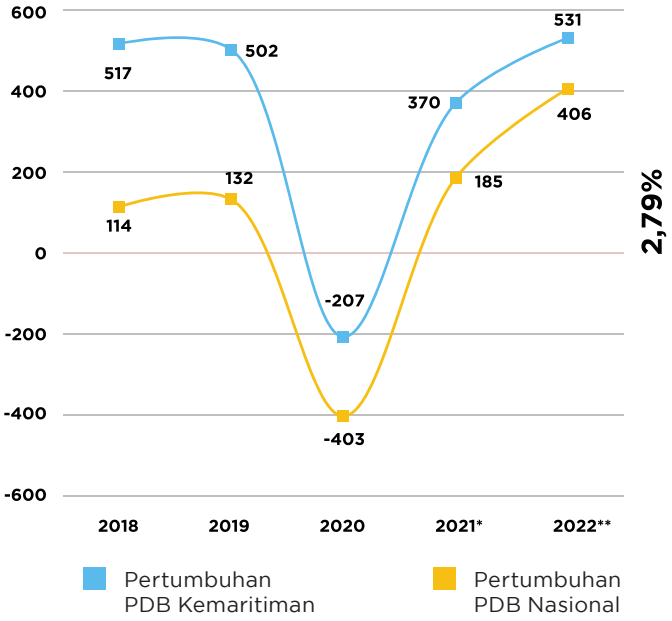




Hasil penghitungan bersama BPS menunjukkan kontribusi PDB Maritim di Indonesia masih relatif kecil yaitu sebesar 7,92% terhadap PDB Nasional pada tahun 2022. Investasi di klaster-klaster strategis seperti Industri Perkapalan, Industri Pengolahan Maritim dan Energi Baru Terbarukan Maritim perlu menjadi fokus kedepannya untuk meningkatkan nilai kontribusi PDB Maritim Indonesia ke depannya.

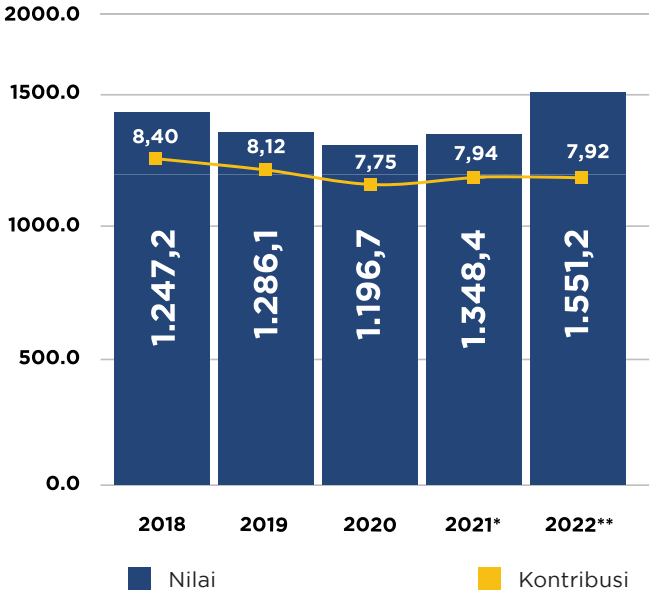
PDB KEMARITIMAN

Share PDB Kemaritiman Terhadap PDB Nasional Tahun 2022



*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

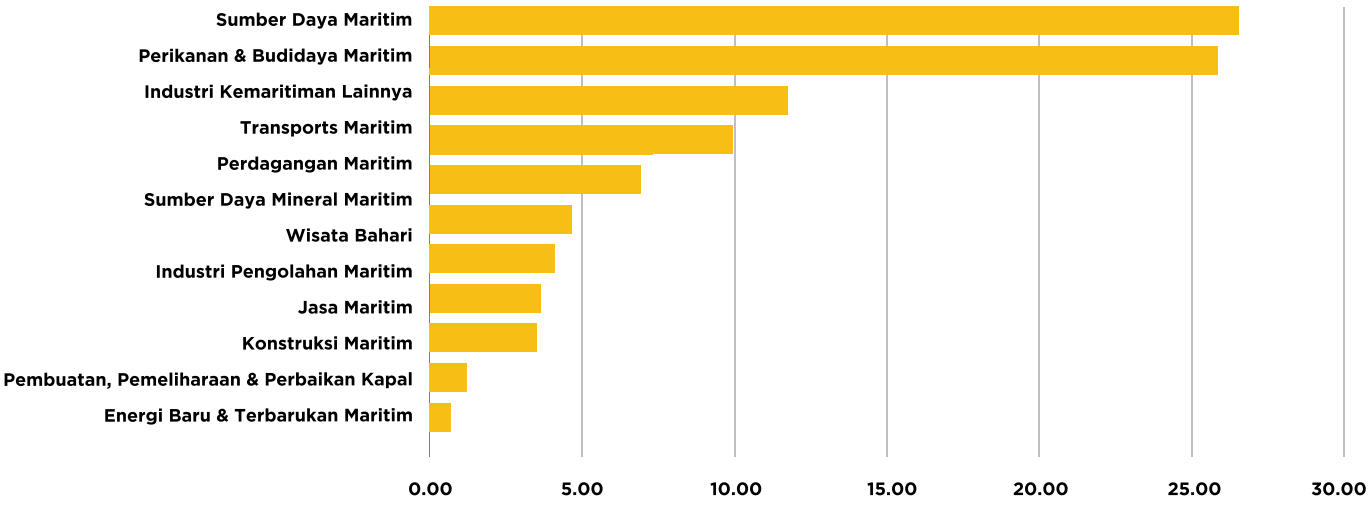
Kontribusi PDB Kemaritiman 2017 - 2022



*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Nilai PDB Kemaritiman (Triliun Rp) & Kontribusi PDB Kemaritiman (%) Tahun 2018-2022 sebesar 7,92%. Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan PDB Kemaritiman mengikuti tren pertumbuhan PDB Nasional.

Kontribusi masing-masing Klaster Penunjang Penghitungan PDB Kemaritiman Tahun 2022



Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Layanan Masyarakat Melalui **Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital (GovTech)**



Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas Kunjungi area kerja INA DIGITAL dan tatap muka dengan talenta INA Digital, di Kantor Peruri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat (07/06/2024)

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan percepatan transformasi digital sebagai bagian dari upaya menciptakan keterpaduan layanan digital nasional. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas, yang mengutamakan integrasi dan interoperabilitas antar sistem digital di berbagai kementerian dan lembaga.

Tantangan utama transformasi digital yang mesti dihadapi adalah inefisiensi birokrasi akibat adanya lebih dari 24.000 aplikasi di lingkup kementerian dan lembaga, termasuk 1.222 aplikasi di hanya 7 (tujuh) kementerian/lembaga. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di masyarakat, pemborosan anggaran, serta menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Penyederhanaan dan integrasi platform aplikasi pemerintahan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi layanan, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, transparan, dan memberikan layanan publik yang berkualitas serta terpercaya.



Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan dalam SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam transformasi digital, yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet 9 Januari 2024, di mana diinstruksikan integrasi layanan SPBE Prioritas di 9 kementerian/lembaga melalui penerapan Digital ID sebagai Single Sign On (SSO).



Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan satu kali pengisian data untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan, sehingga menghilangkan praktik pengumpulan berkas fisik seperti fotokopi KTP dan pengisian data berulang kali. Strategi ini menjadi langkah penting dalam memajukan keterpaduan digital pemerintah, memastikan layanan publik lebih mudah diakses, efisien, dan terintegrasi secara nasional.

Pada September 2024, INA DIGITAL sebagai Government Technology Indonesia telah berhasil melakukan peluncuran terbatas (alpha release) untuk tiga aplikasi penting, yaitu INAku, INAPas dan INAGOV.

INAku berfungsi sebagai portal utama untuk aplikasi-aplikasi pemerintahan, memungkinkan akses ke berbagai layanan dalam satu platform. INAPas adalah aplikasi Digital ID yang terintegrasi dengan sistem nasional, memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan digital dengan satu identitas tunggal. Sementara INAGov merupakan portal administrasi pemerintahan yang memberikan ASN akses ke berbagai layanan administrasi secara efisien.

09

TUGAS KHUSUS/ TAMBAHAN



Dari Bali **untuk Dunia**

Kesuksesan Penyelenggaraan G20 2022 di Indonesia

Indonesia menjadi fokus dunia. Sukses menyuguhkan siapa Indonesia kepada negara-negara besar pada saat pandemi belum berakhir, membuktikan kekuatan diplomasi kita yang tajam. Peran yang dimainkan sangat penting: memulihkan perekonomian dunia sekaligus mendesain arsitektur kesehatanglobal.

Menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang ada di Group of Twenty, Indonesia memikul harapan negara-negara berkembang lainnya akan sebuah kesetaraan. Negara maju harus membantu negara berkembang yang memiliki keterbatasan. Tanggung jawab berat ini diterjemahkan dalam Recover Together, Recover Stronger. Penyelenggaraan G20 Indonesia 2022 menghasilkan join leader declaration yang membuat isu dan tantangan yang dihadapi dunia secara umum dan oleh anggota G20 secara khusus.







Sumber Foto

- G20 : Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
- Jamuan Makan : Biro-pres, Media dan Informasi Setpres
- G20 Mangrove : ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Sigid Kurniawan



Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers terkait kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (12/11/2022).
Foto: ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat/wsj.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberi sambutan dalam seminar internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (9/11/2022).
Foto: AP/Achmad Ibrahim



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyambut kedatangan Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman di terminal kedatangan VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali, Rabu (16/11/2022).
Foto: AP/Achmad Ibrahim

Selain itu Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap deliverables G20 dan memberikan arahan untuk segera menindaklanjuti kepada Kementerian Lembaga yang menangani. Tercatat 444 kesepakatan yang terdiri dari: 41 kesepakatan multilateral diantara anggota G20, 180 kesepakatan bilateral dan 32 implementasi Bali Declaration.

Perhelatan besar di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Orkestrasi agenda dimainkan dengan harmonis, sehingga pembahasan G20 berdampak positif dalam pemulihan ekonomi dalam negeri.

KTT G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022, dinilai sukses dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Pasalnya, KTT G20 berhasil mengadopsi dan mengesahkan Deklarasi Pimpinan G20 (G20 Bali Leaders' Declaration).

Selain deklarasi, Presidensi G20 juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Misalnya, pembangunan PLTS, baterai EV, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, restorasi terumbu karang, renewable energy, infrastruktur biru, dan sebagainya. Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang menjadi salah satu poros negara berkembang dalam forum G20 tersebut.

Sebagai negara maritim Indonesia berinisiatif untuk mengusulkan Ocean20 untuk masuk sebagai agenda G20. Dalam pelaksanaan G20 Brazil 2024, Ocean20 ditetapkan sebagai salah satu Engagement Group G20.

Indonesia disebut mampu mendorong solusi berbagai permasalahan, bahkan di tengah krisis dan tantangan global, juga konflik antara Rusia dan Ukraina.

Dari Bali mengajak dunia untuk pulih bersama, untuk bangkit lebih kuat dengan bergotong royong serta membawa perdamaian bagi masyarakat dunia.

*Ocean*20: **Forum Kelautan Global**

Lautan tidak mengenal batas negara. Ia adalah ekosistem luas dan saling terhubung yang melampaui batas-batas wilayah nasional, menjangkau setiap sudut dunia. Namun, meskipun lautan tidak terbatas, ancaman terhadapnya semakin nyata, dan konsekuensi dari ketidakpedulian kita meluas jauh melampaui garis pantai. Kenaikan permukaan laut, polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan degradasi keanekaragaman hayati laut adalah masalah yang tidak mengenal batas nasional. Ini adalah tantangan global yang memerlukan solusi global. Tanggung jawab untuk melindungi dan merawat lautan kita bukan hanya milik satu negara saja; ini adalah tugas bersama yang membutuhkan upaya kolaboratif dari seluruh komunitas internasional.



Dalam beberapa tahun terakhir, lautan telah menjadi perhatian utama dalam diskusi global tentang pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut demi kelangsungan hidup umat manusia dan keberlanjutan ekonomi global semakin meningkat. Menyadari hal ini, Indonesia menginisiasi Ocean20, sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk membawa isu kelautan ke panggung utama forum internasional G20.

Dalam konteks ini, Ocean20 muncul sebagai inisiatif global yang memainkan peran penting dalam membawa isu-isu kelautan ke meja diskusi utama forum internasional G20. Sejak peluncurannya pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Ocean20 telah menjadi platform yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, LSM, ilmuwan, pemimpin industri, dan masyarakat sipil—yang bersatu dengan tujuan yang sama: memastikan kesehatan dan keberlanjutan lautan kita dalam jangka panjang. Ocean20 tidak hanya menyoroti pentingnya perlindungan lautan tetapi juga memfasilitasi kerja sama internasional untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.



2022

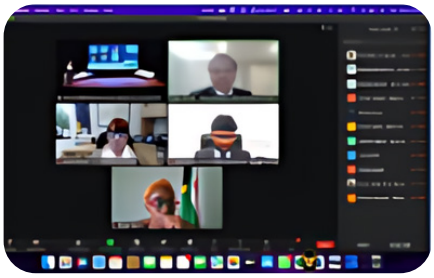
Ocean20 diluncurkan pertama kali pada 14 November 2022 di Bali, Indonesia, bertepatan dengan Presidensi G20 Indonesia. Inisiatif ini dihadirkan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi lautan. Mengingat lautan tidak mengenal batas negara, solusi terhadap masalah kelautan membutuhkan kolaborasi internasional yang kuat dan terkoordinasi. Setelah peluncurannya di Indonesia, Ocean20 terus berlanjut dan menjadi bagian integral dari agenda G20.



2023

Ocean20 Dialogue dilaksanakan pada Presidensi G20 India pada tanggal 21 Mei 2023 di Mumbai, back to back dengan Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG).

Indonesia menginisiasi dan melaksanakan Trilateral Meeting dengan India dan Brazil terkait rencana pembentukan Ocean20 sebagai agenda tetap pada Presidensi G20, dengan tujuan untuk menciptakan platform khusus yang membahas isu kelautan secara mendalam dan meluas, di mana forum G20, yang mewakili 80% PDB dunia dan 75% perdagangan global, menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan yang berdampak luas.





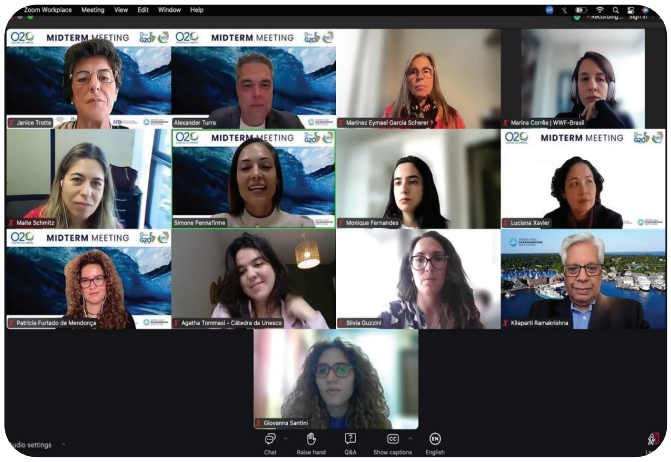
2024

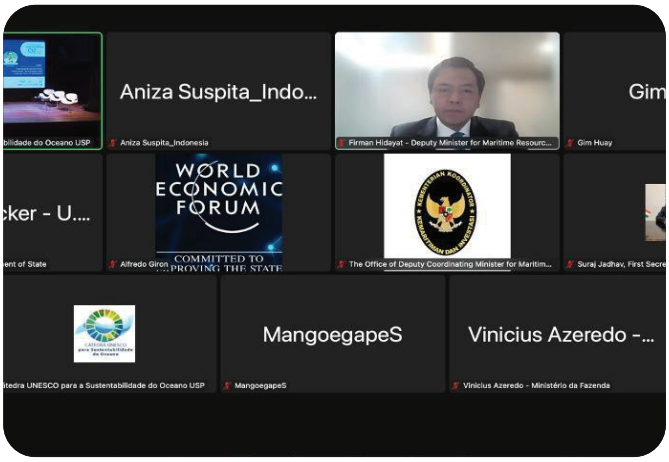
Pada 5 Januari 2024 ditetap Ocean20 sebagai salah satu New Engagement Group G20 Brazil, dimana ini merupakan pencapaian yang baik sebagaipengakuan i pentingnya agenda kelautan dalam diskusi global

Brasil, sebagai tuan rumah, telah menyelenggarakan Inception Meeting of the Oceans20 Engagement Group pada 15 Maret 2024 di Rio de Janeiro. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Marves, sebagai salah satu pembicara utama.

Kemenko Marves menginisiasi dan melaksanakan Global dan National Platform untuk Sustainable Ocean dan Blue Economy pada tanggal 19 Agustus 2024 bersama dengan Konservasi Indonesia dan Conservation International Brazil untuk menyatukan Multi-stakeholders, guna berkolaborasi dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya laut. Melalui platform ini, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, sekaligus mendorong implementasi praktik-praktik terbaik dalam menjaga ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan memastikan keberlanjutan ekonomi berbasis kelautan untuk generasi mendatang.


d to Ocean 20
Carbo


MIDTERM MEETING


Aniza Suspita_Indo...
WORLD ECONOMIC FORUM
MangoegapeS
Vinicius Azeredo -...


Ocean 20 Dialogue
Mumbai, Maharashtra
21st May, 2023
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE
G20
भारत 2023 INDIA





Dalam pelaksanaannya, Ocean20 yang masih baru ini tentunya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kebijakan dan kepentingan antara beberapa pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Koordinasi antar lembaga dan negara menjadi tantangan tersendiri, mengingat beberapa pemangku kepentingan memiliki agenda dan prioritas yang berbeda. Keterbatasan dalam pengelolaan koordinasi ini dapat menghambat efektifitas inisiatif dan memperlambat pencapaian tujuan bersama dalam menyelesaikan isu kelautan global, misalnya terkait isu konservasi dan limbah laut. Namun, melalui upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang solid, Ocean20 berpotensi menjadi forum global yang efektif dalam merumuskan kebijakan kelautan yang berkelanjutan.

Agar Ocean20 dapat mencapai tujuannya, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas lembaga serta negara. Pembentukan tim koordinasi khusus dan platform komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan memastikan penyelarasan kebijakan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Ocean20 perlu dilakukan secara rutin, guna memastikan agar inisiatif ini berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan dampak yang nyata.

Indonesia International Sustainability Forum (ISF): **Mempelopori Solusi Pertumbuhan Berkelanjutan Global**

Indonesia menunjukan komitmen kuat nya dalam transisi energi dan energi berkelanjutan dengan terus mendorong solusi krisis iklim dunia melalui Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024). Sebagai salah satu perhelatan terbesar global mengenai isu-isu keberlanjutan di Asia Pasifik, ISF sukses menghadirkan lebih dari 11,000 peserta dari 53 negara dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Jakarta.

Besarnya animo peserta pada gelaran perdana ISF 2024 menandakan adanya pergeseran positif di kawasan untuk mendukung agenda keberlanjutan. Tokoh-tokoh dunia seperti **Wakil Perdana Menteri Malaysia, Menteri Senior Singapura, Menteri Kedua untuk Perdanganan dan Industri Singapura, dan CEO global lainnya** yang turut hadir menyampaikan perspektif mereka terkait tantangan terbesar krisis iklim, serta praktik terbaik yang telah dilakukan berbagai negara lain. Selain dialog internasional, ISF pun sukses memfasilitasi **kemitraan sektor publik dan swasta yang berdampak melalui penandatanganan 12 Nota Kesepahaman (MoU)** dan telah sukses dilaksanakan **7 High Level Dialogue (HLD)** pada pagelaran tahun ini.

Kolaborasi internasional dapat menjadi kunci untuk meruntuhkan hambatan bagi dunia dalam merangkul pertumbuhan keberlanjutan. Khususnya hambatan tingginya pembiayaan, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia.



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan sambutan pada Pembukaan Penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum 2024 (05/09/2024)



Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memberikan sambutan pada Pembukaan Penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum 2024 (05/09/2024)



Indonesia Sustainability Forum Plenary Session, Jakarta (16/09/2023)



Buah Manis **Kolaborasi dan Kedisiplinan**

Indonesia Mengatasi Pandemi COVID-19

Tak selamanya sebuah keterpaksaan berbuah pahit. Demikian pula ketika pandemi melanda. Indonesia memetik pelajaran besar dari petaka wabah besar tersebut. Pandemi membuat efek daya paksa pada semua elemen.

Sejak itu, telah lebih dari 6,7 juta kasus terjadi di Indonesia, dengan jumlah kematian mencapai 160 ribu orang. Hingga pada akhirnya, untuk menutup tahun 2022, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan PPKM. Penghentian ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, serta kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengaturan kerja secara fleksibel atau flexible working arrangement (FWA). Dalam rapat, lazim terlihat kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga swasta melakukan rapat secara virtual. Begitu juga sektor pendidikan, guru dan siswa harus menggunakan teknologi digital untuk tetap bisa belajar mengajar. Pandemi COVID-19 juga mengubah cara kerja. Semua beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Penggunakan teknologi digital memangkas waktu dan biaya. Budaya kerja baru membuat kita belajar dari sebuah keterpaksaan bernama Corona Virus. Saat ini, pemulihan ekonomi pun berjalan cepat. Indonesia pun menjadi salah satu ekonomi dengan kinerja terbaik di seluruh dunia pasca pandemi. “Relaksasi dan pencabutan PPKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat.



foto:instagram Luhut B. Pandjaitan

Khusus di Jawa–Bali sebagai episentrum Covid-19, capaian vaksinasi dosis kedua juga telah mencapai 79 persen dari sasaran atau hampir 108 juta dosis sampai dengan pertengahan Maret 2023. Selanjutnya, vaksin booster ketiga masih perlu untuk diakselerasi dengan capaian 33,7% dari sasaran.



Sumber: KSP, 2023

Pemulihan Ekonomi Nasional



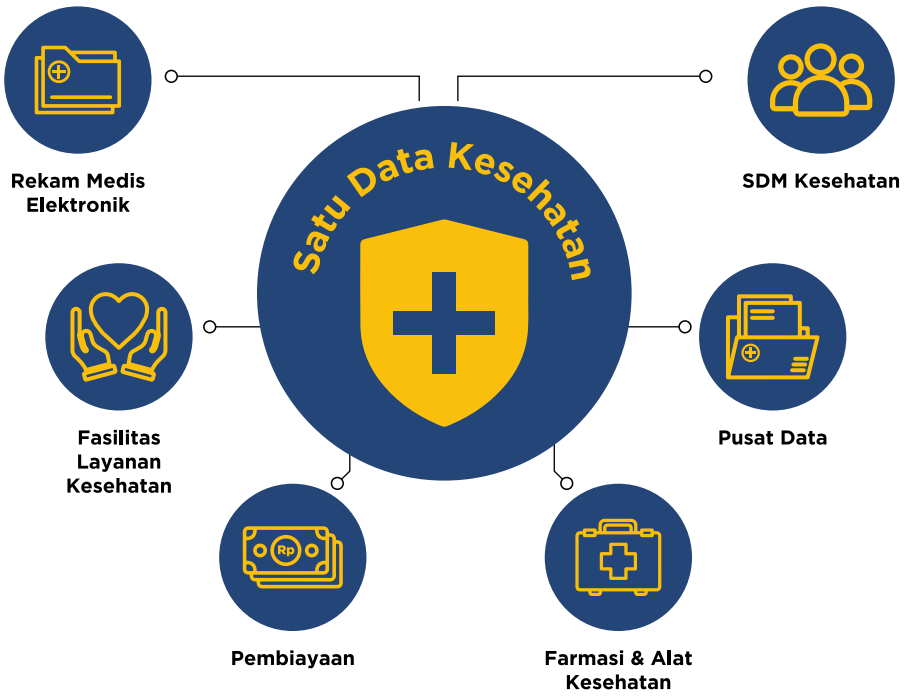
Sumber: KSP, 2023

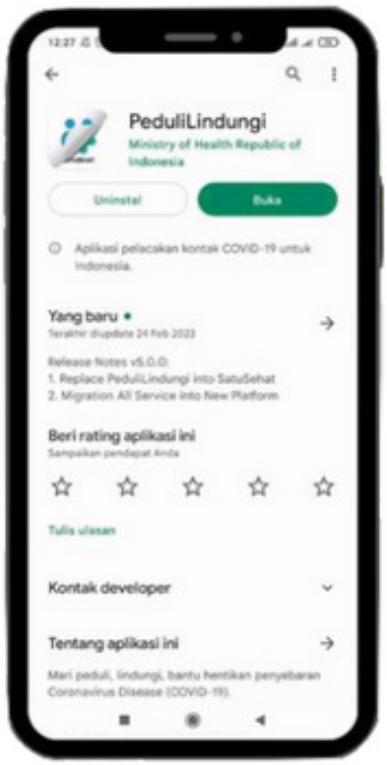
Indonesia bisa pulih lebih cepat, bahkan mendapatkan banyak pujian dari lembaga internasional. Bank Dunia menyebutnya sebagai langkah jitu dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap kemiskinan.

Hawar COVID-19 memaksa semua beradaptasi terutama sektor kesehatan. Percepatan digitalisasi dan inovasi pun dijalankan. Inisiatif tak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari mereka yang tergerak.

Layanan telemedis dan platform digital bidang kesehatan yang tumbuh melesat pada saat pandemi menjadi pemicu kebutuhan baru terhadap data dan teknologi. Pandemi COVID-19 berhasil mentransformasi bidang kesehatan. Pekerjaan yang harus diselesaikan berikutnya adalah banyaknya fasilitas kesehatan yang belum tersentuh teknologi digital.

Inisiatif membangun satu platform digital sektor kesehatan juga dilakukan pemerintah dengan nama Peduli Lindungi. Aplikasi ini semula khusus melacak penularan dan vaksinasi COVID-19. Lantas berkembang menjadi syarat wajib bagi pengguna transportasi publik dan masuk pusat perbelanjaan. Melihat banyaknya manfaat, Peduli Lindungi kemudian berubah nama menjadi Satu Sehat. Fungsinya juga diperluas menjadi tempat pertukaran data kesehatan terintegrasi secara nasional.





sumber: KSP, 2023

Di masa mendatang, masih akan terus dilakukan pemantauan terhadap kasus pandemic Covid-19 di dunia dan di Indonesia, serta mengakselerasi vaksinasi booster. Selain itu, Menko Luhut juga meminta agar pemberian obat-obatan dan vitamin harus tetap tersedia di berbagai fasilitas kesehatan selama masa transisi dan pemberian bantuan sosial harus tetap dilaksanakan untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan cepat.



Satu unit GeNose, alat skrining diserahkan kepada Menko Luhut untuk upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kemenko Maritim & Investasi





“Menko Luhut khawatir”

Virus corona varian baru lebih berdampak bagi **Ekonomi!**

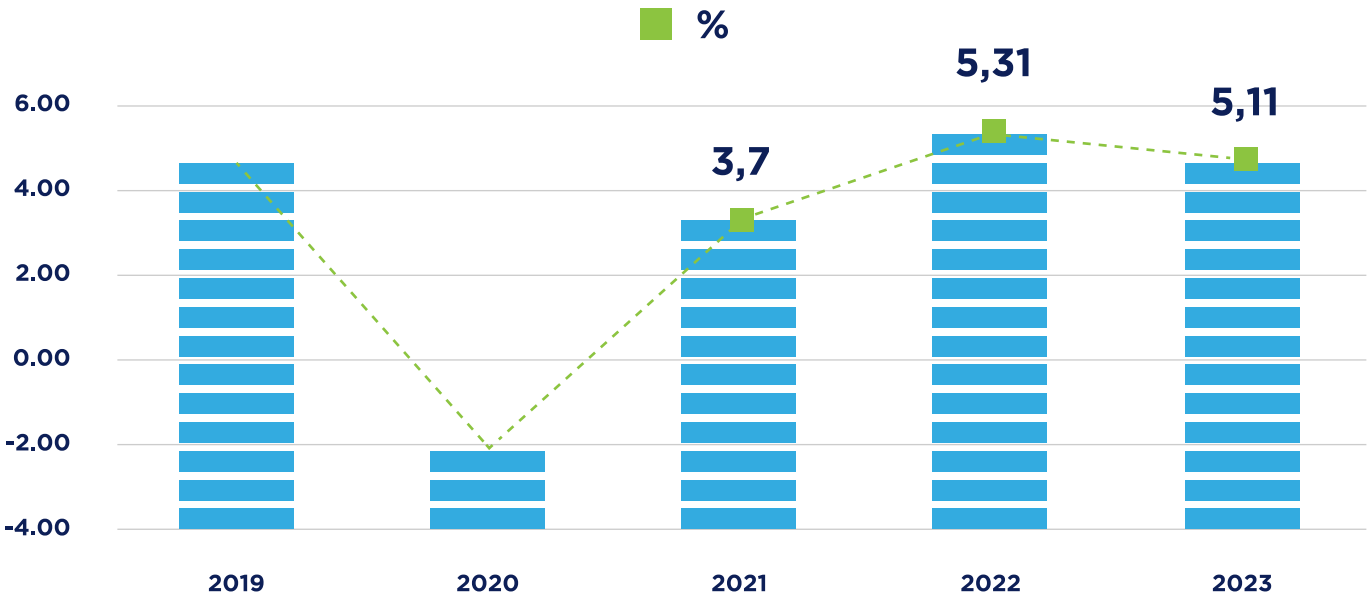




Pertumbuhan Ekonomi

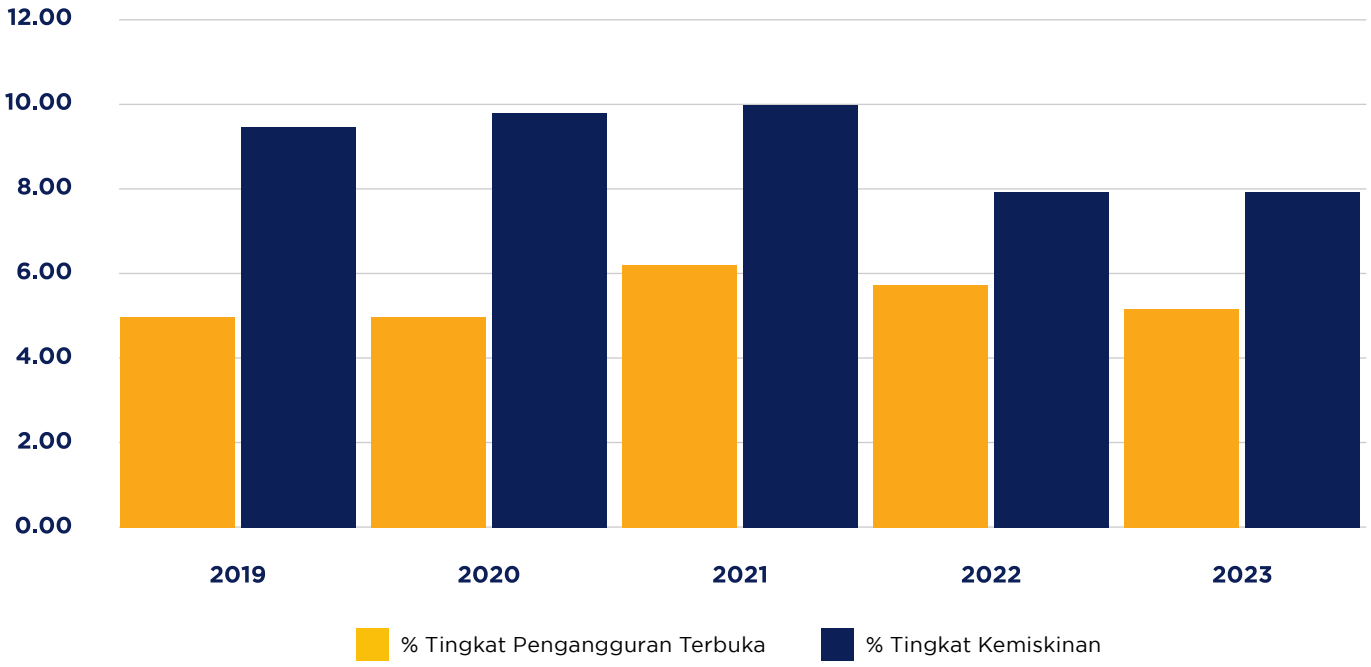
Tahun 2020, Indonesia berhadapan dengan tantangan serius ketika pandemi COVID-19 melanda. Ekonomi negara mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Namun, berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, ekonomi kita kembali tumbuh positif pada 2021, dan mencapai 5,31% pada 2022. Keberhasilan ini tak lepas dari kinerja ekspor yang tetap kuat, dan permintaan domestik yang solid. Dalam semester I/2023, ekonomi tumbuh 5,11%.

Pemulihan ekonomi membuat pengangguran dan kemiskinan dapat diturunkan mendekati level sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan ekstrem terus melorot pada masa pandemi. Dengan tambang USD 1,9 PPP per hari, selama sembilan tahun tingkat kemiskinan ekstrem turun lebih dari lima persen, pada Maret 2023. Kemiskinan ekstrem terus diupayakan mendekati 0%, pada 2024.



sumber: KSP, 2023 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka



sumber: KSP, 2023 (diolah)

Pemulihan Ekonomi Nasional

Indonesia Coral Reef Garden (PEN-ICRG)

Pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid19 dan mengatasi kondisi perekonomian melakukan program restorasi terumbu karang dengan metode transplantasi yang dikenal sebagai Indonesia Coral Reef Garden (ICRG).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat pesisir Sanur dan wilayah sekitar yang terkena dampak pandemi Covid-19. Program ini bertujuan memberikan stimulus ekonomi yang selanjutnya dapat berdampak pula pada pelestarian ekosistem pesisir laut daerah Sanur serta penumbuhan mata pencaharian alternatif melalui pengembangan wisata bahari.

Program PEN-ICRG dipusatkan pada perairan Nusa Dua di samping daerah lainnya seperti Sanur, Serangan, Pantai Pandawa hingga perairan Buleleng dengan luas 50 Hektar merupakan program terbesar yang pernah dilakukan.

Program PEN ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya pada sektor informal atau UMKM.

Bali, dipilih sebagai salah satu target pemerintah dalam program PEN, sebab provinsi ini sangat bergantung dari sektor Pariwisata di mana kunjungan wisata mancanegara (wisman) saat ini berkurang signifikan.

Pekerja yang terlibat dalam PEN-ICRG sebanyak 11.327 orang dengan terdiri antara lain dari penyelam, seniman patung, catering/ penjual makanan, dan sebagainya.

5 Lokasi PEN ICRG



11.327
orang Pekerja

50
Ha Luas

569
Jenis terumbu karang





PEN ICRG 2020

Program PEN Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (ICRG) Bali

Serangan
6 Ha

Buleleng Tengah
4 Ha

Pandawa
7 Ha

Nusa Dua
25 Ha

Sanur
8 Ha

Total Tenaga Kerja
10.211 Orang

Target 70%
100
Realisasi

Minyak Goreng Berlimpah, Penerimaan Negara Cerah

Sejak akhir Mei 2022, Menko Marves mendapat penugasan baru dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan polemik minyak goreng di dalam negeri.

Langkah yang ditempuh dengan, melakukan audit atas lahan sawit di Tanah Air. Mengatasi persoalan minyak goreng tidak terbatas soal harga, audit menyeluruh hingga yield dan produksi perusahaan sawit.

Terapkan DMO CPO

Program minyak goreng curah berbasis wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) dan harga domestik (domestic price obligation/ DPO).

Terapkan Peduli Lindungi

Menerapkan digitalisasi sistem ke dalam Peduli Lindungi

Tegakkan Penindakan

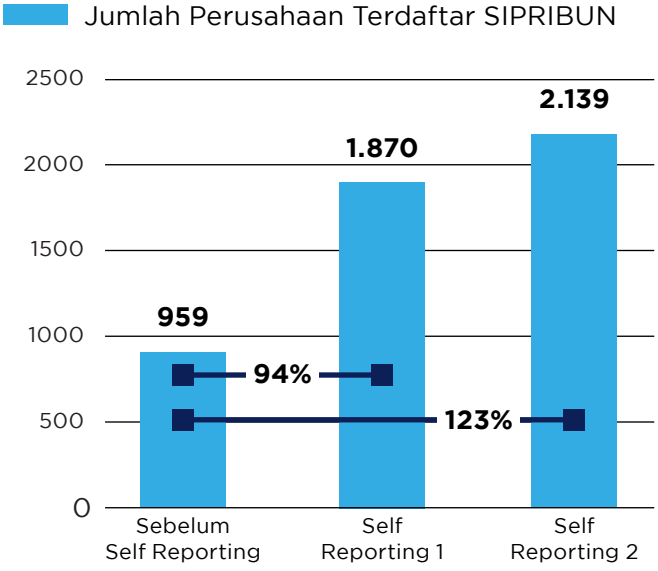
Penindakan hukum atas praktik ilegal, termasuk monopoli oleh distributor.

Ajak BPKP

Lakukan kaji slang



Jurus Luhut Atasi Minyak Goreng



Simirah platform buat minyak goreng, merupakan sistem teknologi digital dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi minyak goreng sawit curah.

Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pelaku usaha dan distributor wajib menggunakan SIMIRAH untuk menyampaikan faktur pajak dan pelaporan transaksi yang mencakup jumlah distribusi dalam liter maupun kilogram (kg).

Satgas bekerja mulai 14 April 2023 sampai 30 September 2023. Dampak yang dirasakan apabila program ini berjalan:

- pemulihan hak negara yang berasal dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (+/- 4-30 Triliun);
- peningkatan tata kelola industri sawit / rencana zonasi;
- Inovasi untuk memantau dan mengawasi perkembangan lahan sawit di Indonesia, mengimplementasikan sistem pelaporan mandiri (selfreporting) melalui Sistem Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan (SIPERIBUN).

Data Awal Satgas

Ijin Lokasi	Ijin Usaha Perkebunan	Hak Guna Usaha
23,5 Juta Ha	20,4 Juta Ha	8,8 Juta Ha

Luasan masing-masing perizinan (data BPKP)

Data Awal Satgas

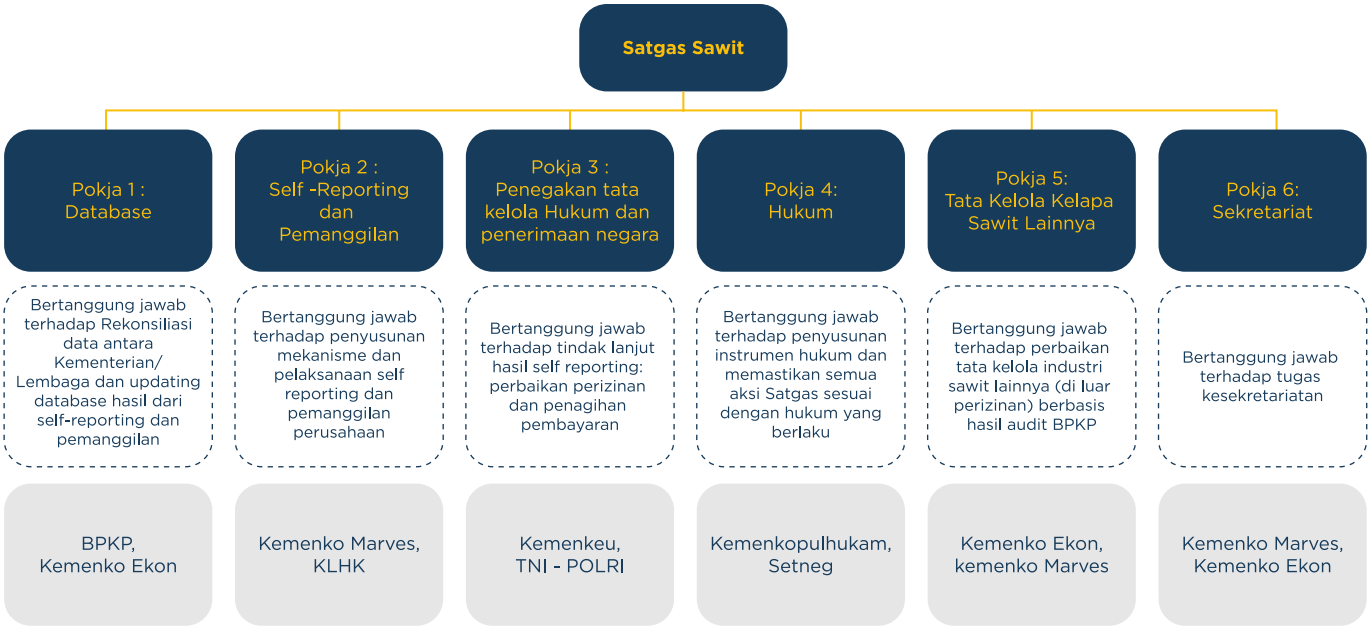
Ijin Lokasi	Ijin Usaha Perkebunan	Hak Guna Usaha
18,5 Juta Ha	16,3 Juta Ha	8,1 Juta Ha

Luasan masing-masing perizinan (data dari 2.140 Perusahaan)

Tata Kelola **Kelapa Sawit**

Pada tahun 2022 terdapat kelangkaan minyak goreng secara nasional yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan tugas dari Presiden untuk memitigasi permasalahan tersebut. Untuk menjalankan arahan dari Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit industri kelapa sawit.
Pada bulan Desember 2022, hasil audit BPKP menyatakan bahwa untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara sistematis, diperlukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Pada bulan April 2023, Presiden secara resmi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas) melalui Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2023. Untuk koordinasi secara harian, Satgas juga membentuk enam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagai berikut

Rancangan Kelompok Kerja Satgas Industri Kelapa Sawit (Eselon 1)



Untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, Satgas mengidentifikasi bahwa lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Perbaikan Tata Kelola Perizinan
2. Penegakkan PNBP dan Denda Sawit dalam KH
3. Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat
4. Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat
5. Peningkatan Produktivitas
6. Plasma
7. Digitalisasi Komoditas Kelapa Sawit dari Hulu ke Hilir

Tercapainya tata kelola industri kelapa sawit dan perkembangan peningkatan pendapatan negara dari pajak yang dapat ditempuh dengan cara antara lain:

- Penyelesaian HGU dalam Kawasan Hutan;
- Pendataan sawit rakyat (Program PSR dan Plasma);
- Mendorong Penagihan PNBP dan Denda Administratif.

Terdapat 4 agenda kerja utama yang dilaksanakan oleh Satgas Sawit, antara lain:

- Pendataan Sawit Perusahaan (Self-Reporting) melalui SIPERIBUN,
- Pemadanan data perizinan dan pajak dengan data BPKP dan SIPERIBUN,
- Penyelesaian syarat administratif perusahaan (pemenuhan UUCK Pasal 110A) dan penerbitan SK Tagih
- Pasal 110A, dan
- Finalisasi tipologi HGU dan Kawasan Hutan serta interpretasi citra satelit Perkebunan Kelapa Sawit.

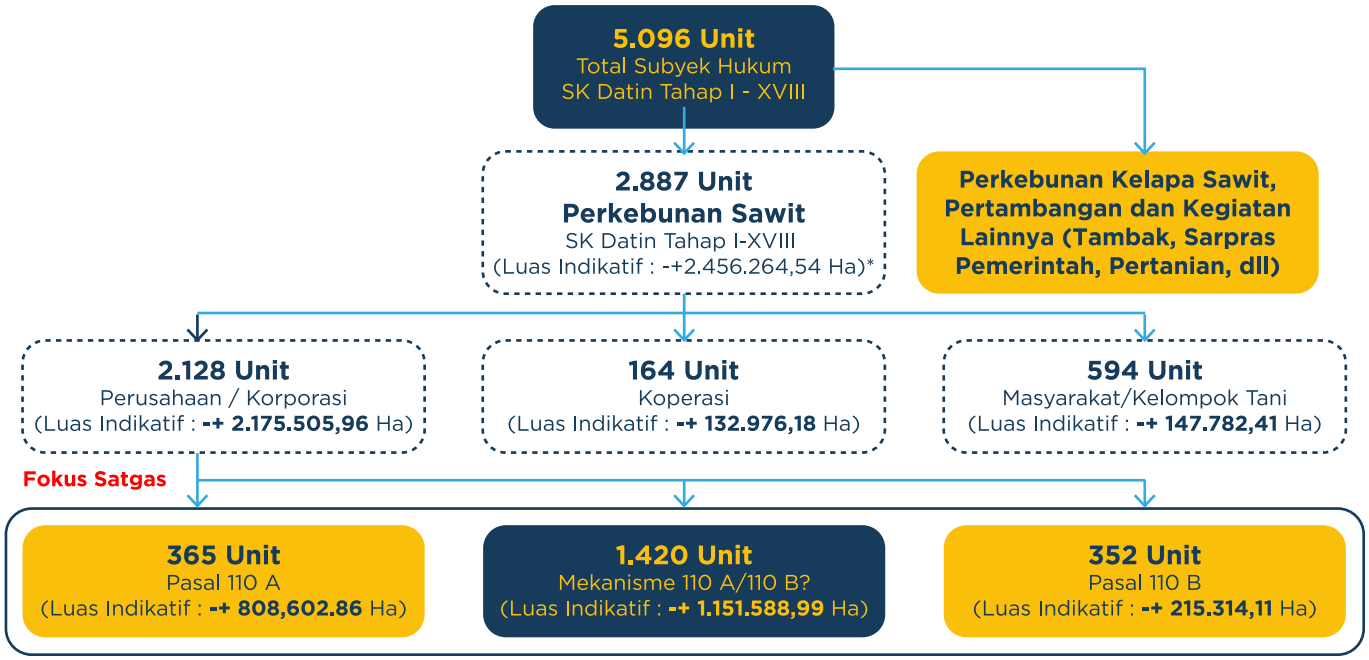
Pendataan Sawit Perusahaan dan Relevansinya dengan Penerimaan Pajak

Satgas menyelenggarakan program self reporting pada tanggal 3 Juli - 8 September 2024. Dari hasil Self reporting, Data Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar 123% atau 2.128 data perusahaan. Dari perusahan tersebut, terlihat bahwa jumlah perusahaan terbanyak berada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Data hasil audit BPKP yang awalnya menunjukkan Izin Lokasi seluas 23,5 Juta Ha; Izin Usaha Perkebunan seluas 20,4 Juta Ha; dan Hak Guna Usaha seluas 8,8 Juta Ha. terkonfirmasi di SIPERIBUN menjadi Izin Lokasi seluas 18 Juta Ha; Izin Usaha Perkebunan seluas 16,3 Juta Ha; dan Hak Guna Usaha seluas 8,1 Juta Ha.

Data **SIPERIBUN** juga digunakan oleh Pajak untuk menambahkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Total penambahan dari aspek intensifikasi dan ekstensifikasi, pengawasan wajib pajak, dan pemeriksaan wajib pajak memperoleh total pemasukan senilai 1,2 Trilyun.

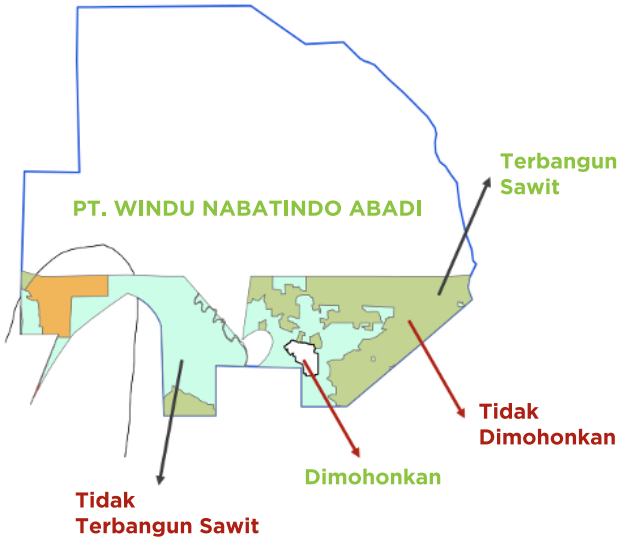
Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan

Pada akhir tahun 2023, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menerbitkan SK Datin I - XVIII dengan luas indikatif 2,4 Juta Ha. Dari angka tersebut, luas unit dengan kategori perusahaan adalah 2,1 Juta Ha.

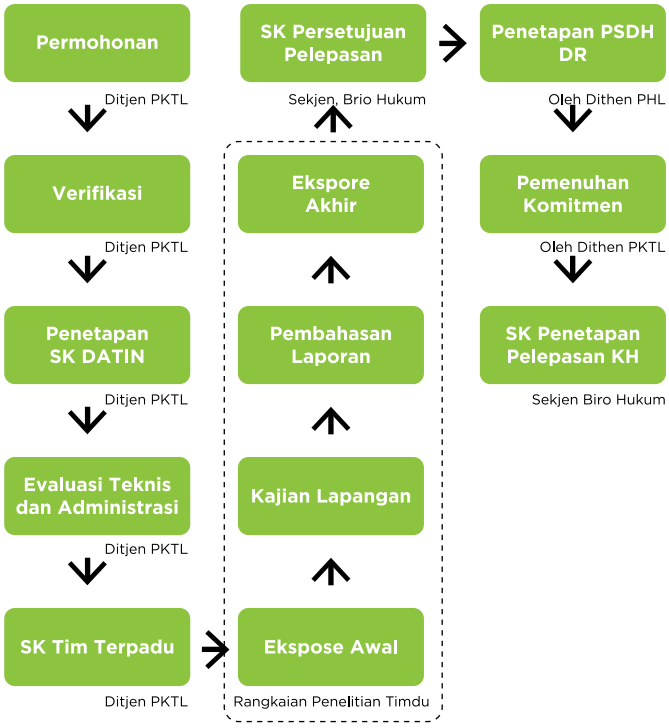


Keterangan :
Luas indikatif berdasarkan SK Datin, luas akhir setelah pemeriksaan kelengkapan data & persyaratan, pemeriksaan citra dan/atau lapangan selesai

Kategori perusahaan ini yang akan diselesaikan menggunakan mekanisme UUCK Pasal 110A dan Pasal 110B. Hasil sementara didapat 365 perusahaan dapat mengikuti Pasal 110A, 352 perusahaan dapat mengikuti Pasal 110B, dan 1.420 perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk Pasal 110A atau Pasal 110B. Analisa perlu dilakukan dengan komponen utama yaitu (1) Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah, (2) Peta digital Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, (3) Peta Kawasan Hutan. Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi, namun yang dapat dianalisa hanya 117 perusahaan karena keterbatasan komponen analisa. Usulan yang akan dikenakan tagihan sementara adalah wilayah yang terbangun di dalam permohonan dan perizinan maupun diluar permohonan namun didalam perizinan.



Menurut BPKP, total potensi PNBP penyelesaian sawit dalam kawasan hutan sekitar 14 - 97 Trilyun. BPKP juga melakukan audit tata kelola, adapun alur dari persetujuan pelepasan Pasal 110A menurut PerMenLHK No 7/2021 adalah sebagai berikut:



BPKP juga menyoroti bahwa akuntabilitas proses perizinan pelepasan kawasan hutan perlu didukung dengan sistem informasi yang memadai.

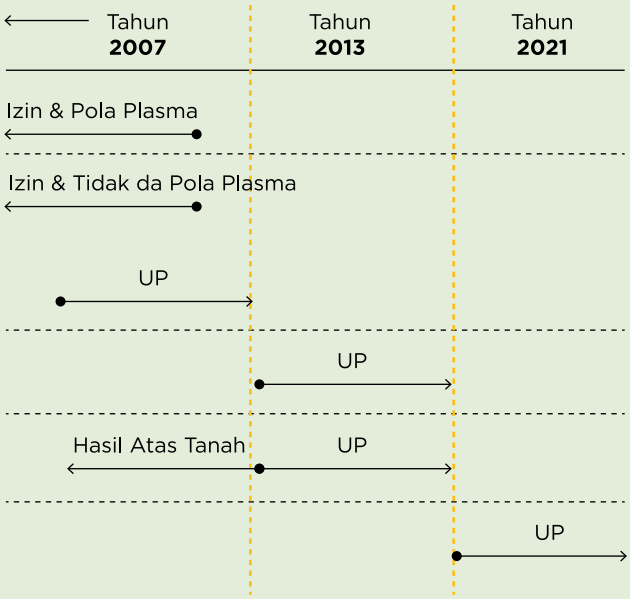
Pemenuhan Plasma dan Hak Guna Usaha Setiap Perusahaan Kelapa Sawit Wajib Memiliki HGU dan IUP menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2015. Sebelumnya Pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 Perusahaan perkebunan dapat melakukan kegiatan perkebunan apabila telah mendapat IUP dan/atau HGU. Namun, pada tahun 2016, terdapat Putusan MK 138/2015 yang menyatakan Menghapus “dan/atau” menjadi kata “dan”

.

Sehingga Setiap Perusahaan wajib memegang IUP dan HGU. Kondisi ini didukung dengan diterbitkannya UU no 6 tahun 2023 Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat. Sehingga Satgas mendorong diterbitkannya Surat Edaran dari Kementerian Pertanian sebagai turunan Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2015. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan inventarisasi, dan didapat sebanyak 537 perusahaan belum memiliki HGU namun sudah memiliki IUP. Adapun detil dari data tersebut adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Tidak Terdefinisi	Grand Total
1	Aceh	12	10	1	13
2	Bengkulu	13	2		15
3	DKI Jakarta	3	2		5
4	Gorontalo	2		1	3
5	Jambi	16	11		27
6	Jawa Tengah		1		1
7	Kalimantan Barat	31	33	1	65
8	Kalimantan Selatan	4	1		5
9	Kalimantan Tengah	34	8	1	43
10	Kalimantan Timur	23	13	2	38
11	Kalimantan Utara	7	1		8
12	Kep. Bangka Belitung	5	8		13
13	Kepulauan Riau		1		1
14	Lampung	3	1		4
15	Maluku	6	1		7
16	Papua	1			1
17	Papua Barat	1			1
18	Papua Selatan	3	1		4
19	Riau	80	44	2	126
20	Sulawesi Barat	1	3		4
21	Sulawesi Selatan	1			1
22	Sulawesi Tengah	10	4		14
23	Sulawesi Tenggara	2			2
24	Sumatera Barat	8	3		11
25	Sumatera Selatan	35	15		50
26	Sumatera Utara	31	19		50
27	Tidak Terdefinisi	10	1	4	15
#	**Grand Total**	**342**	**183**	**12**	**537**

Kementerian ATR/BPN juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mengajukan pengurusan HGU dengan komponen (1) pengukuran kadastral, (2) permohonan pemberian Hak atas Tanah, (3) permohonan pengukuran/PBT, (4) panitia pemeriksaan tanah A/B, (5) penetapan SK, dan (6) pendaftaran sertipikat. Untuk mempercepat pendaftaran HGU, Kementerian ATR/BPN mendelegasikannya juga ke Kantor Pertanahan. Total potensi penerimaan negara dari pengurusan HGU menurut perhitungan BPKP adalah 17 Trilyun. Regulasi pemenuhan plasma berbeda-beda menurut kapan IUP diterbitkan. Adapun perbedaan regulasi adalah sebagai berikut:

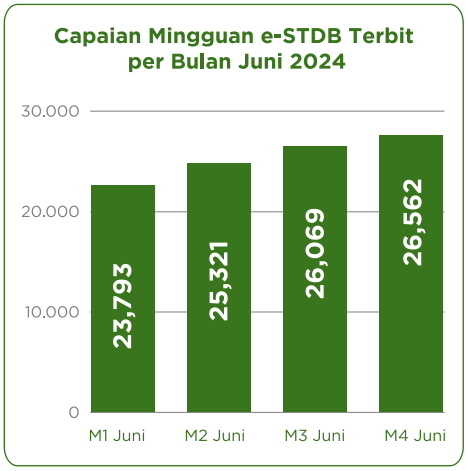


TIDAK BERLAKU Bangun Kebun	Permentan 98/2013 (Ps 60)
Wajib **Kegiatan Usaha Produktif**	Permentan 98/2013 (Ps 60)
Wajib **Bangun kebun 20%** dari luas yang **diusahakan**	Permentan 26/2017 (Ps 11)
Wajib **Bangun kebun 20%** dari luas **IUP**	Permentan 98/2013 (Ps 15)
Tidak Wajib Bangun kebun melakukan **Kegiatan usaha produktif**	Permentan 98/2013 (Ps 61)
Wajib bangun kebun 20% dari luas IUP yang berasal dari APL diluar HGU dan/atau dari pelepasan kawasan hutan	UU 6/2023 (ps 58) dan PP 26/2021 (Ps 12)

Dari data SIPERIBUN sementara (2.099 perusahaan), yang sudah melaporkan pemenuhan plasma/ fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah 733 perusahaan dengan luas IUP 7,4 Juta Ha dan Luas Kebun 1,4 Juta Ha. Sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 1.366 perusahaan dengan luas IUP adalah 14,3 Juta Ha.Menurut Surat Edaran tersebut, pelaporan akan diberikan tenggat waktu hingga 31 Desember 2024. Adapun total potensi denda dari Plasma menurut BPKP senilai 158,9 Trilyun.

Pendataan Sawit Rakyat

Platform yang digunakan untuk mendata sawit rakyat adalah e-STDB. Progress pengisian e-STDB perlu dilakukan akselerasi. Capaian per Bulan Juni 2024 adalah sebagai berikut:



26.562
Realisasi STDB Kelapa Sawit s/d 27 Juni 2024

2,5 Juta
Jumlah pekebun kelapa sawit (ATAP 2021)

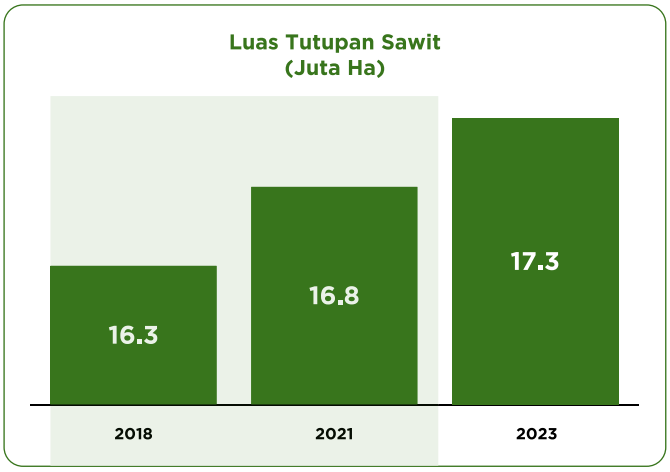
1,05%
Yang memiliki STDB

Langkah percepatan yang dapat dilakukan adalah:

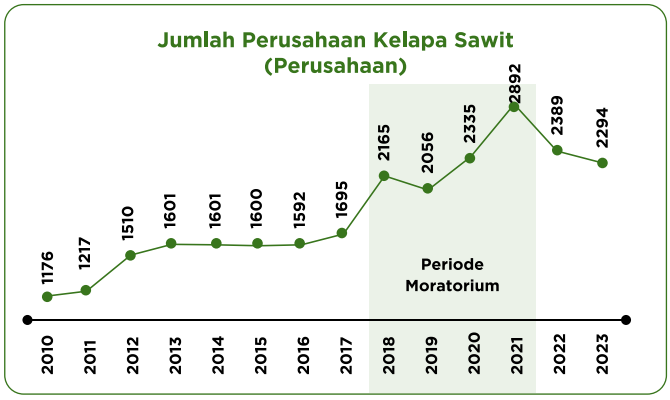
1. Bekerja sama dengan asosiasi petani supaya anggotanya mendaftar di E-STDB.
2. Bekerja sama dengan perusahaan untuk mendaftarkan petani plasma atau mitranya.
3. Memberikan insentif kepada petani yang mendaftar melalui E-STDB.

Isu Moratorium Kelapa Sawit

Moratorium Pernah Diimplementasikan Pada 2018 Yang Berlaku Selama 3 Tahun, Namun Masih ada Sawit Tambahan yang Terbangun



Pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang moratorium kelapa sawit juga memandatkan untuk moratorium izin baru, penataan perizinan dan lahan, upaya peningkatan produktivitas, peningkatan keberlanjutan dan penyelesaian isu lingkungan, dan kewajiban sertifikasi ISPO



Digitalisasi melalui **Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (SIMBARA)**



SIMBARA adalah integrasi proses bisnis dan pelayanan komoditas mineral Batubara antar Kementerian dan Lembaga dari hulu hingga hilir. Benefit memperbaiki tata Kelola sektor mineral batubara: mengurangi kebocoran penerimaan negara; pencegahan atas modus illegal mining; peningkatan kepatuhan pelaku usaha (profiling); terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah; ketelusuran data hulu hingga hilir. pada umum definisi integrasi proses bisnis adalah sebuah metode atau cara untuk melakukan efisiensi baik dari visi, strategi, hingga tindakan dengan cara menggabungkan beberapa proses bisnis menjadi satu kesatuan. Efisiensi ini akan memberikan nilai tambah berupa waktu yang lebih cepat dari dokumen, karena validasi persyaratan dapat dilakukan dengan sistem. Output yang dihasilkan adalah optimalisasi penerimaan negara dapat dicapai.

Proses integrasi pelayanan pemerintah untuk komoditas mineral batubara berbasis elektronik ini adalah mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan pemerintah yang selama ini sudah digunakan oleh badan usaha/perusahaan untuk mendukung kegiatan pembayaran kewajiban, proses ekspor, dan pelaporan. Adapun aplikasi yang diintegrasikan adalah:

1. Kementerian ESDM: e-PNBP; MODI, MOMS, MVP
2. Kementerian Keuangan: SIMPONI, CIESA
3. Kementerian Perdagangan: INATRADE dan Sistem Surveyor
4. Kementerian Perhubungan: INAPORTNET

Proses integrasi antar kementerian Lembaga ini ditunjuk Lembaga Nasional Single Windows (LNSW) sebagai pengelola Sistem INSW untuk mengintegrasi seluruh aplikasi dan membuat monitoring- nya. Hal yang menjadi perhatian dalam proses integrasi ini adalah penyelarasan proses bisnis agar dokumen dari hulu ke hilir dapat tertelusur dengan baik dan menjadi kesinambungan data.

Sedangkan untuk mendukung integrasi antar aplikasi, dibutuhkan juga integrasi antar sistem di lingkungan masing-masing kementerian. Sebagai contoh pada kementerian ESDM agar dapat mengintegrasikan antar aplikasi dan proses bisnis pada e-PNBP; MODI, MOMS, MVP.

Gambaran besar proses bisnis setelah integrasi aplikasi adalah pelayanan komoditas mineral batubara melalui satu pintu (front-end) dimana badan usaha/perusahaan akan melakukan satu-dua kali proses input untuk mendapat segala pelayanan mulai dari bukti pembayaran royalty, LHV, Laporan Surveyor, Surat Persetujuan Berlayar.

Pada pertengahan bulan Juli 2024 Menko Marves dan KL terkait bertempat di Gedung Dharmapala, Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar segera mengimplementasikan SIMBARA, dengan sasaran adalah komoditas batubara, komoditas Timah, Nikel dan diikuti komoditas lainnya. untuk regulasinya sendiri yaitu Rancangan Perpres Layanan Digital Terpadu sedang menunggu persetujuan Presiden.

Penanganan Wabah yang "Kembali" Mewabah

Penyakit Mulut dan Kuku

Setelah bebas dari PMK selama 36 tahun, PMK kembali masuk di wilayah Indonesia pada awal April 2022, dan kemudian ditetapkan sebagai wabah penyakit menular pada hewan ternak di Indonesia oleh Kementerian Pertanian per tanggal 7 Mei 2022. Awal kembalinya kasus PMK pada ternak di Indonesia pertama kali dilaporkan di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Sidoarjo dengan jumlah 1.296 ternak yang sakit dan 8 ternak dilaporkan mati. Pada kurun waktu yang bersamaan juga dilaporkan kasus PMK di 2 kabupaten di Tamiang, provinsi Nangroe Aceh Darrusallam (NAD).

Pemerintah menetapkan 19 daerah yang terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Daerah tersebut antara lain, Aceh; Kepulauan Bangka Belitung; Riau; Sumatra Barat; Sumatra Utara; Sumatra Selatan; Jambi; Bengkulu; Lampung; Banten; DKI Jakarta; Jawa Barat; Jawa Tengah; D.I. Yogyakarta; Jawa Timur; Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; dan Kalimantan Selatan. Dari total daerah tersebut, ada 14 daerah yang terkonfirmasi PMK dengan jumlah kabupaten/kota yang tertular lebih besar dari atau sama dengan 50% dari jumlah kabupaten/kota dinyatakan sebagai daerah tertular wabah PMK.

Sejarah Indonesia Bebas **PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)**

1887
Penyakit ini masuk melalui importasi dari Belanda, dan beberapa kali mewabah

1983
Wabah PMK terakhir di Jawa. Pemberantasan dengan vaksinasi masal

1986
Deklarasi secara nasional terhadap status indonesia bebas PMK dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 260/ Kpts/TN.510/5/1986

1990
Pengakuan status bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), tercantum dalam resolusi OIE No.XI tahun 1990

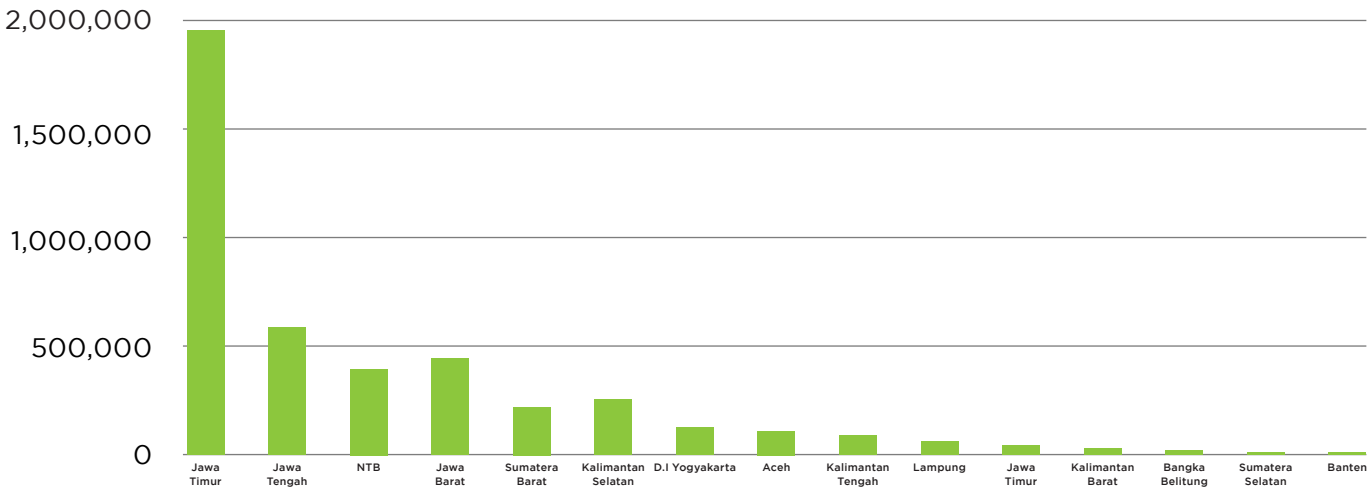
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memantau perkembangan data wabah PMK pada provinsi-provinsi dengan monitoring dan evaluasi di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Menko Marves Luhut B. Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Satgas penanganan PMK oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah, perlu untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Sebagai panduan dalam menyusun organisasi satuan tugas di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT), ditetapkan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.

19 Provinsi Terjangkit PMK



Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah ternak yang paling banyak terdampak wabah PMK. Jumlahnya mencapai 1.941.131 ekor hingga 17 Mei 2022. Kemudian Jawa Tengah menempati urutan kedua, dengan jumlah ternak yang terdampak PMK 689.319 ekor. Setelahnya ada Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara, dengan populasi ternak yang terdampak masing-masing 363.770 ekor dan 346.179 ekor. Provinsi lainnya yang terdampak adalah Jawa Barat dengan 165.468 ekor ternak, Sumatera Barat 151.660 ekor, Kalimantan Selatan 71.831 ekor, dan DI Yogyakarta 56.490 ekor. Selanjutnya Aceh 47.802 ekor, Kalimantan Tengah 25.993 ekor, Lampung 24.175 ekor, Kalimantan Barat 14.186 ekor, Bangka Belitung 10.347 ekor, Sumatera Selatan 1.281 ekor, dan Banten 678 ekor.

Jumlah ternak yang terdampak PMK



Sumber: Kementan (diolah)

4

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku



Menghentikan Penyebaran Virus

Melalui tindakan karantina dan pengawasan/pembatasan lalu lintas

Menghilangkan Sumber Infeksi

Dengan pemusnahan terbatas hewan tertular dan yang terpapar (stamping out)

Menghilangkan Virus PMK

Dengan dekontaminasi kandang, peralatan, kendaraan dan bahan lainnya yang dapat menularkan penyakit; atau disposal bahan yang terkontaminasi

Membentuk Kekebalan

Pada hewan peka dengan vaksinasi

Akhir Tahun 2022 virus PMK berhasil dikendalikan 0 kasus

Sumber: Kementan (diolah)

Sosok Tegas dan Berani **Atasi Polusi Udara**

Penanganan Polusi Udara



Pengentasan masalah polusi udara yang berkecamuk di Jabodetabek dan sekitarnya sejak awal endemi COVID-19 hingga saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dalam menyusun strategi mitigasi hingga penjatuhan sanksi bagi pelanggar.

Ya, sosok itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau itu nekat dan berani, serta mau mengoreksi diri kalau dia salah (Pandu Riono, Epidemiolog FKM-UI).

Penyelesaian masalah polusi tidak bisa dilakukan secara instan melalui kebijakan yang tidak didasari latar ilmu pengetahuan. Tiga strategi Menko Marves Luhut B. Pandjaitan untuk mengatasi polusi udara, yakni mempercepat transisi kendaraan listrik, pengecekan emisi karbon, penyediaan water mist generator atau pompa air bertekanan tinggi.

Akhir tahun 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa polusi udara memicu 6,7 juta kematian prematur setiap tahun.

Menurut temuan LHK, mayoritas atau 44 persen polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebabkan oleh kendaraan bermotor. Lalu, 34 persen dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan sisanya dari rumah tangga seperti pembakaran.



"Membereskan persoalan polusi udara di Jakarta tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu".

Luhut B. Pandjaitan

3 JURUS LUHUT ATASI POLUSI UDARA

1. **Mengurangi polls dari sektor industri dan pembangkit listrik,** dengan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara.
2. **Mendorong masyarakat gunakan transportasi publik,** untuk membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi.
3. **Mendorong perusahaan terapkan pembagian hari dan jam kerja,** guna mengurangi kemacetan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah polutan di jalan.

POLUSI

Pembunuh Senyap dari Udara

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut polusi udara sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Tanpa disadari masuk ke tubuh, hingga memicu penyakity bahkan menyebabkan kematian.

99%

Penduduk dunia menghirup udara yang mengandung polutan.

2,2 JUTA

Orang meninggal sebelum wakunya akibat polusi udara setiap tahun.

300 JUTA

Anak hidup di wilayah dengan polusi udara sangat parah.

600 RIBU

Polusi udara berkontribusi pada kematian 600 ribu anak setiap tahun.

570 RIBU

Kematian pada anak-anak di bawah 5 tahun setiap tahun karena polusi udara.

7 JUTA

Kematian disebabkan oleh paparan polusi udara setiap tahun.

1 JUTA

Anak meninggal karena pneumonia setiap tahun. Separuh terkait polusi udara.

7 JUTA

Diantaranya di kawasan Asia Tenggara.

Kemakmuran dan **Pertumbuhan Bersama**

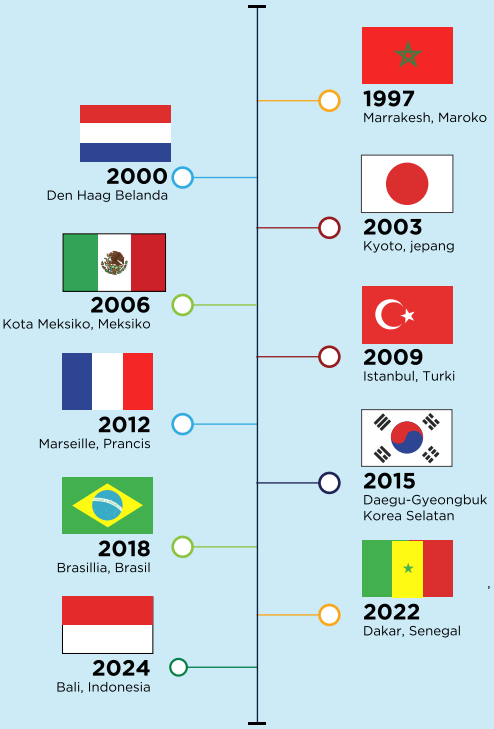
World Water Forum Ke-10

World Water Forum merupakan kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang membahas pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diprakarsai oleh World Water Council, World Water Forum diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan telah berlangsung secara rutin sejak Tahun 1997.

Indonesia dipilih sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 Tahun 2024 bukan tanpa alasan, memiliki lebih dari 17.000 pulau dan beragam sumber daya air, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan air. Mulai dari banjir, kekeringan, hingga pencemaran air, semua masalah ini membutuhkan solusi inovatif dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Sebagai tuan rumah WWF ke-10 Tahun 2024,, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan inisiatif dan inovasi yang telah diterapkan, serta belajar dari praktik terbaik negara lain. Forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan mendorong kebijakan yang efektif dalam pengelolaan air.
World Water Forum ke-10 diselenggarakan pada tanggal 18 - 25 Mei 2024 di Bali.

Tuan Rumah WWF Masa ke Masa



World Water Forum ke-10 Tahun 2024 mengusung tema **"Water for Shared Prosperity".** Tema ini menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi :

- Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan: Mengembangkan strategi untuk mengatasi krisis air melalui teknologi inovatif dan praktik terbaik.
- Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim: Bagaimana negara-negara dapat bersiap dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air.
- Kolaborasi Global: Mendorong kerja sama antar negara dalam pengelolaan air lintas batas.

Tercatat 20.000 delegasi dan partisipan dari 160 negara terdaftar dan total 64.000 peserta hadir selama 7 hari, berpartisipasi pada 278 sesi dan 254 booth fair dan expo.



World Water Forum ke-10 menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan global pengelolaan air di dunia. Upaya diversifikasi tindakan dan implementasi solusi dibahas melalui tiga proses utama, yakni political process, thematic process dan regional process, yang mencakup 6 sub-tema, membahasan 30 topik spesifik dan menghasilkan 278 sesi pembahasan.

FORUM PROCESSES:
OBJECTIVE AND MODALITIES

Process Framework Main Theme :
Water for Shared Prosperity

Water for Human and Nature
Water Security adn Prosperity
Disaster Risk Reduction and Management
Govermance, Cooperation and Hydro Diplomacy
Sustainable Water Finance
Knowledge and Innovation

Common Challenge :
Climate Change, Popullation Growth, Urbanization, Energy Crisis, Soil, dan Air Pollution. ect.

Cross-Cutting Enablers :
Governance, Science and Technology, Innovation, Financing & Inverstmen, Coorpeation and Partnership, Polici Development, Circular Economy, Education & capability Building

↓ ↓ ↓

Political Process	Thematic Process	Regional Process
• Head os States • Parliamentarian • Ministerial • Local Authorities • Basin Authorities	• Topics of water for human and Nature • Topics of water security and prosperity • Topics of Disaster Risk Reduction and Management • Topics of Sustainable Water Finance • Topics of Knowledge and Innovation	• Mediterranean • Asia Pacific • America • to be defined • to be defined

Pertemuan tingkat menteri yang dihadiri oleh perwakilan dari 106 negara dan 27 organisasi internasional telah menghasilkan beberapa deklarasi penting, yakni:

1. **Deklarasi Menteri disepakati saat Pertemuan Tingkat Menteri pada 21 Mei 2024**
2. **'Nusa Dua Communique' diadopsi pada 21 Mei 2024**
3. **Deklarasi 'Local and Regional Authorities Water for Shared Prosperity pada 22 Mei 2024**
4. **Launching 'Bali Basin Champion Agenda' pada 22 Mei 2024**

Dampak World Water Forum ke-10 Bagi Indonesia.

World Water Forum ke-10 Tahun 2024 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan diri di panggung dunia terkait pengelolaan air berkelanjutan. Disahkannya tiga poin utama deklarasi Menteri merupakan sebuah "kemenangan diplomasi" bagi Indonesia.

3 Point Utama Deklarasi Menteri

* **Pertama**

Pendirian ***Center of Excellent untuk ketahanan air dan iklim*** guna mengembangkan kapasitas, knowledge sahring & pemanfaatan fasilitas unggul.

* **Kedua**

Mengangkat dan mendorong isu ***pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.***

* **Ketiga**

Pengusulan Hari Danau Sedunia atau **World Lake Day**

Danau Merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.

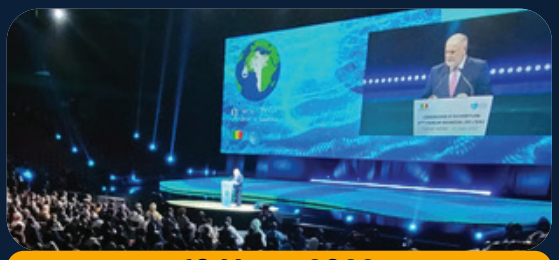
Peringatan Hari Danau Sedunia ini tidak sekedar simbolis, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.

Selain komitmen terkait pengentasan masalah air, World Water Forum ke-10 memberikan dampak yang besar terhadap pergerakan ekonomi di Bali, Menparekraf memperkirakan mencapai 1,5 Miliar rupiah.

Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan bahwa penyelenggaraan World Water Forum ke-10 Tahun 2024 yang berlangsung di Bali merupakan yang terbaik dan paling profesional dalam sejarah.



Timeline World Water Forum ke-10 Tahun 2024



19 Maret 2022

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah WWF ke-10 di Dakar, Senegal



10 November 2022

The 10th World Water Forum Framework Agreement Signing Completion



7-8 Desember 2022

Participation on the UN Water Summit On Groundwater in Paris



15 Februari 2023

Kick - Off Meeting The 10th World Water Forum and 1st Stakeholders Consultation Meeting



22-24 Maret 2023

Participation on the UN 2023 Water Conference in New York



12-13 Oktober 2023

2nd Stakeholders Consultation Meeting



28-28 Maret 2024

2nd Preparatory Committee Meeting of the Ministerial Declaration in Paris



23-24 Januari 2024

1st Preparatory Committee Meeting of the Ministerial Declaration in Paris



26 April 2024

Finalisasi Rangkaian Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan 10th World Water Forum



20 Mei 2024

Opening Ceremony The 10th World Water Forum

World Water Forum ke-10 telah resmi ditutup pada closing ceremony yang dilaksanakan pada 24 Mei 2024 di Mangupura Hall, Bali International Convention Center.

Adapun dalam closing ceremony sore hari ini, juga dilakukan penyerahan tuan rumah World Water Forum ke-11 kepada Arab Saudi. Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada Wakil Menteri Air di Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Kerajaan Arab Saudi Abdulaziz M Alshaibani dan disaksikan oleh Presiden World Water Council Loïc Fauchon. Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat meneruskan kerja sama multilateral terkait air dan dapat sukses seperti halnya perhelatan di Bali, Indonesia.







Rangkaian acara World Water Forum ke-10 di Bali diakhiri pada tanggal 25 Mei 2024 dengan agenda field trip ke Museum Subak, Danau Batur, dan Desa Wisata Jatiluwih yang dihadiri oleh delegasi dan peserta. Destinasi-destinasi ini memberikan gambaran yang relevan tentang bagaimana masyarakat Bali mengolah dan mengelola air dalam kehidupan sehari-hari.









Bali **International Air Show**

Bali International Air Show 2024: Melambungkan Indonesia ke Panggung Dirgantara Dunia dengan Teknologi, Kolaborasi, dan Inovasi



Bali International Airshow 2024: Kebangkitan Kedirgantaraan Indonesia

Setelah 28 tahun absen, pameran dirgantara kembali digelar di Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Udara. Momentum penting dalam sejarah kedirgantaraan Indonesia disebut Bali International Airshow 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 September 2024 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.



Panggung Global bagi Indonesia; Peserta 51 negara dengan 10.000 lebih Pengunjung

Selama empat hari penyelenggaraan, lebih dari 10.000 pengunjung dari sektor bisnis maupun publik dari 51 negara hadir (di antaranya Amerika Serikat, Australia, Cili, India, Inggris, Jepang, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta negara di Kawasan ASEAN seperti Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Vietnam). Delegasi internasional termasuk Perdana Menteri Inggris pada tahun 1997 -2007, H.E. Tony Blair, Senior Minister of State of Defence Republik Singapura, dan Duta Besar Uni Emirates Arab turut hadir menyaksikan berbagai teknologi terbaru dalam penerbangan dan pertahanan. Perhelatan Bali International Airshow 2024 menegaskan pentingnya transportasi udara di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta keinginan Indonesia untuk memimpin di pasar regional.v

Perusahaan Kedirgantaraan dan Pertahanan Global Bersatu

Selain menarik perhatian masyarakat acara ini juga menjadi panggung bagi perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan udara global untuk berpartisipasi. Nama-nama besar seperti Air Asia, Airbus, Boeing, Bell Helicopters, Brahmos, Dassault Aviation, Ettihad Airways, dan Thales memamerkan teknologi dan layanan canggih terbaru. Ajang ini dimanfaatkan sekaligus kesempatan kepada Indonesia untuk membangun kemitraan strategis dengan pemain-pemain besar di industri penerbangan dan pertahanan.

Indonesia melalui perusahaan nasional di Indonesia seperti Garuda Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN (Defend ID), Lion Group, dan Pertamina menunjukkan bahwa berbagai produk anak bangsa telah siap untuk bersaing di level regional dan global. Secara total, ada lebih dari 80 perusahaan yang berpartisipasi memamerkan perkembangan teknologi dan layanan kerdigantaraan dan pertahanan udara.

Dalam pameran ini terdapat 16 pesawat yang dipajang dalam static display, terdiri dari pesawat tempur dari Australia dan Jerman, serta pesawat produksi nasional N-219 dari PT DI dan drone canggih dari PT LEN. Australia bahkan mengirimkan jet tempur F-35 Lightning II untuk tampil dalam flying display bersama dua tim aerobatik Indonesia: Jupiter Aerobatic Team dan Neptunus Aerobatic Team, yang menambah kemeriahan acara ini. Bali International Airshow 2024 memperlihatkan kehebatan teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan global dan membuka peluang besar bagi industri kedirgantaraan Indonesia.







Menko Marves berbincang dengan perwakilan Air Force Australia yang berpartisipasi dalam Bali International Airshow 2024 (18/9)

Komitmen Terhadap Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF)

Di tengah perayaan teknologi penerbangan, Bali International Airshow 2024 juga menjadi *platform* bagi Indonesia untuk memperkenalkan inovasi di sektor energi. Pemerintah secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional untuk Pengembangan Ekosistem Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (*Sustainable Aviation Fuels/SAF*).

Peluncuran dokumen ini menggambarkan komitmen Indonesia untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 bahkan diperkirakan lebih cepat. Pemegang peran utama agar target ini tercapai adalah Pertamina yang juga sebagai sponsor utama Bali Air Show 2024. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memainkan peran penting dengan memasok Pertamina *Sustainable Aviation Fuel* (Pertamina SAF), bahan bakar penerbangan ramah lingkungan yang diharapkan mampu mendukung dekarbonisasi transportasi udara di Indonesia.

Membangun Masa Depan Kedirgantaraan Indonesia

Sukses besar dari Bali International Airshow 2024 mendorong pemerintah untuk merencanakan acara serupa di masa depan. Sebagai kelanjutan dari Bali International Airshow 2024, Indonesia akan menyelenggarakan 'Indonesia International Airshow' (IIA) setiap dua tahun sekali dimulai pada 2025.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tidak hanya sebagai pasar penerbangan besar tetapi juga sebagai pusat inovasi teknologi penerbangan. Apalagi Indonesia diproyeksikan oleh IATA akan menjadi negara dengan pasar dirgantara terbesar keempat di dunia pada tahun 2037.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menyebabkan sektor transportasi udara sebagai salah satu sektor strategis yang harus dikembangkan sebaik-baiknya. Melalui pembangunan infrastruktur udara yang tangguh, Indonesia dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pengembangan sektor pariwisata demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Penampilan Flying Display Jupiter Aerobatic Team dalam Bali International Airshow 2024

Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah kedirgantaraan, Bali International Airshow 2024 sebagai fondasi awal. Keikutsertaan negara-negara sahabat yang memamerkan pesawat tempur modern mereka menunjukkan kemitraan kuat dan kepercayaan global terhadap potensi Indonesia.

Pameran ini telah mengukir sejarah baru dan memberikan Indonesia kesempatan emas untuk memperkuat jaringan internasional. Terlepas dari berbagai tantangan dalam persiapan, kesuksesan acara ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor, komitmen pemerintah, dan dukungan dari mitra internasional dapat menciptakan momentum bagi Indonesia untuk berperan lebih besar di industri penerbangan global.



Deputi Jodi dalam Special Dialogue Fueling The Future : Harnessing Indonesia's Natural Resource Endowment For Global SAF Feedstock, Bali International Airshow 2024 (19/9)



pesawat KT-1B Wong Bee dari Jupiter Aerobatic Team

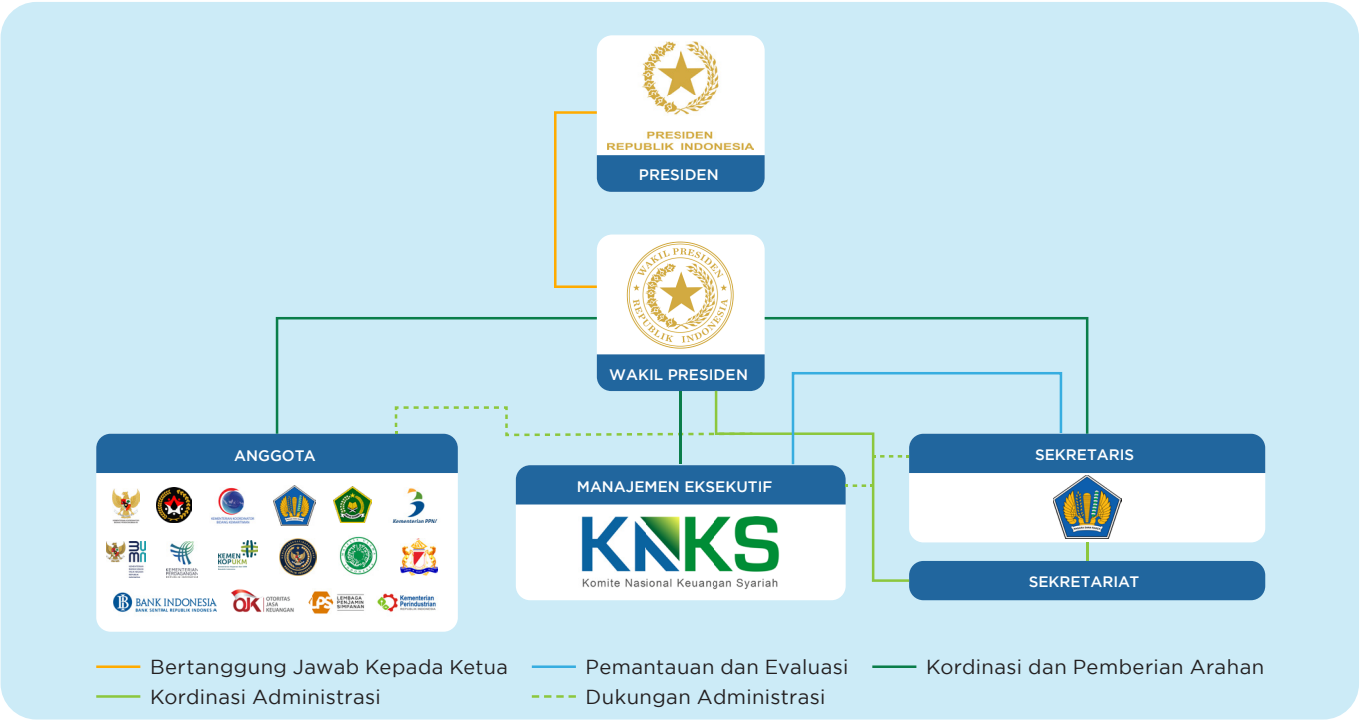


Jupiter Aerobatic Team dalam Bali International Airshow 2024



Penampilan Flying Display Jupiter Aerobatic Team dalam Bali International Airshow 2024

Wujudkan Indonesia Sebagai **Pusat Ekonomi Syariah**



Kemenko Marves berperan aktif dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syrariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin.

Menko Marves sebagai anggota KNEKS mempunyai tugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

KNEKS menjalankan fungsi (i) pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah nasional; (ii) koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah nasional; (iii) perumusan dan penyelesaian masalah ekonomi dan keuangan syariah nasional; (iv) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah nasional.


Maritim 2045 Diusulkan Masuk Pada Penyusunan MEKSI 2024-2029

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G.L Kalake menyampaikan bahwa Kemenko Marves memberikan sumbangsih terhadap penyusunan Rancangan RPJPN 2025-2045 dengan konsepsi pembangunan nasional menuju Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Substansi Maritim 2045 ini juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024-2029. Hal ini disampaikan pada audiensi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama pejabat Kemenko Marves pada Selasa, 23-5-2023 di kantor Kemenko Marves.

Kemenko Marves menginisiasi disusunnya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2025-2029 dan bersama Manajemen Eksekutif melakukan komunikasi intensif dengan Bappenas agar masuk dalam perencanaan strategis nasional, melalui transformasi ekonomi salah satunya dilakukan melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas dan Pesantren, Kemenko Marves Lakukan Rapat Koordinasi

By Administrator · 1303 View · 11 Aug 2023



Marves - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Model Ekosistem Syariah Berbasis Inovasi, Komunitas, dan Pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (11-08-2023). Kemenko Marves merupakan anggota Komite Keuangan dan

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045. Ekonomi Syariah telah masuk dalam RPJPN 2025-2045. Artinya pemerintah telah mendukung ekosistem ekonomi syariah melalui transformasi ekonomi dan pengembangan ekosistem halal sebagai transformasi sosial.

Arah kebijakan dalam RPJPN 2025-2045 dijabarkan menjadi arah kebijakan jangka menengah dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Produktivitas sektor-sektor ekonomi diantaranya didorong melalui penguatan ekonomi dan keuangan
syariah. Indonesia harus optimal memanfaatkan potensi ekonomi syariah global. Keuangan syariah Indonesia juga masih memiliki ruang yang besar untuk tumbuh.

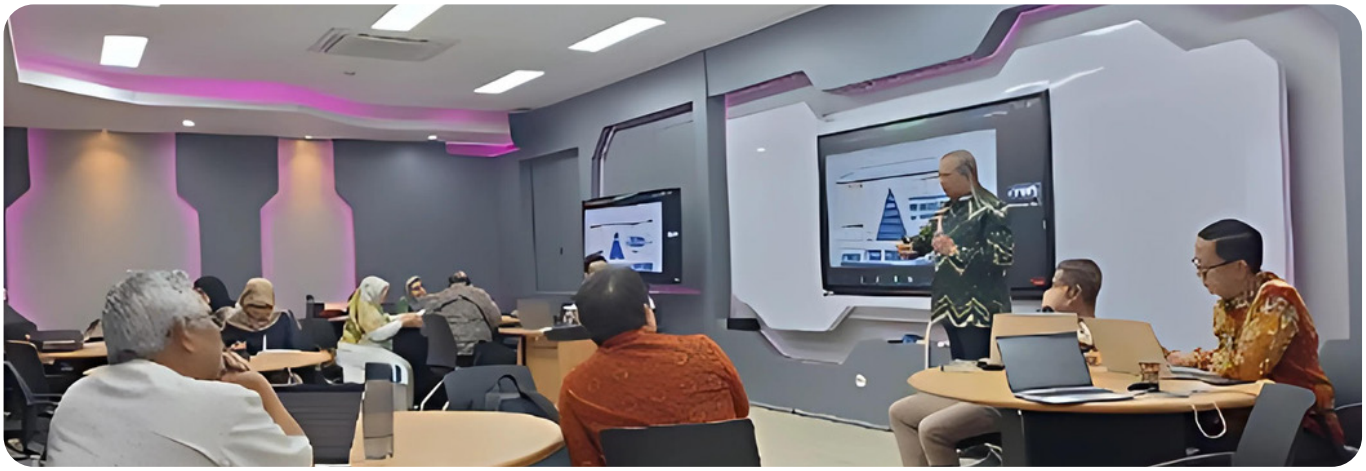
Di tingkat domestik, industri halal indonesia terus tumbuh dan menunjukkan tren positif kedepan. Pertumbuhan industri halal didukung oleh implementasi sertifikasi halal yang terus dilakukan dan perlu diperkuat kedepan.

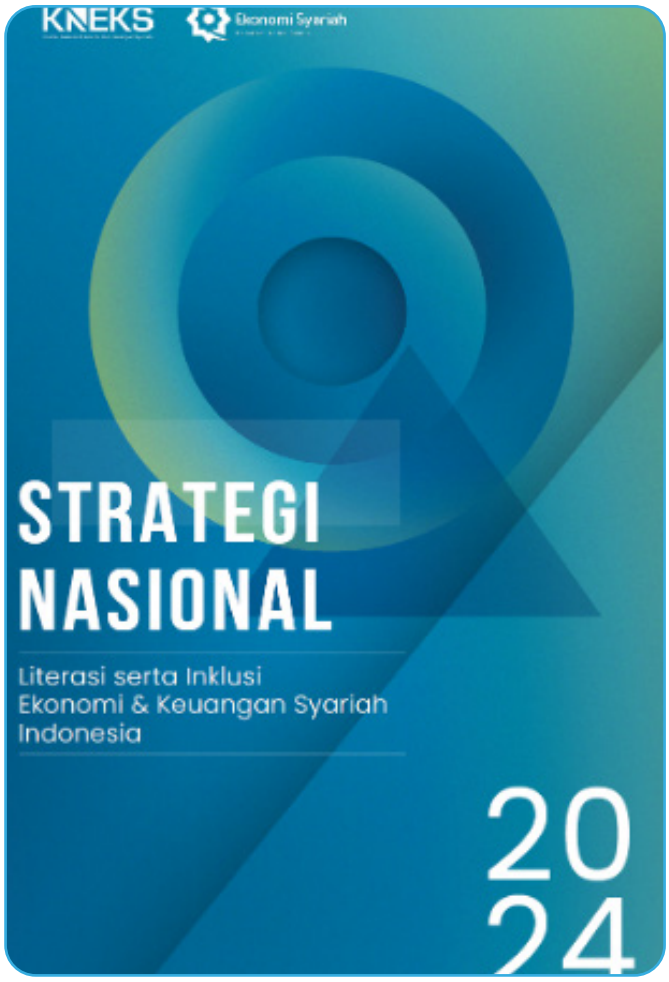
Pariwisata ramah muslim Indonesia juga menunjukkan potensi besar untuk terus tumbuh. Keuangan komersil dan sosial syariah domestik juga terus tumbuh dan memiliki potensi yang besar untuk dioptimalkan.

Pada PDB Syariah, terdapat delapan klaster, yang menjadi fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (1) Makanan minuman halal, (2) Pariwisata ramah muslim (PRM), (3) Tekstil, Pakaian, dan Fesyen muslim, (4) Ekonomi kreatif syariah, (5) Farmasi dan kosmetik halal, (6) Energi terbarukan, (7) Keuangan syariah, dan (8) Sektor syariah lainnya.

Kemenko Marves sebagai pengarah program strategis dan prioritas pada KNEKS menginisiasi penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Strategi Literasi ini memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan karena menggunakan pemodelan dinamika sistem sebagai sistem pendukung keputusan yang sangat membantu dalam menyusun strategi dan simulasi serta menguji skenario, strategi dan rencana aksi berdasarkan hasil simulasi dengan pendekatan berbasis datadriven dan evidence-based.







Dengan hadirnya strategi ini, kita berharap akan terjadi percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta terwujudnya inklusi ekonomi dan keuangan yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, strategi ini diharapkan mampu membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bersama-sama mendukung pengembangan ekonomi syariah yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dan terukur bagi peningkatan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia melalui langkah-langkah yang sinergis dan implementasi aksi yang tepat, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berlari Sambil Menikmati **Keindahan Bumi Kupang**







upang Exotic Run 2024 dilaksanakan pada 31 Agustus 2024, harapannya agar acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga untuk menarik wisatawan menikmati keindahan Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Pada malam harinya dilaksanakan Kupang Jazz Festival yang mengundang grup musik legendaris Krakatau.

Kupang Exotic Run ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wahana untuk menemukan dan mengasah bakat-bakat baru di bidang atletik, khususnya lari menengah dan jarak jauh. Dengan semangat dan kerja keras, pasti bisa melahirkan kembali atlet-atlet handal dari NTT yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

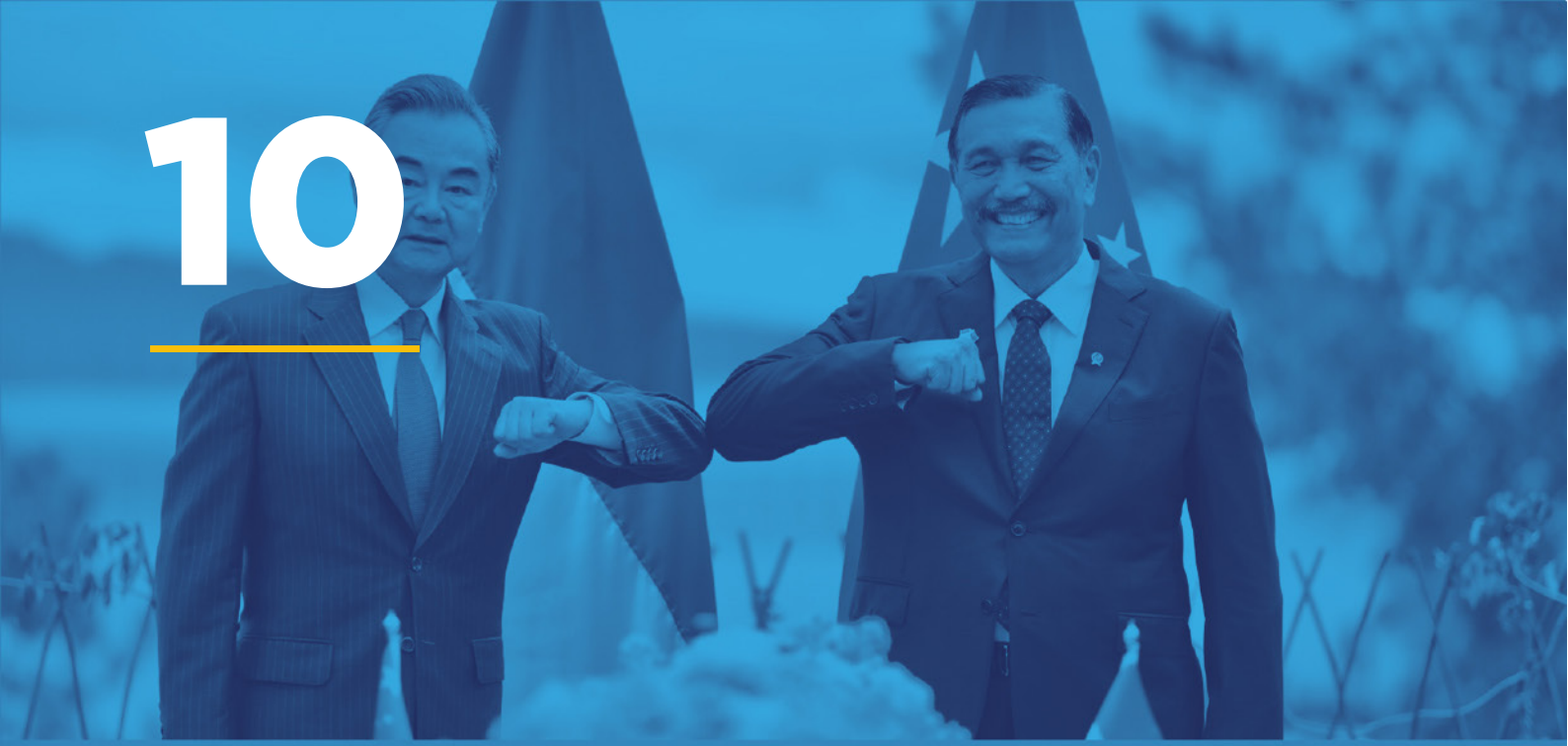
Provinsi NTT telah melahirkan seorang legenda yang namanya terus dikenang hingga kini, yakni Eduardus Nabunome atlet marathon yang telah mengukir prestasi gemilang di kancah nasional maupun internasional. Prestasi terbesar Eduardus Nabunome adalah ketika berhasil meraih medali emas pada SEA Games 1989 di Kuala Lumpur dan 1991 di Manila.

Rekornya baru dapat dipecahkan setelah 35 tahun oleh Robby Sianturi di Australia. Keuletan dan dedikasi beliau dalam berlatih menjadi teladan yang sangat berharga bagi Indonesia, khususnya bagi para atlet muda di NTT.

Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut melakukan peninjauan ke Kawasan Industri Bolok dan menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Gojek Tokopedia, serta penandatangan Prasasti Pekerjaan Jogging Track Lingkungan Kawasan Kantor Gubernur NTT yang bekerja sama dengan Bank NTT.



10

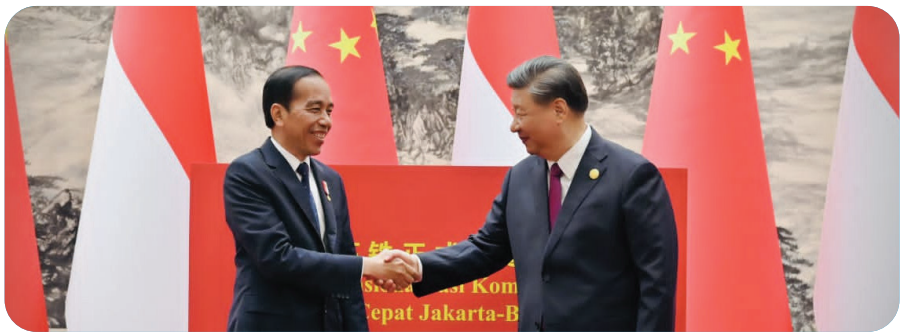




PERAN AKTIF DALAM BERBAGAI FORUM BILATERAL, REGIONAL, DAN MULTILATERAL

Saling Percaya, **Saling Menguntungkan**

High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRT



Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing, China pada Selasa (17/10/2023).





Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi (kiri) usai Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanisme (HDCM) RI-RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4/2024).



Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok berlandaskan asas saling percaya dan saling menguntungkan. Kedua negara akan mengoptimalkan strategi pembangunan untuk maju bersama dalam proses modernisasi dan terus mendorong pembangunan berkualitas tinggi.

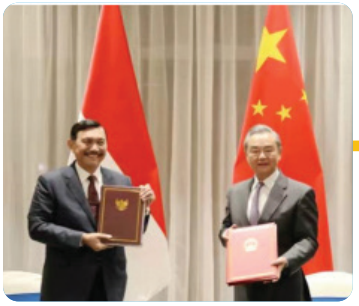
Kerja sama antara Indonesia dan China di bidang energi, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya terjalin makin erat dan membuahkan hasil, serta berperan besar dalam mendorong terwujudnya tujuan- tujuan pembangunan Indonesia.

Banyak hasil bermanfaat dari kerja sama antara kedua negara di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/ BRI), termasuk pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti, yaitu mengenai Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB), investasi kawasan industri Kalimantan Utara, ibu kota negara baru, ketahanan pangan, kura-kura Bali, maritim dan perikanan, kesehatan dan bioteknologi, perdagangan, serta terkait pendidikan dan pelatihan.

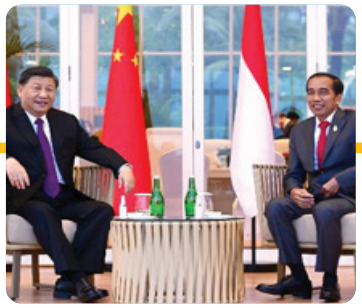
Pembangunan yang berpusat pada masyarakat antara kedua negara membantu meningkatkan sumber daya manusia Indonesi serta meningkatkan konektivitas transportasi di Indonesia.

Capaian HDCM RI – RRT 2021 – sekarang (1)



5 Juni 2021

Penandatanganan MoU Pembentukan HDCM + Pertemuan HDCM Pertama



16 November 2022

Pertemuan Kepala Negara RI - RRT di Bali



21 Februari 2023

Forum Kemitraan Bisnis RI - RRT Ketiga



4 April 2023

Pertemuan Joint Steering Committee Regional Comprehensive Economic Corridors Kedua



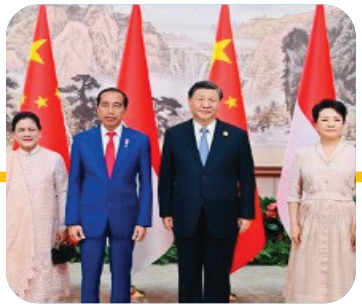
23 Juni 2023

Forum Kemitraan Bisnis RI - RRT Pertama



9 Juli 2023

Pertemuan HDCM Kedua



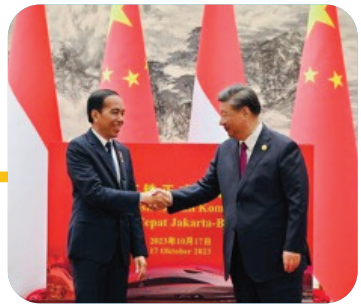
27 Juli 2023

Pertemuan Kepala Negara RI - RRT di Chengdu



8 September 2023

Pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri RRT di Jakarta



17 Oktober 2023

Pertemuan Presiden RI dan Presiden RRT di Beijing

Kerja sama antara Indonesia - China

1. Bangun Pabrik Vaksin
2. Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
3. Kawasan Industri Kaltara
4. KEK Kura-Kura Bali
5. Ibu Kota Nusantara (IKN)
6. Taman Sain Taman Herbal - Food Estate

1

Kerja sama CHINA–INDONESIA Bangun Pabrik Vaksin Covid – 19



FAKTA–FAKTA

Pabrik **sudah diresmikan di wilayah RI**

Vaksin mRNA adalah jenis vaksin baru, digunakan pada **Pfizer** dan **Modena**

Identitas produsen vaksin asal China tersebut **tidak diungkap**

Sejalan dengan vaksin mRNA pemerintah juga akan melanjutkan pengembangan vaksin **Merah Putih**



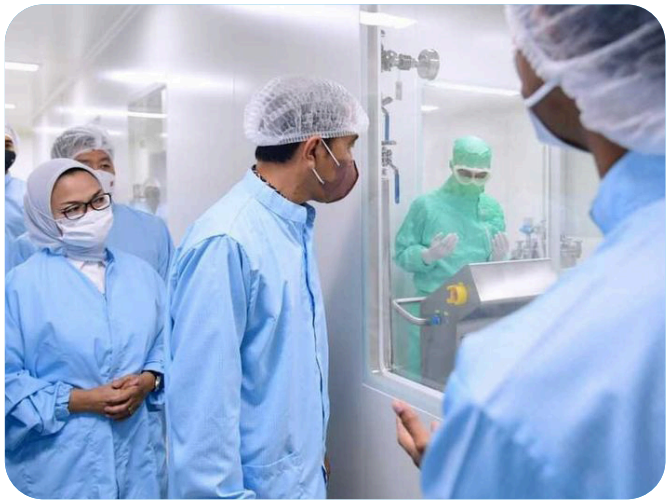
"Sudah ada satu pabrik vaksin yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 7 Oktober 2022, itu kerja sama mRNA, perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan China"

Menko Marves
Luhut Binsar Pandjaitan

1



Menko Marves Luhut B. Pandjaitan memberikan sambutan dalam peresmian pabrik biofarmasi PT Etana Biotechnologies Indonesia di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta, pada Jumat, 7 Oktober 2022.



Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas pabrik biofarmasi PT Etana Biotechnologies Indonesia di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta Jumat (07/10/22)

2



Sumber : Dokumentasi KCIC

3



Sumber : Antara Foto

6



Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) **Solidaritas, Kesetaraan, dan Inklusivitas**



Bendera sejumlah negara yang berpartisipasi dalam perhelatan 4th Ministerial Meeting Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12/2022).
Foto: AISForum.org



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, para kepala daerah dan para delegasi berfoto bersama pada acara Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang digelar di Manado, Kamis (1/11/2018).
Foto: AISForum.org

Sesuai amanat pembukaan UUD 45 untuk turut berperan dalam ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia sebagai negara kepulauan harus berperan dalam tata kelautan global.

Pembentukan forum kerja sama antar negara pulau dan kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) yang digagas Indonesia merupakan bentuk nyata diplomasi maritim dan kontribusi Indonesia terhadap tata kelautan global yang lestari, maju, dan berkeadilan. Forum ini dalam forum yang unik dan satu-satunya di dunia karena melibatkan kerja sama lintas samudera dan bersifat inklusif (mendorong kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang)

Pada 11 Oktober 2023, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh 32 negara, AIS Forum berhasil menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi. Penegasan kolaborasi ini dimuat dalam pernyataan bersama para Kepala Negara AIS Forum tentang Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan. Deklarasi tersebut juga memuat 2 elemen yang sangat penting yaitu perluasan area kerja sama AIS Forum dan komitmen untuk memperkuat kerangka kelembagaan AIS Forum sebagai Organisasi Internasional di masa mendatang.



Suasana pertemuan menteri-menteri negara pulau dan kepulauan dalam rangkaian penyelenggaraan 4th Ministerial Meeting Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Badung, Bali (10/10/2023).
Foto: AISForum.org



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan (tengah) memberi sambutan saat acara pembukaan 4th Ministerial Meeting Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12/2022).
Foto: AISForum.org

Indonesia berperan sebagai pemangku kepentingan kunci yang mendorong agar negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia semakin solid menghadapi berbagai tantangan dunia dengan berkolaborasi.

Sebagai sebuah forum kerja sama antar negara (multilateral), AIS Forum juga telah mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan selaras dengan praktik interaksi multilateral dalam berbagai forum kerja sama lainnya.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting), Pertemuan Tingkat Menteri – PTM (Ministerial Meeting), dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) telah dilaksanakan secara berjenjang dengan level of detailsyang berbeda untuk mengkonsolidasikan kesepahaman berbagai negara terkait kerja sama pembangunan di AIS Forum

Dalam kurun waktu 6 tahun sejak pembentukannya di Manado, AIS forum telah menyelenggarakan beberapa pertemuan monumental antara lain:

1. The 1st Ministerial Meeting AIS Forum yang dilaksanakan pada 1 November 2018 di Manado-Indonesia dan menghasilkan Manado Joint Declaration.
2. The 7th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Juni di Fiji.
3. The 8th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Agustus di Madagaskar.
4. The 5th Ministerial Meeting yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 di Bali.
5. The 1st Leaders' Summit/High Level Meeting yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023 di Bali dengan dihadiri oleh 32 negara partisipan AIS Forum dan 4 Organisasi Internasional
6. Kerja sama pelatihan dengan Fiji, Papua New Guinea, Madagaskar, dan Vanuatu yang menandakan upaya untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di kawasan ini.

Archipelagic & Island States Forum

Foto: AISForum.org

Berbagai pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh AIS Forum tidak hanya merupakan mekanisme pengambilan keputusan secara berjenjang dan konsolidasi pemahaman bersama,namun juga merupakan sarana menciptakan level of comfort dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Indonesia di AIS Forum. Berbagai pertemuan ini meningkatkan keyakinan di antara negara partisipan AIS Forum bahwa meskipun forum ini diinisiasi oleh Indonesia, mereka juga punya suara (voice) dan kepentingan (stake) untuk mengarahkan kolaborasi di AIS Forum.



Presiden Joko Widodo pimpin High level meeting AIS Forum (11/10/2023)
Foto: AISForum.org



Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menjadi Chair SOM dalam sebuah sesi pada penyelenggaraan 4th Ministerial Meeting Archipelago and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12/2022).

Hasil KTT AIS **FORUM 2023**

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Achipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali pada 10-11 Oktober 2023 menghasilkan Deklarasi Solidaritas Negara Kepulauan.



ISI DEKLARASI

AIS Forum menciptakan ruang inklusif untuk menghasilkan solusi

Memulai pembahasan tengang peta jalan strategis dan modalitas pembentukan organisasi berbasi piagam untuk memajukan kerja sama.

Menentukan sektor prioritas kerja sama yang akan dilakukan, yakni:

- **A** Mitigasi, adaptasi dan manajemen bencana perubahan iklim.
- **B** Pembangun ekonomi biru
- **C** Penanganan sampah laut
- **D** Tata kelola maritim yang baik

JUMLAH PESERTA

32 Kepala negara/ pemerintahan anggota AIS Forum

4 Organisasi International

FAKTA MENARIK

1. Tahun ini, pertemuan tingkat kepala negara pertama kali diadakan dalam AIS Forum.
2. Pada pertemuan tingkat menteri, Indonesia melakukan 6 penandatangan kerja sama, yaitu:
   - Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata
   - Profil Emisi Karbon Biru
   - Pernyataan Perjanjian Penelitian Bersama dengan Universitas Maita
   - Pernyataan Perjanjian Penilitian Bersama dengan Universitas Malta
   - Pembangunan Pusat Penilitian dan Pengembangan Ais di Imperial Perguruan Tinggi London
   - Nota Kesepahaman antara UNPAD, IPB, dan Universitas Toliara Madagaskar
   - Pernyataan Program Strategis Bersama antara Forum AIS dan Kelompok Kerja sama Negara Melanesia (MSG)
3. Indonesia sempat melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Tonga, Fiji, Tuvalu dan Sao Tome dan Principe`

"KTT AIS merupakan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia, dan untuk terus menyuarakan kepentingan negara berkembang dan negara kepulauan."

Presiden
Joko Widodo



Presiden Joko Widodo foto bersama dengan pemimpin negara yang hadir di AIS Forum 2023 (11/10/2023)
Foto: B Universe Photo/Ichsan Ali/AISForum.org

Capaian:

- The 7th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Juni di Fiji.
- The 8th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Agustus di Madagaskar.
- The 5th Ministerial Meeting yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 di Bali
- The 1st High Level Meeting yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023 di Bali dengan dihadiri oleh 32 negara partisipan AIS Forum dan 4 Organisasi Internasional
- Kerja sama pelatihan dengan Papua New Guinea.



Presiden Joko Widodo pimpin High level meeting AIS Forum (11/10/2023)
Foto: Sekretariat Presiden

Global South Collaboration

Peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi middle income country (MIC) dan anggota G-20, memposisikan Indonesia menjadi semakin berperan dalam berbagai forum regional dan internasional guna mempercepat capaian target pembangunan nasional. Salah satu strategi diplomasi yang dilakukan Pemri adalah memaksimalkan peran Indonesia sebagai negara mitra strategis dan pemberi bantuan baik teknis, kemanusiaan, dukungan politis, dan inovasi keuangan serta hibah kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS).



"Let a New Asia and Africa be Born" Ir. Soekarno in Asia-Afrikca Conference Bandung, 18 April 1955

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2024), kebijakan luar negeri tersebut diarahkan untuk memperkuat peran aktif Indonesia dalam agenda global bidang pembangunan berkelanjutan dan isu-isu strategis internasional. Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan kelanjutan gagasan kerja sama pembangunan antar negara berkembang yang berawal dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Semangat KAA tersebut melekat pada kebijakan dan upaya strategis Indonesia untuk meningkatkan posisi Indonesia. Dalam implementasinya, semangat KAA tersebut terus diarahkan untuk menjalin kerja sama pembangunan dengan sesama negara berkembang dengan melegasikan bahwa Indonesia adalah "a regional power with global interests and responsibilities"

Seiring perkembangan kerjasama global, Indonesia diposisikan sebagai Emerging Economy Country dalam Presidensi G-20 Tahun 2022. Indonesia berhasil membangkitkan kembali semangat kerja sama dan kolaborasi global. KTT G20 di Bali menghasilkan 5 poin utama Leaders' Declaration yang merefleksikan komitmen bersama G20 untuk berkolaborasi mengatasi tantangan global. Untuk pertama kalinya, KTT menghasilkan concrete deliverables yang membawa manfaat nyata bagi rakyat, khususnya di negara berkembang.

POINT PENTING
Leaders' Declaration KTT G20

Bahwa	Melalui	Untuk
Anggota G20 akan terus berinvestasi ke negara berpenghasilan rendah dan menengah dan negara berkembang lainnya.	Berbagai sumber dan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk untuk mengkatalisasi investasi swasta,	mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

Menindaklanjuti komitmen tersebut, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menginisiasi pembentukan suatu forum Kerja Sama Negara-Negara Berkembang di kawasan Afrika yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan "Special Ministerial-CEOs Meeting: Emerging Economies Cooperation" pada tanggal 17 November 2022 dengan mengundang Menteri-Menteri dari Rwanda, RD Kongo, Afrika Selatan, Senegal, dan Badan Pembangunan Afrika AUDA-NEPAD serta CEOs dari BUMN Indonesia untuk membicarakan gagasan awal potensi kerja sama yang dapatdilaksanakan antara Indonesia dengan masing-masing negara.



Menko Marves dalam "Special Ministerial-CEOs Meeting: Emerging Economies Cooperation" Bali, 17 November 2022

International Maritime Organization (IMO)

Mennko Marves : Nakhoda Diplomasi Maritim Indonesia di Kancah Internasional

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan yang sangat strategis dalam sektor maritim. Laut bukan hanya menjadi penghubung antar pulau, tetapi juga sebagai sumber daya alam yang melimpah dan jalur perdagangan global. Untuk memastikan kepentingan maritim nasional terjaga dan diakui di tingkat internasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, salah satunya adalah International Maritime Organization (IMO).





Presiden Joko Widodo memperkuat diplomasi maritim Indonesia di forum International Maritime Organization (IMO). Bersama negara anggota IMO, kita dorong kemajuan sektor maritim global

IMO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah pencemaran laut oleh kapal. Sebagai anggota aktif IMO sejak 1961, Indonesia telah memainkan peran yang semakin strategis dalam organisasi ini. Kemenko Marves sebagai koordinator lintas kementerian dan lembaga dalam bidang maritim, berperan sentral dalam menyusun strategi dan kebijakan maritim Indonesia di tingkat nasional, termasuk dalam konteks keikutsertaan Indonesia di IMO.

Kemenko Marves telah menunjukkan sejumlah peran aktif dalam diplomasi maritim Indonesia di IMO, antara lain:

- Representasi Aktif: Indonesia secara konsisten mengirimkan delegasi ke berbagai sidang dan pertemuan IMO. Delegasi ini tidak hanya menyampaikan aspirasi nasional, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan maritim internasional.

- Inisiatif Kebijakan: Indonesia telah mengajukan berbagai usulan kebijakan di IMO, seperti usulan aturan khusus untuk kapal laut tanpa awak. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk turut membentuk masa depan pelayaran global yang aman dan berkelanjutan.

- Kemitraan Internasional: Kemenko Marves menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maritim lainnya dan organisasi internasional terkait. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti penelitian maritim, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pertukaran informasi.

- Advokasi Isu Maritim: Indonesia secara konsisten mengadvokasi isu-isu maritim yang menjadi perhatian nasional, seperti pengelolaan wilayah laut, keselamatan pelayaran, pencemaran laut, dan masalah air ballast.

Berkat upaya-upaya tersebut Indonesia telah mencapai sejumlah capaian signifikan di tingkat IMO, antara lain:
Penguatan Posisi: Indonesia semakin diakui sebagai negara maritim yang memiliki peran penting dalam tata kelola laut global. Indonesia berkontribusi dalam perubahan amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional Tahun 2021 tentang struktur dan tata kelola organisasi (SOTK) yang meliputi penambahan anggta dewan IMO, perpanjangan masa jabatan anggota dewan, dan penambahan bahasa resmi dalam sidang-sidang IMO.

Amandemen konvensi IMO tersebut telah disahkan melalui Perpres 25 Tahun 2024 dan menjadi dasar hukum bagi perwakilan Pemri untuk mengembangkan karir dan jabatan strategis, sekaligus menjadi upaya Pemri dalam mencapai kepentingan nasional.

- Kontribusi pada Kebijakan Global: Usulan-usulan kebijakan Indonesia, seperti terkait kapal laut tanpa awak dan pengelolaan air ballast, telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum IMO.

- Peningkatan Kapasitas: Indonesia telah meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai isu maritim, seperti pencemaran minyak dan tabrakan terumbu karang, melalui kerja sama dengan IMO.

- Implementasi Peraturan Internasional: Indonesia secara konsisten berupaya untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan IMO di tingkat nasional, seperti peraturan tentang emisi gas rumah kaca, kandungan sulfur, dan limbah plastik.

- Keberhasilan Menjadi Anggota Dewan IMO: Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2024-2025. Ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia dalam sektor maritim.

Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, diplomasi maritim Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti persaingan kepentingan negara-negara besar, perubahan iklim, dan munculnya isu-isu maritim baru. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk semakin memperkuat posisinya di kancah internasional.

Kemenko Marves telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam diplomasi maritim Indonesia di IMO. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia berhasil memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berpengaruh di tingkat global. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan maritim sebagai poros pembangunan nasional.



Pertemuan bilateral dengan PM Inggris David Cameron di sela-sela Sidang IMO. Membahas penguatan kemitraan maritim Indonesia-Inggris

Indonesia-Africa Forum 2024

IAF adalah forum bersejarah yang mempertemukan unsur pemerintah, pebisnis dan pemangku kepentingan Indonesia-Afrika guna menjajaki potensi kerja sama ekonomi, memperkuat dan meningkatkan kerja sama yang telah lama terjalin baik dalam forum bilateral maupun multilateral. Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan relasi di bidang politik dan ekonomi sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.





Sejumlah Kepala Negara, Menteri Kabinet Kerja, Menteri dari negara Afrika, CEO BUMN, dan pimpinan perusahaan swasta membahas topik yang terkait dengan peningkatan kerja sama ekonomi, energi, pertambangan, manufaktur, pendanaan, ekonomi digital, industri strategis, konektivitas, pertanian, jasa, serta kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Dalam konteks ini, Kemenko Marves RI melalui Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi telah memberikan kontribusi penting antara lain:

- Kesepakatan Kerja sama 'Artisanal Mining Association' Indonesia (jumlah penambang rakyat lebih dari 4,2 juta orang) dengan asosiasi pertambangan rakyat di negara-negara Afrika, salah satunya Kenya (memiliki lebih dari 1.5 juta penambang rakyat)— untuk meningkatkan kesadaran best practices dalam sustainable mining serta meminimalisasi dampak mercury (HG) dan pencemaran lingkungan serta mewujudkan "Responsible Mining Communities" termasuk pengembangan pengelolaan areal bekas tambang dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan/tailing dan peningkatan nilai tambah hasil tambang, misalnya dengan mengembangkan kelompok pengrajin asesoris dari produk tambang rakyat.

- Di sektor pertambangan, terdapat kesepakatan G to G antara Pemerintah Kenya dan Indonesia melalui Joint Technical Meeting on Mining sebagai upaya untuk mengharmonisasikan peraturan-perundang-undangan di bidang pertambangan kedua negara dan meningkatkan kapasitas SDM pertambangan dan standar laboratorium geologi serta kodefikasi hasil tambang yang bernilai tinggi termasuk penambahan nilai komoditas tambang dalam proses hilirisasi tambang

- Di sektor gas dan energi, Kemenko Marves RI telah memfasilitasi kesepakatan kerja sama B to B antara Afrika Selatan, Mozambik, dan Indonesia untuk melalkukan kajian atas potensi kerja sama dalam pengoperasian Blok Buzi, pendistribusian data mengenai Blok Buzi untuk mempelajari lapangan-lapangan gas, dan potensi integrasi diantara aktifitas upstream, midstream, dan downstream untuk memproduksikan gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

- Kick-Off Taks Force Indonesia-Mozambique sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Mozambik pada Agustus 2023, dan dalam rangka meningkatkan kerja sama strategis, yang melibatkan Kementerian/ Lembaga teknis kedua negara terutama terkait dengan isu-isu energi, pertambangan, kesehatan, transportasi, dan perikanan.

- Di sektor Perikanan, Indonesia dan Mozambik menyepakati untuk membentuk Joint Technical Commitee on Fisheries yang akan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas petani (ikan) dan nelayan untuk budidaya ikan bernilai ekonomis dan nilai tambah komoditas produk perikanan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

- Di sektor Pertambangan, Indonesia dan Tanzania sepakat membentuk Joint Technical Commitee on Mining sekaligus menyusun Action Plan on Mineral yang ditindaklanjuti dengan Pertemuan Stakeholders Tambang Indonesia-Tanzania untuk menyelaraskan peraturan pertambangan dan sertifikasi standar laboratorium pertambangan kedua negara.

Indonesia-Papua Nugini: **Kemitraan Baru, Masa Depan Cerah**



Membangun Jembatan Energi di Perbatasan

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini pada awal tahun 2023 menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Salah satu hasil konkret dari kunjungan tersebut adalah aliran listrik 5 Megawatt dari Jayapura ke Papua Nugini. Langkah ini bukan hanya sekadar penyediaan energi, tetapi juga simbol kuat dari persahabatan dan kerja sama kedua negara.

Hilirisasi dan Investasi, Kunci Pertumbuhan Bersama

Potensi kerja sama Indonesia dan Papua Nugini tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga mencakup peluang besar di bidang hilirisasi industri dan investasi. Papua Nugini, yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, gas, dan kayu, melihat nilai strategis dalam mempelajari pengalaman Indonesia yang sukses dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Indonesia, dengan pengalaman panjangnya dalam industrialisasi, mampu mengarahkan Papua Nugini untuk menciptakan rantai pasok yang lebih terintegrasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam mereka.

Sebagai respons atas minat Papua Nugini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi kunjungan delegasi tingkat tinggi Papua Nugini ke sejumlah kawasan industri unggulan. Kawasan-kawasan ini, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (JIIPE), Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), memberikan contoh nyata bagaimana investasi dan hilirisasi bisa mengubah sektor industri. Kunjungan tersebut dirancang untuk memberikan pandangan langsung kepada para pejabat dan investor Papua Nugini tentang potensi investasi dan infrastruktur kelas dunia yang dimiliki Indonesia. Selain itu, ini juga sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat integrasi industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan investasi yang pro-bisnis dan infrastruktur yang memadai, Indonesia menawarkan kesempatan bagi Papua Nugini untuk memanfaatkan keunggulan tersebut sebagai model pengembangan kawasan industri di negaranya. Penguatan kerja sama di sektor hilirisasi ini akan memungkinkan kedua negara untuk saling mendukung dalam menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sambil memperkuat posisi mereka di pasar global.

Kerangka Kerja Sama yang Lebih Kuat

Untuk memperkuat kerja sama bilateral, Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati pembentukan *High Level Dialogue and Cooperation Mechanism* (HLD-CM). Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya **Deklarasi Bersama (Joint Declaration) antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Wakil Perdana Menteri Negara Merdeka Papua Nugini tentang Pembentukan Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Negara Merdeka Papua Nugini**, pada 31 Agustus 2024 di Bali. Deklarasi tersebut menandai era baru dalam hubungan bilateral, yang kini ditopang oleh komitmen lebih kuat dan sistematis melalui mekanisme dialog tingkat tinggi.

High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HLD-CM) akan menjadi *platform* utama bagi Indonesia dan Papua Nugini untuk membahas isu strategis di berbagai sektor, seperti hilirisasi, energi, pertambangan, pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. HLD-CM juga memungkinkan pembahasan isu-isu keamanan, ketahanan pangan, dan infrastruktur untuk memperkuat integrasi regional di Asia Pasifik.

Masa Depan yang Cerah

Kemitraan antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa manfaat strategis dan ekonomi bagi kedua negara. Seiring dengan semakin eratnya kerja sama di berbagai bidang, hubungan bilateral ini diproyeksikan akan semakin kokoh dan memberikan dampak jangka panjang yang positif. Upaya bersama dalam menciptakan platform dialog tingkat tinggi melalui High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HLD-CM) akan menjadi landasan utama dalam mengatasi tantangan global dan regional, sekaligus membuka peluang baru bagi investasi dan perdagangan.

Keberhasilan kerja sama ini juga akan memperkuat posisi kedua negara di kawasan Asia Pasifik, dengan potensi untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan. Melalui komitmen yang kuat dan kolaborasi berkelanjutan, Indonesia dan Papua Nugini dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah, di mana stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran bersama menjadi tujuan utama. Dengan pandangan yang sama terhadap masa depan, kedua negara akan terus berkembang sebagai mitra yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang global.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meskipun telah banyak capaian yang diraih dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah penyelesaian **Perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) antara PT PLN dan PNG Power**, yang menjadi kunci dalam memperkuat kerja sama sektor energi. Penyelarasan harga, mekanisme hibah untuk menutupi selisih biaya, serta kepastian legalitas penugasan infrastruktur kelistrikan adalah beberapa aspek teknis yang masih perlu dikerjakan.

Namun, di balik tantangan tersebut, peluang untuk memperdalam hubungan kerja sama sangat besar. Dengan komitmen kuat dari kedua negara dan upaya diplomasi ekonomi yang terus berjalan, tantangan ini diyakini dapat diatasi. Penyelesaian PPA akan membuka jalan bagi perluasan ekspor energi yang lebih signifikan, serta memberikan manfaat strategis dalam mendorong stabilitas dan kemakmuran ekonomi kawasan perbatasan. Selain itu, tantangan ini juga memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk semakin memperkuat hubungan bilateral di sektor lain seperti industri, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan mengukuhkan posisi Indonesia dan Papua Nugini sebagai mitra strategis di kawasan Asia Pasifik.



PERAN KEMENKO MARVES

di Forum Bilateral, Global, dan Multilateral

- Tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan ke-5 Tingkat Pejabat Tinggi (the 5th Senior Official Meeting/SOM-5) dan Pertemuan ke-3 Tingkat Menteri (the 3rd Ministerial Meeting/MM-3) Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
- Menyampaikan submisi perluasan landas kontinen di segmen barat daya Sumatera seluas 211.397,7 km2 ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB pada tanggal 28 Desember 2020.
- Sidang ke-26 Dewan dan Majelis ISA di tahun 2020.
- The 13th meeting of the Ad Hoc Working Group of the Whole yang diselenggarakan pada 9 September-5 Oktober 2020.
- Sidang ke-75 Marine Environment Protection Committee (MEPC) International Maritime Organization (IMO) pada 16-19 November 2020.
- Sidang ke-7 Human Element Training and Watchkeeping (HTW) International Maritime Organization (IMO) pada 15-19 Februari 2021 (secara daring).
- Sidang ke-76 Marine Environment Protection Committee (MEPC) International Maritime Organization (IMO) pada 10-17 Juni 2021.
- High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE). HLP SOE merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh Norwegia pada tahun 2018.
- Conference of the Parties ke- 26 (COP2-6) UNFCCC di Glasgow-Skotlandia (1-10 November 2021).
- Sidang Assembly (Majelis) ke-32 International Maritime Organization (IMO) pada 6 November-1 Desember 2021 secara daring.
- Mengusulkan Kerja Sama terkait Sustainable Port Development and Renewable Maritime Energy.
- Mengusulkan Kerja Sama terkait Collaboration on Sustainable Shipbuilding in Indonesia.
- Mengusulkan Kerja Sama terkait Maritime Education in Indonesia.
- Mengusulkan penguatan komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi kerja sama AIS Forum di masa mendatang.
- Mengusulkan Leaders Declaration on Solidarity of the Archipelagic and Island States Forum.
- Mendukung Pledge Indonesia tentang dana hibah Pemri untuk negara pulau dan kepulauan dalam kerangka AIS Forum.

- Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO periode dua tahunan (2024-2025).
- Menugaskan Delegari Pemri untuk menjadi anggota pada Komite I dan Komite II.
- Mendukung penyelesaian consolidated text Konvensi IMO dan berperan aktif dalam setiap working group yang kemungkinan dibentuk untuk membahas draft resolution.
- Mendukung permintaan kemudahan pembayaran kontribusi.
- Mendukung pelaksanaan Perlindungan Keanekaragaman Hayati maupun Pemanfaatan Ruang di Laut Bebas secara Adil dan Berkelanjutan.
- Mengusulkan tidak dikecualikannya Sumber Daya Genetik Terbesar (Ikan) di Laut Bebas dari Cakupan Pengaturan Pembagian Keuntungan dalam Pemanfaatan Marine Genetic Resources (MGR).
- Mengusulkan Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Pengetahuan Masyarakat Pesisir (rights of traditional knowledge) terhadap Khasiat dan Manfaat MGR di dalam Rezim Pembagian Manfaat (benefit sharing) BBNJ.
- Mengusulkan pengakuan atas kekhususan Negara Berkembang dan Kebijakan Afirmasi untuk Keterwakilan Negara Kepulauan dalam berbagai Proses Institutional Governance Implementasi Perjanjian BBNJ.
- Mengusulkan perubahan masa jabatan pada Organisasi IMO guna menciptakan organisasi yang progresif
- Mengusulkan dilakukannya impact assesment dalam perhitungan indikator intensitas karbon dalam pelayaran guna menciptakan aktivitas maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut untuk menunjang efektifitas aktivitas pelayaran, pemudahan pemberian sertifikat magang bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran yang proses pembelajarannya terdampak pandemi.
- Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut guna menunjang efektifitas aktivitas pelayaran yang modern.
- Mengusulkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat pelaut bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaranyang proses pembelajarannya terdampak pandemi.
- Menegaskan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AISForum.
- Mendorong inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan Bersama.
- Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerja sama AIS Forum.
- Menyetujui serta memberikan mandate kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan.

- Frasa “archipelagic state” termuat dalam kelima pilar utama pembahasan further refreshed text International Legally Binding Instrumet BBNJ
- Forum menerima usulan untuk memuat dan mempertahankan frasa adjacent coastal state sebagai upayaperlindungan hak-hak negara pantai.
- Usulan untuk menggunakan frasa “fishing and fishing activities” pada bab terkait Marine Genetic Resources
- Menginisiasi Peningkatan Kerja Sama RI - Kenya.
- Menginisiasi Peningkatan Kerja Sama RI - Afrika Selatan.
- Menginisiasi Peningkatan Kerja Sama RI - Tanzania.
- Menginisiasi Peningkatan Kerja Sama RI - Mozambik.
- Wakil Indonesia pada Organisasi International Maritime Organization (IMO).
- Wakil Indonesia pada Organisasi International Seabed Authority (ISA).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).
- Wakil Indonesia pada Organisasi Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).
- Wakil Indonesia pada Organisasi International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).

11



DUKUNGAN MANAJEMEN

Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan/ Diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sepanjang 2016-2024, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang meneguhkan posisi sebagai poros maritim dunia. Regulasi dan kebijakan tersebut tertuang dalam sejumlah aturan, antara lain dalam bentuk Perpres, Inpres dan Permenko Kemaritiman dan Investasi.

11 Perpres

3 Inpres

73 Permenko

- Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024
- Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2019
- Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
- Perpres Nomor 113 Tahun 2017 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 74 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi.
- Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
- Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi
- Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
- Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
- Perpres Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
- Perpres Nomor 101 tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
- Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah
- Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional
- Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2016

- Permenko Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2016 tentang Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
- Permenko Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 10 Tahun 2016 sedang dilakukan proses Revisi dan sampai pada tahap pengusulan P3MK tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 11 Tahun 2016 telah diubah dengan No. 2 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2017

- Permenko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas, Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2017 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Permenko Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 9 Tahun 2015 telah diubah 9 Tahun 2017, diubah kembali 6 Tahun 2018 dan diubah terakhir 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2018

- Permenko Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security Indonesia.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lagu Mars dan Himne Maritim.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2018 tentang Koordinator Pengawasan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 8 Tahun 2018 telah diubah 1 Tahun 2019 dan terakhir dengan 6 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- Permenko Nomor 9 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 10 Tahun 2018 telah dilakukan perubahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 11 Tahun 2018 telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 13 Tahun 2018 telah diubah dengan 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2019

- Permenko Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait
- Permenko Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dengan Badan Usaha dan Lembaga Terkait.

2020

- Permenko Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Menteri Koordinator dan Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2020 tentang 5 Tahun 2020 Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bateray Electric Vehichle untuk Transportasi Jalan dan Kelompok Kerja.
- Permenko Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokuemntasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemenko Marves.
- Permenko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2021

- Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2022

- Permenko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- Permenko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

2023

- Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evakuasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025.
- Permenko Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah.
- Permenko Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan penyesuaian Rencana Aksi percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
- Permenko Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Permenko Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Menteri, dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2024

- Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Permenko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Permenko Nomor 3 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
- Permenko Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

Pendampingan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

RUU

- RUU tentang Kesehatan
- RUU tentang Daerah Khusus Jakarta
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

RPP

- RPP tentang Perubahan Kelima PP Jalan Tol (update terakhir jadi RPP baru, pergantian)
- RPP tentang Jalan
- RPP tentang Irigasi
- RPP tentang Pelaksanaan UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- RPP tentang Sumber Air
- RPP tentang Konservasi Tanah dan Air
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- RPP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- RPP tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

RPP

- RPerpres tentang Food Estate Sumatera Utara
- RPerpres tentang Percepatan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- RPerpres tentang Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- RPerpres tentang Peta Jalan Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional
- RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
- Rperpres tentang Perubahan atas Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.
- Rperpres tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi
- Rperpres tentang Percepatan Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan (Nursery) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- RPerpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023 – 2024
- Rperpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2023-2044
- Rperpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2023-2044
- Rperpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo Tahun 2023-2044
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru Tahun 2024–2044
- Rperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Situs Warisan Dunia Geopark Belitong
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Toraja dan Sekitarnya
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua
- RPerpres tentang Rencana Aksi Pemanfaatan Persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Cagar Budaya Muarajambi
- RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Wilayah Perencanaan Sei Pancang di Provinsi Kalimantan Utara
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan Nusakambangan (Pacangsanak)
- RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Leuser

RKeppres

- Rkeppres tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi Ibu Kota Nusantara
- Rancangan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah Tahun 2024-2029

RInpres

- Rancangan Instruksi Presiden tentang Penertipan Wisatawan Mancanegara dan Penataan Ruang Dalam Rangka Penerapan Pariwisata Berkualitas di Provinsi Bali

RPermen Teknis

- Rpermen ESDM Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
- Rpermen ESDM Pemanfaatan Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
- Rpermen PUPR tentang Perubahan Kedua Permen PUPR Nomor 27/PRTT/M/2015 tentang Bendungan
- Rpermen PUPR tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, dan Persetujuan Pemanfaatan Irigasi
- Rpermen ESDM tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
- Rancangan Kepmenko PMK tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB)
- Rancangan Kepmenko PMK tentang Penetapan Daftar Penyakit Wajib Lapor
- Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Subsidi Angkutan Perkotaan
- Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC)
- RPermen ESDM tentang Air Tanah

Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri

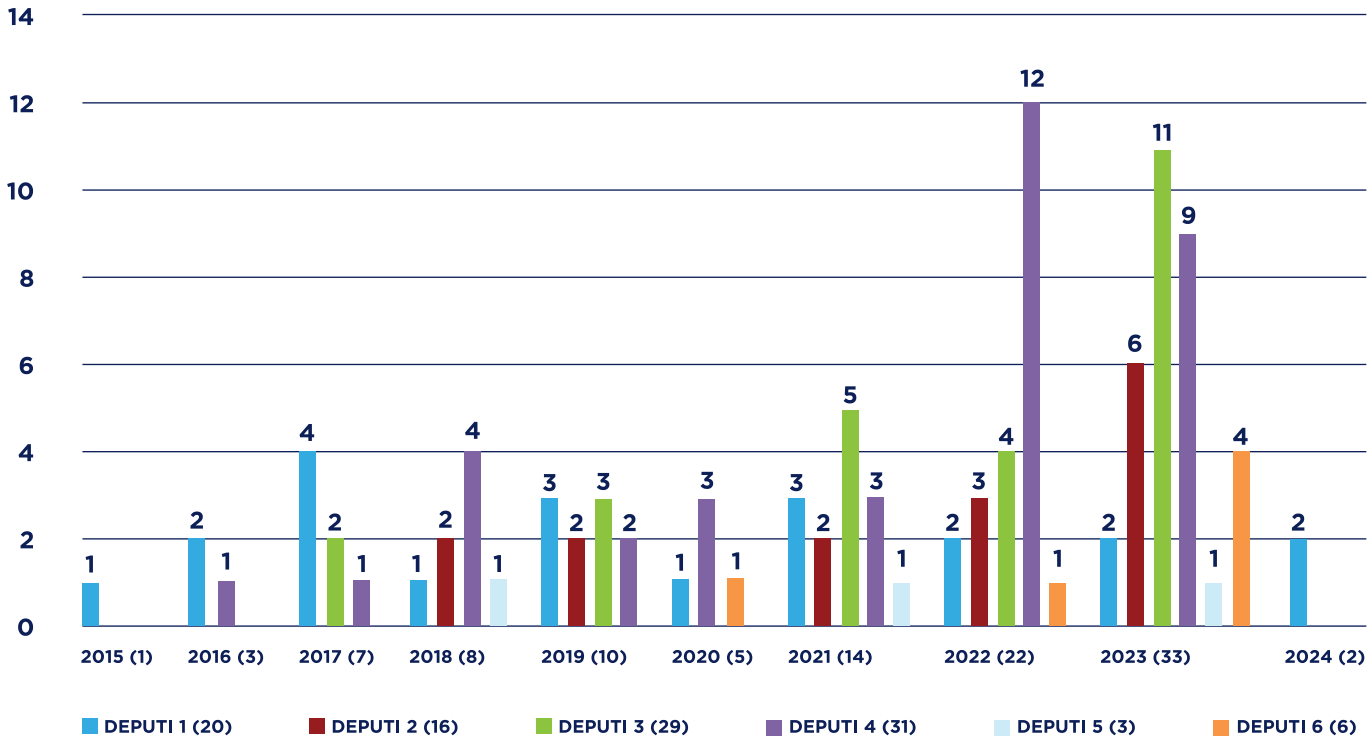
Kesepakatan Kerja Sama Luar dan Dalam Negeri
Kerja Sama Luar Negeri 2015 - 2024 Berdasarkan Tahun

- 17 Join Statement / Join Declaration / Letter of Intent
- 55 Memorandum of Understanding / Memorandum of Cooperation
- 25 Implementing Arrangement / Implementation Agreement
- 5 Plan of Action / Work Plan / Cooperation Plan/ Action Plan
- 3 kerja sama lainnya

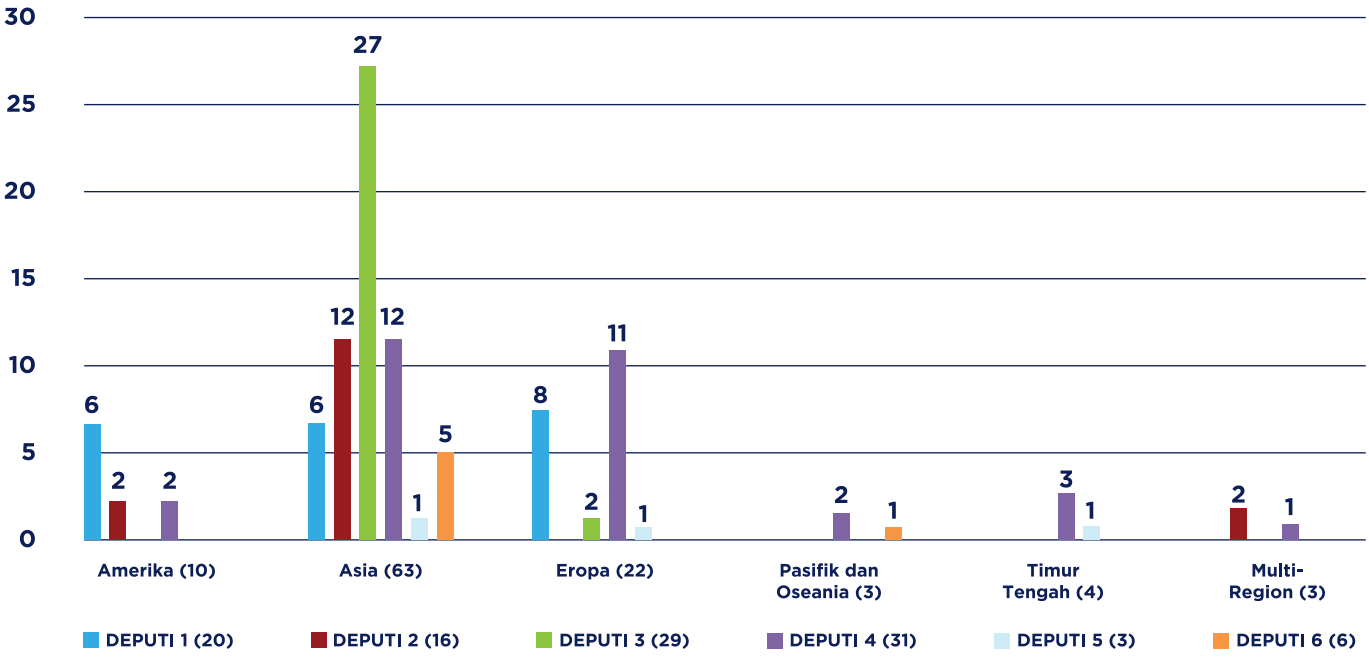
TOTAL 2015-2024

105

*** Masih Berlaku: 86** *** Tidak Berlaku: 19**

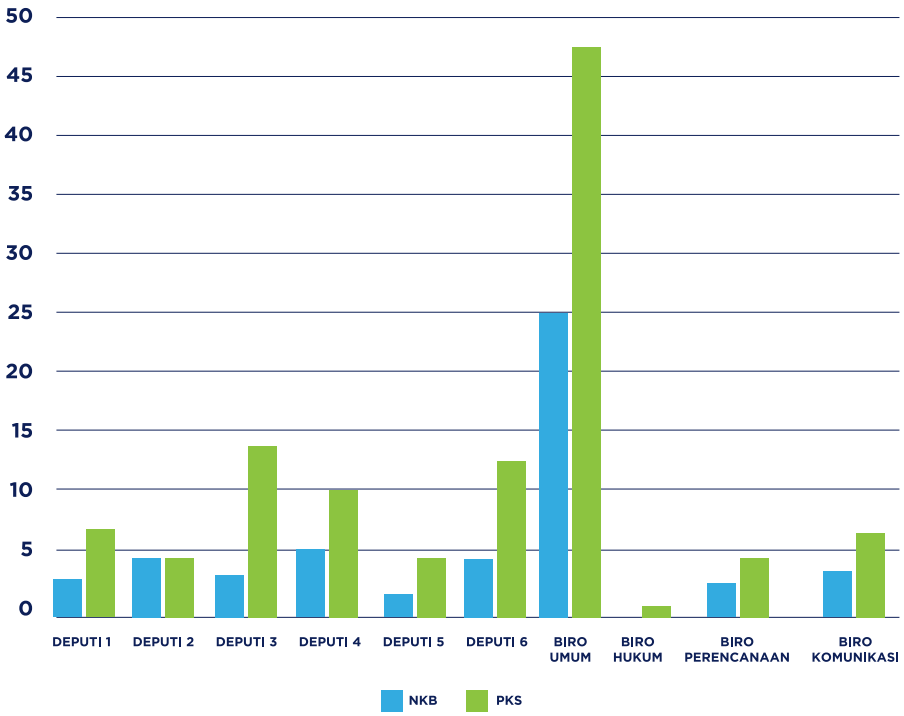


Kesepakatan Kerja Sama Luar dan Dalam Negeri
Kerja Sama Luar Negeri 2015 - 2024 Berdasarkan Wilayah



Kesepakatan Kerja Sama Luar dan Dalam Negeri
Kerja Sama Luar Negeri 2015 - 2024 Berdasarkan Unit Focal point

NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI 2015 - 2024



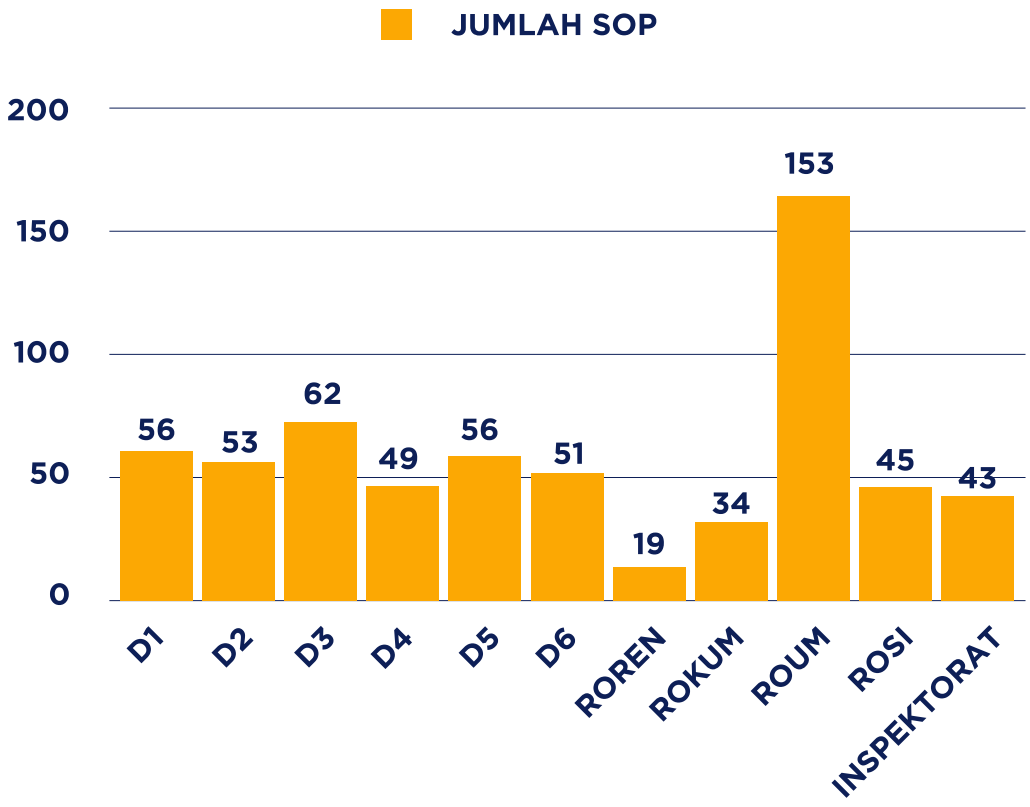
DEPUTI 1 = **11**
DEPUTI 2 = **8**
DEPUTI 3 = **17**
DEPUTI 4 = **15**
DEPUTI 5 = **6**
DEPUTI 6 = **16**
BIRO UMUM = **72**
BIRO HUKUM = **1**
BIRO PERENCANAAN = **6**
BIRO KOMUNIKASI = **8**

TOTAL 2015-2024

160

*** Masih Berlaku: 59**
*** Tidak Berlaku: 101**

Standard Operating Procedure (SOP)
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Total SOP

621

Realisasi Capaian
Periode 2019 - 2024

	CAPAIAN 2023
INDEKS RB	85,07 (0-100)
SISTEM MERIT	300 (0-400)
KUALITAS PENGELOLAAN ASET	3,5 (1-4)
SPBE	3,31 (0-5)
KUALITAS PENGELOLAAN PBJ	68,11 (1-100)
DIGITALISASI ARSIP	89,64 (1-100)
SAKIP	72,19 (1-100)
KINERJA ANGGARAN	93,09 (1-100)

	CAPAIAN 2023
SPI INTERNAL	90 (0-100)
ZONA INTÉGRITAS	WBK/ WBM (0-100)
AKUNTABLITAS KEUANGAN	WTP (5) (1-5)
KUALITAS KEBIJAKAN	67,28% (BAIK) 0-100
REFORMASI HUKUM	99,20 (0-10)
BERAKHLAK	78.1 (0-100)
INDEKS PELAYANAN PUBLIK	4,49 (0-5)
SPIP	3,4 (1-5)

(SUMBER: LEMBAR KERJA EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Kemen PANRB 2024)

Realisasi Capaian **Periode 2016 - 2022**

8 Area Perubahan

[REFORMASI BIROKRASI]

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pengelolaan Reformasi Birokrasi secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menekankan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan (Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

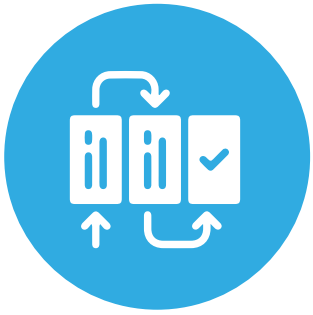
Kemenko Marves terus melakukan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan RB, antara lain menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh KemenPANRB, serta terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam digitalisasi guna mendukung implementasi SPBE.



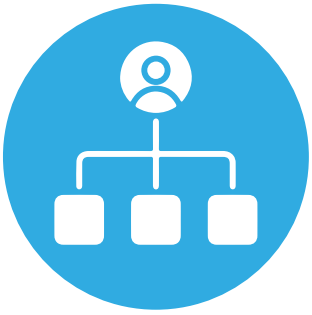
Manajemen Perubahan



Deregulasi Kebijakan



Penataan Organisasi



Penataan Tatalaksana



Pentaaan SDM Aparatur



Penguatan Akuntabilitas



Penguatan Pengawasan



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi Capaian **Periode 2023 - 2024**

Double Track | General & Tematik

Pada tahun 2023, Pengelolaan RB bertranformasi menjadi double track. Dua fokus yang dikenal dengan ‘double track’ ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Dua fokus ini lahir sebagai jawaban pada ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB yang menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual.

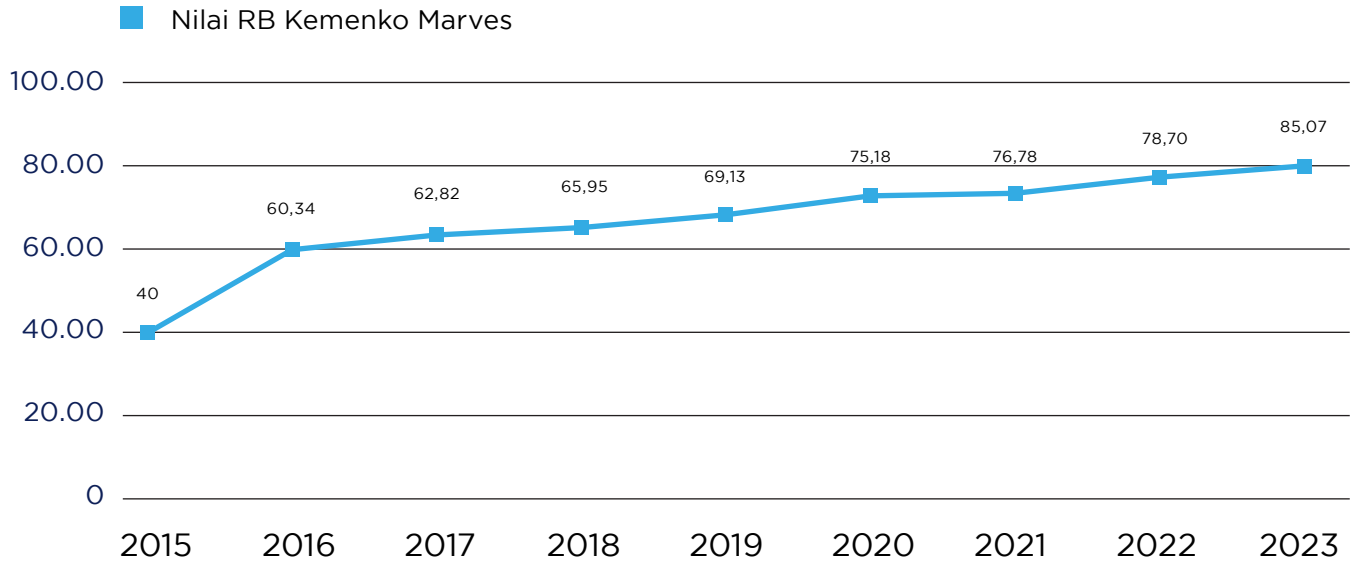
Kemenko Marves telah menyusun Road Map Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan 2 metode yaitu internal (Dikoordinasikan Pengelola RB Pusat dan Tim RB unit Kerja Eselon I), eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2023–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Komitmen Kemenko Marves dalam mendukung kebijakan RB berhasil menjadi salah satu Kementerian yang menerima penghargaan Apresiasi K/L Pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 pada kegiatan RBXperience dan Coaching Clinic.

Berdasarkan capaian implementasi RB sejak tahun 2016 - 2024 dengan 2 kali perubahan kebijakan pengelolaan RB, Kemenko Marves dianggap sebagai Kementerian baru dengan peningkatan indeks RB yang sangat signifikan, kurang dari 10 tahun perjalanan RB berhasil memperoleh predikat “A”.

Grafik Indeks RB Kemenko Marves 2016–2023



Pelayanan Informasi Hukum

Kemenko Marves tidak hanya menjadi Juara JDIHN dengan nilai sempurna 100, namun juga mendorong 7 K/L di bawah koordinasinya agar menjadi 10 Besar JDIHN terbaik dan juga memberikan penghargaan khusus di bawah koordinasi Kemenko Marves dengan kategori Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kategori Pengelolaan Dokumentasi Hukum, Kategori Pengelolaan Organisasi Terbaik untuk mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, lengkap dan mudah bagi masyarakat.

Website JDIH Kemenko Marves bertransformasi dengan menyediakan dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, hal ini mendorong kunjungan tidak hanya dari nasional namun juga internasional(30 Negara).



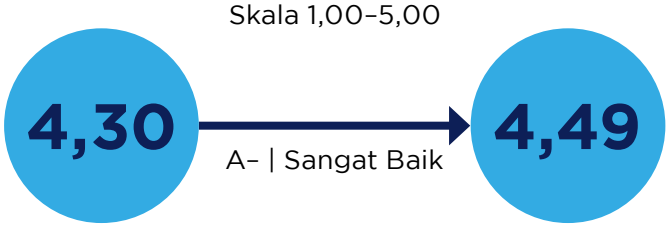


Pelayanan Publik

Hasil Evaluasi Yanlik Tahun 2022, Kemenko Marves meraih nilai Indeks Pelayanan Publik 4,3 Predikat A- (Sangat Baik). Rekomendasi atas hasil evaluasi Yanlik Kemenko Marves tahun 2022 menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 dan menyiapkan bukti dukungnya. Kemenko Marves telah menyepakati unit evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai lokus evaluasi tahun 2023 yaitu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenko Marves.

PESAN sebagai inovasi layanan dari Bagian Humas, PESAN memberikan layanan rata-rata 42 layanan setiap bulannya. PESAN terkoneksi dengankontak kami yang terdapat dalam website maritim.go.id

Capaian Indeks Pelayanan Publik
Skala 1,00–5,00



Indeks Keterbukaan Informasi Publik

2019	2020	2021
38,22	92,44	97,03
Tidak Informatif	Tidak Informatif	Tidak Informatif

2022	2023
97,12	93,33
Tidak Informatif	Tidak Informatif

Pengelolaan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi Pusat Layanan Terpadu di Kemenko Marves. PPID Kemenko Marves sudah mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tiga tahun berturut-turut.



Pengendalian Intern

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 terkait mekanisme penilaian antara penilaian mandiri oleh manajemen K/L, penjaminan kualitas, dan evaluasi oleh BPKP. Selain itu, untuk pemahaman tentang Manajemen Risiko dalam mendukung Pengendalian Internal.

Capaian nilai SPIP Kemenko Marves di Tahun 2023 yakni sebesar 3,425 atau meningkat sebesar 0,146 dari Tahun 2022.

Capaian
Skala 5

2022	2023
3,279	3.425

Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Adapun pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan disusul oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada tahun 2022.



Capaian

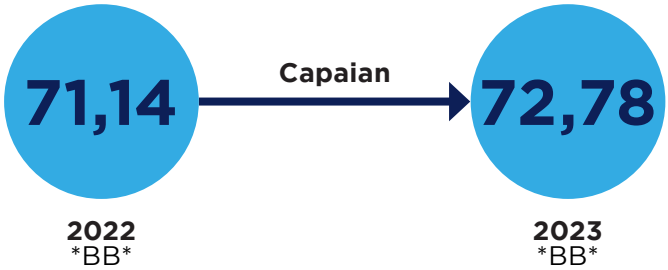
Jumlah Rekomendasi Inspektorat pada 6 unit kerja	telah ditindaklanjuti
84	84

Peningkatan Kinerja

Kemenko Marves berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggung jawab.

Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian Nilai SAKIP Kemenko Marves dari tahun 2019 s.d 2023:



Arsitektur SPBE Nasional

embangunan pemerintahan yang efisien dan efektif merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekturnya. Menko Luhut berbicara bahwa Indonesia memiliki empat pilar ekonomi, yakni hilirisasi, digitalisasi, dana desa, dan harga komoditi. Ia menekankan bahwa digitalisasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi menjadi satu aplikasi untuk Indonesia.

SPBE adalah terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam hal ini, kesederhanaan adalah kunci, baik pada kesederhanaan aturan, proses, dan aplikasi. Setiap unsur layanan haruslah berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha. Menko Luhut menjelaskan salah satunya melalui digitalisasi lewat adanya e-katalog.

9 Fokus Sistem Prioritas dan Pembentukan GovTech Menjadi Kunci Percepatan dan Keberlanjutan Pemerintahan Digital



Layanan Publik Terintegrasi
Infrastruktur Publik Digital (DPI)
Portal Nasional (Portal Layanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan)

Digitalisasi Arsip

Digitalisasi dokumen/arsip adalah salah satu cara proses mengubah dokumen/arsip konvensional ke dalam berbagai bentuk dan media menjadi dokumen/arsip elektronik/ digital.

Pemanfaatan SRIKANDI secara menyeluruh sebagai implementasi SPBE. Melaksanakan tanggung jawab anggota simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Capaian 2023 **81** Skala 1–100

SRIKANDI
Sistem infoRmasI KeArsipaN Dinamis terintegrasI
Versi 2

Kinerja Anggaran

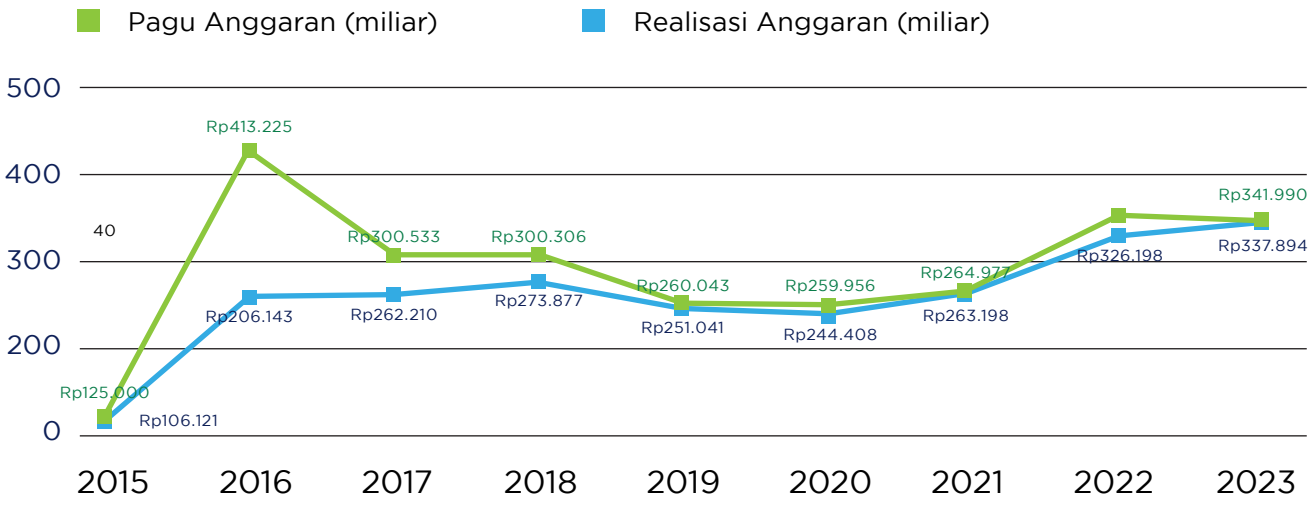
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Juara 3 nilai IKPA terbaik tahun 2021 kategori satuan kerja pusat pagu kecil.

Capaian

91 → **91,53**

TARGET **REALISASI**

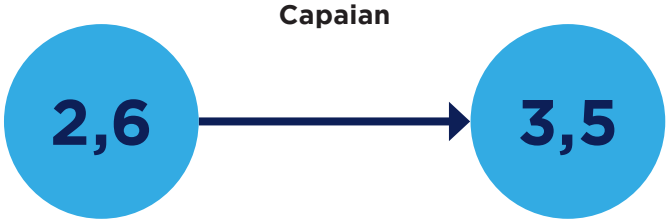


Pengelolaan Aset

Pemeliharaan dan updating kondisi BMN membutuhkan Komitmen, sistem dan pengawasan yang berkelanjutan. Capaian: Penyampaian Laporan BMN dan Laporan; Pengawasan dan Pengendalian tepat waktu; Penyusunan RKBMN sesuai target penyelesaian rekomendasi temuan BPK terkait pengelolaan BMN.



Capaian



2022 **2023**

Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Kebijakan yang diinisiasi Kemenko Marves dalam bentuk Peraturan Menko perlu di nilai kualitasnya.

PM Tahun 2023

100%

Kemenko Marves mengikuti Penilaian IKK secara nasional pada tahun 2023 dengana sampel Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komite Kererta Cepat Antara jakarta dan Bandung dan berhasil memperoleh predikat Baik dengan Progres Pengisian Bukti Dukung 100%. Hasil Penilaian LAN memperoleh nilai 67,28% atau predikat “Baik”).

Reformasi Hukum

Pengukuran terhadap kualitas regulasi, deregulasi dan database sesuai standar layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Tersedianya peraturan yang berkualitas
- Tersedianya database yang sesuai dengan standar layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Kemenko Marves pertama kali mengikuti penilaian Indeks Reformasi Hukum dan memperoleh peringkat 4 nasional.

Capaian 2023

99,20

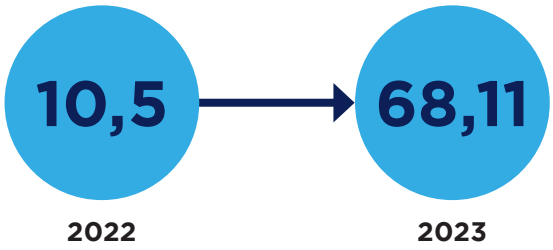
A | Sangat Baik

Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan [ITKP] sebagai Nilai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pengadaan .

- Seluruh PPK memiliki perhatian penuh dalam meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan
- Meningkatkan awareness PPK untuk mengumumkan RUP sesuai dengan pagu pengadaan
- Seluruh PPK melakukan penyelesaian proses e-Tendering,pengisianseluruhmenukatalog,pencatatan Non e-Tendering /Non e-Purchasing dan pengisian e-Kontrak.

Capaian

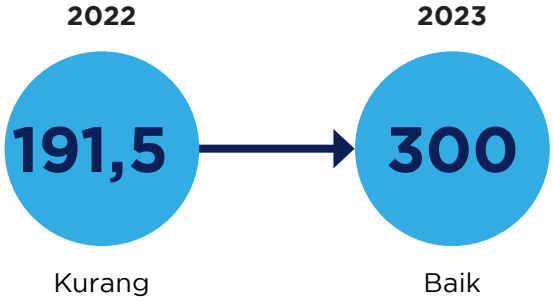


Sistem Merit

- Dokumen Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi menjadi acuan dalam pengembangan pegawai.
- Penilaian SKP semakin objektif dengan telah adanya penerapan penilaian 360 dalam aplikasi e-kinerja
- Adanya acuan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
- Kebijakan internal yang telah disusun akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian.
- Pemanfaatan aplikasi kepegawaian yang ada seperti layanan hukuman disiplin dan layanan administrasi kepegawaianyang telah terintegrasi

Capaian

Nilai capaian aspek sistem merit Kemenko Marves bernilai baik



Akuntabilitas Keuangan

Capaian WTP tidak hanya bergantung pada pemahaman Akuntansi Pemerintahan oleh Tim Penyusun LK akan tetapi juga bergantung pada cara pelaksanaan anggaran oleh unit kerja yang harus sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Kemenko Marves mendapat WTP 8 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan 2016 - 2024.

WTP 2014 S.D 2023



Marves Ber–Akhlak

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi menjadi penting untuk mendorong perubahan sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture set ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif.

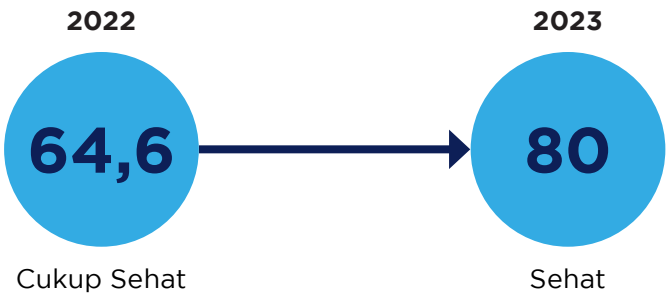
Pada tahun 2024, Kemenko Marves menginisiasi pembentukan Forum Budaya Kerja Kemenko Marves bersama dengan 7 K/L di bawah koordinasi yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kealutan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekraf.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kembali menjadi yang terbaik nasional dalam penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif) dengan memperoleh penghargaan The Biggest Improvement dan The Highest Score kategori Kementerian dalam acara Appreciation Day sebagai rangkaian dari ASN Culture Festival 2023.

Kemenko Marves berhasil memperoleh lonjakan nilai tertinggi kategori kementerian sebesar 13,70 persen dari tahun 2022 sebesar 64,4 persen menjadi 78,10 persen pada tahun 2023 yang sekaligus menjadi nilai tertinggi kementerian.

Forum budaya kerja diagendakan sebagai wahana untuk sharing session antar Kementerian terkait kegiatan budaya kerja BerAKHLAK. Pada pertemuan tersebut juga di lakukan tanda tangan bersama pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani budaya kerja BerAKHLAK dari masing-masing Kementerian.

Capaian
Skala 1–100





1 Kategori The Best Starter Dengan Nilai Tertinggi Dari Seluruh K/L Dan Pemda Yaitu 64,6% (Cukup Sehat)

2 Kategori Best Starter Core Values Akun Tabel Dengan Nilai 82,3% (Sehat)

3 Kategori Best Starter Core Values Adaptif Dengan Nilai 59,5% (Sehat)

Pencegahan Korupsi

Capaian indeks integritas Kemenko Marves lebih tinggi dari capaian nasional, namun masih memiliki risiko yang tinggi pada area pengelolaan keuangan, pengelolaan PBJ dan benturan kepentingan.

Capaian Indeks Integritas 2023

81,2	70,97
Kemenko Marves	Indeks Integritas Nasional 2023

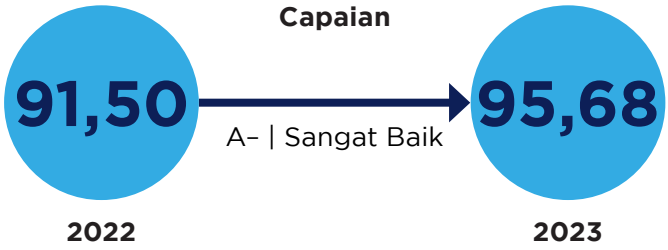
Capaian 2023

86,66	2023	80,4
Indeks Eksternal		Indeks Internal



Survey Kepuasan Masyarakat

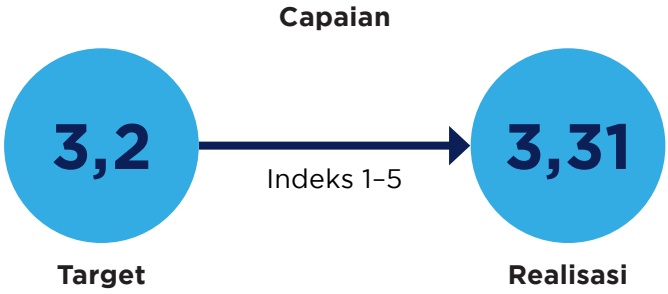
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

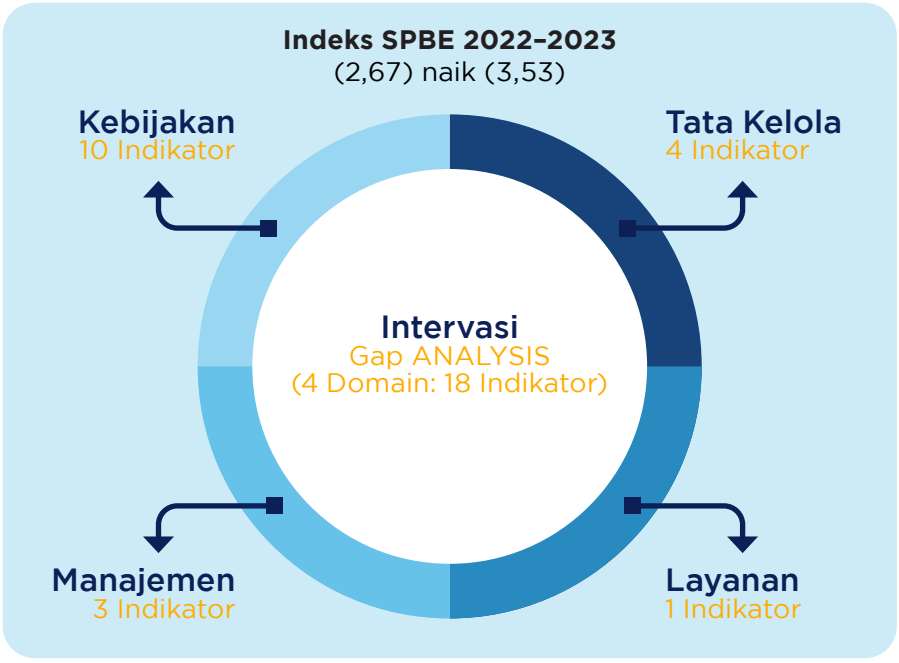


Layanan SPBE

SPBE penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.





- Melaksanakan reviu dokumen kebijakan internal SPBE
- Melaksanakan audit Internal TIK (tool BRIN)
- Memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE
- Perumahan dokumen pendukung untuk tiap domain
- Transformasi digital layanan

Prestasi

Kemenko Marves meraih beberapa penghargaan:

- Predikat “Sangat Baik” atas Capaian Kinerja Anggaran TA 2020 dari Kementerian Keuangan
- Penghargaan Pengelola Anggaran Terbaik ke-2 level Kementerian dari Kementerian Keuangan dengan Kategori Kementerian/Lembaga Pagu Anggaran Kecil
- Penghargaan Institusi dengan program inovatif selama masa Pandemi Covid 19 “Terpopuler di Media Cetak 2020” (Public Relations Indonesia Awards 2021)
- Penghargaan BKN Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun dari BKN
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 s.d 2023 dan Penghargaan atas 8 kali WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Predikat sangat baik mencapai 98,3% atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) Kemenko Marves Tahun 2020
- Apresiasi dalam Merdeka Award 2021 untuk Program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)
- Penerbitan Peraturan Presiden Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
- Penghargaan JDIHN Awards, 4 tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022, 2023), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards 2023 (oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023).
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan total nilai 77,91 pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari KemenPANRB
- Kategori Kementerian, “Terpopuler di Media Cetak 2021”.
- Media Sosial terbaik (Silver Winner)
- Website Terbaik (Bronze Winner).
- Peringkat I kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT untuk Kementerian Kecil
- Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I Tahun 2022 Kategori Kementerian.
- Sinergitas Awards
- ASN Culture Fest 2022 (Best Starter Overall Indeks BerAKHLAK) dari KemenPANRB
- Juara 1 Kementerian dan Lembaga dengan Indeks Implementasi BerAKHLAK, juara 1 Indeks Implementasi Akuntabel dan juara 1 Indeks Implementasi Adaptif, ACT Consulting International, 2023.
- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023 (2020,2021,2022,2023), Komisi Informasi Publik (KIP)
- The Biggest Improvement dan The Highest Score kategori Kementerian dalam acara Appreciation Day (ASN Culture Festival 2023 oleh KemenPanRB).
- Peringkat 4 Indeks Reformasi Hukum (IRH) (Skor 96) (Pemberian Penghargaan IRH Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI).
- Apresiasi K/L Pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 (RBXperience dan Coaching Clinic, KemenPanRB, 2023).
- Apresiasi Revolusi Mental 2023, Gerakan Indonesia Bersih, Anugerah Revolusi Mental 2023, Kemenko PMK
- Kategori Pelayanan Informasi Publik, SubKategori Ruang Pelayanan Informasi Publik., Anugerah Humas Indonesia 2022.
- Menko Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- sebagai pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Digital 2022, Anugerah Humas Indonesia 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI sebagai Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022, Anugerah Humas Indonesia 2022.



Inovasi

No	Inovasi	Manfaat
1	Aplikasi Administrasi dan Monitoring Kehadiran Pegawai MARVES CORE	Administrasi dan monitoring kehadiran pegawai serta presensi elektronik berbasis mobile, sehingga memudahkan pegawai kemenko marves.
2	Aplikasi publikasi dan dokumentasi Produk Hukum JDIH WEBSITEDAN MOBILE	Publikasi dan dokumentasi produk hukum yang dapat diakses oleh publik
3	Aplikasi pengelolaan data pegawai Marves Human Resources	Pengelola data kepegawaian berbasis aplikasi (seperti pengurusan kepangkatan, berkala dan pensiun) sehingga memudahkan dalam menjaga dokumen pegawai dan proses pengurusan administrasi kepegawaian.
4	Aplikasi Pengelolaan Kinerja Sistem Informasi Kinerja – Maritim	Pengelolaan kinerja berbasis sistem informasi yang dapat memantau capaian kinerja dan data dukung seluruh unit kerja.
5	Aplikasi pengumpulan bukti dukung RB E-Reformasi Birokrasi	Pengumpulan bukti dukung RB terpusat sehingga tersimpan rapi dan berkelanjutan, memudahkan unit kerja untuk mencari bukti dukung, tim penilai internal/inspektorat dalam memberikan penilaian, dan KemenpanRB dalam memeriksa bukti dukung dan penilaian
6	Aplikasi monitoring dan updating data Anjab ABK EOrganisasi	Keseragaman sekaligus memudahkan pelaksanaan monitoring dalam updating data atas pelaksanaan Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkup Kemenko Marves. Sistem saat ini dalam proses integrasi ke sistem CIASN milik BKN dengan tujuan memudahkan BKN dalam mendapatkan data Kemenko marves.
7	Aplikasi informasi dan penyusunan Monev SOP ETata Laksana	Sistem informasi yang berfungsi sebagai penyusunan dan monev SOP
8	Aplikasi Sarana Pengaduan dan Aspirasi Pengelolaan Sistem Informasi aspirasi kemaritiman	Sarana pengaduan dan aspirasi berbasis website yang dapat diakses oleh publik

Inovasi #2

No	Inovasi	Manfaat
9	Aplikasi pengelolaan anggaran internal Sistem Penatausahaan Anggaran Terpadu	Sistem pengelolaan anggaran internal
10	Aplikasi Geospasial Kemaritiman	Menyajikan informasi kebumian atau aspek keruangan dengan koordinat tertentu seperti peta jalur koridor kabel laut, peta lahan garam indonesia, peta labuh jangkar, peta kawasan konservasi, peta pulau-pulau kecil terluar dll.
11	Layanan Pengaduan Pungli Pelabuhan	Layanan yang memungkinkan publik untuk dapat melaporkan kegiatan pungli di pelabuhan
12	Layanan Pelaporan Penelantaran Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia	Menyediakan form pelaporan yang dapat digunakan oleh pelaut dan AKP Indonesia untuk melaporkan kasus penelantaran, seperti pelanggaran HAM maupun hak-hak ketenagakerjaan yang dialaminya, baik di luar maupun dalam negeri.
13	Layanan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Layanan pengaduan terkait aktivitas di pelayaran rakyat serta microsite pelayaran rakyat juga sebagai layanan informasi (regulasi, data base, dll.) terkait pelayaran rakyat
14	Aplikasi mendukung manajemen pengetahuan Sistem Informasi Managemen Pengetahuan	Sistem informasi berbasis website yang mendukung manajemen pengetahuan di kemenko marves, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui progres kegiatan dan analisa data dari seluruh unit kerja.
15	Aplikasi untuk Database Smelter melalui Information and Communication System for Indonesian MineralDownstreaming Stakeholders (ICOS for IMDOS).	Sinkronisasi data antara KESDM, Kemenperin, dan Kemeninves/BKPM.· Validitas tinggi karena data yang terkumpul merupakan data primer.· Kualitas perumusan bahan kebijakan meningkat karena didukung oleh data yang komprehensif.Data yang terkumpul dapat diguna-pakai oleh seluruh K/L.

Perayaan Hari Maritim Nasional (HMN) Sebagai Momentum Membangun Literasi dan Potensi Kemaritiman di Indonesia



Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional yang dipusatkan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Kupang, Nusa Tenggara Timur (30-9-2023)

Penetapan Hari Maritim Nasional diinisiasi oleh Presiden RI ke-I Soekarno setelah Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I yang diadakan pada 23 September 1963, satu tahun kemudian Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomer 249/1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional (HMN). Hal tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim.

Keinginan tersebut kembali digaungkan pada masa pemerintahan Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla 50 tahun kemudian. Semangat Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia kembali berjaya sebagai negara maritim telah mengilhami Presiden Joko Widodo. “Kita telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya pada tahun 2014 di Gedung DPR/MPR.

Salah satu Langkah nyatanya adalah dengan membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2014 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan. “Bertahun-tahun kita suka lupa padahal Indonesia ini terdiri dari lebih 75% laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,”ujarnya di kantornya, Jumat (22/3/2017).

Hingga kini, perayaan HMN ini terus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai kemaritiman. Hari Maritim Nasional juga merupakan momen penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di sektor kemaritiman, serta memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang kuat dan unggul.

Perayaan Hari Maritim Nasional Tahun 2022, Kemenko Marves menggelar Lokakarya bertajuk Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Pesisir pada tanggal 23 September 2022. Lokakarya ini menghadirkan beberapa narasumber dan pakar yang ahli di bidang perubahan iklim dan ekosistem pesisir, di antaranya Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M. Sc (Menko Maritim 2014-2015); Dr. Andreas Kunzmann dari Center for Marine Tropical Ecology (ZMT) Jerman dan Prof. Dr. Ir. Hefni Effendi selaku narasumber; Perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia.



Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional 2022 yang ke-58, di Jakarta (27-9-2022). Dalam puncak HMN Tahun 2022 ini, Menko Marves juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M yang diwakili oleh putra beliau R. Askari Kusumaatmadja sebagai apresiasi dan penghormatan atas jasa dan pengabdiannya dalam memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan dan wawasan nusantara yang diakui oleh dunia dan menjadi bagian dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982).

Puncak Hari Maritim nasional ke-58 Tahun 2022 diselenggarakan di Auditorium Soemitro Djojohadikoesoemo pada tanggal 27 September 2022 dengan mengangkat Tema "Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan" dengan slogan Maritim Tangguh, Indonesia Kuat. Walaupun dilaksanakan masih dalam masa pandemi Covid-19, acara ini tetap dilaksanakan secara meriah karena dilaksanakan secara daring dan luring. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi, masyarakat serta lembaga lainnya di beberapa tempat atau kota di Indonesia ikut memeriahkan secara online. Lebih dari 1000 peserta hadir secara online baik melalui *link zoom meeting* maupun kanal youtube resmi Kemenko Marves.

Dalam puncak HMN ke-58 Tahun 2022, Menko Marves juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M yang diwakili oleh putra beliau R. Askari Kusumaatmadja sebagai apresiasi dan penghormatan atas jasa dan pengabdiannya dalam memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan dan wawasan nusantara yang diakui oleh dunia dan menjadi bagian dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982). Ini merupakan bentuk konkret dukungan untuk mendorong penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Selain itu, sejumlah agenda kegiatan telah dilaksanakan sebagai Bulan Literasi Maritim di mana menjadi pre-event Peringatan Hari Maritim Nasional ke-58 tahun 2022 dari bulan Agustus sampai September 2022.

Perayaan Hari Maritim Nasional Tahun 2023 dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan yang diawali dengan kegiatan bertajuk Kerja Bersama Hijaukan Indonesia: Aksi Penanaman Mangrove yang akan dilaksanakan di Ketapang Urban Aquaculture, Mauk, Tangerang pada 31 Agustus 2023 sebagai salah satu agenda Bulan Maritim Nasional. Rangkaian kegiatannya meliputi aksi penanaman 15.000 batang mangrove, aksi pelepas liaran belangkas/mimi (Tachypleus gigas), aksi sosial literasi maritim berbagi buku bacaan untuk anak-anak, paket peralatan sekolah dan paket makanan untuk anak-anak. Agenda ini dihadiri Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia G. L. Kalake, Deputi Nani Hendiarti, Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Marsetio bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Marves, Ibu Devi Pandjaitan, beserta Ketua dan anggota DWP yang mendukung dan membantu menyukseskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Mangrove.

Menutup Perayaan Hari Maritim nasional ke-59 dilaksanakan puncak perayaan HMN ke-59 Tahun 2023 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengusung tema “Pembangunan Negara Kepulauan berwawasan Nusantara menuju Indonesia Emas 2045.” Pada tanggal 12 Oktober 2023. Dalam sambutannya melalui rekaman video, Presiden mengatakan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman. Dirinya kemudian mengajak semua elemen masyarakat untuk wujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 mengambil tema **“Layar Terkembang Manuju Indonesia Maju”.** Tema HMN ke-59 ini juga tergambarkan secara visualisasi melalui Konsep background display kapal-kapal yang memberi nuansa Kemaritiman serta atraksi kapal nelayan hias sebagai bentuk apresiasi nelayan pada peringatan Selain itu, keluarga laksamana Perempuan pertama di Indonesia, Laksamana Keumalahayati, juga memberikan apresiasinya kepada pemerintah atas dijadikannya Keumalahayati sebagai pahlawan nasional.

Hari Maritim Nasional. Puncak Hari Maritim Nasional ke-59 di Kota Kupang, ini juga menjadi momentum strategis untuk menyampaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil diselesaikan dan juga ditargetkan selesai di akhir tahun 2023 sampai 2024 sebagai Janji Prioritas Presiden untuk Provinsi NTT. Pada kesempatan tersebut, Kemenko Marves bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Buku Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim 2017-2021. Penyusunan PDB Kemariman mengacu pada rekomendasi dan manual standar yang berlaku secara internasional. Cakupan klasifikasi PDB kemaritiman juga berdasarkan framework dari ocean account dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia sehingga diperoleh 12 klaster kemaritiman dan 374 klasifikasi baku lapangan Indonesia tahun 2020.

Perayaan Hari Maritim Nasional yang ke-60 Tahun 2024 mengusung tema yaitu “Membangun Nusantara Baru Melalui Kekuatan Maritim: Menuju Indonesia Maju”. Perayaan Hari Maritim tahun ini adalah kesempatan penting untuk menanamkan kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang potensi Indonesia sebagai Negara Maritim yang perlu di eksplorasi dan dikembangkan lebih dalam lagi.

Sebagai rangkaian dari Hari Maritim Nasional (HMN) ke-60, Kemenko Marves menyelenggarakan Penguatan Literasi Kemaritiman dengan







Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional yang dipusatkan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Kupang, Nusa Tenggara Timur (30-9-2023)





Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional yang dipusatkan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Kupang, |Nusa Tenggara Timur (30-9-2023)

mengadakan Kunjungan Edukasi ke Museum Bahari bersama perwakilan pelajar Sekolah Menengah Atas, Kamis (19-9-2024). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Kemenko Marves untuk mengenalkan serta memberikan pemahaman sejarah kemaritiman yang kuat kepada generasi muda.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong minat generasi muda agar mencintai dan mengembangkan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan diberikannya wawasan kemaritiman kepada siswa SMA, dapat mendorong para pelajar tersebut untuk dapat memilih fakultas ataupun jurusan yang berkaitan dengan bidang kemaritiman.

Selain mengunjungi Museum Bahari, para siswa juga diajak untuk melakukan kunjungan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Para pelajar ini diajak berkeliling pelabuhan menggunakan kapal nelayan dan menaiki kapal-kapal angkut untuk melihat lebih dekat aktivitas-aktivitas yang dilakukan di pelabuhan.

Menutup rangkaian peringatan Hari Maritim Nasional ke-60, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Universitas Riau menyelenggarakan Kuliah Umum Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kesehatan Laut, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Bersama, Selasa (23-9-2024). Bertepatan dengan Hari Maritim Nasional, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam video sambutan yang diputar dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa kekuatan maritim merupakan pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus bekerja keras untuk memastikan bahwa program-program pembangunan kemaritiman telah, sedang, dan akan terus diimplementasikan. Ada banyak program prioritas yang menjadi fokus kami demi menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Dari pembangunan infrastruktur pelabuhan, meningkatkan konektivitas maritim, hingga peningkatan ekonomi berbasis kelautan, semua diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara maritim yang Tangguh.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini, Hendra Yusran Siry, Staf Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kuliah umum ini dihadiri tidak kurang dari 600 mahasiswa dari berbagai program studi dan civitas akademik Universitas Riau.

12

APA KATA MEREKA



PENUTUP

Apa yang disajikan dalam "Bentangkan Layar: Menuju Indonesia Emas 2045" merupakan potret pencapaian kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024. Meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi, 34 penugasan tambahan langsung dari Presiden, serta amanat peraturan perundang-undangan lainnya telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Seperti penanganan Covid - 19, perundingan batas maritim, ekstensi landas kontinen, *Realignment Flight Information Region (FIR)* RI-Singapura, *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), Carbon Capture Storage,* Tol Laut, Pemberdayaan Pelayaran Rakyat, *International Sustainability Forum (ISF),* serta Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Tugas lainnya tak kalah penting adalah Eksplorasi Laut Dalam, Hilirisasi Rumput Laut, Pemulihan Ekonomi *Nasional Indonesia Coral Reef Garden (PEN- ICRG),* Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, Citarum Harum, Tata Kelola Sawit, Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata Indonesia (BBWI), Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Dalam sektor transportasi dan infrastruktur, tugas yang diemban meliputi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Pembangunan Pelabuhan dan Bandara.

Terlaksana pula *High-level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM)* Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok, Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), Peningkatan Sumber Daya Manusia dan lainnya, yang merupakan potret pembelajaran dan pijakan langkah selanjutnya bagi generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan global dan bergerak maju mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tidak ada gading yang tak retak, kami menyadari masih banyak yang harus disempurnakan, mengingat kondisi global yang penuh tantangan seperti Pandemi Covid-19, konflik Rusia dan Timur Tengah, serta kondisi Ekonomi Global yang kurang menguntungkan. Namun, di atas itu semua, yang terpenting adalah kita tetap optimis melanjutkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tidak ada peradaban maju yang dibangun hanya oleh satu atau dua generasi. Membangun peradaban ibarat sebuah perlombaan lari estafet yang melibatkan berbagai generasi. Perspektif jangka panjang harus dimiliki oleh semua generasi. Oleh karena itu, penting bagi kita unuk terus menyempurnakan harapan kita menujù Indonesia Emas 2045.



Ayodhia G. L. Kalake
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator di Kemenko Marves, Sesmenko Ayodhia menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves yang mencakup rencana program dan anggaran, manajemen SDM dan organisasi, dukungan regulasi hukum dan peraturan perundangan, rumah tangga, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi.

Banyak keberhasilan yg telah dicapai oleh Kemenko Marves selama ini, antara lain: Terbaik I Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH Nasional Tahun 2021, 2022, dan 2024, Terbaik I Nasional Kategori Kementerian Implementasi BerAKHLAK Tahun 2022 dan 2023, Anugerah dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Kementerian Informatif, Kategori Kementerian terpopuler di Media Cetak Tahun 2021 – PR Indonesia, Predikat "Sangat Baik" atas Capaian Kinerja Anggaran, Predikat WTP selama 8 Tahun berturut-turut, *Best Starter Overall* BerAKHLAK, *Best Starter* Akuntabel, *Best Starter* Adaptif, *The Biggest Improvement* dan *The Highest Score* kategori Kementerian dari Kementerian PAN RB, dan yang terkahir Kemenko Marves berhasil mendapatkan Tunjangan Kinerja 100% yg suratnya diserahkan langsung oleh Men PAN RB kepada Bapak Menko. Selain menjalankan tugas sebagai Sesmenko, beliau juga melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Sekretaris Jenderal *High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM)* Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan telah menyelesaikan berbagai perjanjian kerja sama yang membawa banyak manfaat bagi pembangunan nasional.

Sebagai Kepala Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara pada Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, beliau berperan aktif memimpin rapat koordinasi persiapan Presidensi G20 dan merumuskan berbagai kebijakan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam menyukseskan penyelenggaraan Presidensi G20. Beliau juga mengoordinasikan satgas yang mengawal implementasi deliverables/kesepakatan yang ditandatangani pada G20.

Berbagai capaian ini tidak lepas dari sosok Bapak Menko Luhut B. Pandjaitan yang selalu menginspirasi dan memberikan berbagai dorongan untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi organisasi.

Sesmenko Ayodhia senantiasa berharap Kemenko Marves tetap meneruskan tradisi berprestasi dalam berbagai hal. Beliau juga mengharapkan program – program yang telah dibangun selama ini tetap berjalan dan memberikan manfaat baik bagi bangsa Indonesia.



JODI MAHARDI
Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim dan Energi

Menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves, telah menjalankan tugas-tugas krusial yang mencakup keamanan maritim, pengelolaan energi, hingga koordinasi perbatasan laut Indonesia. Selain tanggung jawab utama, juga dipercaya oleh Menko Luhut Pandjaitan untuk menangani berbagai tugas khusus, seperti ketahanan pangan melalui regulasi diversifikasi sumber pangan dan proyek-proyek strategis di sektor energi. Salah satu proyek penting adalah pengembangan carbon capture storage, teknologi yang dapat membantu Indonesia menarik investasi rendah karbon.

Selama lima tahun terakhir, Tercatat banyak pencapaian. Salah satu yang paling berkesan adalah keberhasilan menyelesaikan kesepakatan maritim antara Indonesia dan Singapura, yang sempat tertunda selama bertahun-tahun. Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Menko Luhut yang mampu mengarahkan timnya dengan baik. Pengalaman berkesan lainnya adalah berhasil membebaskan aset Pertamina di Venezuela yang terhambat oleh sanksi Amerika Serikat. Melalui pendekatan diplomatik yang intensif, Tmnya berhasil mengamankan aset bernilai ratusan juta dolar AS tersebut.

Melihat ke depan, berharap Kemenko Marves terus berperan dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional. Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan program yang telah dibangun, seperti pengembangan teknologi *carbon capture storage* yang memiliki potensi besar untuk ekonomi Indonesia. Kesinambungan program ini sangat penting untuk mendukung pemerintahan yang akan datang dan menjaga posisi Indonesia di kancah global.



MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, tugasnya mencakup berbagai isu strategis. Salah satu fokus utamanya adalah hilirisasi rumput laut dan eksplorasi laut dalam—dua bidang yang memiliki potensi besar namun masih membutuhkan banyak perbaikan.

Timnya telah bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem rumput laut dari hulu ke hilir. Mereka mendorong adanya corporate farming dan mekanisasi, namun diakuinya bahwa masih banyak kebijakan yang perlu diubah agar hilirisasi dapat berjalan lebih cepat. Demikian pula, dalam eksplorasi laut dalam, timnya berhasil mendatangkan kapal dari China yang mencatat rekor penyelaman terdalam, serta menjalin kerja sama dengan Ocean X dalam bidang riset dan edukasi. Namun, Masih banyak yang harus ditingkatkan agar Indonesia memiliki armada kapal riset yang independen dan canggih.

Salah satu momen paling berkesan adalah saat terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di masa varian Delta. Saat itu, Menko Marves, Pak Luhut, ditunjuk sebagai Koordinator PPKM untuk Jawa dan Bali, dan menjadi bagian dari tim yang merancang kebijakan PPKM tersebut. Pengalaman ini sangat berkesan karena merupakan tugas pertamanya di Kemenko Marves. Merasa bangga karena kebijakan yang didesain memberikan dampak besar, tidak hanya dalam menyelamatkan nyawa, tetapi juga dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, diakui bahwa potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, berbagai fondasi telah diperbaiki untuk mempercepat perkembangan sektor kemaritiman. Harapannya siapa pun yang menjadi Menko Marves berikutnya dapat melanjutkan fondasi ini, karena potensi maritim harus dimaksimalkan jika Indonesia ingin menjadi negara maju sesuai visi Indonesia 2045.

Optimis dengan fondasi yang telah dibangun selama ini akan menjadi landasan kuat bagi pemerintahan berikutnya dalam mengembangkan potensi maritim Indonesia.



RACHMAT KAIMUDDIN
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), memulai perjalanan kariernya di Kemenko Marves pada awal tahun 2022. Berawal sebagai penasehat khusus Menteri, kemudian staf khusus, dan akhirnya sebagai Deputi yang menangani koordinasi infrastruktur dan transportasi, Rachmat memegang peran kunci dalam mengawal pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, serta mendukung industri nasional.

Di luar tugas-tugas utamanya, dipercaya untuk mengawal transisi energi—suatu upaya penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil. Transisi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangkit tenaga listrik, transportasi, hingga sektor lainnya, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bersama timnya berhasil meraih beberapa pencapaian besar. Salah satunya adalah komitmen pendanaan lebih dari 20 miliar dolar untuk pembangunan transmisi dan pembangkit listrik tenaga terbarukan. Tak hanya itu, beberapa proyek terkait energi terbarukan juga sudah mulai berjalan. Selain itu, berperan penting dalam mendorong industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari mobil hingga motor listrik. Hasilnya, kapasitas produksi telah terbangun, dan produk-produk tersebut mulai diterima oleh masyarakat. Tak ketinggalan, industri energi terbarukan seperti panel surya dan baterai, baik untuk energi penyimpanan, juga menjadi fokus utama dalam mendorong ekonomi hijau di masa depan.

Harapannya, upaya transisi energi dan ekonomi hijau yang telah dimulai ini dapat terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Visi besarnya adalah menjadikan Indonesia tidak hanya mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga mampu menjadi eksportir kendaraan listrik, baterai, panel surya, listrik hijau, dan produk hijau lainnya. Semua ini diharapkan menjadi industri andalan Indonesia di masa depan.

Rasa syukur dan terima kasihnya kepada Menteri Koordinator, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, atas bimbingan dan kesempatan belajar yang diberikan. *“I learn a lot from you, Pak, to deliver better results, to be a leader, and to be a man. I love you, Pak Luhut,”*



NANI HENDIARTI
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan di Kemenko Marves memainkan peran penting dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan kehutanan. Bertanggung jawab untuk memastikan semua pihak terkait bekerja sejalan dalam menjaga lingkungan hidup dan mengelola sumber daya hutan dengan bijak.

Selama empat tahun terakhir, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah melaksanakan sejumlah program prioritas yang berdampak luas. Salah satu pencapaiannya adalah program perhutanan sosial, yang menargetkan pemanfaatan lahan hutan seluas 12,7 juta hektar. Saat ini, sekitar 7,5 juta hektar sudah terealisasi, dan targetnya terus bertambah. Program lain yang menjadi sorotan adalah pengembangan food estate di Sumatra Utara, sebuah inisiatif yang melibatkan pengelolaan lahan tidur menjadi lahan produktif untuk hortikultura. Selain itu, Bberperan dalam inisiatif G20 Bali 2022 yang melibatkan kerja sama internasional untuk mendukung negara berkembang dalam mencapai target lingkungan. Hingga kini, sembilan negara telah menandatangani Letter of Intent untuk mendukung inisiatif ini.

Bekerja di bawah kepemimpinan Menko Luhut Binsar Pandjaitan adalah pengalaman yang sangat berharga. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika diminta mempresentasikan program food estate di hadapan Presiden. Program ini melibatkan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat, dan berhasil mengubah lahan yang tidak produktif menjadi kawasan hortikultura yang mandiri.

Pengalaman berkesan lainnya adalah dalam menangani isu sampah. Timnya menghadapi tantangan besar dalam mengubah budaya masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Program ini melibatkan teknologi baru seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) dan ekonomi sirkular, yang mulai diterapkan di berbagai daerah.

Melihat perkembangan yang telah dicapai, berharap agar program-program lingkungan dan kehutanan ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Misalnya, Sungai Citarum, yang dulunya dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia, kini telah mengalami peningkatan kualitas air yang signifikan. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk mencapai target rehabilitasi 600 ribu hektar mangrove dan melibatkan lebih banyak masyarakat serta sektor swasta dalam menjaga lingkungan.

Ke depan, berharap Indonesia terus mempertahankan dan meningkatkan kemajuan yang telah dicapai, memastikan bahwa program-program yang telah berjalan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.



ODO R. M. MANUHUTU
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), berperan dalam mengoordinasikan berbagai isu penting yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa setiap arahan dari Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, dapat dijalankan dengan baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Bekerja di bawah kepemimpinan Pak Luhut sebagai sesuatu yang mirip dengan balapan mobil Formula One. “Di Jakarta, kita mungkin biasa melaju dengan kecepatan 60-80 km/jam, tapi di Kemenko Marves, di bawah Pak Menko, kecepatannya bisa mencapai 250 km/jam, kadang 300, bahkan 340 km/jam. Jarang sekali di bawah 250 km/jam,”. Ini adalah metafora yang tepat untuk menggambarkan betapa cepat dan intensnya ritme kerja di kementerian ini.

Semua proyek yang ditangani memiliki kesan tersendiri karena setiap program melibatkan banyak pihak, menyelesaikan berbagai isu penting, dan yang paling utama, berdampak positif bagi masyarakat. Sebagai Deputi, tanggung jawabnya adalah merinci arahan dari Presiden yang diteruskan oleh Pak Menko, agar setiap inisiatif dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu program yang sedang berada di tahap akhir adalah pembangunan Kampung Kujon di Borobudur, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Kemenko Marves adalah menyelesaikan semua tugas yang ada, memastikan bahwa setiap janji presiden telah diimplementasikan dan terealisasi. Harapannya semua pekerjaan yang dilakukan saat ini akan memberikan warisan yang lebih baik bagi kabinet selanjutnya dan memastikan Indonesia terus berkembang.

Pentingnya kolaborasi yang kuat di internal Kemenko Marves serta memperluas kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar kementerian. Dengan demikian, fokus pada penyelesaian masalah akan semakin efektif dan hasil yang dicapai akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas dan bagi masa depan Indonesia.



SEPTIAN HARIO SETO
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Tugas dari Deputi ini yaitu mengoordinasikan berbagai kebijakan-kebijakan di sektor investasi dan pertambangan. Lalu, juga mengatasi bottleneck-bottleneck atau masalah-masalah yang terkait dengan implementasi dan kebijakan yang sudah diambil, ataupun juga penanganan masalah-masalah yang ada di dalam berbagai program pemerintah, terutama yang ada kaitannya dengan investasi dan pertambangan.

Arahan-arahan dari Menko Marves Luhut B. Pandjaitan sepanjang 5 tahun terakhir (2019-2024) berbagai macam projek PSN banyak yang nilainya cukup besar seperti kereta cepat LRT, Jalan Tol Transumatra, dan jalan tol di berbagai wilayah lain adalah termasuk penugasan-penugasan dari Pak Menko yang diberikan kepada kedeputian.

Pengalaman yang paling berkesan pada tahun 2021 ketika itu menangani covid-19 terutama dari varian delta, karena itu adalah pengalaman yang sangat berharga, bagaimana mengatasi pandemi yang terjadi dalam skala global dengan dampak kesehatan yang cukup signifikan bahkan jumlah kematian yang terjadi pun tidak sedikit.

Jadi, itu adalah pengalaman berharga, sehingga waktu itu kita bisa sukses dalam hal penanganan pandemi ini. Kalau untuk program, saya kira yang paling berkesan adalah terkait dengan program hirilisasi, yang memang didorong oleh Pak Menko, bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari biji nikel menjadi sesuatu yang lebih berharga seperti baterai, besi baja, dan berbagai produk-produk turunan lainnya. Sehingga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan.

Untuk program nikel, kira progresnya semakin baik walaupun masih ada kekurangan disana-sini yang harus kita perbaiki. Tetapi, overall ini terus mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

Harapan untuk Menko yang akan datang yakni, Kemenko Marves sudah memainkan peran yang sangat signifikan dalam 5 sampai 10 tahun terakhir terutama pada masa kepemimpinan Pak Menko Luhut. Tentu saja harapannya peran ini kedepannya bisa terus berjalan, melanjutkan dengan baik.



SUGENG SANTOSO
Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim

Salah satu jabatan strategis di Kemenko Marves adalah Staf Ahli Mentri (SAM) yang bertugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis. Salah satunya SAM Dr. Sugeng Santoso yang fokus pada bidang ekonomi maritim, Mulai bertugas sejak 2020 SAM Sugeng ikut andil salah satunya mengenai Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim, penyusunan Indeks Kepemimpinan dan Indeks Kedaulatan Maritim serta dipercaya sebagai Ketua Pelaksana *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam menjalankan tugasnya SAM Sugeng berkoordinasi dengan para Deputi untuk menjalankan program salah satunya adalah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang melahirkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan *Spice Up The World.* "Hal ini dilakukan untuk mengembangakan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia,"ungkap SAM Sugeng. Bentuk legacy yang telah dilakukan untuk Indonesia SAM Sugeng aktif sebagai tim pelaksana Transformasi Tata Kelola tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi dan Manajemen Risiko Pemabangunan Lintas Sektor.

Harapan bagi pemerintah kedepan SAM Sugeng menekankan pentingnya peran koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas dan implementasi antar berbagai pihak dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Hal ini untuk memperkuat sistem ekonomi nasional serta diperlukan keberlanjutan perencanaan strategis nasional dan ekonomi maritim yang berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan *Blue Economy.*



OKTO IRIANTO
Staf Ahli Menko Bidang Hukum Laut

Menjadi Staf Ahli Mentri (SAM) bidang Hukum Laut Okto Irianto, S.I.P, MA diberi tugas penting oleh Menko Marves Bapak Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memastikan Indonesia keluar dari daftar *blacklist* Tokyo MoU. Menurut SAM Okto, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan tujuan mengurangi operasional kapal di bawah standard internasional melalui kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. Melalui kerja sama dari sejumlah pihak akhirnya Indonesia dapat keluar dari daftar *blacklist* dan menjadi *whitelist* pada tahun 2020 sesuai harapan besar bangsa Indonesia.

Selama berada dibawah kepemimpinan Menko Luhut yang tidak akan terlupakan oleh SAM Okto saat pandemi Covid-19. Menurutnya Kemenko Marves merupakan salah satu pelopor yang mampu memperoleh vaksin sebelum akhirnya disebarluaskan ke banyak instansi lainnya dan juga masyarakat Indonesia. Selain itu SAM Okto juga memberikan apresiasi terhadap peran Menko Luhut dalam hal pemulihan ekonomi nasional saat kegiatan G20 yang merupakan legasi terbesar sebagai Menko Marves.



JONA WIDHAGDO PUTRI
Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Teknologi

"Jangan membuat diri sendiri hebat, tapi buatlah tim yang hebat," sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Jona Widhagdo Putri selaku Staf Khusus Menteri di Bidang Infrastruktur dan Teknologi yang menggambarkan prinsip kerja dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Selaku Staf Khusus Jona memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang di antaranya berkaitan dengan pembentukan *High-Level Dialogue* antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu Jona juga dipercaya sebagai penerjemah atau ahli bahasa baik dengan pihak pemerintah, swasta maupun investor dari dalam dan luar negeri.

Kinerja paling berkesan saat mendampingi dan menjalankan tugas di kala pandemi *Covid-19* bersama Menko Marves dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Namun dengan tekad yang luar biasa Jona menjadi salah satu saksi Kemenko Marves dapat menjamin ketersediaan alat Perlindungan Diri (APD), obat-obatan & vaksin dengan cepat untuk masyarakat Indonesia melalui hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Menurut Jona infrastruktur dan teknologi juga memberikan dampak secara langsung terhadap empat sektor yakni ketahanan dan kemandirian di bidang pendidikan dan riset, ketahanan pangan (maritim), kesehatan yang mengarah pada bioteknologi, serta dunia digital yang kini diimplementasikan ke dalam program *Government Technology (Govtech).*

Menurut Jona Menko Marves Bapak Luhut B. Pandjaitan merupakan sosok pemimpin yang sangat teliti, detil, dan senantiasa memberi contoh untuk bekerja dengan hati terutama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini Jona mempunyai kesamaan visi apalagi sebagai ibu dari dua anak yang ingin buah hatinya mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu sebagai ibu dan istri Jona membuktikan bekerja bukanlah halangan yang mampu memberikan dampak positif bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, namun juga masyarakat Indonesia.



MARSETIO
Penasihat Khusus Menko Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim

"One team one speed" merupakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Penasihat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M yang akrab dipanggil Prof Marsetio. Dalam tugas pokok dan fungsi menjaga pertahanan dan keamanan maritim Prof Marsetio harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti TNI AL dan Bea Cukai serta turut andil dalam pengembangan program kerja setiap kedeputian seperti program penataan investasi maritim, perbatasan maritim, sumber daya maritim, konektivitas, karbonasi mangrove, dan percepatan industri pariwisata.

Pengalaman Prof Marsetio berkarir di Angkatan Laut (AL) sampai menjadi Kepala Staf AL (Kasal) 17 Desember 2012-31 Desember 2014 diterapkan dibawah kepemimpinan Menko Marves Bapak Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, "Keberhasilan Kemenko Marves merupakan keberhasilan bersama antar semua pihak. Kemenko Marves harus dipimpin oleh sosok seperti Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang mampu menjadi pemimpin tangguh dan perencana yang baik. Menko Luhut dapat mengakselerasi keinginan Presiden serta menggerakkan generasi muda untuk aktif dalam pembentukan Indonesia sebagai negara maritim. Di bawah masa kepemimpinan Menko Luhut juga telah terwujud Kebijakan Kelautan Indonesia & integrasi pelabuhan-pelabuhan menjadi satu yang memberikan dampak besar kepada perkembangan Indonesia sebagai negara maritim," ujar Prof Marsetio.

Menuju pergantian periode pemerintahan, Prof Marsetio berharap adanya kesinambungan antara visi-misi periode saat ini dengan periode Presiden terpilih. Salah satu harapan besar yang disampaikan adalah keberlanjutan visi-misi kemaritiman yang telah dibangun selama ini agar dapat tercapai tujuan besar negara sebagai Indonesia Emas tahun 2045.



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

Penasihat Khusus Menko Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri

Salah satu yang sedang dikembangkan dibawah koordinasi Menko Marves Jend (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan adalah kendaraan berbasis Listrik. Maka untuk menangani program ini ditunjuk Penasehat Kementrian Marves (PKM) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro yang membidangi Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Indonesia. Salah satu Guru Besar Institut Teknologi Bandung ini memiliki dua tugas pokok yakni pengembangan dan percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Juga diberikan fungsi utama menangani Hilirisasi Industri Mineral. Dalam pelaksanaannya PKM Prof. Satryo melakukan edukasi kepada publik terkait pentingnya penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai yang memili 3 misi di antaranya menciptakan lingkungan bersih bebas dari emisi karbon, mengurangi stok impor bahan bakar minyak (BBM), serta meningkatkan kemampuan industri KBLBB di Indonesia baik roda empat atau roda dua.

Selain itu PKM Prof Satryo berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves di daerah Morowali terkait penggunaan nikel sebagai bahan baku utama baterai untuk kendaraan bermotor listrik . Karena hilirisasi nikel erat kaitannya dengan negara Tiongkok yang telah memberikan investasi untuk Indonesia maka PKM Prof. Satrio mempelajari kemajuan teknologi juga mengirim para pelajar terbaik dari Indonesia untuk menempuh studi di Tiongkok selama 2 tahun yang dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program ini dimaksudkan agar perkembangan industri di Indonesia selaras dengan perkembangan sumber daya manusia.

Fungsi lainnya sebagai PKM Prof. Satryo juga memiliki peran sebagai fasilitator regulasi di antara Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan industri seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu inovasi besar yang dilakukan oleh Prof. Satryo adalah pengembangan ekonomi sirkular yang jika sistem ini diterapkan dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan maju dalam hal perindustrian, khususnya industri berbasis listrik dan mineral.



YOHANES SURYA

Penasihat Khusus Menko Bidang Informasi dan Teknologi

Salah satu koordinasi dibawah Kemenko Marves yaitu bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuat investasi tumbuh di daerah tertinggal. Menko Marves jend (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyadari agar kedepan masyarakat sekitar terutama anak-anak lebih berkualitas maka harus disiapkan pendidikan yang lebih baik. Salah satu yang mendapatkan tugas tersebut Penasihat Khusus Menteri (PKM) dalam bidang Informasi dan Teknologi Prof. Yohanes Surya, Ph.D yang tugas utamanya memberikan pendidikan di daerah tertinggal. Menurut Prof.Surya semakin terdidik suatu daerah maka para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dampak positif lainnya supaya masyarakat dapat merasa memiliki kekayaan alam di daerahnya sendiri.

Salah satu daerah yang dikawal PKM Prof Surya di Morowali melalui berbagai macam pelatihan telah dilakukan, seperti pelatihan matematika untuk anak-anak dan guru-guru. Juga daerah lainnya yaitu pelatihan untuk pekerja di Papua, Halmahera Tengah dengan kawasan Weda Bay. Sejalan dengan pelatihan tersebut Kemenko Marves mengadakan kerja sama dengan Pertamina di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Tengah, Gianyar dan Badung di Provinsi Bali, dan Bojonegoro agar banyak yang terdidik terutama di masa depan bidang perminyakan dipegang oleh orang lokal.

“Seluruh anak di Indonesia pandai berhitung serta seluruh daerah bisa maju, berkembang dan menjadi hebat,” ujar Menko Marves Bapak Luhut kepada PKM Prof Surya. Ahli matematika dengan modul Gasing ini menambahkan bahwa Menko Luhut mencetuskan ide tersebut sejak 4 tahun lalu. Kesimpulan diskusi dan analisis oleh PKM Prof Surya maka memilih 30 – 50 orang dari daerah khususnya yang di dalamnya terdapat Taman Sains seperti dari Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali kemudian dilatih dan dikirim melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke *top university* di luar negeri. Untuk menyeleksi maka dibentuk Program Beasiswa Indonesia Maju Afirmasi yang merupakan program beasiswa unggulan yang dikelola oleh Kemenko Marves.

Saat ini PKM Prof. Yohanes tengah aktif mengembangkan riset pendeteksi gempa yang akan dibuat sebagai produk yang dipakai di seluruh dunia. Karena itu Prof. Yohanes berharap bahwa kedepannya Kemenko Marves akan terus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan yang layak di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal.



EZKI TRI REZEKI WIDIANTI
(Ezki Suyanto)
Penasihat Khusus Menko Bidang Komunikasi

Selama dua periode era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Penasehat Khusus Mentri (PKM) Ezki mendapatkan tugas mendampingi Menko Marves Jend (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dalam bidang komunikasi sesuai dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya dan jenjang akademi. Menurut PKM Ezki yang mulai ikut Menko Luhut sejak di Kemenko Polhukam pada 2015, sebagai pejabat publik kinerja Menko dan kementrian harus diinfokan kepada publik melalui media arus utama dan media sosial. Saat masih di Kemenko Polhukam bersama dengan tim humas merancang strategi komunikasi termasuk membuat akun media sosial Menko secara pribadi juga akun kementrian, whatsapp grup wartawan serta merancang jumpa pers juga isi rilis. Hal yang sama dilakukan PKM Ezki ketika Menko Luhut dipindah ke Kemenko Kemarintiman era 2016-2019 kemudian menjadi Kemenko Marves pada periode 2019-2024.

Tugas bidang komunikasi bukan hanya memberikan informasi tapi juga bagaimana memberikan edukasi kepada publik bahwa pemerintah melakukan berbagai program terkait kehidupan orang banyak. Tantangan selama dua periode ini kerap terjadi miskomunikasi dan salah paham dengan publik terutama di media sosial sehingga harus diklarifikasi. Selain sistem sudah terbentuk juga Menko Luhut paham pentingnya informasi maka berita simpang siur bisa tertangani dengan hasil positif.

Keberhasilan dalam bidang komunikasi dibawah kepemimpinan Menko Luhut dapat dinilai dari keberhasilan ketika menjadi koordinator penanganan Covid 19 dimana setiap hari berkoordinasi dengan berbagai pihak kemudian dibuatkan rilis disertai jumpa pers bahkan wawancara ekslusif dengan stasiun tv juga melakukan zoom briefing dengan para pemimpin redaksi (pemred). Strategi ini berdampak positif masyarakat selalu mendapatkan info valid dari pemerintah.

Dalam perhelatan internasional, Kemenko Marves kerap ditunjuk sebagai koordinator yang tugasnya mengatur kerja sama dengan berbagai kementrian termasuk memberikan informasi serta melayani media dan wartawan bukan hanya skala nasional namun juga internasional secara professional. Saat menjadi ketua G20 Menko Luhut khusus untuk bidang komunikasi menginstruksikan untuk menjalin kerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepala Staf Presiden (KSP), Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk *media center* dan *news room.*

Keberhasilan penyelenggaraan G20 termasuk dalam bidang komunikasi menjadi bench mark untuk acara internasional selanjutnya seperti *Archipelago Island State* (Ais) Forum 2023, *Internasional Sustainability Forum* (ISF) pada 2023 dan 2024 dan World Water Forum (WWF) 2024. Harapan PKM Ezki agar pola kerja sama antar KL dalam bidang komunikasi dapat dilanjutkan seperti arahan Menko Luhut terutama bila Kemenko Marves menjadi pimpinan sebuah perhelatan internasional.



TIM PENYUSUN

Tim Penyusun

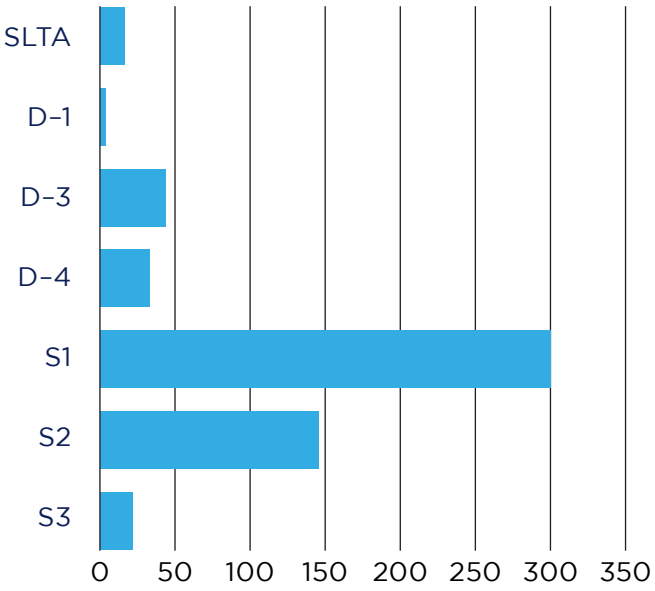
PENGARAH	Ayodhia G.L. Kalake Ezki Tri Rezeki Widianti
KETUA 1	Arif Rahman
KETUA 2	Andreas Dipi Patria
SEKRETARIS	Yetri Fermila
KONTRIBUTOR SUBTANSI	Jodi Mahardi Mochammad Firman Hidayat M. Rachmat Kaimuddin Nani Hendiarti Odo R.M. Manuhutu Septian Hario Seto M. Jalu Wredo Aribowo Rahayu Antonius Lambok Sihombing Rifky Setiawan Dirhansyah Conbul Rustam Efendi Romi Firman Andi Hariawan Aniza Suspita
TIM KONTRIBUTOR	Andi Hariawan Aniza Suspita Luky Bambang La Ode Nurman Mbay Fauzi Akbar Joko Rehutomo Achmad Murman Yoke Faizal Azhari Oktofan J.A. Maulidan Jeunike Suciayu Matkussa M. Reza Razak Rollyanus Susanto Hendra Kusuma Wardana Andri Widodo Ahmad Vidura Elfi Syafitri Jason Fredrick Siregar Ferdian Bhaskoro Diky Mahardika Ali Sibro Malisi Nogie Wikarsa Nugraha Moeis Rendra Budi Hutama Narulita Altari Intan Meilistya Rizki Ramadhanis Raka Panji Wibowo Muhammad Kautsar Farah Almira Syahira Faisal Azhar Akbar Sagala Daniel Rafidianta Rieldy Johanis Leiwakabessy Ulfah Pratiwi
TIM PELAKSANA	Indra Nugraha Happy Budi Baswara Dewi Maharani Allifah Rindu Febriani Anisa Nurhadaya P Deby Purnama Sari
TIM PENYUSUN	Indra Nugraha Andi Juwandi Anisa Nurhadaya P
KURATOR	Ezki Tri Rezeki Widianti Joko Rehutomo
TIM EDITOR, DESIGN & LAYOUT	Anjang Bangun Prasetio Indra Nugraha Bella Rahmah Herlita Dian Purba Septiawan
DOKUMENTASI	Yanelis Prasenja Sri Wida Purbowasi Meidika Sri Wardiana Asti Prasetyawati Nelly Hassani Rachmi
SUMBER FOTO DAN DATA	Humas Kemenko Marves Sekretariat Presiden Sekretariat G20 Sekretariat AIS Forum Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Investasi/BKPM Badan Pusat Statistik Kementerian Komunikasi dan Informasi PT KCIC PT KAI LKBN Antara
HAK CIPTA	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
JENIS & UKURAN KERTAS	Cover : Hardcover A4 Poly Embos Isi Materi : artpaper 150 gr
Nomor ISBN	.....
DITERBITKAN OLEH	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



LAMPIRAN

DUKUNGAN
SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Pegawai Berdasarkan TIngkat Pendidikan



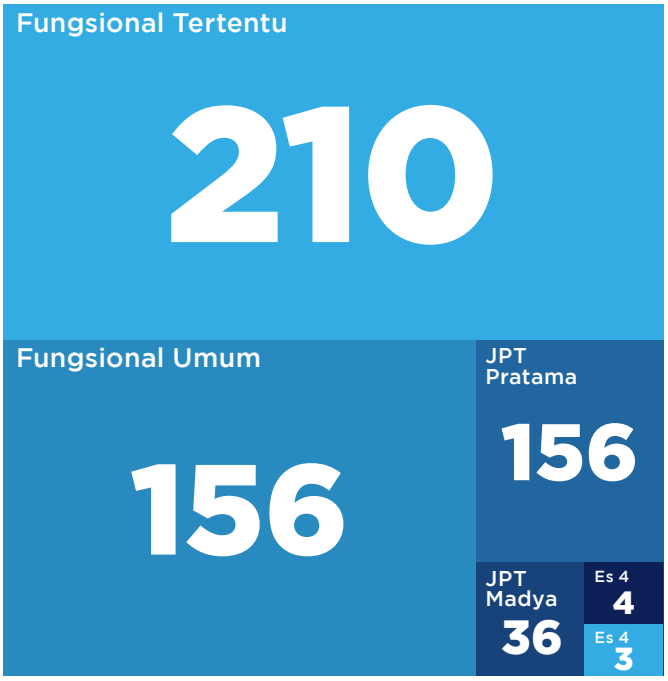
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Perempuan 35,3%

Laki-laki 64,7%

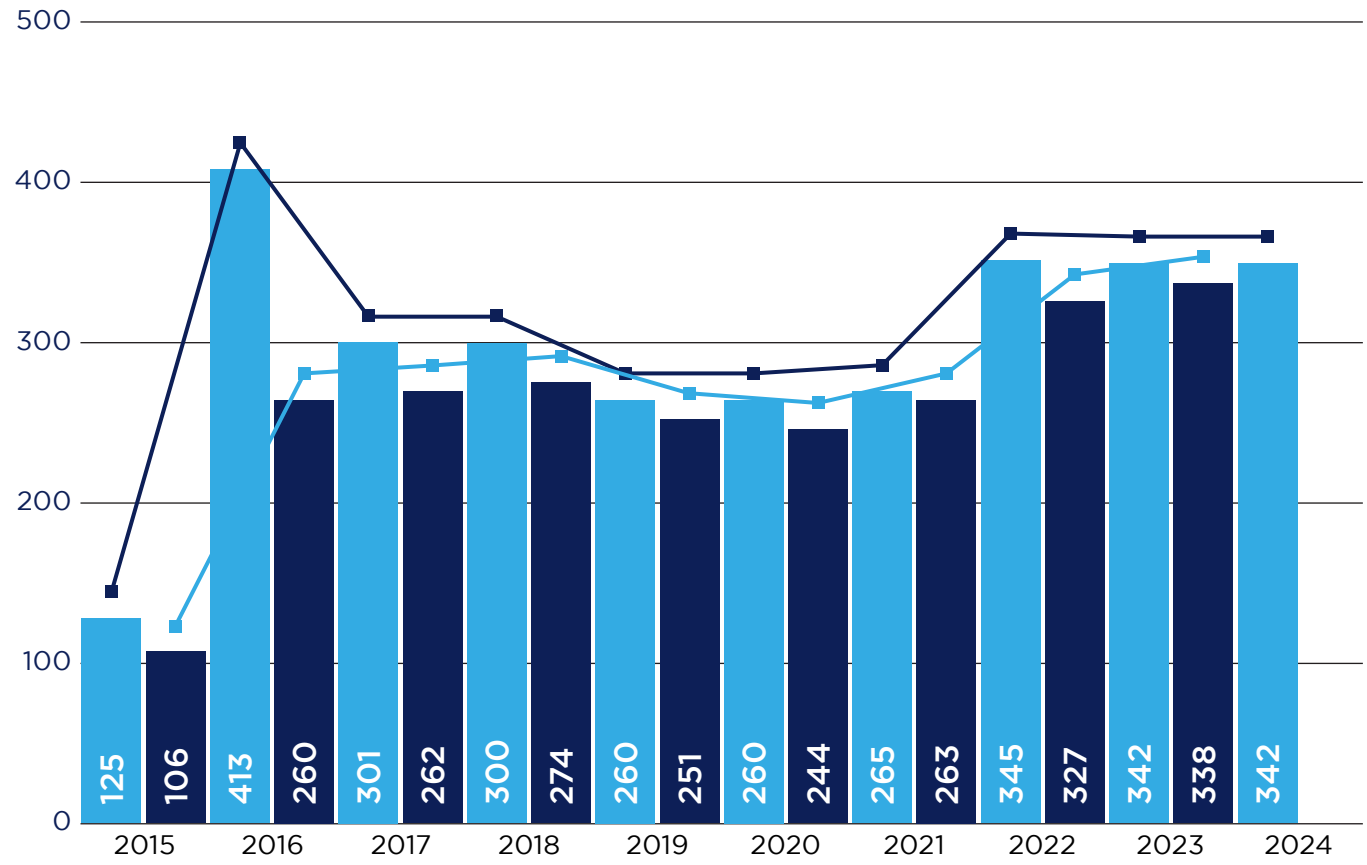
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	PNS	Non PNS
Perempuan	258	192	66
Laki-laki	473	279	194
Total	**730**	**471**	**259**

PAGU ANGGARAN

KEMENKO MARVES 2015-2024

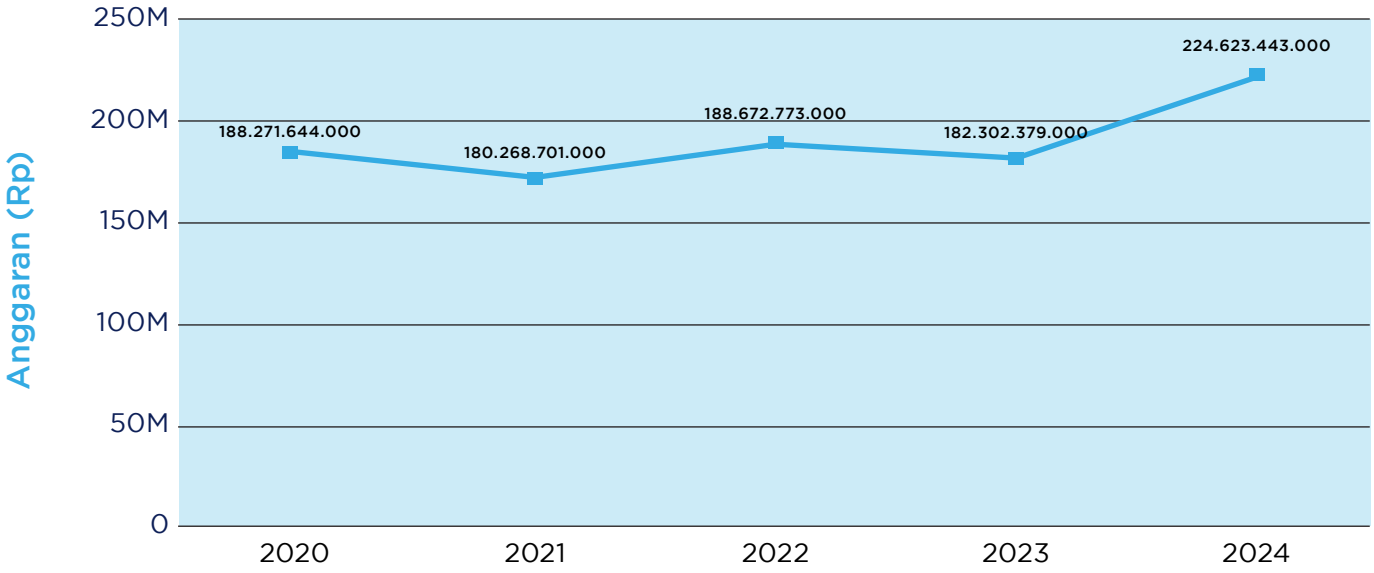


Sumber: Aplikasi SMART, 2024

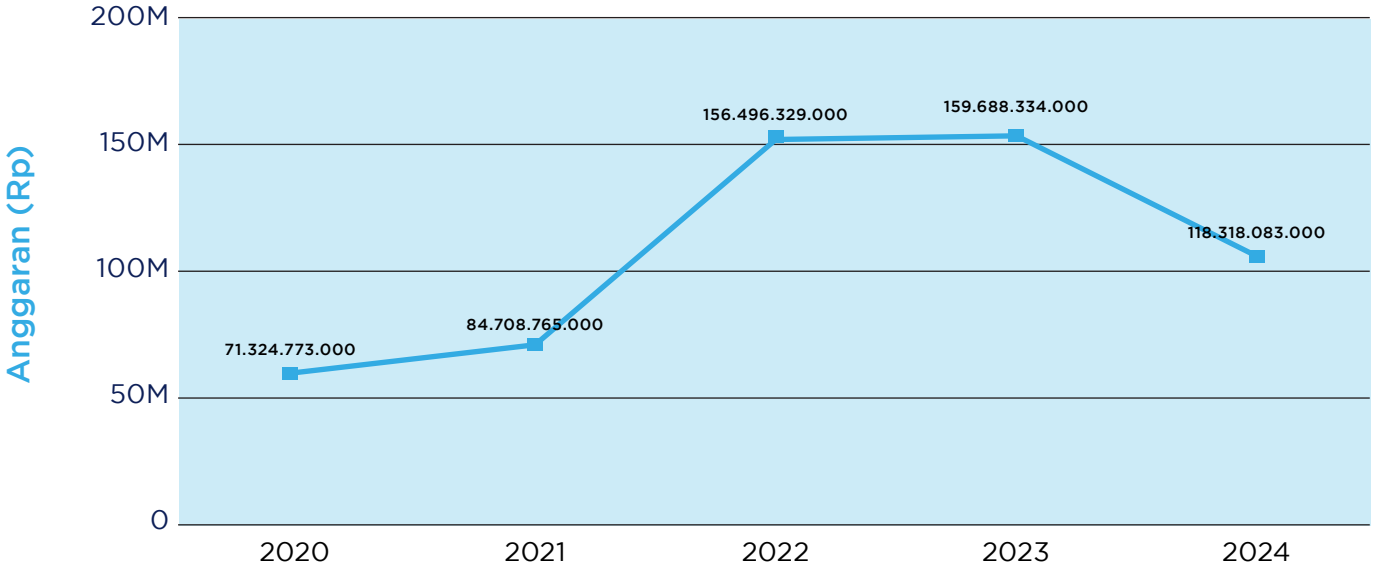
PROGRAM DAN KEGIATAN

2 Program dan 6 Kegiatan

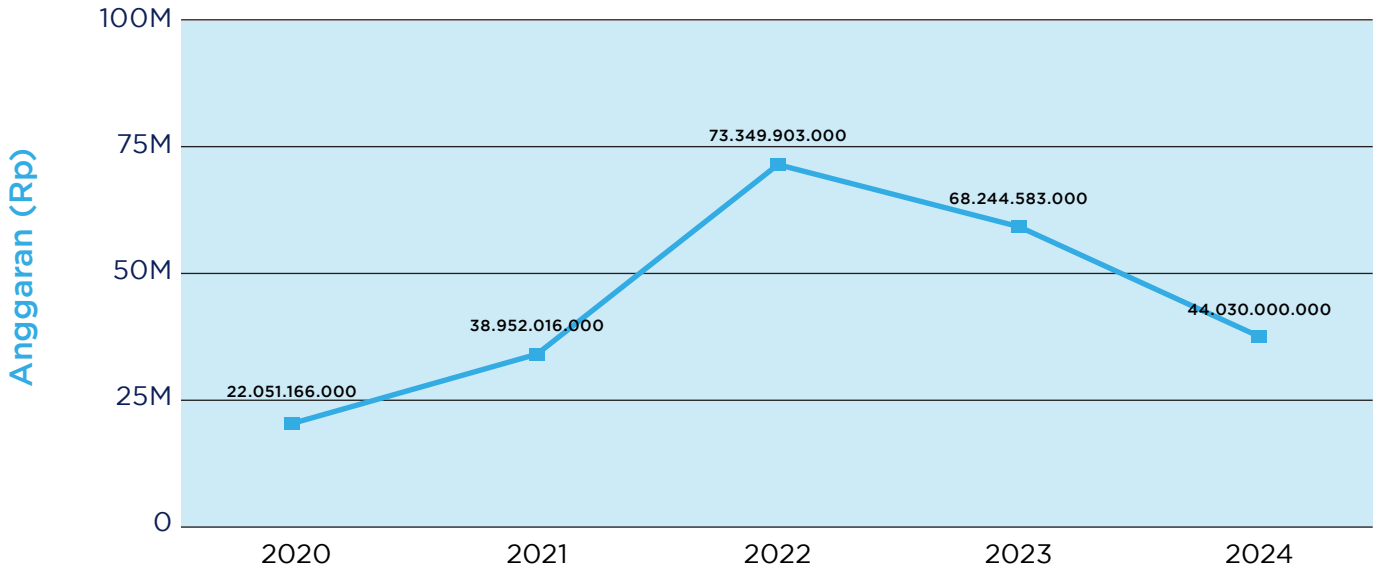
Program Dukungan Manajemen



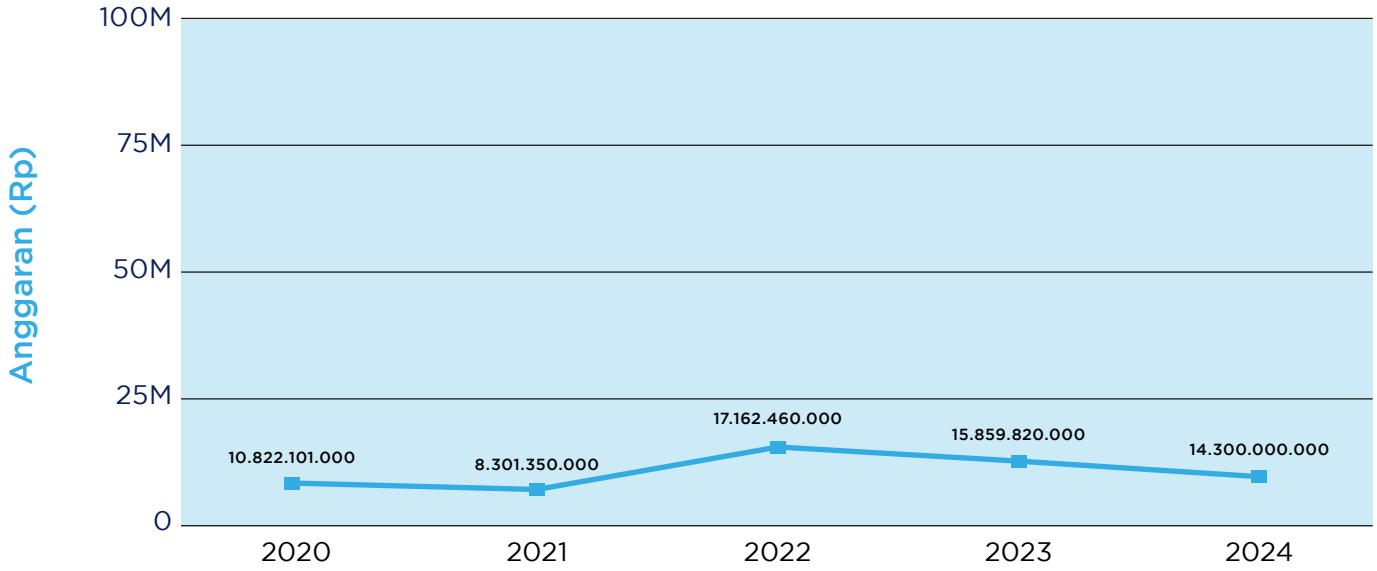
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan



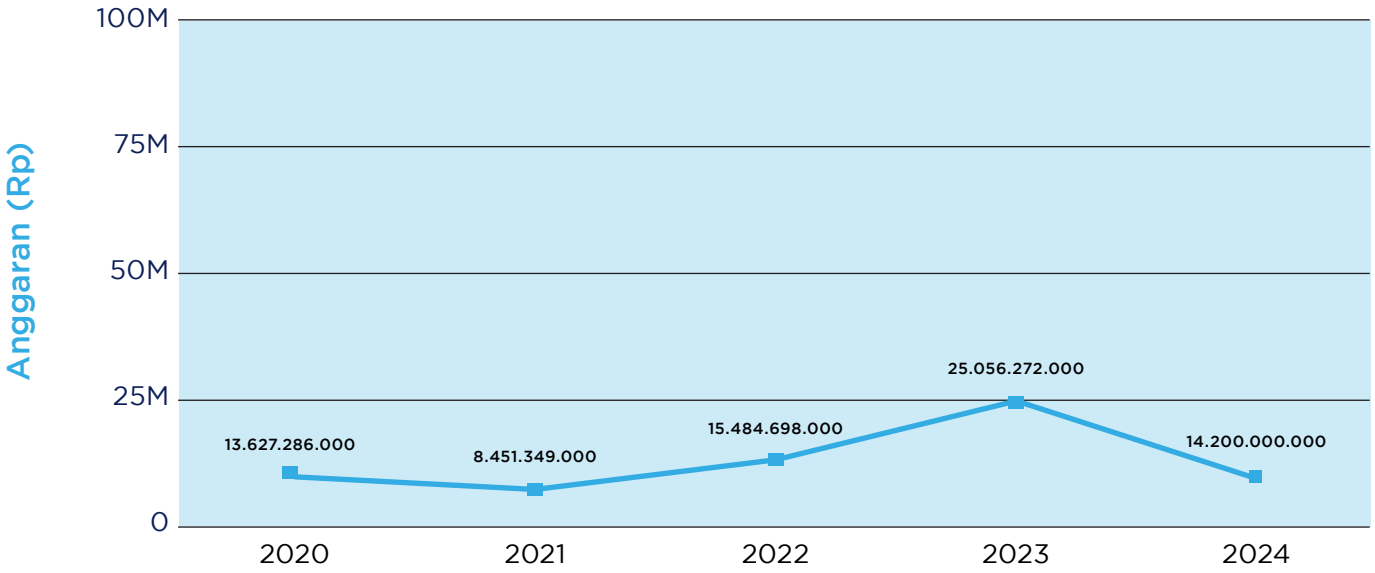
Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



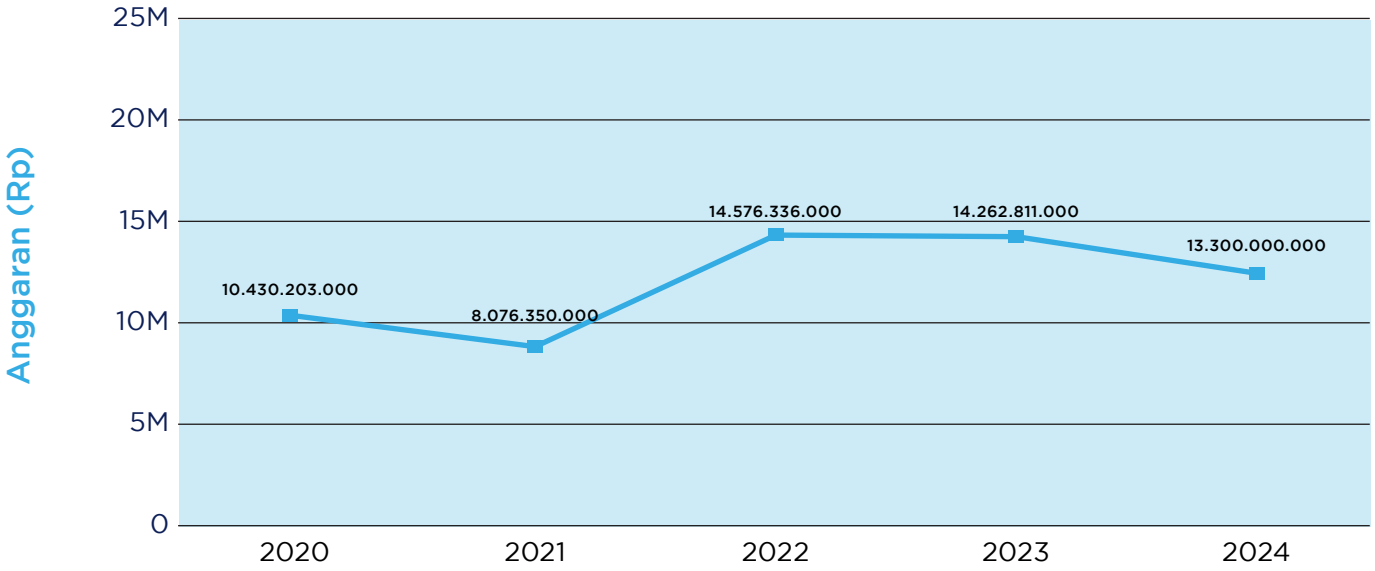
Koordinasi Sumber Daya Martim



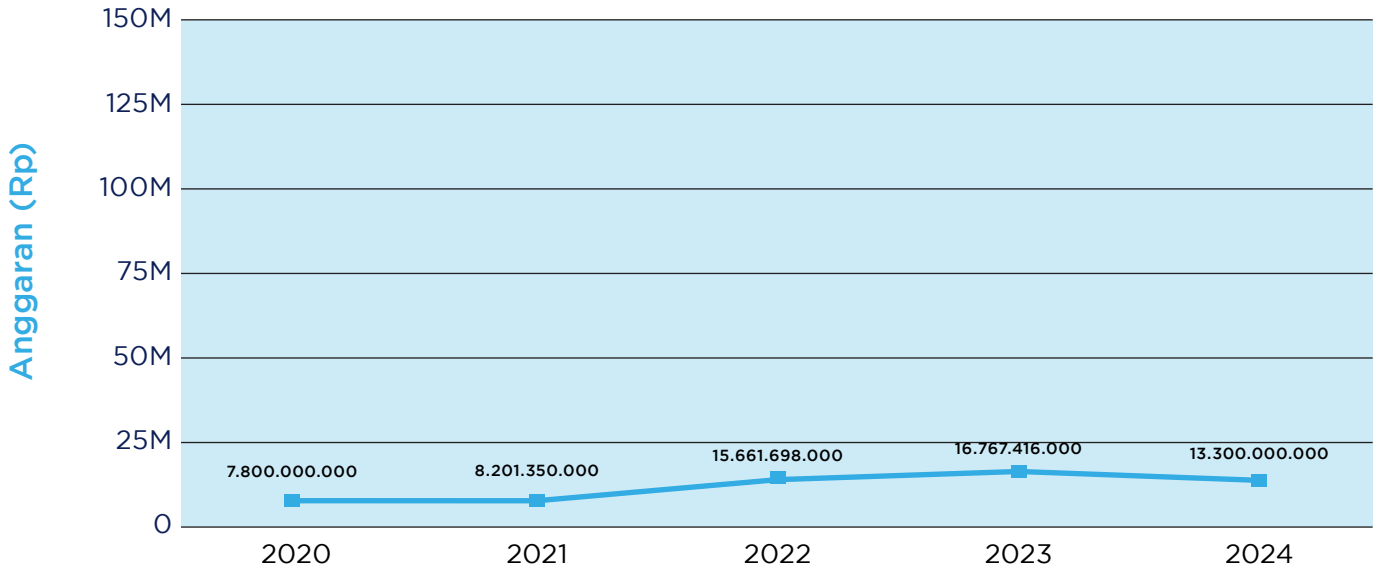
Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



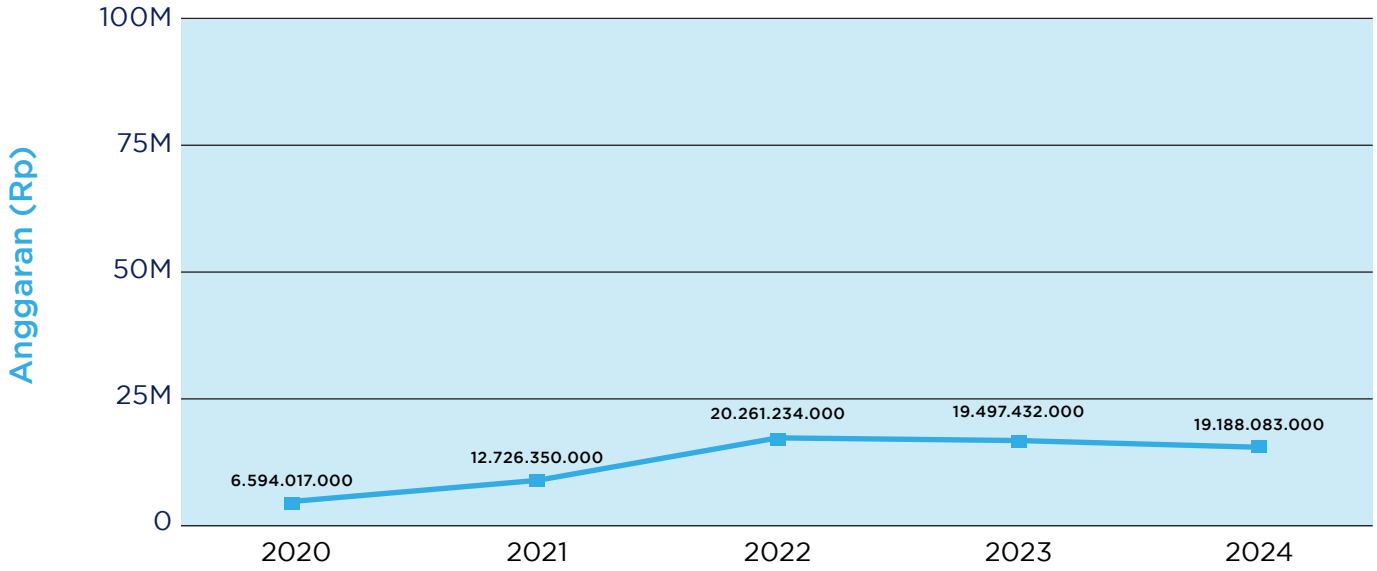
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan



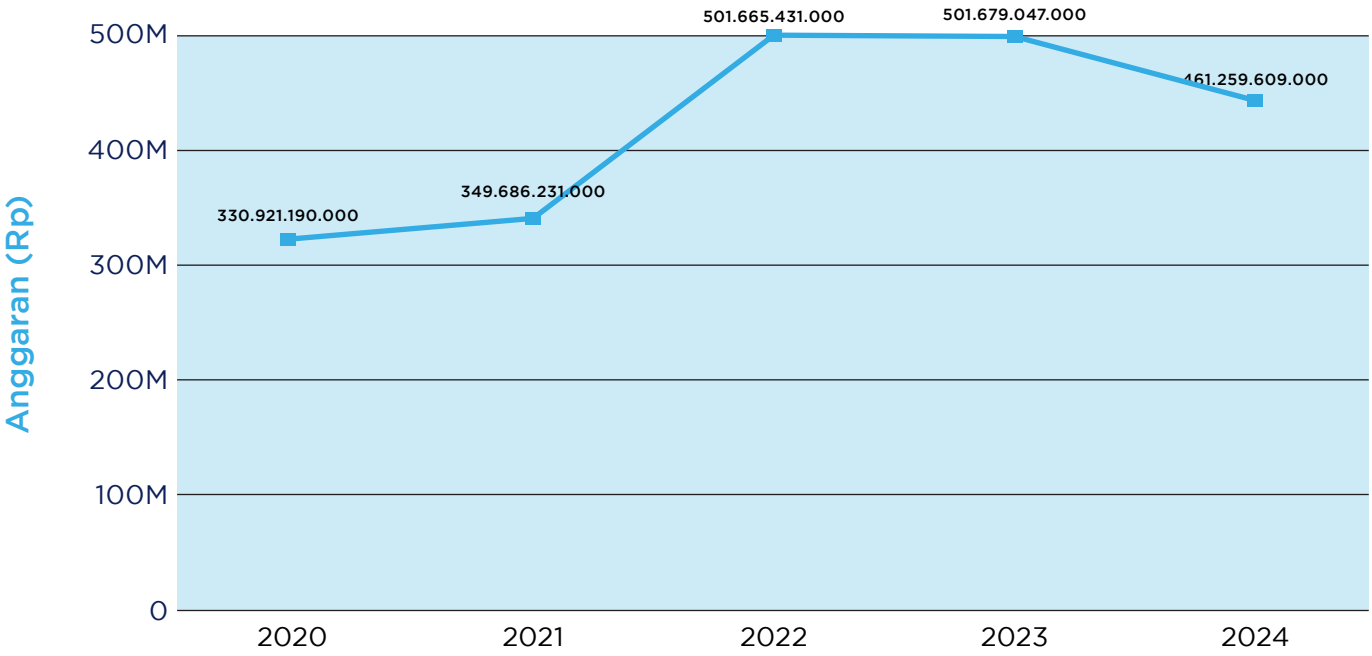
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Koordinasi Investasi dan Pertambangan



Total



Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	188.271.644.000	180.268.701.000	188.672.773.000	182.302.379.000	224.623.443.000
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	71.324.773.000	84.708.765.000	156.496.329.000	159.688.334.000	118.318.083.000
Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	22.051.166.000	38.952.016.000	73.349.903.000	68.244.583.000	44.030.000.000
Koordinasi Sumber Daya Martim	10.822.101.000	8.301.350.000	17.162.460.000	15.859.820.000	14.300.000.000
Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	13.627.286.000	8.451.349.000	15.484.698.000	25.056.272.000	14.200.000.000
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10.430.203.000	8.076.350.000	14.576.336.000	14.262.811.000	13.300.000.000
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.800.000.000	8.201.350.000	15.661.698.000	16.767.416.000	13.300.000.000
Koordinasi Investasi dan Pertambangan	6.594.017.000	12.726.350.000	20.261.234.000	19.497.432.000	19.188.083.000
Total	330.921.190.000	349.686.231.000	501.665.431.000	501.679.047.000	461.259.609.000